

LAPORAN KOMISI
PENCARI FAKTA (KPF)

OPERASI PEMBUNGKAMAN KAUM MUDA TERBESAR SEJAK REFORMASI

FAKTA DI BALIK
DEMONSTRASI
AGUSTUS 2025 DAN
ESKALASI KERUSUHAN,
PENJARAHAN, DAN
PERBURUAN AKTIVIS

Ringkasan Eksekutif

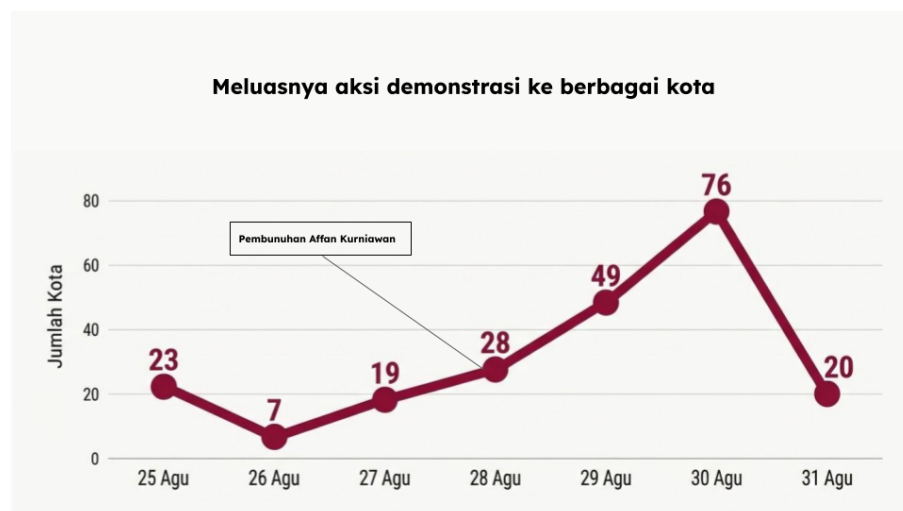
Affan, Septianus, Dandi, Sumari, Abay, Sarina, Saiful, Rheza, Iko, Andika, Farhan, Reno, dan Alfarsi bukan hanya deretan nama korban untuk dilupakan karena hidup harus berlanjut. Mereka adalah penanda harga mahal yang harus ditanggung karena kegagalan negara menjaga kontrak sosialnya dengan rakyat. Tidak ada pembenaran yang dapat menjustifikasi gugurnya 13 orang dalam rangkaian peristiwa demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Satu korban saja terlalu banyak—apalagi tiga belas.

Hampir lima bulan sejak demonstrasi Agustus 2025 berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan, respons negara menyisakan pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas. Ketika pemerintah diam, maka masyarakat sipil menggugat. Komisi Pencari Fakta (KPF) yang diberi mandat oleh masyarakat sipil melakukan penelusuran independen terhadap 115 berkas pemeriksaan kepolisian, ribuan data sumber terbuka, 63 informan, serta jejak peristiwa di 8 provinsi, 18 kota, dan 3 lokasi di luar negeri sejak September 2025 hingga Februari 2026.

Laporan ini menjawab empat mandat utama: mencari penyebab demonstrasi dan eskalasi kekerasan, memetakan aksi dan respons para pihak, mengidentifikasi pola serta faktor pemicu dan akselerator, serta menelaah akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.

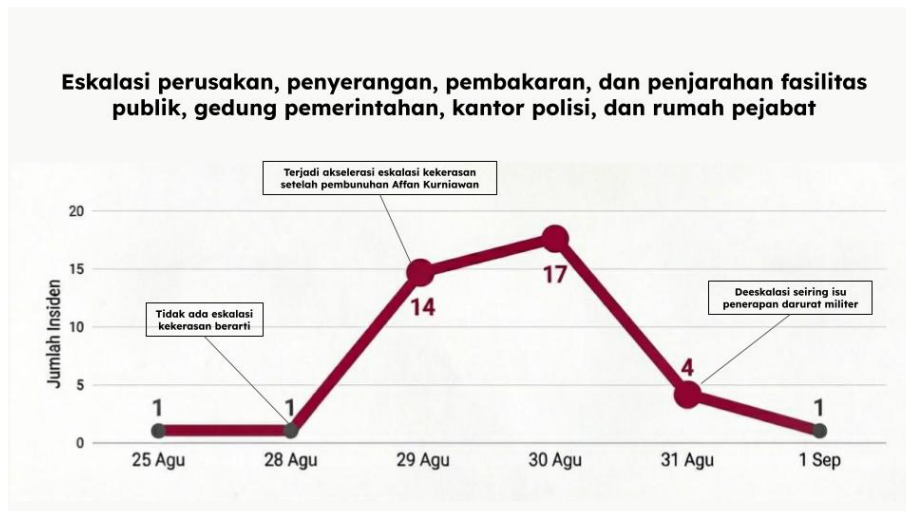
Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar sejak Reformasi

Temuan KPF menunjukkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 tidak lahir dari satu isu tunggal. Wacana kenaikan tunjangan anggota DPR berfungsi sebagai pemicu, tetapi bukan sebab utama. Akar persoalan terletak pada akumulasi ketidakpuasan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dan persepsi meluas tentang ketidakpekaan elite politik terhadap tekanan hidup—terutama di antara kaum muda. Dalam konteks tersebut, mobilisasi demonstrasi merupakan ekspresi politik yang dinilai KPF sebagai pilihan rasional.



Demonstrasi gelombang pertama (25–27 Agustus) dan kedua (28 Agustus) berlangsung relatif damai sebelum eskalasi tajam pada gelombang ketiga (29–31 Agustus) yang diakselerasi oleh pembunuhan Affan Kurniawan oleh aparat kepolisian. Peristiwa kunci ini mengubah dinamika massa secara signifikan dan meluas.

KPF mendokumentasikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penangkapan massal, serta dugaan penyiksaan dan pengakuan paksa. Data yang dihimpun juga menunjukkan ribuan kaum muda berusia anak turut ditahan—banyak tanpa tuduhan yang jelas pembuktian hukumnya. Praktik-praktik ini menunjukkan penyimpangan dari prinsip proporsionalitas dan jaminan prosedural yang menjadi fondasi negara hukum.



Setelah demonstrasi, KPF menemukan pola penegakan hukum yang tajam ke bawah. Aparat bergerak cepat menetapkan aktivis, pelajar, dan warga sipil sebagai tersangka. Banyak di antara mereka dibingkai sebagai ‘dalang’ dan ‘provokator’ hanya berbasis ekspresi di media sosial serta keterlibatan dalam jejaring percakapan digital.

Dalam banyak kasus, tidak ada relasi kausalitas yang jelas antara tindakan yang disangkakan dengan pidana yang dituduhkan. Sebaliknya, penelusuran terhadap pola penjarahan yang terkoordinasi dan pergerakan massa antar-lokasi tidak menunjukkan kemajuan penyidikan yang setara.

Laporan ini tidak menyimpulkan adanya satu aktor tunggal yang secara formal memerintahkan rangkaian kerusuhan. Namun, pola eskalasi yang terstruktur, pergerakan massa yang berurutan, serta kegagalan pencegahan pada momen-momen krusial mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam pengawasan, koordinasi, dan tanggung jawab komando. Setidaknya, KPF menilai telah terjadi pembiaran dan kelalaian oleh aparat keamanan yang berkontribusi pada meluasnya kekerasan dan jatuhnya korban warga sipil.

KPF menemukan narasi ‘dalang’ dan ‘provokator’ yang dibangun aparat dan penyelenggara negara sebagai penjelasan utama atas eskalasi. Alih-alih menguji secara terbuka berbagai kemungkinan penyebab, aparat penegak hukum bertindak berdasarkan kesimpulan yang sudah ditetapkan sebelumnya (*pre-determined conclusion*). Pendekatan ini menyebabkan terjadinya kriminalisasi (*malicious prosecution*).

Hari ini, 703 warga sipil di berbagai daerah masih menghadapi ancaman proses hukum karena menggunakan hak konstitusionalnya. Menghukum akibat tanpa mengakui dan memperbaiki sebab yang melatarbelakanginya hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Laporan ini memastikan bahwa tanggung jawab tidak dibebankan pada mereka yang paling mudah dituduh, melainkan yang memiliki pengaruh. KPF tidak membenarkan kekerasan, namun ruang sipil tidak menyempit dalam satu hari dan demokrasi tidak rapuh hanya karena sebuah unggahan di media sosial. Selama kekerasan dinormalisasi, kritik dipidana, hukum digunakan menindas yang lemah, dan *kaum muda dibungkam*, maka akumulasi ketidakpuasan yang sama akan meledak layaknya bom waktu ketika pemicu dan katalis berikutnya hadir untuk memobilisasi warga.

Tiga belas nyawa yang hilang menuntut lebih dari sekadar simpati. Mereka menuntut kejelasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan struktural agar tragedi serupa tidak terulang.

Jakarta, 18 Februari 2026

PENANGGUNG JAWAB

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

KOMISI PENCARI FAKTA

Andrie Yunus

Arif Maulana

Aqwam Fiazmi Hanifan

Fadilah Rahmatan Al Kafi

Khaerul Anwar

M. Islah Satrio

M. Yahya Ihyaroza

Nurkholis Hidayat

Ravio Patra

Rizaldi Ageng Wicaksono

Vebrina Monicha

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| INDEKS TABEL | 8 |
| INDEKS GAMBAR | 9 |
| LATAR BELAKANG DAN MANDAT | 11 |
| METODOLOGI DAN BEBAN PEMBUKTIAN | 12 |
| I. KONTEKS: AKUMULASI KEMARAHAN PUBLIK | 14 |
| I.A. Ketegangan elite dan perebutan kekuasaan politik | 14 |
| I.B. Ketegangan di sektor ekonomi dan ekstraktif | 15 |
| I.C. Ketegangan rakyat dan elite dalam pusaran multifungsi TNI | 16 |
| I.D. “Revolusi dimulai dari Pati” | 18 |
| I.E. Kampanye Jolly Roger One Piece dan Kolektif NIKA | 19 |
| I.F. Sekuritisasi kampanye Jolly Roger One Piece | 22 |
| II. DEMONSTRASI DAMAI DALAM DUA GELOMBANG | 24 |
| II.A. Perencanaan aksi demonstrasi damai 25 Agustus 2025 | 24 |
| II.B. Gelombang pertama: 25–27 Agustus | 26 |
| II.C. Gelombang kedua: 28 Agustus | 28 |
| III. GELOMBANG KETIGA: TSUNAMI KEMARAHAN | 31 |
| III.A. Eskalasi kekerasan setelah pembunuhan Affan Kurniawan | 31 |
| III.B. Pengepungan Mako Brimob Kwitang | 32 |
| III.C. Bentrokan di Gedung DPR | 35 |
| III.D. Penyerangan kantor pemerintahan dan kepolisian | 36 |
| III.D. Pembakaran dan penjarahan | 37 |
| III.E. Pola kerusuhan di berbagai daerah | 39 |
| IV. KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGANAN AKSI | 46 |
| IV.A. Pengerahan TNI dalam penanganan aksi | 46 |
| IV.B. Dinamika TNI, Polri, dan massa aksi | 48 |
| IV.C. Patroli TNI di kawasan publik | 51 |
| V. ESKALASI DI RUANG DIGITAL | 54 |
| V.A. Teror digital terhadap kolektif NIKA | 54 |
| V.B. Narasi Riza Chalid sebagai dalang demonstrasi | 56 |
| V.C. Narasi PDI-P sebagai dalang demonstrasi | 57 |

| | |
|---|-----|
| V.D. Narasi Geng Solo sebagai dalang demonstrasi | 58 |
| V.E. Narasi asing sebagai dalang demonstrasi | 59 |
| V.F. Narasi kampanye 17+8 sebagai deeskalasi terselubung | 60 |
| | |
| VI. PELANGGARAN HUKUM DAN HAM DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI | 64 |
| VI.A. Provokasi dan penggunaan kekuatan berlebihan | 64 |
| VI.B. Penangkapan demonstran dan pelajar oleh aparat | 66 |
| VI.C. Penempatan rantis di kerumunan massa | 68 |
| VI.C. Kekerasan terhadap jurnalis dan pers | 70 |
| VI.D. Intimidasi, teror, dan pembatasan ruang digital | 71 |
| VI.E. Korban luka dan meninggal dunia | 72 |
| VI.F. Kriminalisasi demonstran dan aktivis | 74 |
| | |
| VII. PERBURUAN AKTIVIS TERBESAR SEJAK REFORMASI | 75 |
| VII.A. Pemidanaan tanpa mens rea | 75 |
| VII.B. Semakin ditekan, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim semakin melawan | 77 |
| VII.C. Gejayan memanggil Syahdan Husein | 79 |
| VII.D. Khariq Anhar yang Menggugat | 80 |
| VII.E. Solidaritas Laras Faizati Khairunnisa | 82 |
| VII.F. Aktivis literasi Saiful Amin | 83 |
| VII.G. Aktivis literasi Shelfin Bima | 84 |
| VII.H. Aktivis literasi Ahmad Faiz Yusuf | 84 |
| VII.I. Aktivis Kamisan Muhammad Fakhurrozi | 85 |
| VII.J. Reyhan Aryaputra Purnomo dan brutalitas aparat | 86 |
| VII.K. Pengakuan paksa Very Kurnia Kusuma | 87 |
| | |
| VIII. OPERASI SEBELUM OPERASI | 89 |
| VIII.A. Disinformasi dan manipulasi persepsi di ruang digital | 89 |
| VIII.B. Telinga yang tak mendengar | 91 |
| VIII.C. Gedung DPR sebagai <i>ground zero</i> | 92 |
| VIII.D. Jolly Roger One Piece dan keberanian yang menular | 93 |
| VIII.E. Massa aksi yang organik dan sporadis | 95 |
| VIII.F. Mahasiswa dan pelajar turun ke jalan | 98 |
| VIII.G. Menelusuri massa aksi bayaran | 101 |
| | |
| IX. PENEGAKAN HUKUM YANG TAJAM KE BAWAH | 104 |
| IX.A. Jejak bentrokan aparat dan demonstran | 104 |
| IX.B. Manipulasi psikologi massa | 105 |
| IX.C. Penyerangan dan penjarahan yang sistematis dan terukur | 106 |
| IX.D. Satu koin, tiga sisi: Massa organik, bayaran, dan ojol | 108 |
| IX.E. Malapetaka seharga 13 nyawa | 111 |
| IX.F. Ketiadaan penegak hukum | 113 |
| IX.G. Hukum acara yang seremonial | 114 |
| | |
| X. OPERASI DALAM OPERASI | 117 |
| X.A. Keterlibatan militer dalam pengamanan sipil | 117 |
| X.B. Garis komando yang abu-abu | 120 |

| | |
|--|-----|
| X.C. Rekonstruksi lepasnya komando aksi dari massa organik | 120 |
| X.D. Paralel Agustus 2025 dan Malari | 122 |
| X.E. Analisis Operasi Siber yang Menebar Ketakutan | 123 |
| | |
| XI. OPERASI KAMBING HITAM | 126 |
| XI.A. Yang dikejar dan diabaikan | 126 |
| XI.B. Harus bersih maksimal | 127 |
| XI.C. Kegagalan deeskalasi oleh kepolisian | 130 |
| XI.D. Respons negara yang setengah hati | 132 |
| | |
| XII. REKOMENDASI | 134 |
| XII.A. Kepada Presiden Republik Indonesia | 134 |
| XII.B. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 134 |
| XII.C. Kepada Tentara Nasional Indonesia | 135 |
| XII.D. Kepada Kepolisian Republik Indonesia | 135 |
| XII.E. Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 135 |
| XII.F. Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 135 |
| XII.G. Kepada Dewan Pers | 136 |
| XII.H. Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia | 136 |
| XII.I. Kepada Masyarakat Sipil | 136 |
| XII.J. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa | 136 |
| | |
| EPILOG: MERAWAT INGATAN UNTUK AFFAN, SEPTIANUS, DANDI, SUMARI, ABAY, SARINA, SAIFUL, RHEZA, IKO, ANDIKA, FARHAN, RENO, DAN ALFARISI | 137 |
| Respons negara terhadap tuntutan publik | 137 |
| Ruang sipil yang terus menyempit | 137 |
| Menjahit ulang kontrak sosial yang putus | 138 |

Indeks Tabel

Tabel 1. Daftar eskalasi penjarahan, perusakan, dan pembakaran kantor dan fasilitas publik serta kediaman pejabat negara selama demonstrasi Agustus 2025

Tabel 2. Insiden kekerasan terhadap jurnalis dan pers selama demonstrasi Agustus 2025

Tabel 3. Korban luka-luka di Jakarta pada demonstrasi 28 Agustus 2025

Tabel 4. Korban meninggal dunia selama rangkaian demonstrasi Agustus 2025

Tabel 5. Tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan status

Tabel 6. Tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan provinsi

Tabel 7. Tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan kabupaten/kota

Tabel 8. Pasal-pasal pidana penjerat tahanan politik demonstrasi Agustus 2025

Indeks Gambar

Gambar 1. Poster demonstrasi Revolusi dimulai dari Pati

Gambar 2 dan 3. Tangkapan layar unggahan akun Instagram @gejayanmemanggil

Gambar 4. Tangkapan layar diskusi awal grup WhatsApp NIKA

Gambar 5 dan 6. Tangkapan layar percakapan grup WhatsApp NIKA dan Instagram Pasukan Revolusi

Gambar 7. Tangkapan layar unggahan akun @yobi76 dan @gejayanmemanggil

Gambar 8 dan 9. Tangkapan layar grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat), dan unggahan Instagram @gejayanmemanggil

Gambar 10, 11, dan 12. Tangkapan layar ajakan aksi demonstrasi 25 Agustus 2025

Gambar 13. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025

Gambar 14 dan 15. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 26–27 Agustus

Gambar 16. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025

Gambar 17. Affan Kurniawan

Gambar 18 dan 19. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 29–30 Agustus 2025

Gambar 20. Mobil bercat putih yang dibakar di sekitar Mako Brimob Kwitang

Gambar 21. Poster seruan aksi 'geruduk' Polres dan Samsat Jakarta Utara di media sosial

Gambar 22. Kolase foto suasana penjarahan di rumah anggota DPR Ahmad Sahroni

Gambar 23. Pangdam V Brawijaya menemui demonstran di Surabaya

Gambar 24, 25, dan 26. Suasana demonstrasi dan poster seruan aksi di Kediri

Gambar 27 dan 28. Tangkapan layar video orang tak dikenal yang mengambil alih komando dan memprovokasi massa aksi untuk terus melanjutkan demonstrasi

Gambar 29 dan 30. Orang tak dikenal yang memprovokasi kerusuhan di Bali

Gambar 31. Personel TNI berjaga di depan Mako Brimob Kwitang

Gambar 32. Penangkapan personel BAIS TNI Mayjen SS di Pejompongan

Gambar 33. Tangkapan layar grup WhatsApp Nakama Network

Gambar 34, 35, dan 36. Tangkapan layar grup Nakama Network tentang Davina Karamoy

Gambar 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Tangkapan layar teror digital terhadap anggota NIKA

Gambar 44 dan 45. Tangkapan layar rumor agen CIA di Gedung DPR dan klarifikasi terkait

Gambar 46. Unggahan pertama 17+8 Tuntutan Rakyat di Instagram

Gambar 47 dan 48. Daftar 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di media sosial

Gambar 49. Keterangan 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai rangkuman berbagai tuntutan dan desakan banyak pihak yang berkembang selama demonstrasi Agustus 2025

Gambar 50. Tangkapan layar persyaratan Kolektif 17+8 untuk berdialog dengan DPR

Gambar 51. Aksi Piknik Nasional di Gedung DPR pada 5 September 2025

Gambar 52 dan 53. Berita terkait provokasi aparat kepolisian terhadap massa demonstran

Gambar 54. Foto orang tak dikenal saat sidang tahanan politik di Jakarta pada 23 Januari 2026 yang diduga sama dengan provokator kerusuhan di Kediri

Gambar 55 dan 56. Tangkapan layar berita aksi demonstrasi buruh dan *meme* timpa teks oleh akun Instagram @AliansiMahasiswaPenggugat

Gambar 57 dan 58. Penyekatan massa demonstran oleh kepolisian

Gambar 59. Poster seruan aksi demonstrasi oleh BEM SI

Gambar 60, 61, 62, dan 63. Tangkapan layar percakapan grup WhatsApp NIKA menolak keterlibatan dalam kerusuhan yang diusulkan salah satu anggota tidak dikenal

Gambar 64, 65, 66, dan 67. Tangkapan layar percakapan grup Nakama Network tentang demonstrasi 25 Agustus 2025

Gambar 68. Pernyataan Kompol Gilang Prasetya tentang Reyhan Aryaputra Purnomo

Gambar 69, 70, dan 71. Bukti penggunaan buku dan kegiatan aktivisme literasi sebagai alat pemidanaan terhadap warga sipil oleh kepolisian

Latar Belakang dan Mandat

1. **Demonstrasi Agustus 2025 diikuti oleh gelombang kerusuhan, penjarahan dan perburuan aktivis terbesar sejak Reformasi 1998.** Hingga akhir Januari 2026, Komisi Pencari Fakta (KPF) mencatat sedikitnya 13 warga sipil meninggal dunia dan 703 tahanan politik menjadi objek kriminalisasi. Demonstrasi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Beberapa bulan sebelumnya, telah terjadi banyak demonstrasi besar seperti bertajuk #IndonesiaDarurat dan #IndonesiaGelap.
2. **Rangkaian demonstrasi Agustus 2025 memunculkan banyak pertanyaan mendasar.** Apa latar belakangnya? Siapa saja yang terlibat? Apakah gerakan ini organik atau direayasa oleh pihak-pihak tertentu? Apa tujuannya? Mengapa terjadi eskalasi kekerasan? Tidak ada pertanggungjawaban struktural atas korban dan kerusakan yang terjadi—hanya pemberian materiil yang tidak akan menutupi luka yang ditinggalkan. Alih-alih, penegakan hukum malah menggeser akuntabilitas pada sejumlah warga sipil yang kini menjadi tahanan politik.
3. **Memahami demonstrasi Agustus 2025 membutuhkan pendekatan struktural.** Akumulasi kemarahan publik, terutama orang muda, tidak semestinya disimpulkan secara gegabah menjadi hasil provokasi pihak-pihak yang nyatanya tidak memiliki kuasa besar.
4. **Hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada upaya pemerintah dan lembaga negara untuk menyusun laporan resmi yang independen dan komprehensif.** Akibatnya, publik dibiarkan berspekulasi. Oleh sebab itu, koalisi masyarakat sipil membentuk sebuah KPF (KPF) dengan empat mandat utama yang dipenuhi dalam laporan ini:
 - a. Mencari fakta penyebab terjadinya demonstrasi dan eskalasi kekerasan;
 - b. Mencari fakta aksi dan reaksi pihak-pihak dalam pusaran demonstrasi dan eskalasi kekerasan;
 - c. Mencari fakta pola, pemicu, dan katalis yang mengakselerasi demonstrasi dan eskalasi kekerasan; serta
 - d. Mencari fakta pihak-pihak yang berbuat dan bertanggung jawab.
5. **KPF menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama penanganan demonstrasi dan kerusuhan, khususnya oleh aparat negara.** Di samping kronologi peristiwa, KPF mendokumentasikan dugaan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sebelum, selama, dan sesudah rangkaian demonstrasi Agustus 2025.
6. **KPF menyusun laporan ini sebagai upaya melawan impunitas yang mengedepankan kepentingan umum (*public interest*) secara independen.** KPF mendorong akuntabilitas penuh bagi pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum—baik dari pihak negara maupun sipil—serta pemulihan dan keadilan bagi para korban, termasuk para tahanan politik yang dikriminalisasi karena aktivitasnya membela demokrasi.
7. **KPF bekerja selama lima bulan dari pertengahan September 2025 hingga pertengahan Februari 2026.** Seluruh temuan dan analisis dalam laporan ini dibangun di atas kumpulan bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan dan diolah menggunakan metodologi yang mengikuti kaidah ilmiah.
8. **Laporan ini disusun oleh 3 lembaga masyarakat sipil yang membentuk sebuah Komisi Pencari Fakta (KPF) independen.** Anggota KPF menyelesaikan mandatnya pada 17 Februari 2026 dan menyerahkan laporan ini kepada 3 lembaga pemberi mandat untuk ditindaklanjuti:
 1. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
 3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Metodologi dan Beban Pembuktian

9. **Dalam menyusun laporan ini, KPF mempelajari 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian terhadap saksi, tersangka, ahli, serta pemeriksaan forensik.** Langkah ini membantu KPF memahami perspektif tiap pihak terkait untuk memahami awal mula dan pola peristiwa. KPF kemudian menyusun hipotesis yang diuji melalui verifikasi lanjutan.
10. **KPF menggunakan metode intelijen sumber terbuka atau *open source intelligence* (OSINT).** Hal ini penting guna menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi informasi dari sumber terbuka yang tersedia untuk publik.
11. **KPF melakukan wawancara dengan setidaknya 63 informan.** Mereka terdiri atas aktivis masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar, serikat buruh, kolektif, advokat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lain. Rangkaian wawancara menggali peran aktor sebelum, selama, dan setelah demonstrasi, sembari mendukung verifikasi keterangan yang dikumpulkan.
12. **KPF melakukan investigasi lapangan untuk menindaklanjuti petunjuk dan informasi di 8 provinsi dan 18 kota, serta penelusuran jarak jauh mencapai 3 negara lain.** Lokasi-lokasi ini tidak ditentukan di awal pencarian fakta, namun mengikuti temuan selama proses investigasi.
 - Provinsi: Bali, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta.
 - Kota: Bandung, Cimahi, Denpasar, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jember, Kediri, Magelang, Makassar, Malang, Palembang, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.
 - Luar Negeri: Australia, Hong Kong, dan Malaysia.
13. **Di samping data-data primer, KPF menerapkan triangulasi data-data sekunder.** Langkah ini mencakup analisis terhadap pemberitaan media massa, wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi saksi kejadian, serta pengamatan lapangan untuk memastikan temuan yang logis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat perbedaan antara isi laporan ini dengan keterangan resmi negara yang tidak dibuktikan secara terbuka, maka KPF berpegang pada fakta dalam laporan ini.
14. **KPF menyadari adanya keterbatasan dan potensi bias dalam proses pencarian fakta yang dilakukan secara independen dengan sumber daya terbatas.** Dalam meneliti dan menulis laporan ini, KPF menggunakan banyak bukti yang bersumber dari media sosial sebagai respons terhadap pembingkai narasi oleh aparat penegak hukum yang menyimpulkan adanya pihak-pihak provokator dan ‘dalang’ demonstrasi berbekal potongan konten media sosial. Sebagai mitigasi, KPF memastikan bukti-bukti yang berasal dari konten media sosial diverifikasi secara hati-hati dan melihat dinamika lintas kanal untuk mendapatkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
15. **KPF secara proaktif melakukan verifikasi temuan dengan berbagai pihak terkait.** Akan tetapi, KPF tidak mendapatkan akses langsung kepada pihak-pihak kunci negara—Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri—hingga laporan ini diterbitkan.
16. **KPF melakukan peninjauan pakar lintas sektor dan keahlian.** Hal ini dilakukan guna memahami karakteristik mobilisasi massa, pola kerusuhan, dinamika media massa dan sosial serta identifikasi penyebaran disinformasi sebelum, selama, dan setelah demonstrasi.
 1. **Asfinawati** (Pakar Hukum dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)
 2. **Bivitri Susanti** (Pakar Hukum dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)
 3. **Diah Kusumaningrum** (Pakar Resolusi Konflik dan Pengajar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada)
 4. **Made Supriatma** (Pakar Politik dan Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute)
 5. **Marzuki Darusman** (Pakar Hukum, Jaksa Agung 1999–2001, dan Pendiri Foundation for International Human Rights Reporting Standards)
 6. **Nany Afrida** (Pakar Jurnalisme dan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen)
 7. **Usman Hamid** (Pakar Hak Asasi Manusia dan Direktur Amnesty International Indonesia)

17. **Rangkaian peristiwa demonstrasi Agustus 2025 penting dipahami dalam sebuah kerangka hukum yang tegas.** Dalam menyusun laporan ini, KPF mempertimbangkan sejumlah dasar hukum yang berlaku di Indonesia serta standar-standar HAM internasional, di antaranya:
1. **Pasal 28E UUD 1945** tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
 2. **Pasal 28F UUD 1945** tentang hak mencari, menyimpan, dan menyampaikan informasi.
 3. **Pasal 28G UUD 1945** tentang rasa aman dan perlindungan dari ancaman.
 4. **Pasal 28I UUD 1945** tentang hak yang tidak dapat dikurangi dan larangan penyiksaan sebagai prinsip umum HAM.
 5. **Pasal 28J UUD 1945** tentang tujuan sah dan proporsional.
 6. **UU Nomor 9/1998** tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terkait prosedur pemberitahuan demonstrasi, kewajiban dan larangan, peran aparat, dan prinsip dasar penanganan.
 7. **UU No. 39/1999 tentang HAM**, terkait hak dan kewajiban dalam kerangka HAM.
 8. **UU No. 2/2002 tentang Polri**, terkait fungsi dan otoritas, batasan mandat, akuntabilitas, dan penggunaan kewenangan kepolisian.
 9. **UU No. 1/2003 tentang KUHP**, terkait pasal-pasal pidana yang kerap digunakan dalam penanganan demonstrasi seperti penghasutan, perusakan, dan kekerasan yang penerapannya harus tetap tunduk pada legalitas, pembuktian, dan proporsionalitas.
 10. **UU No. 8/1981 tentang KUHAP**, terkait standar upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta hak tersangka, bantuan hukum, prosedur penindakan pidana, dan pembuktian. KPF tidak menggunakan kerangka KUHAP baru yang disahkan pada November 2025 karena rangkaian peristiwa yang dicakup oleh laporan ini terjadi sebelum KUHAP terbaru disahkan.
 11. **UU No. 12/2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)**, terkait standar hak sipil dan politik, terutama kebebasan berekspresi dan berkumpul, sebagai rujukan yang mengikat dalam kerangka nasional.
 12. **UU No. 5/1998 tentang ratifikasi Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT)**, terkait dengan tanggung jawab negara untuk menjamin setiap orang terbebas dari tindakan penyiksaan.
 13. **Peraturan Kapolri No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian**, terkait eskalasi, proporsionalitas, dan keperluan kekuatan paksa.
 14. **Peraturan Kapolri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**, terkait penghormatan HAM dalam fungsi dan tugas Polri.
 15. **UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (CRC)**, terkait hak anak untuk berdemonstrasi dan kewajiban perlindungan oleh negara.
 16. **Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum (BPUFF)**, terkait batasan keperluan, proporsionalitas, kewaspadaan, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan dan senjata oleh aparat penegak hukum.
 17. **Kode Etik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Aparat Penegak Hukum (CCLEO)**, terkait legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan HAM oleh aparat penegak hukum.
 18. **Protokol Minnesota**, terkait standar investigasi dan akuntabilitas pembuktian, independensi, dan alur barang bukti kematian yang berpotensi melanggar hukum.
 19. **Protokol Istanbul**, terkait standar dokumentasi dan investigasi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

I. Konteks: Akumulasi Kemarahan Publik

I.A. Ketegangan elite dan perebutan kekuasaan politik

18. Demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus 2025 tidak dapat dipahami sebagai akibat ajakan satu kelompok atau figur tertentu. Peristiwa ini terjadi di tengah ketegangan elite, ketidakstabilan institusi negara, dan kebijakan ekonomi yang menekan kehidupan rakyat.
19. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan tiga pola utama:
 1. Kecenderungan mengakomodasi pendukung rezim sebelumnya melalui jejaring politik yang dekat dengan Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi pasangan Presiden Prabowo sebagai Wakil Presiden.
 2. Perubahan konfigurasi kekuasaan melalui penggemukan kabinet dan penataan ulang alat kelengkapan DPR untuk membagi posisi kepada anggota koalisi politik.
 3. Percepatan agenda prioritas seperti penguatan sektor pertahanan, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengorbankan anggaran sektor lain, termasuk transfer ke daerah (TKD).
20. Di permukaan, konfigurasi ini mengesankan konsolidasi dan stabilitas. Figur kunci rezim lama tetap berada di lingkaran inti pemerintahan dan kebijakan populis memberi kuasa pada institusi keamanan. Di bawah permukaan, pemerintahan baru mewarisi persoalan struktural yang berat. Beban utang mendekati jatuh tempo dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membesar di tengah tekanan ekonomi global yang mendorong pengetatan fiskal.¹
21. Presiden Prabowo mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengejar kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan era sebelumnya. Untuk itu, ia memberikan pengamanan dari TNI. Langkah ini menggeser posisi Polri sebagai institusi penegak hukum utama. Rivalitas antara kedua institusi ini pun semakin menguat.
22. Eskalasi friksi antara TNI dan Polri dipicu oleh perebutan kewenangan. Insiden penembakan *drone* di Kejagung serta penguntitan jaksa oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 adalah satu dari indikasi friksi yang meruncing.² Penggunaan kekuatan oleh satu institusi kerap ditafsirkan sebagai tekanan terhadap institusi lain, sehingga agenda penegakan hukum bercampur dengan tarik tambang pengaruh antara siapa yang mengendalikan dan dikendalikan.
23. Pemerintah juga berupaya mengamankan dukungan lembaga peradilan. Kenaikan gaji hakim diberi tajuk pencegahan korupsi dan penguatan independensi kehakiman.³ Namun, kebijakan ini juga dibaca sebagai langkah merapikan barisan elite hukum agar agenda politik dan hukum pemerintah berlangsung mulus. Dukungan pada lembaga kejaksaan dan kehakiman berjalan seiring penataan ulang peran Polri dan TNI dalam rantai penegakan hukum.
24. Ketegangan menguat seiring pembahasan berbagai rancangan undang-undang terkait penegakan hukum yang memuat desain pemindahan, pengurangan, atau perluasan kewenangan lembaga tertentu.⁴ Sebelum pergantian rezim, kepolisian telah mendorong Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) untuk mengukuhkan kewenangannya.⁵ Setelahnya, sorotan bergeser ke Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

¹ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240711154837-4-553801/tugas-prabowo-berat-ri-dihadapkan-pada-4-krisis-tahun-depan>, 11 Juli 2024.

² Tempo, <https://www.tempo.co/politik/misteri-sebuah-drone-yang-terbang-mengitari-di-atas-kejagung-lalu-ditembak-jatuh-51420>, 7 Juni 2024; Tempo, <https://www.tempo.co/arsip/7-fakta-jampidsus-kejagung-febrie-adriansyah-diduga-dibuntuti-anggota-densus-88-55638>,

³ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/22/20073161/tni-perpres-prabowo-lindungi-jaksa-dari-intimidasi>, 22 Mei 2025.

⁴ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/lobi-polisi-jaksa-revisi-kuhap-2051278>, 26 Juli 2025.

⁵ YLBHI, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental>, 3 Juni 2024.

(RUU TNI) yang membuka ruang lebih besar bagi militer mengisi jabatan sipil. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) turut memicu kontroversi karena menempatkan Polri sebagai institusi superior dalam penyelidikan tindak pidana. Di balik perdebatan normatif, KPF melihat manuver legislatif ini sebagai arena tawar-menawar aktor politik dalam menata ulang arsitektur kekuasaan baru.

25. Ketegangan juga muncul di lingkaran partai politik pendukung pemerintah. Efisiensi anggaran mempersempit ruang bagi anggota kabinet untuk menopang mesin politik melalui program sektoral. Sebagai kompensasi, Presiden membuka ruang jabatan komisaris BUMN bagi kader partai.⁶ Namun, penghapusan tantiem komisaris membuat banyak elite partai makin frustrasi.⁷ Ketidakpuasan ini bercampur dengan rivalitas lama dan jejaring bisnis serta persaingan aktor penegak hukum dalam mengelola proyek strategis, terutama di sektor ekstraktif.
26. Dalam konteks ini, demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus 2025 menjadi perpanjangan konflik elite. Temuan KPF menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, lembaga intelijen, dan aktor politik tidak hanya berperan sebagai pengaman situasi. Mereka juga memiliki kepentingan dalam membentuk narasi tentang siapa yang harus disalahkan. Aktivis demokrasi dan HAM, kolektif gerakan sipil, dan serikat buruh diposisikan sebagai dalang. Sementara itu, ketegangan struktural antara Polri, TNI, Kejaksaan, dan kelompok politik di lingkaran utama kekuasaan dihapus dari penjelasan resmi.
27. KPF menemukan pola penyidikan yang agresif terhadap aktivis, tetapi abai menelusuri jejaring massa bayaran, pelaku penjarahan, dan penyebar disinformasi secara serius. Pola ini menguatkan dugaan bahwa narasi aktivis sebagai 'dalang' demonstrasi berfungsi sebagai pengalihan dari konflik elite dan kegagalan tata kelola negara.

I.B. Ketegangan di sektor ekonomi dan ekstraktif

28. Ketegangan di sektor ekonomi dirasakan lebih awal oleh sejumlah aktor lama yang selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo menikmati stabilitas kebijakan dan akses terhadap sumber daya perekonomian. Pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan penataan ulang sektor-sektor strategis, khususnya di bidang perkebunan dan pertambangan, dijalankan secara lebih agresif melalui pembentukan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menertibkan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan serta menyita tambang ilegal.⁸ Di atas kertas, agenda ini merupakan koreksi terhadap pelanggaran tata kelola sumber daya alam (SDA) yang ekstraktif tanpa kepatuhan untuk merestorasi lingkungan secara berkesinambungan. Dalam praktiknya, penertiban menyasar langsung aktor-aktor bisnis besar yang kehilangan kenyamanan politik, termasuk aktor-aktor dengan daya ekonomi besar yang selama bertahun-tahun bergantung pada perlindungan 'oknum' aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri. Dengan kata lain, sektor ekonomi bukan hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi juga medan perebutan rente dan patronasi kelembagaan.
29. Ketegangan struktural terjadi karena kebijakan negara mengguncang keseimbangan kekuasaan elite. Pembentukan Satgas PKH tidak hanya mengganggu perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan, tetapi juga mengusik jaringan aktor negara yang menikmati keuntungan dari ekosistem ilegal tersebut. Penunjukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk memimpin operasi penertiban memperjelas bahwa operasi ekonomi ini juga beririsan langsung dengan agenda konsolidasi kekuasaan TNI di ranah sipil dan

⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen-rangkap-komisaris-bumn-teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat-1985551>, 13 Juli 2025.

⁷ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/16312721/prabowo-hapus-tantiem-komisaris-direksi-bumn-tak-perlu-bonus-kalau-rugi>, 15 Agustus 2025.

⁸ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/satgas-pkh-mulai-tertibkan-tambang-ilegal-lahan-32107-hektar-disita>, 12 September 2025.

- penegakan hukum; sekaligus mengisyaratkan keraguan Presiden Prabowo terhadap kemampuan Polri menjadi ujung tombak penertiban.
30. Ketegangan di sektor ekstraktif bukan penyebab langsung kerusuhan Agustus 2025, namun turut menciptakan kondisi politik yang melemahkan kemampuan negara merespons kemarahan rakyat. Ketika konflik elite meruncing dan kepercayaan terhadap institusi negara ada di titik nadir, negara menutupi himpitan ekonomi bukan dengan kompromi di level kebijakan, tetapi dengan pendekatan keamanan yang agresif karena elite tidak ingin terlihat ‘mengalah’ di tengah perebutan kekuasaan di titik tertinggi.
 31. Dalam konteks ini, demonstrasi menjadi ruang alternatif terakhir warga negara yang menggugat akuntabilitas dari pemimpinnya. Terhimpunnya mahasiswa, pelajar, buruh, dan masyarakat umum dari berbagai kalangan dan latar belakang tidak semestinya dikerdilkan sebagai orkestrasi hebat sebuah kelompok gerakan rahasia. Alih-alih, negara perlu melihat ini sebagai refleksi dari tidak ada atau lemahnya mekanisme penyerapan keluhan dan aspirasi yang ada. Selagi negara sibuk mengerjakan konsolidasi sumber daya di antara para elite, masyarakat limbung sebab kehilangan pintu masuk untuk mengoreksi kebijakan. Akibatnya, terbentuk akumulasi kemarahan yang kemudian meledak sebagai demonstrasi skala besar.
 32. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil menjadi sasaran empuk bagi aparat penegak hukum untuk ditasbihkan sebagai ‘dalang’ yang mahakuasa. Mereka dilihat sebagai pengendali aksi demonstrasi, meskipun nyatanya hanya sekelompok orang yang menantang konsolidasi elite melalui kerja-kerja advokasi demi menguak tabir jaringan pendanaan ilegal, perebutan rente ekstraktif, ‘permainan’ aparat, dan konflik elite yang sebenarnya jauh lebih berbahaya secara politik bagi kestabilan administrasi pemerintahan dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
 33. Narasi aktivis muda sebagai ‘dalang’ demonstrasi berfungsi mengalihkan perhatian dari kompleksitas ketegangan elite, konflik kepentingan di sektor ekstraktif, serta kegagalan negara membangun mekanisme koreksi kebijakan yang efektif. Dalam kerangka tersebut, aktivis dan organisasi masyarakat sipil menjadi pihak yang paling rentan diposisikan sebagai aktor pengendali, meskipun temuan fakta dalam laporan ini tidak mendukung klaim adanya kendali terpusat atas demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025.

I.C. Ketegangan rakyat dan elite dalam pusaran multifungsi TNI

34. Ketegangan sosial di tingkat akar rumput berkembang sejalan dengan tekanan ekonomi yang memburuk sejak awal 2025. Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB), pemangkasan anggaran pendidikan, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menekan kelas pekerja dan bawah-menengah tanpa adanya jaring pengaman sosial yang memadai.⁹ Di ruang publik, berita mengenai antrean panjang pencari kerja dan meningkatnya pengangguran menjadi pemandangan rutin yang menciptakan rasa kehilangan arah terutama pada generasi muda yang sejak masa kampanye dijanjikan “Indonesia Emas” dan perluasan lapangan pekerjaan.¹⁰ Frustrasi ekonomi ini bukan sekadar kondisi material, melainkan kekecewaan emosional terhadap kontrak sosial yang dianggap dilanggar oleh negara.
35. Letupan pertama frustrasi rakyat muncul melalui tren #KaburAjaDulu di media sosial sepanjang setahun terakhir dan demonstrasi #IndonesiaGelap pada 17–21 Februari 2025.¹¹ Isu ekonomi menjadi pemantik, tetapi yang memperkeras kemarahan adalah respons negara yang, ketimbang membuka ruang dialog, malah koersif dan represif melalui tuduhan bahwa

⁹ BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4i3z2e8xro>, 11 September 2024.

¹⁰ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250528091502-20-1233981/job-fair-di-cikarang-membeludak-banyak-pelamar-kerja-jatuh-pingsan>, 28 Mei 2025.

¹¹ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dengan-demonstrasi-indonesia-gelap>, 19 Februari 2025.

- demonstrasi didanai oleh koruptor.¹² Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah mengerdilkan rakyat sebagai kolektif yang memiliki agensi dan mampu berpikir secara mandiri dan mengorganisir dirinya tanpa intervensi kelompok kepentingan tertentu.
36. Pengesahan UU TNI, yang dipersepsikan publik sebagai upaya memperluas peran militer ke ruang sipil di 16 sektor sekaligus, meskipun akhirnya berkurang menjadi 14 sektor,¹³ memperkuat posisi TNI sebagai instrumen pelaksanaan program prioritas pemerintah.¹⁴ UU ini dibaca banyak kelompok sebagai puncak tren penyusutan ruang sipil dan bukti bahwa negara tidak hanya mengabaikan keluhan publik, tetapi juga menyiapkan “mesin kekuasaan” untuk menekan suara-suara kritis guna menjalankan agendanya tanpa oposisi dan partisipasi publik.¹⁵ Aksi ‘geruduk’ rapat Komisi I DPR di Hotel Fairmont oleh masyarakat sipil bukan hanya protes terhadap UU TNI, tetapi simbol penolakan terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan aparat keamanan.¹⁶
 37. Respons negara terhadap demonstrasi RUU TNI pun sama. Konsesi minimal, retorika yang meremehkan kritik, dan mengedepankan pendekatan keamanan yang represif. Namun, perlawanan terhadap RUU TNI menyingkap satu lapis persoalan yang tidak terlihat sebelumnya: konflik aparat negara di dalam tubuh negara sendiri. Akhirnya, masyarakat sipil hanya dapat bergantung pada pilihan mengajukan uji materi ke MK.¹⁷
 38. Saat Polri dan Kejagung saling berebut kendali penegakan hukum dan TNI bergerak untuk memperluas kewenangan sipil melalui legislasi yang otoriter, masyarakat sipil melihat bahwa negara sedang terpecah bukan karena ancaman rakyat, tetapi karena perebutan kekuasaan antar institusi. Dengan demikian, rasa ketidakpercayaan publik terhadap negara menjadi lintas kepentingan. Pemerintah tidak peduli pada rakyat dan juga tidak mampu mengelola dirinya.
 39. Dinamika sepanjang April hingga Juli 2025 memperkuat persepsi tersebut. Kasus kriminalisasi Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto memperlihatkan bahwa penegakan hukum dapat dibalik dan dibatalkan ketika kemarahan publik menguat, bukan karena mekanisme keadilan ditegakkan sebagaimana mestinya.¹⁸
 40. Pesan ini sampai ke masyarakat. Keadilan dapat diperjuangkan untuk elite, tapi tidak untuk rakyat. Demonstrasi Pati pada 13 Agustus 2025 pun mengonfirmasi pola yang sama. Setelah kebijakan kenaikan PBB dibatalkan, negara tidak melakukan konsolidasi kepercayaan rakyat, melainkan memilih tindakan represif hingga bentrokan pecah.¹⁹ Bagi publik, ini menjadi indikator bahwa negara hanya mendengar ketika terdesak.
 41. Pada titik ini, ledakan sosial tak terhindarkan. Ketika keputusan menaikkan tunjangan anggota DPR mencuat, reaksi publik keras bukan sekadar terhadap substansi, tetapi seluruh rangkaian pengalaman kolektif setahun terakhir. Negara cenderung memanjakan elite, meskipun harus membebani rakyat yang terus diimpit kesulitan ekonomi.
 42. Dengan pemahaman tersebut, upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meringkai kelompok gerakan masyarakat sipil sebagai provokator yang mengorkestrasi

¹² Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/ada-apa-dengan-ukt>, 22 Mei 2024; Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-pertanyakan-motif-kejagung-sebarkan-video-marcella-santoso-singgung-ruu-tni-dan-indonesia-gelap-1745685>, 19 Juni 2025.

¹³ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu-dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi>, 18 Maret 2025.

¹⁴ CNN, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316065957-32-1209322/ruu-tni-perluas-jabatan-sipil-bisa-dijabat-tentara-jadi-16-posisi>, 16 Maret 2025.

¹⁵ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/info/resmi-uu-tni-disahkan-14-posisi-sipil-terbuka-bagi-militer-aktif>, 20 Maret 2025.

¹⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/aktivis-geruduk-rapat-ruu-tni-di-hotel-fairmont-deddy-corbuzier-tindakan-ilegal-1220473>, 17 Maret 2025.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/berita/y1bhi-imparsial-hingga-kontras-sebut-uu-tni-ilegal-23203>, 14 Mei 2025.

¹⁸ BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14q0652xv4o>, 2 Agustus 2025.

¹⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/penyebab-warga-masih-kesal-kepada-bupati-pati-sudewo--2057082>, 10 Agustus 2025.

amarah publik dari sebuah ketiadaan tidak sejalan dengan konteks sosial dan politik yang berkembang sepanjang setahun terakhir. Temuan fakta justru menunjukkan bahwa eskalasi kemarahan publik memiliki basis struktural yang kuat dan tidak memerlukan adanya orkestrasi terpusat oleh kelompok tertentu.

43. Akar kerusuhan Agustus 2025 tidak dapat direduksi menjadi operasi terselubung kelompok aktivis tertentu atau gerakan masyarakat sipil. Demonstrasi adalah bentuk artikulasi sosial dari krisis kepercayaan, bukan agenda tersembunyi. Kegagalan negara untuk membangun saluran aspirasi yang kredibel, ditambah politisasi aparat dan perebutan kekuasaan di antara institusi penegak hukum lebih dari cukup untuk menghasilkan kondisi di mana demonstrasi dan luapan amarah menjadi satu-satunya kanal koreksi, sekalipun berisiko menjadi destruktif.
44. Dalam pusaran tarik tambang kekuasaan tersebut, aktivis dan kelompok masyarakat sipil dijadikan kambing hitam bukan karena mereka pelaku, melainkan karena mereka dapat dengan mudah dibingkai sebagai pihak yang memiliki pengaruh lebih besar daripada kenyataan berkat kegiatan-kegiatan aktivisme dan advokasinya yang kerap bertentangan dengan kepentingan elite. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa kerusuhan Agustus 2025 “di-orkestrasi oleh aktivis” adalah narasi penyederhanaan yang mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar kegagalan tata kelola pemerintahan, ketidakadilan ekonomi yang struktural, serta konflik dan rivalitas elite politik dan institusional yang belum terselesaikan.

I.D. “Revolusi dimulai dari Pati”

45. Pada 18 Mei 2025, Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan kebijakannya menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dengan alasan “percepatan pembangunan.”²⁰ Hal ini mengundang penolakan keras dari warga Pati.
46. Pada 1 Agustus 2025, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendirikan posko pengumpulan donasi logistik di sisi barat Kantor Bupati Pati.
47. Pada 5 Agustus 2025, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu beradu argumen dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda), Pati Riyoso, dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sriyatun. Perdebatan terjadi karena penolakan warga terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2.
48. Situasi memanas setelah Sudewo menyampaikan pernyataan terbuka kepada demonstran. Ia menantang penolakan publik dan menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Jangan hanya 5.000 orang. 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan.” — Bupati Pati, Sadewo²¹
49. Pernyataan tersebut memperdalam kemarahan warga dan memperkuat persepsi arogansi pejabat daerah terhadap aspirasi publik. Pada 7 Agustus 2025, Bupati Pati menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan kenaikan PBB-P2 keesokan harinya.²²
50. Pada 10 Agustus 2025, warga Pati tetap memutuskan turun ke jalan. Sejumlah warga menyatakan bahwa kemarahan mereka tidak lagi semata soal pajak, tetapi terkait sikap pejabat yang dianggap merendahkan dan tidak menghormati warga.²³ Pada 12 Agustus 2025, kantor Bupati Pati dipenuhi tumpukan logistik demonstrasi yang

²⁰ BPK Jateng, <https://jateng.bpk.go.id/tarif-pbb-p2-pati-disesuaikan-hingga-250-persen-bupati-sudewo-untuk-pembangunan-daerah>, 18 Mei 2025.

²¹ Kompas, <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/05/203000488/pati-memanas-ribuan-massa-bersiap-demo-tolak-kenaikan-pbb-250-persen>, 5 Agustus 2025.

²² CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250808120919-32-1260253/bupati-pati-resmi-batalkan-kenaikan-pbb-250-persen>, 8 Agustus 2025.

²³ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/penyebab-warga-masih-kesal-kepada-bupati-pati-sudewo--2057082>, 10 Agustus 2025.

direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025.²⁴ Logistik ini dikumpulkan secara swadaya oleh warga sebagai penegasan bahwa aksi tersebut tidak ditunggangi pihak mana pun.

51. Pada 13 Agustus 2025, poster bertajuk “Revolusi dimulai dari Pati” beredar di media sosial dengan narasi. Ribuan warga Pati turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Dalam aksi tersebut, bendera Jolly Roger One Piece dikibarkan di tengah massa. Tuntutan meluas dari penolakan pajak menjadi desakan pengunduran diri kepala daerah.²⁵ Sekitar pukul 11.30 WIB, keributan terjadi setelah pelemparan air mineral dan benda lain ke arah petugas pengamanan. Menjelang sore, jumlah massa membengkak dari sekitar 25 ribu menjadi sekitar 100 ribu orang. Aparat merespons dengan gas air mata, meriam air, dan granat asap untuk membubarkan massa. Setelah peristiwa tersebut, Bupati Sudewo tidak lagi tampil di ruang publik dalam beberapa waktu.



Gambar 1. Poster demonstrasi Revolusi dimulai dari Pati

52. Pada 14 Agustus 2025, sebuah poster yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bone Bersatu menyerukan demonstrasi pada 19 Agustus 2025 untuk menolak kenaikan PBB-P2 sebagaimana halnya yang terjadi di Pati.
53. Pada 19 Agustus 2025, demonstrasi berlangsung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Massa menuntut Bupati Asman Sulaiman menemui mereka. Tidak puas dengan perwakilan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), massa merangsek masuk ke area kantor bupati. Sekitar pukul 18.30 WITA, terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat gabungan kepolisian, Satpol PP, dan TNI.²⁶ Aparat menembakkan gas air mata dan menangkap 16 orang demonstran. Massa membubarkan diri sekitar pukul 22.30 WITA.

I.E. Kampanye Jolly Roger One Piece dan Kolektif NIKA

54. Gejala kemarahan publik telah muncul sejak demonstrasi buruh pada 2 Juli 2025.²⁷ Sejumlah sopir truk yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU) mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece.²⁸ Hal ini merupakan ekspresi

²⁴ NU Online, <https://nu.or.id/nasional/kantor-bupati-pati-dipenuhi-14-ribu-kardus-air-mineral-demo-tak-ditunggangi-pihak-mana-pun-KJyxZ>, 12 Agustus 2025.

²⁵ Tempo, <https://www.tempo.co/ekonomi/duduk-perkara-ribuan-warga-pati-demo-tuntut-bupati-lengser-meskipun-PBB-batal-naik-250-persen-2058231>, 13 Agustus 2025.

²⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kerusuhan-dalam-demo-tolak-kenaikan-pajak-di-bone-2060945>, 20 Agustus 2025.

²⁷ NU Online, <https://nu.or.id/nasional/tuntutan-tak-diakomodasi-sopir-truk-pasang-bendera-one-piece-di-momen-agustusan-nanti-aksRg>, 30 Juli 2025.

²⁸ Jolly Roger adalah bendera kelompok bajak laut topi jerami dalam komik One Piece karya Eiichiro Oda, menceritakan sekumpulan anak muda yang berpetualang mencari kebebasan sebagai bajak laut dan dalam

kekecewaan atas kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).²⁹

55. Penggunaan simbol Jolly Roger One Piece kemudian merambah ke ruang percakapan digital. Penelusuran KPF menunjukkan bahwa simbol ini telah beredar setidaknya sejak 26 Juli 2025. Namun, intensitasnya meningkat tajam sepanjang Agustus 2025, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.³⁰
56. Pada 29 Juli–9 Agustus 2025, Syahdan Husein (Gejayan Memanggil) serta Delpedro Marhaen Rismansyah dan Muzaffar Salim (Yayasan Lokataru) melakukan studi banding ke Malaysia.³¹
57. Pada 30 Juli 2025, pukul 15.12 WIB, Khariq Anhar membuat grup WhatsApp Pasukan Revolusi (kemudian NIKA). Khariq mengusulkan kampanye simbolis yang bersifat non-konfrontatif dan digital. Usulan tersebut meliputi pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, penggunaan pakaian serba hitam, penyebaran simbol Jolly Roger One Piece di media sosial, dan penggunaan foto profil Jolly Roger One Piece di jaringan masing-masing.

“Dengan ini, mari kita sambut peringatan hari pembacaan proklamasi dengan semangat perlawanan. Pasang di tiang depan rumah, di jendela mobil, di lapangan upacara tempatmu bekerja, di kiri kanan jalan desa, di story dan feed Instagram, disablun di kaos-kaos oblong.” — Khariq Anhar



Gambar 2 dan 3. Tangkapan layar unggahan akun Instagram @gejayanmemanggil

58. Pada 31 Juli 2025, anggota grup NIKA membahas perluasan jangkauan kampanye digital. Sejumlah akun Instagram besar mengunggah video Jolly Roger One Piece yang dibuat menggunakan mesin kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Narasi ini pertama kali dipopulerkan oleh akun Instagram @sultaanrmdhn dan diadopsi oleh @GejayanMemanggil, @lokataru_foundation, @mahasiswa_bergerak, serta @lbhyogyakarta. Mereka menekankan perlawanan simbolis dan menolak narasi kekacauan. Pada awal Agustus 2025, simbol ini mulai digunakan secara konsisten dan belum ada seruan aksi demonstrasi.

“Bendera ini melambangkan mereka yang menolak tunduk pada ketidakadilan, ini bukanlah simbol kekacauan, ini adalah panggilan, satu bulan saja kibarkan ini, jika bersuara dianggap sebagai kekacauan, maka biarlah kekacauan menjadi jalan satu-satunya.” — @sultaanrmdhn

prosesnya menyelamatkan banyak komunitas dari tirani penguasa yang diktator; berhadapan langsung dengan “Pemerintah Dunia” yang menghapus sejarah dan melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan.

²⁹ Kemenko Polhukam, <https://polkam.go.id/program-zero-odol-langkah-strategis-transportasi-logistik>, 11 Juli 2025.

³⁰ Drone Emprit, <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-pengibaran-bendera-one-piece>, 5 Agustus 2025.

³¹ Keterangan Syahdan Husein kepada anggota Mandiri Malaysia bahwa isi tasnya sempat digeledah ketika tiba dari Malaysia pada 6 Agustus 2025 di Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.



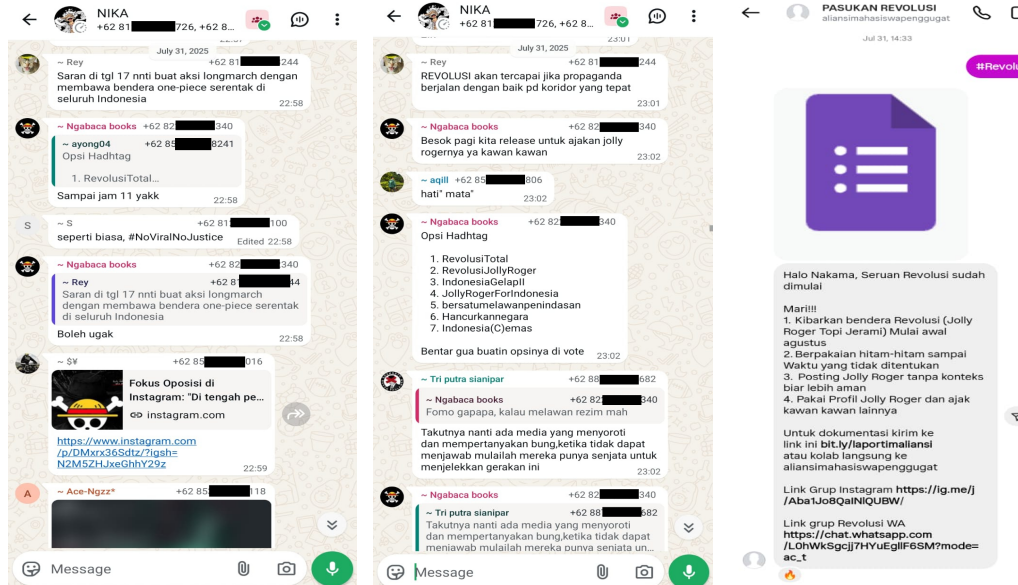
Gambar 4. Tangkapan layar diskusi awal grup WhatsApp NIKA

59. Akun @GejayanMemanggil mengunggah ajakan menggunakan avatar Jolly Roger One Piece. Unggahan ini disukai 11,8 ribu kali, dikomentari 136 kali, diteruskan 566 kali, dan diunggah ulang 11 kali. Ajakan mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece disukai 8.793 kali, dikomentari 78 kali, diteruskan 684 kali, dan diunggah ulang 11 kali.

"Gunakan Avatar ini bersama-sama dan mengibarkan bendera pada 17 Agustus 2025. Gerakan ini dibiayai oleh komandan Luffy." — @gejayanmemanggil

"#IndonesiaGelap #17Agustus2025 Kibarkan Bendera Perayaan Indonesia Merdeka dari para oligarki yang menghancurkan negeri ini. Generasi baru akan datang." — @gejayanmemanggil

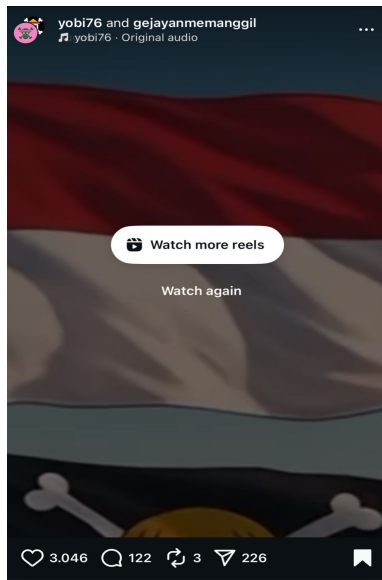
60. Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) membentuk grup Instagram dan menyerukan kampanye simbolis serupa. Seruan ini mencantumkan tautan ke grup WhatsApp Revolusi WA. Di dalam grup NIKA sendiri, muncul diskusi mengenai penggunaan tanda pagar dan kemungkinan aksi lanjutan, termasuk usulan *long march* pada 17 Agustus 2025 dengan membawa bendera One Piece secara serentak. Hingga tahap ini, seluruh aktivitas masih berpusat pada kampanye simbolis dan narasi digital. Akan tetapi, respons negara yang gegabah mengubah makna simbol tersebut dari ekspresi kultural menjadi ancaman keamanan.
61. Di grup NIKA, akun Khariq Ngabaca Books (62822xxxx2340) mengusulkan sejumlah ide tajuk kampanye: #RevolusiTotal, #RevolusiJollyRoger, #IndonesiaGelapII, #JollyRogerForIndonesia, #BersatuLawanPenindasan, #HancurkanNegara, #Indoneisa(C)emas. Sebelumnya, akun Rey (+62819xxxx3244) menyarankan aksi *long march* dengan membawa bendera Jolly Roger One Piece pada 17 Agustus 2025 serentak di seluruh Indonesia.



Gambar 5 dan 6. Tangkapan layar percakapan grup WhatsApp NIKA dan Instagram Pasukan Revolusi

I.F. Sekuritisasi kampanye Jolly Roger One Piece

62. Pada 1 Agustus 2025, akun Instagram @yobi76 berkolaborasi dengan @GejayanMemanggil mengunggah konten yang menyebut Agustus sebagai bulan perlawanan. Unggahan ini mengajak pengibaran bendera Jolly Roger sebagai simbol perlawanan terhadap “kegelapan” sesuai karya fiksi One Piece. Unggahan tersebut pertama kali dibuat oleh akun @firmansyahsuryanna dan @AliansiMahasiswaPenggugat.



Gambar 7. Tangkapan layar unggahan akun @yobi76 dan @gejayanmemanggil

63. Sejumlah pejabat negara merespons penggunaan simbol Jolly Roger One Piece yang meluas. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan adanya “deteksi dari lembaga pengamanan” terkait dugaan upaya memecah belah persatuan.³² Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut penggunaan bendera tersebut sebagai

³² Tempo, <https://www.tempo.co/politik/dasco-anggap-bendera-one-piece-saat-agustusan-upaya-pecah-belah-bangsa--2053513>, 1 Agustus 2025.

provokasi.³³ Ia bahkan mengaitkannya dengan unsur makar dan menyerukan penindakan tegas. Pernyataan-pernyataan ini menandai sekritisasi terhadap ekspresi perlawanan berupa simbol kultural sebagai ancaman keamanan.

64. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut pengibaran bendera Jolly Roger One Piece sebagai bentuk “ekspresi kreativitas” selama tidak melanggar hukum dan tidak mencederai simbol negara. Namun, ia juga menyatakan pemerintah “mencermati dengan serius adanya provokasi” dan akan mengambil “tindakan hukum secara tegas dan terukur” jika ditemukan unsur kesengajaan dan provokasi.
65. Pada 2 Agustus 2025, pengibaran bendera Jolly Roger One Piece menjadi tren di media sosial. Drone Emprit mencatat hingga 2,64 miliar interaksi yang didominasi percakapan di kanal X (Twitter), kemudian TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.³⁴ Tidak ada indikasi gerakan ini merupakan *coordinated inauthentic behavior*.
66. Pada 3 Agustus 2025, Sarbumusi NU menyerukan anggotanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Mereka menilai ada pihak tertentu yang menunggangi gerakan Jolly Roger One Piece. Pada 4 Agustus 2025, Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Ika Rosiyanti, dan Presiden Sarbumusi NU, Irham Ali Saifuddin, bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta. Setelah pertemuan tersebut, Ika mengonfirmasi kelompoknya sebagai inisiator kampanye simbol Jolly Roger One Piece dalam konteks perjuangan buruh sopir truk.

“Aku mengakui ke Bang Dasco soal pergerakan aksi bendera One Piece itu memang pergerakan kita dan kita nggak mau merasa bersalah karena memang tidak salah. Itu kan ekspresi, hanya simbol dan kita memang sedang punya kepentingan.” — Ketua Umum RBPI, Ika Rosiyanti³⁵

67. Drone Emprit merilis laporan pemantauan percakapan digital periode 26 Juli–4 Agustus 2025. Laporan tersebut mencatat 1.141 artikel dan 2.935 sebutan di media online, serta 14.182 sebutan di media sosial terkait bendera Jolly Roger One Piece. Analisis menunjukkan sentimen publik di media sosial cenderung positif (81%), sementara di media daring lebih berimbang dengan sentimen netral (43%) dan negatif (33%). Drone Emprit mengidentifikasi empat klaster utama dalam pembentukan persepsi publik:³⁶
 - a. klaster pro yang menekankan kritik terhadap ketakutan berlebihan pemerintah dan menolak tuduhan makar, didominasi oleh akun X @WidasSatyo, @JukiJoki, @rahmaniarbaftim, dan @enoliska;
 - b. klaster aktivis yang menyoroti ancaman pemidanaan dan menjelaskan asal-usul simbol sebagai ekspresi perlawanan, didominasi oleh akun X @barengwarga, @YLBHI, @MurthadaOne1, @yaniarsim, dan @LexWu_13;
 - c. klaster kontra yang memandang simbol ini sebagai provokasi dan ancaman persatuan nasional, didominasi oleh akun X @kangdede78, dan @Blira_C; dan
 - d. klaster media yang fokus pada pemberitaan dan pernyataan pejabat negara terkait fenomena tersebut, didominasi oleh akun X @tempodotco dan @kompascom.

³³ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/12220571/soal-pengibaran-bendera-one-piece-jelang-17-Agustus-anggota-dpr-makar-itu>, 1 Agustus 2025.

³⁴ Drone Emprit, <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-pengibaran-bendera-one-piece>, 5 Agustus 2025.

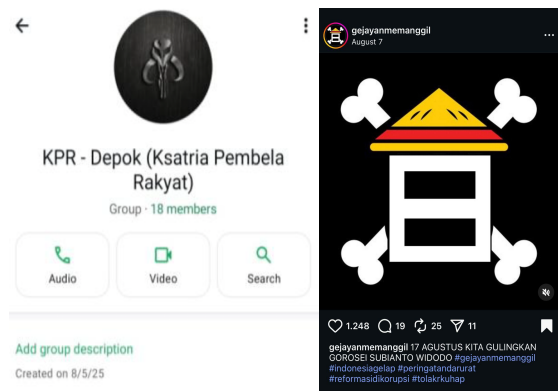
³⁵ NU Online, <https://www.nu.or.id/nasional/bertemu-dasco-rbpi-sarbumusi-sampaikan-aspirasi-sopir-truk-singgung-bendera-one-piece-4jtbF>, 5 Agustus 2025.

³⁶ Drone Emprit, <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-pengibaran-bendera-one-piece>, 5 Agustus 2025.

II. Demonstrasi Damai dalam Dua Gelombang

II.A. Perencanaan aksi demonstrasi damai 25 Agustus 2025

68. Pada 5 Agustus 2025 pukul 20.53 WIB, Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji (6287xxxxx345) membuat grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat). Grup lain dengan nama 'Pembangkok Oligarki' juga dibuat oleh pengguna bernama StoryRakyat (6281xxxxx036).



Gambar 8 dan 9. Tangkapan layar grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat) dan unggahan Instagram @gejayanmemanggil

69. Pada 6 Agustus 2025, grup WhatsApp Nakama Pekanbaru dibuat oleh pengguna Takana Motor (6282xxxxx879).
70. Pada 7 Agustus 2025, Khariq Anhar bergabung ke dalam grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat). Pada hari yang sama, akun Instagram @GejayanMemanggil mengunggah logo Gejayan Memanggil yang dimodifikasi dengan simbol Jolly Roger One Piece. Unggahan ini disukai 1.248 kali, dikomentari 19 kali, diteruskan 11 kali, dan diunggah ulang 25 kali. Sementara itu, grup WhatsApp Pembangkang Oligarki menggulirkan rencana pertemuan virtual di Google Meet.³⁷
71. Pada 9 Agustus 2025, Agt24_Raja Prasetia M. (6282xxxxx121) membuat komunitas WhatsApp Pasukan Revolusi Jolly Roger.³⁸ Mansurni Abadi alias Adi alias Luna Bombardilo Suryodiningrat membuat grup WhatsApp Nakama Jatim dan Jateng serta mengambil alih peran administrator grup NIKA dari Khariq Anhar yang mengalami *doxing* dan teror digital.³⁹ Di laman Suara Muda, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat—dengan label sebagai mahasiswa Universitas Avondale di Australia—menerbitkan artikel opini berjudul “Balada Pati: Ketika Bupati Mengajak Rakyat ‘Gathering’.”⁴⁰ Ia menyebut bahwa bendera Jolly Roger One Piece “rasanya pantas untuk menegaskan bersama Bupati Pati pastinya jika Indonesia perlu dibajak ke arah yang lebih baik.”
72. Pada 10 Agustus 2025, sejumlah administrator Gejayan Memanggil menyadari bahwa kata sandi seluruh akun gerakan telah diganti. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Syahdan Husein karena rangkaian intimidasi dan teror digital yang dialaminya. Konflik koordinasi ini memperlihatkan bahwa jaringan gerakan bersifat cair dan dipenuhi kecurigaan.
73. Pada 12 Agustus 2025, Agt24_Raja Prasetia M. memasukkan ratusan nomor baru ke komunitas Pasukan Revolusi Jolly Roger. Khariq Anhar mengajak anggota jaringan untuk melakukan aksi pengibaran bendera Jolly Roger One Piece melalui grup Nakama Pekanbaru.

³⁷ BAP Forensik a.n. Khariq Anhar.

³⁸ BAP a.n. Khariq Anhar.

³⁹ BAP Forensik a.n. Khariq Anhar; wawancara dengan Khariq Anhar.

⁴⁰ Suara Muda, <https://suaramuda.net/2025/08/09/balada-pati-ketika-bupati-mengajak-rakyat-gathering>, 9 Agustus 2025.

Salah satu akun yang tidak diketahui identitasnya mengirim pesan “*Yok JOIN RAPAT RAKYAT !!!*” disertai tautan Google Meet di grup NIKA. Pada 14 Agustus 2025, Rendi Rizki Sutisna (6285xxxxx725) membuat grup WhatsApp Pasukan NIKA Jabar.

74. Sejak 15 Agustus 2025, wacana demonstrasi lanjutan terus beredar di media sosial dan pesan berantai WhatsApp. Ajakan aksi awalnya fokus pada kelanjutan demonstrasi Pati yang menjadi perhatian nasional. Seiring mencuatnya isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, narasi demonstrasi bergeser ke Gedung DPR di Jakarta. Pergeseran ini menandai perubahan arah aksi dari kepala daerah ke institusi politik nasional.
75. Pada 20 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB, warga Pati menggelar aksi simbolis “1.000 Lilin” di Alun-Alun Kabupaten Pati sebagai peringatan publik menandai kelanjutan ekspresi protes damai. Anggota tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Kristoni Duha, mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam wacana demonstrasi lanjutan 25 Agustus 2025 yang disampaikan oleh Ahmad Husein pada 18 Agustus 2025.⁴¹
76. Pada 21 Agustus 2025, Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) menggelar aksi di depan Gedung DPR dengan membawa spanduk bertajuk “Indonesia Sold Out.”⁴² Sekitar 1.145 personel kepolisian dikerahkan dan aksi berlangsung damai tanpa tindakan represif.⁴³
77. Wacana aksi menyebar cepat di ruang digital. Poster, video, dan konten berbasis AI menyebar dengan narasi kemarahan dan delegitimasi lembaga negara, terutama DPR. Pada 22 Agustus 2025, perencanaan aksi kembali muncul di sejumlah grup percakapan. Salah satu pesan berbunyi, “*25 mau turun aksi gak?*” direspons dengan diskusi mengenai skema pemantauan karena banyaknya aliansi yang berpotensi turun. Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat menginisiasi daftar hadir aksi yang direncanakan pada 25 Agustus di grup KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat). Sembilan anggota (Rehan, Gery, Nopal, Habil, Riki, Dito, Yans, dan Rian Icann) mengisi daftar tersebut. Fakta ini menunjukkan skala mobilisasi yang terbatas, berbeda dengan narasi aparat negara tentang gerakan besar yang terpusat dan dikomandoi pihak dengan kekuatan besar.
78. Pada 23 Agustus 2025, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat mengirimkan ajakan aksi melalui komunitas WhatsApp Pasukan Revolusi Jolly Roger. Dalam pesan tersebut, ia membagikan tautan untuk bergabung ke grup bernama KPR - Depok.
79. Pada 24 Agustus 2025, akun Instagram @GejayanMemanggil mengunggah seruan aksi 25 Agustus 2025 yang memuat sembilan tuntutan. Unggahan ini disukai 15,8 ribu kali, dikomentari 109 kali, diteruskan 1.815 kali, dan diunggah ulang 765 kali. Tuntutan tersebut mencakup seruan pembubaran DPR, penolakan RUU KUHAP, transparansi gaji anggota DPR, hingga tuntutan politik langsung terhadap Presiden Prabowo dan kabinetnya.
80. Pada 24 Agustus 2025, anggota grup KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat) dan Pasukan Revolusi Jolly Roger menggelar konsolidasi di tempat usaha milik Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji di Pancoran Mas, Depok. Pertemuan ini membahas persiapan teknis aksi, termasuk logistik seperti masker, perlengkapan P3K, dan tali. Dalam pertemuan tersebut, seorang peserta bernama Nopal membawa bahan yang kemudian disebut sebagai molotov.⁴⁴
81. Di grup Pasukan Revolusi Jolly Roger, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat mengumumkan penggalangan dana untuk aksi 25 Agustus ke nomor rekening atas nama Gerry Gesta Abdullah. Faradisa Oktirisyani alias Shizuka menyumbang Rp500.000 dan Pram alias Sutan Sjahrir menyumbang Rp50.000. Dana digunakan untuk biaya transportasi dan membeli cat semprot, masker, makanan, kopi, cabai, lada, dan bensin.

⁴¹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/rencana-demo-pati-25-agustus-disebut-sepihak-dari-ahmad-husein-2061370>, 25 Agustus 2025; Channel News Asia, <https://www.cna.id/indonesia/ngotot-bupati-sudewo-dimakzulkan-demo-pati-jilid-ii-akan-digelar-25-agustus-36756>, 19 Agustus 2025.

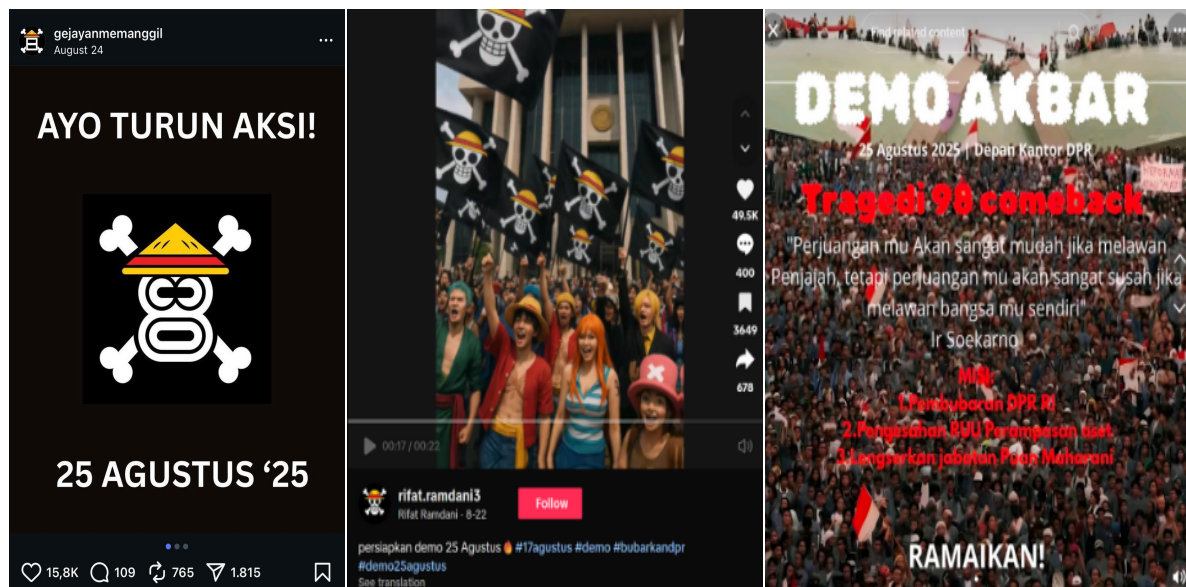
⁴² Detik, <https://news.detik.com/foto-news/d-8072626/penampakan-mahasiswa-demo-di-depan-dpr-sempat-ricuh>, 21 Agustus 2025.

⁴³ TVRI News, <https://nasional.tvrinews.com/berita/t3yjgda-1145-personel-diterjunksan-amankan-aksi-gemarak-di-gedung-DPR>, 21 Agustus 2025.

⁴⁴ BAP a.n. Reyhan Aryaputra Purnomo.

Menurut keterangan Gerry Gesta Abdullah, Faradisa Oktirisyani alias Shizuka mengetahui dana tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan molotov.⁴⁵

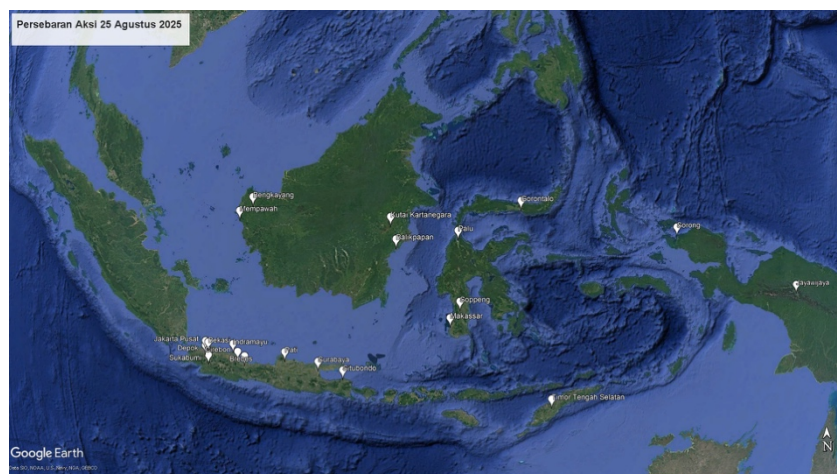
82. Pada 24 Agustus 2025, beredar pesan siaran (*broadcast*) untuk tidak mengikuti aksi 25 Agustus di WhatsApp karena “didalangi aparat kepolisian.” Menanggapi peringatan tersebut, kelompok yang dilabeli sejumlah aktivis sebagai ‘anarko palsu’ mendorong agar aksi tetap dilaksanakan karena dugaan keterlibatan aparat bukan alasan untuk membatalkan demonstrasi. Di grup percakapan administrator Gejayan Memanggil, Syahdan Husein menyampaikan ia khawatir dirinya dibuntuti dan telepon genggamnya telah dibajak. Hal ini memperkuat kekhawatiran di kalangan aktivis menjelang aksi demonstrasi 25 Agustus.



Gambar 10, 11, dan 12. Tangkapan layar ajakan aksi demonstrasi 25 Agustus 2025

83. Peringatan potensi demonstrasi dan kerusuhan juga disampaikan sejumlah tokoh. Pendiri Great Institute, Syahganda Nainggolan, mengklaim adanya informasi dari seorang petinggi militer mengenai rencana pergerakan besar pada akhir Agustus 2025.⁴⁶ Syahganda mengimbau rekan-rekannya tidak mengikuti demonstrasi 25 Agustus dan selanjutnya.

II.B. Gelombang pertama: 25–27 Agustus

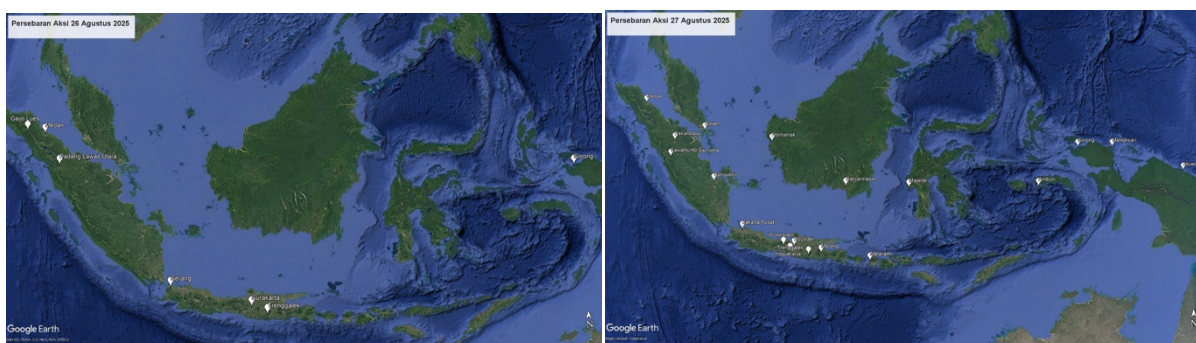


Gambar 13. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025

⁴⁵ BAP a.n. Gerry Gesta Abdullah.

⁴⁶ YouTube @tvOneNews, https://www.youtube.com/watch?v=fcdA_8g2GAs, 6 September 2025.

84. Pada gelombang pertama (25–27 Agustus 2025), aksi demonstrasi berlangsung damai. Total, KPF mencatat aksi terjadi di 23 kota pada 25 Agustus, lalu berkurang menjadi 7 kota pada 26 Agustus, dan 19 kota pada 27 Agustus.
85. Di Jakarta, demonstran berkumpul pada 25 Agustus sejak pukul 09.00 WIB di dua titik utama: Gerbang Utama DPR di Jalan Gatot Subroto dan Gerbang Pancasila DPR di Jalan Gelora. Untuk pengamanan aksi, aparat mengerahkan sekitar 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Mereka bersiaga di dalam dan sekitar area Gedung DPR.⁴⁷
86. Situasi mulai memanas pada pukul 11.45 WIB setelah polisi melakukan penyekatan di bawah Jalan Layang Gerbang Pemuda. Sebagian massa merespons dengan melempar botol dan batu ke arah Gedung DPR. Pada pukul 12.45 WIB, sekelompok pelajar mencoba menembus barikade polisi di persimpangan Kementerian Kehutanan menuju arah Slipi. Polisi merespons dengan meriam air dan gas air mata.
87. Massa kemudian terpecah dan menyebar ke berbagai titik. Sebagian massa memasuki jalur rel kereta dan akses tol dalam kota di sekitar Stasiun Palmerah. Akibatnya, Jalan Tol S. Parman ditutup sementara serta operasional KRL di Stasiun Palmerah dan Tanah Abang dihentikan. Pada pukul 19.00 WIB, sekelompok orang membakar Pos Polisi Petamburan. Hingga pukul 21.05 WIB, bentrokan terjadi di kawasan kolong Jalan Layang Pejompongan dan Petamburan.
88. Sebagian massa aksi mengatasnamakan diri sebagai ‘Revolusi Rakyat Indonesia’. Mobilisasi ini berkaitan dengan kolektif NIKA, Nakama, dan KPR – Depok (Ksatria Pembela Rakyat) yang memulai kampanye simbolis. Beberapa anggota jaringan menyebut nama Khariq Anhar dan Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat sebagai koordinator.
89. Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) juga memobilisasi aksi melalui media sosial, termasuk kolaborasi dengan akun @kolektifpr, @sahara_sahabatmahasiswa, dan @dkv_bergerak. Mereka menyuarakan empat tuntutan utama: sahkan RUU Perampasan Aset, tegakkan pemerintahan yang bersih, tolak komersialisasi pendidikan, dan hapus sistem kerja alih daya. Dalam aksinya, Gemarak menggunakan tagar #WujudkanReformasiLegislatif, #LawanKapitalismeImperialisme, dan #GanyangOligarki.
90. Temuan KPF mengindikasikan hanya sekitar 10 orang dari grup KPR – Depok (Ksatria Pembela Rakyat) dan 8 orang dari grup NIKA.⁴⁸ Ketegangan yang terjadi pada gelombang pertama demonstrasi utamanya disebabkan kehadiran rombongan pelajar di tengah aksi.



Gambar 14 dan 15. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 26–27 Agustus 2025

91. Di media sosial dan berbagai publikasi media online, konten tentang demonstrasi 25 Agustus 2025 mendapat interaksi hingga 356 juta kali. Kanal TikTok mendominasi dengan sekitar 289 juta interaksi, terutama melalui video dan siaran langsung dari lokasi aksi. Analisis sentimen menunjukkan respons publik yang cenderung mendukung tuntutan demonstran.⁴⁹
92. Kemarahan umumnya diarahkan kepada DPR dan aparat keamanan, disertai harapan agar aksi berlangsung damai. Narasi yang meluas fokus pada isu kenaikan gaji anggota DPR,

⁴⁷ Tirto, <https://tirto.id/rangkuman-demo-25-agustus-di-DPR-RI-yang-berakhir-ricuh-hgqj>, 26 Agustus 2025.

⁴⁸ Wawancara dengan Gerry Gesta Abdullah.

⁴⁹ Drone Emprit, <https://pers.droneemprit.id/peta-netizen-tentang-aksi-demo-25-agustus-2025>, 8 September 2025.

Tuntutan ini mencerminkan kekecewaan terhadap DPR sebagai institusi yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

97. Sekitar pukul 14.50 WIB, massa berupaya namun gagal menjebol pagar Gedung DPR.⁵⁶ Pada pukul 15.00 WIB, sebagian massa melempar batu dan petasan ke arah kompleks DPR. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata. Massa berlarian ke arah Jalan Gerbang Pemuda.⁵⁷ Sekitar pukul 15.20 WIB, polisi kembali menembakkan gas air mata dan meriam air. Aparat mengerahkan kendaraan taktis dan personel bersenjata tameng. Sebagian massa tetap bertahan dan membalas dengan lemparan botol dan petasan.⁵⁸
98. Pada pukul 15.30 WIB, lemparan batu meningkat. Polisi kembali membalas dengan gas air mata.⁵⁹ Massa mulai mundur dari Gerbang Pancasila pada pukul 15.35 WIB, sementara polisi membentuk barikade untuk menjauhkan massa dari kompleks DPR.⁶⁰ Sekitar pukul 15.43 WIB, massa bertahan di bawah Jalan Layang Pejompongan dan terus melempar batu serta petasan.⁶¹ Polisi kembali membentuk barikade pada pukul 15.50 WIB untuk memecah konsentrasi massa.⁶²
99. Pada pukul 16.56 WIB, pasukan Brimob terlihat membentuk formasi menyerupai huruf U di Jalan Pejompongan Raya dengan dukungan kendaraan taktis (rantis) jenis Rimueng. Bentrokan meluas ke kawasan Asia Afrika, Senayan, Bendungan Hilir, hingga Petamburan. Aparat menggunakan meriam air dan gas air mata.⁶³ Massa membakar pembatas jalan dan melempar batu serta petasan.⁶⁴
100. Sekitar pukul 19.27, rantis berpelat Polri 17713-VII tersebut berhenti di Jalan Penjernihan I.⁶⁵ Di waktu bersamaan, aparat menembakkan gas air mata ke arah massa. Pada saat yang sama, puluhan pelajar yang sedang menuju Gedung DPR dihentikan oleh aparat kepolisian, termasuk sebagian yang menyatakan tidak berniat mengikuti demonstrasi.⁶⁶ Beberapa di antara mereka terjatuh dari sepeda motor.
101. Sekitar pukul 19.28 WIB, rantis Brimob tersebut melaju kencang melawan arus lalu lintas di tengah kerumunan massa aksi dan melindas seorang sopir ojek online (ojol) yang kemudian diketahui bernama Affan Kurniawan.⁶⁷ Saat itu, Affan diketahui baru saja mengantar pesanan

⁵⁶ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/polisi-tembakkan-water-cannon-massa-demo-di-dpr-dibubarkan-paksa>, 28 Agustus 2025.

⁵⁷ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/polisi-tembakkan-water-cannon-massa-demo-di-dpr-dibubarkan-paksa>, 28 Agustus 2025.

⁵⁸ Tirto, <https://tirto.id/kondisi-demo-28-agustus-2025-di-jakarta-apakah-sudah-bubar-sore-ini-hgDM>, 28 Agustus 2025.

⁵⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/aparat-dan-massa-demo-dpr-saling-lempar-batu-di-jalan-gerbang-pemuda-2064100>, 28 Agustus 2025.

⁶⁰ BBC Indonesia, www.bbc.com/indonesia/articles/c1mpvgvjzeo, 28 Agustus 2025.

⁶¹ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8083958/massa-bertahan-di-pejompongan-lempar-batu-hingga-petasan-lalin-dialihkan>, 28 Agustus 2025.

⁶² Bisnis, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250828/15/1906584/demo-di-DPR-Ricuh-polisi-pukul-mundur-massa-aksi-hingga-gedung-tvri>, 28 Agustus 2025.

⁶³ Tirto, <https://tirto.id/rangkuman-demo-28-agustus-2025-di-jakarta-ada-korban-jiwa-hgHo>, 29 Agustus 2025; Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-pukul-mundur-massa-demo-yang-masih-bertahan-di-jalan-ks-tubun-25kFwf2Eza3>, 28 Agustus 2025.

⁶⁴ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/aparat-dan-massa-demo-dpr-saling-lempar-batu-di-jalan-gerbang-pemuda-2064100>, 28 Agustus 2025; Bloomberg Technoz, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/82248/massa-ojol-ricuh-di-pasar-senen-sasar-mako-brimob-kwitang>, 29 Agustus 2025.

⁶⁵ Tim Advokasi untuk Demokrasi, <https://drive.google.com/file/d/1IBfCsAmu5521btdwc47bYkVg6vD9fUJP/view>, 10 September 2025.

⁶⁶ Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/2917712/kronologi-tragedi-di-demo-dpr-ojol-terlindas-rantis-brimob>, 28 Agustus 2025.

⁶⁷ Tim Advokasi untuk Demokrasi, <https://drive.google.com/file/d/1IBfCsAmu5521btdwc47bYkVg6vD9fUJP/view>, 10 September 2025.

makanan ke seorang pelanggan.⁶⁸ Di tengah kekacauan, telepon genggam Affan terjatuh.⁶⁹ Ketika menunduk untuk mengambil telepon genggamnya, rantis Brimob yang melaju zig-zag melindas tubuh Affan yang sudah tidak bisa menghindar.⁷⁰ Seorang penghuni rumah susun di dekat lokasi kejadian bernama Kevin mengonfirmasi kronologi kejadian ini.

102. Benediktus Subardi alias Aping, seorang sopir ojol dan saksi langsung kejadian, mengatakan ia dan massa meneriaki pengendara rantis agar mundur supaya mereka bisa menolong Affan.⁷¹ Rantis tersebut sempat berhenti sekitar 7 detik sebelum menyeret tubuh Affan dan melindasnya kembali.⁷² Affan seketika muntah darah.⁷³



Gambar 17. Affan Kurniawan

103. Sekitar pukul 19.58 WIB, massa membawa Affan ke RS Pelni, namun beralih ke RS Cipto Mangunkusumo karena kondisi lalu lintas yang padat.⁷⁴ Affan sampai di rumah sakit dalam keadaan sudah tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian.⁷⁵

⁶⁸ Project Multatuli, <http://projectmultatuli.org/pembunuhan-affan-kurniawan-sebuah-kegilaan-di-jalan-penjernihan>, 1 September 2025.

⁶⁹ Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/2917712/kronologi-tragedi-di-demo-dpr-ojol-terlindas-rantis-brimob>, 28 Agustus 2025.

⁷⁰ Project Multatuli, <http://projectmultatuli.org/pembunuhan-affan-kurniawan-sebuah-kegilaan-di-jalan-penjernihan>, 1 September 2025.

⁷¹ Project Multatuli, <http://projectmultatuli.org/pembunuhan-affan-kurniawan-sebuah-kegilaan-di-jalan-penjernihan>, 1 September 2025.

⁷² Tim Advokasi untuk Demokrasi, <https://drive.google.com/file/d/1IBfCsAmu5521btdwc47bYkVg6vD9fUJP/view>, 10 September 2025.

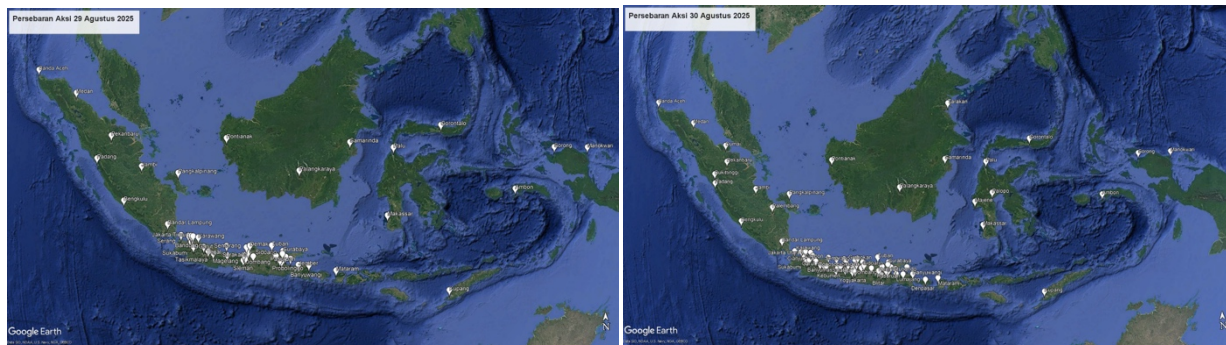
⁷³ Project Multatuli, <http://projectmultatuli.org/pembunuhan-affan-kurniawan-sebuah-kegilaan-di-jalan-penjernihan>, 1 September 2025.

⁷⁴ Tim Advokasi untuk Demokrasi, <https://drive.google.com/file/d/1IBfCsAmu5521btdwc47bYkVg6vD9fUJP/view>, 10 September 2025.

⁷⁵ Tim Advokasi untuk Demokrasi, <https://drive.google.com/file/d/1IBfCsAmu5521btdwc47bYkVg6vD9fUJP/view>, 10 September 2025.

III. Gelombang Ketiga: Tsunami Kemarahan

III.A. Eskalasi kekerasan setelah pembunuhan Affan Kurniawan



Gambar 18 dan 19. Peta persebaran aksi demonstrasi pada 29–30 Agustus 2025

104. Eskalasi kerusuhan ke berbagai daerah setelah pembunuhan Affan Kurniawan diakselerasi oleh respons negara yang cenderung lambat, sehingga menjadi akselerator peluasan aksi yang berujung perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas publik, kantor pemerintahan, serta kantor dan pos jaga kepolisian sebagai sasaran kemarahan publik.

| Lokasi | Tanggal | Waktu (ca.) | Eskalasi | Target |
|--|------------|-------------|------------|---|
| Demonstrasi Gelombang Pertama (25–27 Agustus 2025) | | | | |
| Jakarta | 25 Agustus | 18.00 WIB | Perusakan | Pos Polisi Slipi |
| Demonstrasi Gelombang Kedua (28 Agustus 2025) | | | | |
| Tidak ada kejadian penyerangan fasilitas dan sarana publik | | | | |
| Demonstrasi Gelombang Ketiga (29–31 Agustus 2025) | | | | |
| Jakarta | 28 Agustus | 23.30 WIB | Pembakaran | Pos Polantas Jalan Layang Senen |
| Jambi | 29 Agustus | 13.00 WIB | Perusakan | Gedung DPRD Jambi |
| Bandung | 29 Agustus | 16.00 WIB | Pembakaran | Gedung DPRD Jawa Barat |
| Bandung | 29 Agustus | 16.30 WIB | Pembakaran | Eks-Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat |
| Jakarta | 29 Agustus | 16.30 WIB | Pembakaran | Gedung ACC Kwitang |
| Medan | 29 Agustus | 18.00 WIB | Pembakaran | Pos Polisi Lapangan Merdeka |
| Pontianak | 29 Agustus | 18.40 WIB | Pembakaran | Pos Polisi Gedung DPRD Kalimantan Barat |
| Jakarta | 29 Agustus | 19.30 WIB | Penjarahan | Markas Gegana Brimob Polda Metro Jaya |
| Makassar | 29 Agustus | 20.16 WITA | Pembakaran | Pos Polisi Sultan Alauddin |
| Jakarta | 29 Agustus | 20.56 WIB | Pembakaran | Halte TransJakarta Polda Metro Jaya |
| Jakarta | 29 Agustus | 21.22 WIB | Pembakaran | Gerbang Tol Pejompongan |
| Surabaya | 29 Agustus | 21.30 WIB | Pembakaran | Pos Polisi Jalan Darmo Taman Bungkul |
| Makassar | 29 Agustus | 22.45 WITA | Pembakaran | Gedung DPRD Makassar |
| Jambi | 29 Agustus | 22.00 WIB | Pembakaran | Pos Polisi Lalu Lintas Simpang BI |
| Jakarta | 29 Agustus | 22.35 WIB | Pembakaran | Halte TransJakarta Senen Toyota Rangka |

| | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|--|
| Makassar | 30 Agustus | 00.35 WITA | Pembakaran | Gedung DPRD Sulawesi Selatan |
| Solo | 30 Agustus | 01.30 WIB | Pembakaran | Gedung DPRD Solo |
| Jambi | 30 Agustus | 02.00 WIB | Perusakan | Gedung Kajati Jambi |
| Mataram | 30 Agustus | 12.30 WITA | Pembakaran | Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat |
| Pekalongan | 30 Agustus | 12.10 WIB | Pembakaran | Gedung DPRD Pekalongan |
| Cirebon | 30 Agustus | 13.00 WIB | Pembakaran | Gedung DPRD Cirebon |
| Cirebon | 30 Agustus | 13.30 WIB | Perusakan | Pos Polantas Sumber |
| Cirebon | 30 Agustus | 13.30 WIB | Perusakan | Polsek Sumber |
| Jakarta | 30 Agustus | 15.00 WIB | Penjarahan | Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni |
| Serang | 30 Agustus | 16.30 WIB | Pembakaran | Pos Polisi Ciceri |
| Banyumas | 30 Agustus | 16.51 WIB | Penjarahan | Gedung Pemkab Banyumas |
| Kediri | 30 Agustus | 19.00 WIB | Pembakaran | Gedung DPRD Kota Kediri |
| Kediri | 30 Agustus | 20.00 WIB | Pembakaran | Gedung Pemkab Kediri |
| Surabaya | 30 Agustus | 21.00 WIB | Pembakaran | Gedung Negara Grahadi |
| Kediri | 30 Agustus | 21.30 WIB | Penjarahan | Samsat Katang |
| Jakarta | 30 Agustus | 22.00 WIB | Penjarahan | Rumah Anggota DPR Eko Hendro Purnomo |
| Jakarta | 30 Agustus | 23.00 WIB | Penjarahan | Rumah Anggota DPR Surya Utama |
| Jepara | 31 Agustus | 00.50 WIB | Pembakaran | Gedung DPRD Jepara |
| Jakarta | 31 Agustus | 01.00 WIB | Penjarahan | Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati |
| Jakarta | 31 Agustus | 16.30 WIB | Pembakaran | Markas Gegana Brimob Polda Metro Jaya |
| Bekasi | 31 Agustus | 20.46 WIB | Perusakan | Polres Metro Bekasi |
| Bandung | 1 September | 17.15 WIB | Perusakan | Gedung DPRD Jawa Barat |

Tabel 1. Daftar eskalasi penjarahan, perusakan, dan pembakaran kantor dan fasilitas publik serta kediaman pejabat negara selama demonstrasi Agustus 2025

III.B. Pengepungan Mako Brimob Kwitang

105. Demonstrasi yang sejak awal terfokus di DPR dengan jumlah massa terbatas berubah arah setelah kabar pembunuhan Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 malam. Demonstrasi meluas ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan tuntutan yang membesar dari terpusat pada perbaikan kebijakan ke pertanggungjawaban penegak hukum atas pembunuhan Affan Kurniawan yang dinyatakan meninggal sekitar pukul 19.58 di RSCM.
106. Pada 28 Agustus 2025 sekitar pukul 19.30–20.30 WIB, massa dan warga sekitar bersepeda motor yang menyaksikan pembunuhan Affan Kurniawan mengejar rantis Brimob berpelat Polri 17713-VII. Massa mengejar dari area Will Fitness Bendungan Hilir dan Gereja Kristen Protestan Angkola Penjernihan menuju perempatan Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, berbelok ke Jalan K. H. Mas Mansyur, lalu melintasi Jalan Layang Kasablanka, sebelum akhirnya masuk ke Markas Komando (Mako) Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.⁷⁶

⁷⁶ TikTok @vitzyyyyyyy, https://www.tiktok.com/@vitzyyyyyyy/video/7543628646255283462?_t=ZS-8zJfCLVFo85&_r=1, 28 Agustus 2025.

107. Sekitar pukul 22.00 WIB, ratusan orang massa aksi telah berkumpul di depan Mako Brimob Kwitang.⁷⁷ Massa terdiri atas demonstran dan pengemudi ojol yang bersolidaritas terhadap sejawatnya yang menjadi korban. Menjelang pukul 22.40 WIB, kawasan Mako Brimob Kwitang semakin dipadati massa. Sekitar pukul 23.30 WIB, mahasiswa, warga sekitar, dan elemen lain terus berdatangan meskipun hujan gerimis turun.⁷⁸ Mereka datang setelah mendengar pembunuhan Affan Kurniawan karena dilindas rantis Brimob.⁷⁹
108. Pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 00.10 WIB, rombongan personel Brimob bermotor keluar dari Mako Brimob Kwitang untuk melakukan penyisiran di sisi barat dan timur dengan membawa pelontar gas air mata.⁸⁰ Massa, terutama pengemudi ojek daring yang datang setelah mengetahui kematian Affan Kurniawan akibat dilindas rantis Brimob, membentuk barisan penjagaan di sekitar markas. Sekitar pukul 01.30 WIB, massa yang bertahan bergerak menghindari tembakan gas air mata. Mereka terus menyuarkan tuntutan agar tujuh personel Brimob yang berada di dalam rantis pelindas Affan Kurniawan diadili secara hukum. Sekitar pukul 02.30 WIB, massa mengepung Mako Brimob Kwitang dari sisi timur dan barat. Aparat dan massa terlibat saling balas gas air mata dan petasan. Hingga pukul 04.30 WIB, bentrokan sporadis masih terjadi. Suara tembakan gas air mata dan ledakan petasan terdengar berkala, namun sebagian massa tetap bertahan⁸¹ Sekitar pukul 08.45 WIB, polisi kembali menembak gas air mata ke arah massa yang kemudian bergerak mundur ke arah mal Atrium Senen.⁸²
109. Sekitar pukul 12.00 WIB, massa sempat membubarkan diri dari kawasan Mako Brimob Kwitang.⁸³ Sekitar pukul 13.40 WIB, Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, menemui massa dan menyampaikan komitmen untuk mengusut tuntas pembunuhan Affan Kurniawan.⁸⁴ Sekitar pukul 14.47 WIB, polisi kembali menembakkan gas air mata.⁸⁵ Massa dipukul mundur setelah menyalakan petasan dan melempar berbagai benda ke dalam kompleks Mako Brimob.⁸⁶ Hingga sore hari, bentrokan terus berlangsung. Sekitar pukul 16.00 WIB, sebuah mobil berwarna putih dibakar.⁸⁷ Sekitar pukul 16.20 WIB, Gedung Astra Credit Companies (ACC) di Jalan Habib Ali dibakar.⁸⁸ Sekitar pukul 20.00 WIB, sejumlah orang membakar Halte TransJakarta Pasar Senen dan mencoba menjarah fasilitas umum.⁸⁹ Massa juga menjarah perlengkapan di Markas Gegana Polri di Jalan Kramat Raya. Sebelum penjarahan, massa melempar benda keras dan menyalakan petasan. Beberapa orang

⁷⁷ YouTube @suaradotcom, <https://www.youtube.com/watch?v=FDdTIHUUxV4>, 28 Agustus 2025.

⁷⁸ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250828224218-20-1267631/ojol-datangi-mako-brimob-kwitang-dibalas-tembakan-gas-air-mata>, 28 Agustus 2025.

⁷⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/malam-pengepungan-mako-brimob-kwitang-usai-driver-ojol-tewas-2064209>, 29 Agustus 2025.

⁸⁰ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/malam-pengepungan-mako-brimob-kwitang-usai-driver-ojol-tewas-2064209>, 29 Agustus 2025.

⁸¹ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8084855/massa-masih-bertahan-di-mako-brimob-kwitang-sempat-bakar-pospol-senen>, 29 Agustus 2025.

⁸² CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250829111503-20-1267759/brimob-minta-maaf-ke-massa-aksi-demo-kwitang-ramai-disoraki>, 29 Agustus 2025.

⁸³ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8085739/demo-di-mako-brimob-kwitang-memas-saling-balas-petasan-dan-gas-air-mata>, 29 Agustus 2025.

⁸⁴ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8085878/masih-panas-massa-demo-mako-brimob-kwitang-didorong-hingga-halte-transj>, 29 Agustus 2025.

⁸⁵ Tirto, <https://tirto.id/update-demo-jakarta-di-mako-brimob-dpr-polda-sore-hari-ini-hgLL>, 29 Agustus 2025.

⁸⁶ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8085739/demo-di-mako-brimob-kwitang-memas-saling-balas-petasan-dan-gas-air-mata>, 29 Agustus 2025.

⁸⁷ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8085739/demo-di-mako-brimob-kwitang-memas-saling-balas-petasan-dan-gas-air-mata>, 29 Agustus 2025.

⁸⁸ Republika, <https://news.republika.co.id/berita/t1r3h3377/gedung-acc-di-kwitang-terbakar-saksi-ada-yang-ngira-brimob-ngumpet-di-sana>, 29 Agustus 2025.

⁸⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/demo-di-mako-brimob-kwitang-memas-massa-bakar-halte-transjakarta-senen-2064563>, 29 Agustus 2025.

meneriakkan, “Bakar aja, bakar!”⁹⁰ Sejumlah orang melarang warga dan wartawan mengambil gambar. Mereka berdalih tindakan itu untuk “menjaga keamanan rakyat bersama.”



Gambar 20. Mobil bercat putih yang dibakar di sekitar Mako Brimob Kwitang

110. Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 02.25 WIB, bentrokan kembali terjadi setelah massa melempar petasan dan bom molotov ke arah aparat.⁹¹ Pada pagi hari, ratusan demonstran kembali berdatangan, termasuk anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.⁹² Sekitar pukul 07.55 WIB, sisa gas air mata masih terasa pekat di Jalan Raden Saleh hingga mendekati Mako Brimob Kwitang, menyebabkan iritasi pernapasan dan mata.⁹³ Massa kembali berkumpul di sekitar Mako Brimob Kwitang hingga siang hari.⁹⁴ Aparat menahan pergerakan massa di depan Apartemen Capitol Suites.⁹⁵ Sekitar pukul 18.30 WIB, massa kembali melempar botol, batu, petasan, dan kembang api.⁹⁶ Aparat meningkatkan intensitas tembakan gas air mata.⁹⁷ Sekitar pukul 20.50 WIB, massa mendekati Mako Brimob sambil menyalakan petasan dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.⁹⁸ Pada saat yang sama, listrik di sejumlah ruko dan lampu jalan padam.⁹⁹

⁹⁰ NU Online, <https://www.nu.or.id/nasional/massa-aksi-jarah-markas-gegana-dan-bakar-halte-senen-yang-tak-jauh-dari-mako-brimob-kwitang-k1bH1>, 30 Agustus 2025.

⁹¹ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/update-situasi-di-mako-brimob-kwitang-polisi-bermotor-turun-massa-kocar-kacir-25klxzDv83B/1>, 30 Agustus 2025.

⁹² Republika, <https://news.republika.co.id/berita/t1sbyv487/aparat-penjaga-mako-brimob-kepada-pendemo-pagi-ini-tahan-dulu-ayo-sini-sarapan-dulu-part2>, 30 Agustus 2025.

⁹³ IDN Times, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/5-potret-demo-terkini-di-markas-brimob-kwitang-00-7lwyz-6jjkd4>, 30 Agustus 2025.

⁹⁴ Tirto, <https://tirto.id/demo-berlanjut-di-mako-brimob-kwitang-massa-tertahan-barikade-hgNz>, 30 Agustus 2025.

⁹⁵ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250830123951-20-1268224/mako-brimob-kwitang-kembali-didemo-Sabtu-siang>, 30 Agustus 2025.

⁹⁶ Tribun News, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/30/update-kericuhan-pecah-lagi-di-mako-brimob-kwitang-TNI-mundur-situasi-gelap-dan-mencekam>, 30 Agustus 2025.

⁹⁷ Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/6146670/bentrokan-massa-aksi-demo-kembali-pecah-di-depan-mako-brimob-kwitang-sabtu-malam-30-agustus-2025>, 30 Agustus 2025.

⁹⁸ Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2918314/potensi-ricuh-tinggi-berikut-titik-demo-di-jakarta-malam-ini>, 30 Agustus 2025.

⁹⁹ Kumparan, kumparan.com/kumparannews/listrik-di-jalan-kramat-kwitang-arah-senen-padam-suasana-gelap-gulita-2514wp9FzZy/1, 30 Agustus 2025.

Sekitar pukul 20.55 WIB, beredar video instruksi Kapolri untuk menindak tegas massa di Mako Brimob, termasuk dengan peluru karet. Bentrokan berlanjut hingga sekitar pukul 23.00 WIB, sebelum massa akhirnya dipukul mundur dan mulai meninggalkan lokasi.¹⁰⁰

“Haram hukumnya yang namanya Mako diserang—haram hukumnya. Dan kalau kemudian mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak.” — Kapolri Listyo Sigit Prabowo.¹⁰¹

111. Pada 31 Agustus 2025 sekitar pukul 00.28 WIB, pemadaman listrik terjadi di sejumlah area dari Tugu Tani hingga Senen. Pada saat yang sama, beredar isu darurat militer. Massa yang terus ditembaki gas air mata bergerak ke perempatan Pasar Senen. Bersamaan dengan isu darurat militer, jalanan dari Pasar Senen hingga Pertigaan Universitas Indonesia Jakarta Pusat padam. Massa berlarian menuju kawasan sekitar Gedung YLBHI untuk mencari perlindungan.

III.C. Bentrokan di Gedung DPR

112. Pada 29 Agustus 2025 pukul 09.04 WIB, puluhan sopir ojol berkumpul di Gerbang Utama DPR.¹⁰² Sekitar pukul 15.00 WIB, rombongan mahasiswa yang membawa poster terus memadati Gerbang Utama DPR dan bergabung dengan masyarakat umum yang telah lebih dulu beraksi tanpa atribut.¹⁰³ Sekitar pukul 17.00 WIB, massa aksi merobohkan pagar dan kemudian memereteli pagar besi pilar Gerbang Utama Gedung DPR.¹⁰⁴ Sekitar pukul 20.37 WIB, massa yang mencoba memasuki area Gedung DPR dihalau oleh personel TNI.¹⁰⁵
113. Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 01.15 WIB, massa berupaya menjatuhkan tiang kamera tilang elektronik di depan Gerbang Utama Gedung DPR.¹⁰⁶ Sekitar pukul 03.30 WIB, kendaraan TNI dan mobil pemadam kebakaran memadamkan api di sejumlah titik sekitar Gedung DPR di tengah letusan petasan dan tembakan gas air mata.¹⁰⁷ Sekitar pukul 05.00 WIB, sebagian massa masih bertahan di depan Gerbang Utama Gedung DPR, meskipun mayoritas mulai meninggalkan lokasi.
114. Sekitar pukul 06.00 WIB, massa yang tersisa di area Gedung DPR berkurang hingga sekitar sepuluh orang. Sekitar pukul 06.30 WIB, aparat kepolisian tetap berjaga untuk mencegah massa yang tersisa memasuki kompleks parlemen.¹⁰⁸

¹⁰⁰ Tirto, <https://tirto.id/jalanan-mako-brimob-kwitang-gelap-bentrokan-masih-berlanjut-hgPC>, 30 Agustus 2025; Antara, <https://kalsel.antaranews.com/berita/481941/aparat-pukul-mundur-demonstran-di-mako-brimob-kwitang>, 30 Agustus 2025.

¹⁰¹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/kapolri-perintahkan-tindak-tegas-perusuh-yang-menerobos-mako-brimob-2064943>, 31 Agustus 2025.

¹⁰² Tempo, <https://www.tempo.co/politik/situasi-terkini-di-gedung-dpr-setelah-pengemudi-ojol-tewas-dilindas-brimob>, 29 Agustus 2025.

¹⁰³ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250829152652-20-1267913/massa-demo-mulai-datangi-dpr-tuntut-parlemen-dan-aparat-tak-arogan>, 29 Agustus 2025; Tirto, <https://tirto.id/update-demo-jakarta-di-mako-brimob-dpr-polda-sore-hari-ini-hgLL>, 29 Agustus 2025; CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250829171310-7-662673/begini-kondisi-terkini-demo-di-depan-gedung-dpr-jalan-tol-ditutup/2>, 29 Agustus 2025.

¹⁰⁴ Tirto, <https://tirto.id/update-demo-jakarta-di-mako-brimob-dpr-polda-sore-hari-ini-hgLL>, 29 Agustus 2025.

¹⁰⁵ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8086633/demo-di-dpr-makin-panas-gas-air-mata-dibalas-petasan-oleh-massa>, 29 Agustus 2025.

¹⁰⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/rangkaian-demo-setelah-affan-kurniawan-tewas-dpr-hingga-markas-brimob-diserbu-massa-2064688>, 30 Agustus 2025.

¹⁰⁷ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/massa-demo-di-dpr-masih-bertahan-hingga-sabtu-pagi-2064655>, 30 Agustus 2025.

¹⁰⁸ Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2918085/demo-ricuh-ini-akses-tol-jakarta-yang-masih-ditutup>, 30 Agustus 2025.

115. Sekitar pukul 13.30 WIB, massa kembali mulai berkumpul di sekitar Gedung DPR.¹⁰⁹ Sekitar pukul 16.30 WIB, aparat menyiagakan dua unit kendaraan meriam air dan memasang barikade kawat berduri di Gerbang Utama Gedung DPR di tengah situasi yang masih tegang.¹¹⁰
116. Sekitar pukul 20.52 WIB, massa beberapa kali menyalakan petasan ketika mendekati barikade. Aparat merespons dengan tembakan gas air mata. Sekitar pukul 21.10 WIB, ketegangan meningkat setelah terjadi aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat kepolisian.¹¹¹
117. Sekitar pukul 21.34 WIB, massa semakin intens melempar petasan ke arah barisan aparat yang terus bertahan sambil membalas dengan tembakan gas air mata.¹¹²

III.D. Penyerangan kantor pemerintahan dan kepolisian

118. Menurut keterangan Kepala Bagian Pembinaan Operasional Polres Jakarta Utara, aparat kepolisian mulai memprediksi potensi terjadinya kerusuhan sejak 27 Agustus 2025.¹¹³ Pada 29 Agustus 2025, Polres Jakarta Utara melakukan pemantauan dengan menugaskan aparat tidak berseragam.¹¹⁴
119. Pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 14.45 WIB, massa mulai berdatangan ke depan Markas Polda Metro Jaya. Kepolisian menutup sementara arus lalu lintas menuju pusat kawasan bisnis Sudirman (SCBD). Sekitar pukul 14.50 WIB, massa menyalakan petasan dan melempar benda ke arah markas. Aparat merespons dengan mendorong massa mundur menggunakan gas air mata.¹¹⁵ Sekitar pukul 15.00 WIB, massa menghadang sebuah mobil yang hendak keluar dari area Polda Metro Jaya dan memaksanya mundur kembali ke dalam.¹¹⁶ Sekitar pukul 15.20 WIB, massa yang terdiri dari pengemudi ojol, mahasiswa lintas universitas, dan masyarakat umum berkumpul di Gerbang Polda Metro Jaya.¹¹⁷ Sekitar pukul 15.35 WIB, massa yang membesar menghambat Jalan Gatot Subroto sehingga hanya dapat dilalui satu baris kendaraan.¹¹⁸ Sekitar pukul 15.55 WIB, massa mahasiswa berhasil masuk ke halaman Polda Metro Jaya dan berorasi.¹¹⁹ Sekitar pukul 16.50 WIB, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal (Irjen) Asep Edi Suheri, menemui massa aksi yang bertahan.¹²⁰ Sekitar pukul 19.00 WIB, aparat kembali menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.¹²¹ Sekitar pukul 23.00 WIB, dilaporkan terdapat 3–4 orang tidak dikenal yang membagikan bom molotov kepada massa di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Semanggi.

¹⁰⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/situasi-di-depan-dpr-siang-ini-massa-demo-kembali-berdatangan-2064813>, 30 Agustus 2025.

¹¹⁰ Kompas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/30/17185841/aksi-di-depan-dpr-memas-massa-bertahan-meski-disemprot-water-cannon>, 30 Agustus 2025.

¹¹¹ Kompas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/30/21384861/situasi-demo-di-depan-dpr-memas-diwarnai-gas-air-mata-dan-petasan>, 30 Agustus 2025.

¹¹² Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2918314/potensi-ricuh-tinggi-berikut-titik-demo-di-jakarta>, 30 Agustus 2025.

¹¹³ Keterangan polisi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 4 Desember 2025.

¹¹⁴ Keterangan polisi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 4 Desember 2025.

¹¹⁵ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8085906/situasi-demo-29-agustus-terkini-di-kwitang-polda-metro-dan-depan-dpr>, 29 Agustus 2025.

¹¹⁶ Tirto, <https://tirto.id/update-demo-jakarta-di-mako-brimob-dpr-polda-sore-hari-ini-hgLL>, 29 Agustus 2025.

¹¹⁷ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8085909/jalan-gatot-subroto-tersendat-imbis-demo-mahasiswa-di-polda-metro-jaya>, 29 Agustus 2025.

¹¹⁸ Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/6145740/demo-mahasiswa-di-polda-metro-mobil-provost-hancur-diamuk-massa>, 29 Agustus 2025.

¹¹⁹ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/massa-demo-polda-metro-tutup-jalan-semanggi-arrah-senayan-pengendara-putar-balik-25kb68YLMlq>, 29 Agustus 2025.

¹²⁰ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8086206/massa-demo-bakar-barier-dan-pagar-di-polda-metro-jaya>, 29 Agustus 2025.

¹²¹ Sindo, <https://daerah.sindonews.com/read/1613219/6/aksi-demo-di-polda-metro-jaya-polisi-hujani-balik-pengunjuk-rasa-pakai-gas-air-mata-1756469305>, 29 Agustus 2025.

120. Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, beredar poster seruan di media sosial yang mengajak massa untuk mengeruduk Polres dan Kantor Samsat Jakarta Utara.¹²² Di media sosial, poster tersebut dinilai sebagai provokasi yang mencurigakan dan tidak berasal dari massa aksi organik.¹²³ Sekitar pukul 20.00 WIB, Polres Jakarta Utara menggelar apel internal menyusul peristiwa penjarahan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di wilayah Tanjung Priok.¹²⁴ Sekitar pukul 22.00 WIB, sebuah konvoi yang terdiri atas kurang lebih 30 sepeda motor melintas di sekitar Polres Jakarta Utara. Konvoi tersebut ‘menggeber’ kendaraan dan melemparkan bom molotov, petasan, serta batu ke arah kantor Polres Jakarta Utara.



Gambar 21 Poster seruan aksi ‘geruduk’ Polres dan Samsat Jakarta Utara di media sosial

121. Di Surabaya, kelanjutan demonstrasi pada 31 Agustus 2025 ditandai dengan membakar Polsek Tegalsari dan penjarahan barang-barang di dalamnya.¹²⁵ Total sekitar 29 pos polisi di Kota Surabaya dilaporkan dirusak massa. Kekerasan massa dilaporkan banyak menasar kendaraan polisi (bukan TNI) dan berpindah-pindah dalam bentuk konvoi bermotor.

III.D. Pembakaran dan penjarahan

122. Pada 28 Agustus 2025 pukul 21.33 WIB, seorang anggota grup NIKA yang identitasnya tidak diketahui mengirim pesan berisi informasi mengenai dugaan rencana pengiriman molotov ke rumah pejabat. Pada pukul 22.52 WIB, anggota grup lain menanggapi dengan menyebut beberapa nama pejabat, termasuk Ahmad Sahroni, Sri Mulyani Indrawati, dan “semua anggota DPR.” Pesan tersebut tidak mendapat respons dari anggota grup. KPF juga tidak menemukan penyebaran alamat atau koordinasi penjarahan rumah pejabat yang disebutkan.
123. Pada 29 Agustus 2025, di tengah eskalasi demonstrasi dan bentrokan di sekitar Mako Brimob Kwitang, aksi penjarahan mulai terjadi di sejumlah lokasi. Di kawasan Senen, penjarahan berlangsung pada Jumat sore setelah Gedung ACC dibakar. Massa awalnya menduga terdapat anggota Brimob yang bersembunyi di gedung tersebut. Sebagian massa kemudian memasuki Gedung ACC dan mengambil berbagai barang seperti meja kayu, monitor komputer, kotak logam, sepeda lipat, dispenser air, dan lemari. Barang-barang tersebut

¹²² Keterangan polisi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 4 Desember 2025.

¹²³ X @howtodresvwell, <https://x.com/howtodresvwell/status/1962122433370177620?s=20>, 31 Agustus 2025.

¹²⁴ Keterangan polisi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 4 Desember 2025.

¹²⁵ YouTube @TribunNewsSurya, <https://www.youtube.com/watch?v=0oNzWaaBGIs>, 31 Agustus 2025.

dibawa ke arah Stasiun Senen.¹²⁶ Sejumlah pelaku dilaporkan mengembalikan barang ke Gedung ACC setelah situasi mereda.

124. Pada 30 Agustus 2025, Hotel Sahid Surabaya mengalami kerusakan akibat lemparan batu, beton, dan tempat sampah ke arah lobi kaca. Sementara itu, sisi barat Gedung Negara Grahadi di Surabaya mengalami pembakaran dan penjarahan. Ruang wartawan dirusak dan sejumlah komputer dibawa serta dihancurkan. Penjarahan dan perusakan juga terjadi di beberapa kantor DPRD dan pemerintah daerah di Jawa Timur, termasuk Kediri dan Blitar.
125. **Penjarahan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni:** Pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, warga lokal berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Pertemuan Pemuda dan Warga Tanjung Priok: Lebih Cerdas, Lebih Intelek, Lebih Beradab, Lebih Beretika, Lebih Berwibawa.” Sebelumnya, alamat rumah anggota DPR Jakarta Sahroni di Tanjung Priok beredar luas di media sosial. Penyebaran ini terjadi setelah Sahroni menyebut demonstran sebagai “orang tertolol sedunia,” yang memicu kemarahan publik. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan desakan agar Jakarta Sahroni dicopot dari DPR dan menyatakan kekhawatiran atas potensi kerusuhan. Rombongan kemudian bergerak ke depan rumah Jakarta Sahroni, berorasi singkat, lalu membubarkan diri setelah menutup portal menuju lokasi. Tak lama kemudian, dari gang lain di sekitar lokasi, muncul kerumunan baru yang memprovokasi agar terjadi penjarahan dan pembakaran rumah Jakarta Sahroni, disusul oleh rombongan lain dari arah selatan Jalan Swadaya. Salah satu individu dalam kerumunan baru terlihat berkomunikasi intens melalui telepon genggam ketika massa dihadang aparat. Individu tersebut kemudian berlari menerobos portal dan mendorong aparat yang belakangan diketahui sebagai Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Jakarta Utara. Massa kemudian memasuki rumah Jakarta Sahroni dan memulai penjarahan disertai pelemparan benda keras. Individu yang pertama kali mendobrak portal terlihat hanya memprovokasi dan merekam kejadian tanpa ikut menjarah. Warga sekitar dan massa dari luar kampung kemudian ikut terprovokasi. Penjarahan berlangsung hingga malam hari. Dalam situasi tersebut, sulit membedakan antara warga lokal yang terbawa situasi dan massa dari luar yang datang dengan tujuan spesifik untuk menjarah.



Gambar 22. Kolase foto suasana penjarahan di rumah anggota DPR Ahmad Sahroni

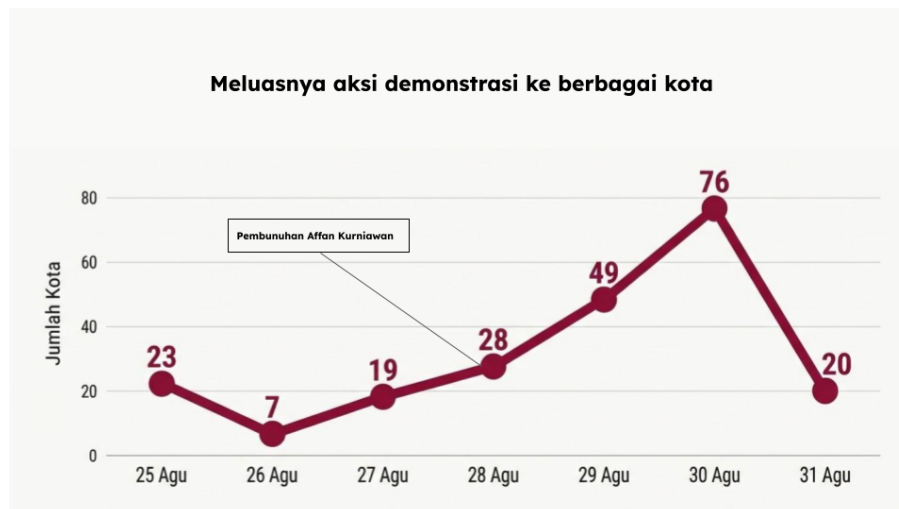
¹²⁶ Republika, <https://news.republika.co.id/berita/t1r3h3377/gedung-acc-di-kwitang-terbakar-saksi-ada-yang-ngira-brimob-ngumpet-di-sana-part2>, 29 Agustus 2025; Tempo, <https://cekfakta.tempo.co/fakta/3795/sebagian-benar-penjarahan-di-sekitar-mako-brimob-kwitang-29-agustus-2025>, 31 Agustus 2025.

126. **Penjarahan rumah anggota DPR Surya Utama:** Pada 30 Agustus 2025 sore hari, petugas keamanan di Duren Sawit, Jakarta Timur, telah menerima informasi mengenai rencana penjarahan rumah anggota DPR Surya Utama alias Uya Kuya. Sekitar pukul 18.00 WIB, massa konvoi bermotor mulai berkumpul di depan Alfamidi Teluk Mandar. Sebagian mengenakan masker dan sepatu, berbonceng tiga, dan menggunakan motor berpelat B (Jakarta), K (Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, dan Grobogan), dan F (Bogor, Sukabumi, dan Cianjur). Menjelang pukul 20.00 WIB, massa berkumpul di depan rumah Surya Utama. Mereka tampak bertubuh besar, berambut cepak, dan melakukan pemantauan secara bergantian. Antara pukul 20.00–22.00 WIB, pagar rumah dirusak dan penjarahan terjadi. Sekitar pukul 23.00 WIB, gelombang kedua massa kembali berkumpul di Alfamidi Teluk Mandar. Massa ini terlihat aktif memeriksa telepon genggamnya. Ketika aparat datang, terjadi saling caci maki antara massa dan polisi. Bentrokan berlangsung disertai lemparan suar api dan baru mereda setelah personel TNI berseragam tiba di lokasi.
127. **Penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati:** Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Ketua RT 05 sekaligus Koordinator Keamanan RW 10 Pondok Karya Bintaro, Iqbal Rezeki Awal, menerima banyak pesan berisi ajakan menjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di media sosial. Sri Mulyani Indrawati menghubungi Sjafrie Sjamsoeddin untuk meminta bantuan pengamanan. Sekitar pukul 21.00 WIB, massa konvoi bermotor dengan pola serupa penjarahan sebelumnya berkumpul di Taman Mandar Utama Bintaro dan area ruko sekitar kompleks kediaman Sri Mulyani Indrawati. Sekitar pukul 21.30 WIB, enam personel Komando Rayon Militer (Koramil) Bintaro tiba dan berjaga di lokasi. Sekitar pukul 23.00 WIB, massa mencoba masuk ke kompleks dengan dalih menuju SMPN 13 Tangerang Selatan, namun dihalau petugas keamanan. Tak lama berselang, ratusan massa menerobos masuk sambil membawa bambu, kayu bekas umbul-umbul, dan tiang lampu jalan. Di tengah kejadian, warga melaporkan sebuah *drone* terbang dari luar kompleks menuju Pos Mandar IX. Pada 31 Agustus 2025 sekitar pukul 01.28 WIB, gelombang kedua massa kembali menyerbu. Seorang pria yang mengenakan jaket ojek daring dalam kondisi terbalik terlihat memberi aba-aba sebelum massa masuk ke rumah dan melakukan penjarahan. Dalam kekacauan, Sarwono, petugas keamanan RT 02, dipukul menggunakan bambu saat berusaha menghadang massa.
128. **Penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbach:** Setelah menjarah rumah Menteri Keuangan, massa penjarah bergerak menuju rumah anggota DPR Nafa Urbach yang juga berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Sekitar 50 motor berkonvoi dari satu kompleks ke kompleks lain menjelang subuh 31 Agustus 2025. Sekitar pukul 05.00 WIB, konvoi berhenti di depan perumahan Kebayoran Height. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan Mercedes-Benz merah muncul dengan pelat nomor yang sempat ditutupi kain diikuti massa menuju klaster Kebayoran Essence. Seorang pria turun dari mobil dan memprovokasi massa untuk mendobrak portal kompleks. Ketika warga mencoba merekam kejadian, salah satu orang mengintimidasi mereka agar mematikan kamera. Pelat mobil kemudian terbuka dan terbaca bernomor AD 1 IW (Solo). Polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka penjarahan rumah Nafa Urbach. Hingga laporan ini disusun, tidak ditemukan informasi mengenai penangkapan atau pencarian terhadap pengendara mobil Mercedes-Benz merah berpelat AD 1 IW, yang diketahui mengarah pada kendaraan milik seorang pengusaha mebel di Boyolali.

III.E. Pola kerusuhan di berbagai daerah

129. **Kerusuhan di Bandung:** Pada Jumat, 29 Agustus 2025, massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, sopir ojol, dan masyarakat umum berkumpul di depan DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro untuk memprotes kebijakan pemerintah serta menyatakan solidaritas atas pembunuhan Affan Kurniawan di Jakarta pada malam sebelumnya. Aksi yang pada awalnya berupa penyampaian aspirasi berubah ricuh pada malam hari. Massa melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas umum, bangunan, dan kendaraan di sejumlah titik, termasuk

beberapa bangunan bersejarah.¹²⁷ Dalam eskalasi tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi, Mayjen Kosasih, datang ke lokasi untuk menemui massa dan mengupayakan dialog. Ia dilaporkan turut menjadi sasaran lemparan benda oleh massa.¹²⁸



130. **Kerusuhan di Makassar:** Demonstrasi pada 29 Agustus 2025 berakhir ricuh. Sekitar pukul 16.00 WITA, 18 orang dari Universitas Sawerigading (Unsa) melakukan aksi di sekitar Masjid Raya Makassar dengan menutup jalan dan membakar ban.¹²⁹ Sekitar pukul 17.00 WITA, massa Unsa bergabung dengan mahasiswa dari Universitas Bosowa dan Universitas Muslim Indonesia (UMI). Aksi berlangsung di beberapa titik, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Sulsel, Polda Sulsel, dan ruas jalan utama. Setelah pukul 19.21 WITA, massa Unsa bergerak menuju DPRD Kota Makassar dan berlanjut ke DPRD Provinsi Sulsel. Sekitar pukul 20.00 WITA, orasi berlangsung selama 30 menit. Setelah itu, massa terus bertambah, termasuk anak di bawah umur. Dari kerumunan, terdengar seruan untuk menjebol pagar, diikuti pelemparan batu dan benda-benda lain.¹³⁰ Personel TNI berjaga di bagian depan gedung, sementara kepolisian berada di bagian dalam. Sekitar pukul 20.30 WITA, sekitar 30 orang memaksa masuk dengan merobohkan pagar dan melempar bom molotov ke arah pos jaga serta bagian depan gedung. Sekitar 10 orang menyeret empat motor dari belakang pos jaga, menumpuk, lalu membakarnya. Sebagian massa naik melalui tangga darurat, menjarah barang, dan membakar gorden.¹³¹ Di sisi lain, di DPRD Kota Makassar, rapat paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 berlangsung hingga sekitar pukul 21.30 WITA.¹³² Sekitar pukul 22.10 WITA, serangan terhadap gedung DPRD Kota Makassar dilaporkan berlangsung tanpa pengamanan kepolisian yang memadai.¹³³ Kerusuhan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka setelah sejumlah individu terjebak dalam kebakaran gedung.¹³⁴ Seorang pelaku pembakaran menggunakan jaket hitam dan penutup wajah dengan tinggi 160–170 cm, sementara satu orang lainnya terlihat memakai alat pelindung diri (APD) kuning-

¹²⁷ Detik, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-8087074/kronologi-aksi-demo-di-bandung-yang-berakhir-rusuh-rumah-hingga-mobil-dibakar>, 30 Agustus 2025.

¹²⁸ Tempo, <https://www.tempo.co/foto/arsip/pangdam-iii-siliwangi-dievakuasi-dari-demo-di-dprd-bandung-2064617>, 29 Agustus 2025.

¹²⁹ Wawancara dengan Nong Kevin.

¹³⁰ Wawancara dengan Muhammad Rizki alias Ikki.

¹³¹ Wawancara dengan Audi Frits Johannes Uber.

¹³² Detik, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8094290/kronologi-gedung-dprd-makassar-dibakar-usai-rapat-paripurna-versi-legislator>, 3 September 2026.

¹³³ Detik, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8094290/kronologi-gedung-dprd-makassar-dibakar-usai-rapat-paripurna-versi-legislator>, 3 September 2026.

¹³⁴ Wawancara dengan Audi Frits Johannes Uber.

hijau dan aktif melempar benda di sekitar pos penjagaan lalu lintas.¹³⁵ Seorang massa aksi mengklaim adanya orang tak dikenal yang memberi uang sebesar Rp20.000 sebagai “uang dari ojol buat beli bensin.”¹³⁶

131. **Kerusuhan di Surabaya:** Demonstrasi pada 29 Agustus 2025 berawal di depan Gedung Negara Graha di dalam bentuk orasi dari berbagai elemen massa. Sekitar pukul 15.00 WIB, massa mulai menyerang Gedung Graha setelah pagar kawat berduri berhasil dibuka. Sejumlah orang melakukan pelemparan batu dan bom molotov ke arah aparat. Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 09.30 WIB, aksi kembali berlangsung dengan sasaran Polda Jawa Timur. Aksi ini diawali *long march* sekitar 1.000 mahasiswa dan berlangsung relatif damai. Massa mahasiswa kemudian membubarkan diri setelah tercapai kesepakatan dengan Kapolda Jawa Timur terkait pembebasan massa aksi yang sebelumnya ditangkap. Pada sore hari, massa mahasiswa kembali berkumpul di Polrestabes Surabaya untuk menuntut pembebasan peserta aksi. Di waktu yang hampir bersamaan, kelompok massa berpakaian serba hitam mulai berdatangan dari berbagai arah. Pada malam harinya, Gedung Graha kembali diserang. Bagian barat gedung dibakar dan sejumlah inventaris pemerintah dijarah. Pada fase ini, aparat TNI melakukan penjagaan di sekitar gedung. Pangdam V Brawijaya dilaporkan sempat keluar dan berdialog dengan massa, yang disambut yel-yel “ljo! ljo! ljo!” sebelum ia kembali masuk ke dalam area gedung. Sekitar pukul 20.00 WIB, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui massa. Setelah itu, massa meneriakkan “Kita tunggu sampai jam 21.00 WIB!”¹³⁷

Gambar 23. Pangdam V Brawijaya menemui demonstran di Surabaya



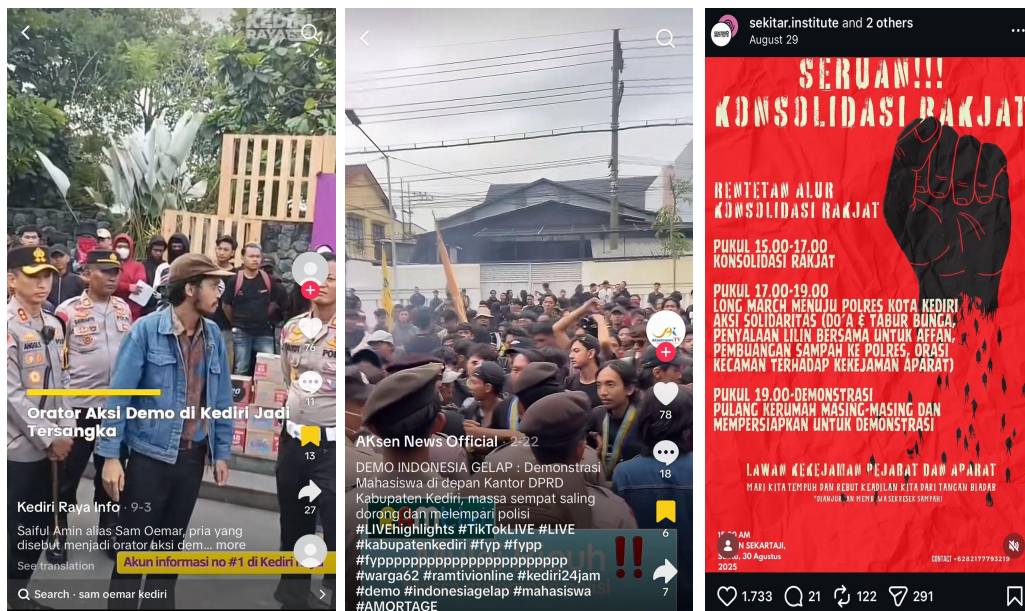
132. **Kerusuhan di Malang:** Demonstrasi pada 29 Agustus 2025 berlangsung pukul 15.00–18.00 WIB. Aksi diikuti ratusan sopir ojol, mahasiswa, dan masyarakat yang berkumpul di Alun-Alun Merdeka Kota Malang untuk berdoa bersama dan menyalakan lilin sebagai solidaritas atas pembunuhan Affan Kurniawan. Sekitar pukul 18.30 WIB, massa bergeser menuju Polresta Malang untuk melanjutkan aksi. Kapolres Malang Kota bersama ratusan personel TNI menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf atas meninggalnya Affan Kurniawan. Aksi berubah ricuh sekitar pukul 22.00 WIB, setelah massa mulai melempar batu, membakar baliho, merusak spanduk, serta mencoret-coret tembok Polresta Malang.

¹³⁵ Wawancara dengan Audi Frits Johannes Uber.

¹³⁶ Wawancara dengan Nong Kevin.

¹³⁷ YouTube @TribunMataraman, <https://www.youtube.com/watch?v=Q3BMTWfW3QU>, 3 September 2025.

133. **Kerusuhan di Kediri:** Saiful Amin alias Sam Oemar (Sekitar Institute) mengirim pemberitahuan aksi dengan kop surat Koalisi Masyarakat Sipil kepada Polresta Kediri pada 29 Agustus 2025. Surat itu menyampaikan rencana konsolidasi dan aksi solidaritas terhadap situasi sosial-politik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, termasuk solidaritas atas pembunuhan Affan Kurniawan dan korban-korban lain. Pada 30 Agustus 2025, demonstrasi berlangsung pukul 15.00–18.00 WIB dengan titik utama di Taman Sekartaji dan diikuti massa sekitar 500 orang. Sekitar pukul 15.15 WIB, terjadi perdebatan antara Saiful Amin alias Sam Oemar dan pihak kepolisian. Massa berada di belakang Saiful Amin alias Sam Oemar, sementara kelompok lain yang tidak berada di bawah koordinasinya berkumpul di sisi lain. Sekitar pukul 16.00 WIB, massa berjalan kaki sekitar 500 meter menuju Kantor Polresta Kediri. Aksi diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya dan orasi. Sekitar pukul 16.30 WIB, situasi memanas ketika massa tak dikenal dari sisi utara melempar batu dan kayu, memicu kerusuhan selama kurang lebih 30 menit. Penyerangan terhadap Polresta Kediri kemudian direspons dengan penggunaan meriam air.¹³⁸ Saiful Amin alias Sam Oemar berupaya menenangkan massa menggunakan mobil ambulans dan massa yang berada di bawah koordinasinya membubarkan diri dan menyatakan aksi selesai.



Gambar 24, 25, dan 26. Suasana demonstrasi dan poster seruan aksi di Kediri

Sekitar pukul 17.57 WIB, massa menyatakan selesai dan mundur dari lokasi aksi.¹³⁹ Namun, seorang pria tak dikenal berpakaian hitam muncul dari barisan aksi dan berteriak agar massa melanjutkan aksi.¹⁴⁰

"Pimpinan saya ambil alih. Kita geser ke DPRD Kota sekarang!" — Orang tak dikenal yang mengambil alih komando massa di Kediri

Sekitar pukul 18.00 WIB, sebagian massa bergerak ke Gedung DPRD Kota Kediri. Tanpa penjagaan yang ketat, gedung tersebut kemudian dibakar dan dijarah setelah seseorang tak dikenal berteriak, "Bakar wae!"¹⁴¹ Kerusuhan terus meluas ke berbagai titik hingga larut malam sekitar pukul 22.40 WIB.¹⁴²

¹³⁸ YouTube @tribunnews, <https://www.youtube.com/watch?v=hMU5MAd2Urk>, 30 Agustus 2025.

¹³⁹ LBH Surabaya, "Kronologis Penangkapan dan Penetapan Saiful Amin - Sam Oemar," 20 September 2025.

¹⁴⁰ Wawancara dengan informan yang identitasnya dirahasiakan.

¹⁴¹ YouTube @tribunvideo, <https://www.youtube.com/live/Xi84vqjHU9c>, 30 Agustus 2025.

¹⁴² Detik, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8088734/fakta-fakta-kerusuhan-di-kediri-saat-gedung-dprd-dan-pemkab-hangus-terbakar>, 31 Agustus 2025



Gambar 27 dan 28. Tangkapan layar video orang tak dikenal yang mengambil alih komando dan memprovokasi massa aksi untuk terus melanjutkan demonstrasi

134. **Kerusuhan di Jember:** Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) menggelar aksi menyalakan lilin di depan Polres Jember pada 29 Agustus 2025 malam. Ketua FKJOB, Deddy Novianto, menyampaikan tuntutan pengusutan tuntas pembunuhan Affan Kurniawan. Aksi lanjutan dilakukan pada 30 Agustus 2025 oleh Aliansi Amarah Rakyat Jember. Sekitar pukul 16.00 WIB, sekitar 500 orang bergerak menuju DPRD Jember dan berhenti di Polres Jember dengan lima tuntutan: (a) bebaskan massa aksi yang ditahan; (b) usut dan adili aparat pembunuh, termasuk pemberi perintah; (c) evaluasi total Polri; (d) copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo; dan (e) hentikan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Orang tak dikenal berkaus polo merusak papan neon Polres Jember dan kemudian membaaur ke barisan massa aksi. Sementara itu, massa mahasiswa mengamankan seseorang yang membawa tas berisi batu dan mengaku berasal dari Sidoarjo. Sekitar pukul 17.00 WIB, koordinator lapangan aksi, Aziz, menyatakan demonstrasi selesai. Namun, sebagian kecil massa tetap melakukan pelemparan dan pembakaran tenda setelah seseorang mengambil alih mobil komando. Dalam situasi tersebut terdengar seruan, “Perjuangan kita belum selesai, ada satu poin yang harus ditandatangani, yaitu pencopotan Kapolri!”
135. **Kerusuhan di Semarang:** Demonstrasi pada 29 Agustus 2025 dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk menyampaikan orasi dan membacakan tuntutan. Sekitar pukul 17.30 WIB, situasi berubah ricuh dan aparat memukul mundur massa ke Jalan Pahlawan. Sekitar pukul 19.00 WIB, massa bergerak menuju DPRD Jawa Tengah. Dari arah belakang gedung atau area Taman Indonesia Kaya, puluhan orang masuk ke Gedung DPRD tanpa perlawanan karena tidak ada petugas yang berjaga sambil melempar benda keras. Salah satu massa aksi dengan penutup wajah kemudian menyiram bensin ke sebuah mobil dan membakarnya. Dua mobil lain turut dibakar. Dalam kurun waktu 30 menit, massa menyerang Gedung DPRD dan merusak belasan kendaraan dengan lemparan batu.
136. **Kerusuhan di Solo:** Demonstrasi dimulai pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Mako Brimob Batalyon C Pelopor. Massa menuntut Polri menindak tegas oknum yang bertanggung jawab atas pembunuhan Affan Kurniawan di Jakarta. Kapolres Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, turun langsung menemui demonstran dan menyampaikan permintaan maaf. Setelah pertemuan tersebut, sebagian besar massa tidak membubarkan diri dan bergerak menuju pusat kota. Sekitar pukul 19.00 WIB, massa bergeser ke kawasan Gladag sambil menyalakan dan melempar kembang api ke arah aparat. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata, sementara arus lalu lintas di kawasan Gladag dan Jalan Jenderal Sudirman ditutup. Pada pukul 20.30 WIB, massa bertahan di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka merusak pot tanaman pembatas jalan, mencabut tanaman, dan

membakarnya. Barikade air yang dipasang aparat turut dirusak dan dibakar. Sekitar pukul 21.00 WIB, sebuah truk polisi dibakar di Jalan Slamet Riyadi. Kerumunan terus berdatangan dari arah Laweyan menuju Patung Gladag. Massa bergerak dalam konvoi, membawa bendera merah putih dan mengenakan kaos hitam. Polisi berupaya membubarkan massa yang mulai menyebar ke berbagai titik, termasuk Gladag, Balai Kota, Ngarsopura, dan Keraton Surakarta. Sekitar pukul 22.00 WIB, ribuan orang memadati Gedung DPRD Solo. Suasana memanas setelah massa melempar petasan ke arah gedung. Aparat membalas dengan gas air mata, namun massa kembali maju. Pada pukul 23.00 WIB, jumlah massa terus bertambah dan situasi semakin sulit dikendalikan. Barikade air yang menjadi barikade di sekitar Gedung DPRD dibakar. Sekitar pukul 00.10 WIB, pagar Gedung DPRD dirusak dan dibakar. Massa juga merusak fasilitas umum di sekitar lokasi. Sekitar pukul 01.15 WIB, Gedung DPRD Solo dibakar. Massa terlebih dahulu membakar tumpukan sampah di dekat gedung, lalu menembakkan kembang api ke arah jendela lantai dua, sehingga menjalar ke material bangunan dan menyambar bagian atap.

137. **Kerusuhan di Magelang:** Pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai memadati kompleks Polres Magelang Kota. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa atribut berupa bendera Merah Putih serta simbol yang terkait dengan Jolly Roger One Piece. Setelah berkumpul di depan gerbang, massa mendesak masuk dan polisi merespons dengan membentuk barikade. Sekitar pukul 16.30 WIB, massa mulai melempari batu dan menyalakan petasan ke arah Polres. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata, namun massa bertahan. Menjelang pukul 18.00 WIB, sebagian massa mulai membubarkan diri. Sekitar pukul 18.40 WIB, demonstran kembali melanjutkan aksi dengan melempar batu dan benda lain ke pintu sisi timur Polres. Bentrokan berlangsung hingga sekitar pukul 23.00 WIB.¹⁴³
138. **Kerusuhan di Palembang:** Mahasiswa berdemonstrasi pada 29–30 Agustus 2025 dan berkoordinasi dengan LBH Palembang. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan turun langsung menemui massa. Pada fase ini, aksi berjalan damai tanpa insiden kekerasan. Situasi berubah pada 30 Agustus malam sekitar pukul 22.30 WIB ketika terjadi pelemparan bom molotov. Sekitar pukul 23.00 WIB, kira-kira 50 sepeda motor berkonvoi dari Jalan Demang Lebar Daun menuju Simpang Lima DPRD Sumsel.¹⁴⁴ Rombongan tersebut membawa umbul-umbul dan tongkat kayu. Sepanjang perjalanan, mereka mengajak orang-orang yang ditemui untuk bergabung dengan seruan, “*Payo melok, payo melok.*” Aksi perusakan dimulai setelah konvoi tiba di sekitar DPRD Sumsel dan menasar pos polisi serta fasilitas gedung.
139. **Kerusuhan di Bali:** Komite Aksi Kamisan Bali melakukan konsolidasi terbuka di LBH Bali pada 29 Agustus 2025. Lebih dari 300 orang hadir, dengan sebagian besar berada di luar kantor LBH Bali karena keterbatasan ruang. Forum menyepakati aksi damai pada keesokan harinya. Pada 30 Agustus 2025, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WITA dengan *long march* dari Gelanggang Olahraga Ngurah Rai menuju Polda Bali. Aksi berlangsung damai dengan massa bergantian menyampaikan aspirasi dari mobil komando. Ketika terjadi upaya provokasi ringan, seperti pelemparan gelas plastik, orator menghentikan tindakan tersebut, sehingga situasi relatif terkendali. Sekitar pukul 14.00 WITA, sebagian massa mulai melempar botol dan batu ke arah Polda Bali. Seorang peserta mengaku tindakan tersebut dipicu oleh penembakan gas air mata serta pengaruh ajakan beberapa orang tak dikenal. Saksi menggambarkan empat pria dengan ciri fisik tertentu, salah satunya berambut panjang sebahu, berbaju abu-abu, membawa tas hitam, dan meneriakkan, “*Woy anjing, lempar, lempar!*” dengan logat Jakarta.¹⁴⁵

¹⁴³ Solidaritas Perjuangan untuk Keadilan Rakyat (Sangkar), “Laporan Investigasi Kasus Salah Tangkap, Penyiksaan, dan Penyebaran Data Pribadi 6 Anak yang Diduga Dilakukan oleh Anggota Polres Magelang Kota,” 2025.

¹⁴⁴ BAP a.n. Rasya Bagas Alamsyah.

¹⁴⁵ BAP a.n. berinisial FIN.



Gambar 29 dan 30. Orang tak dikenal yang memprovokasi kerusuhan di Bali

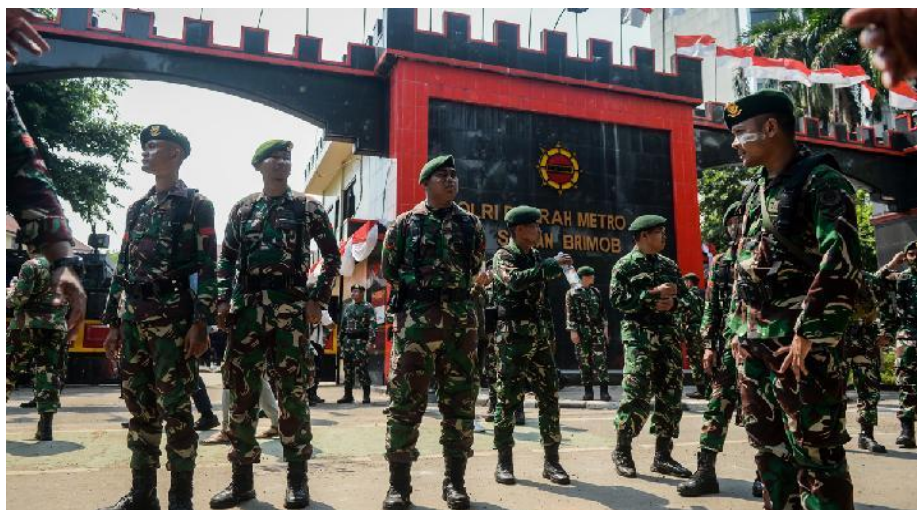
Sekitar pukul 15.25 WITA, massa membacakan tuntutan demonstrasi. Sekitar pukul 15.40 WITA, situasi memburuk. Polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet serta melakukan penangkapan. Sebagian massa menyebar dan bergerak ke kawasan Renon. Sekitar pukul 16.15 WITA, sebuah truk logistik kepolisian berisi perlengkapan pengendalian massa mencoba masuk ke Gedung DPRD Provinsi Bali dan dijarah massa.¹⁴⁶

¹⁴⁶ BAP a.n. Kadek Rusmana.

IV. Keterlibatan TNI dalam Penanganan Aksi

IV.A. Pengerahan TNI dalam penanganan aksi

140. Kapolri disebut mengirim surat permohonan bantuan ke TNI pada 30 Agustus 2025.¹⁴⁷ Namun, KPF menemukan personel TNI telah hadir di lapangan sebelum tanggal tersebut, termasuk kehadiran beberapa Pangdam yang menemui massa sejak 29 Agustus 2025 di Jakarta (Pangdam Jaya), Bandung (Pangdam III Siliwangi), Surabaya (Pangdam V Brawijaya), dan Makassar (Pangdam XIV Hasanuddin) utamanya setelah kejadian pembunuhan Affan Kurniawan yang memantik aksi demonstrasi meluas ke berbagai daerah.
141. **Pengerahan militer di Jakarta:** Pada 28 Agustus 2025, 4.531 personel TNI-Polri dilibatkan untuk mengawal demonstrasi buruh di wilayah Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyebut personel tersebut terdiri atas 2.174 anggota Polda Metro Jaya, 1.725 anggota Bawah Kendali Operasi (BKO) yang mencakup TNI AD, Marinir, Brimob, Den C, Kodim Jakarta, Komando Tugas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 anggota dari Polres jajaran.¹⁴⁸ Pada 29 Agustus 2025, Brigade Parako I Pasgat TNI AU menerjunkan 579 prajurit untuk menjaga aksi demonstrasi yang tersebar di beberapa titik pusat demonstrasi, termasuk Kwitang.¹⁴⁹ Asisten Intelijen Kostrad, Brigjen TNI Muhammad Nas, menyampaikan bahwa TNI akan mendorong pembebasan massa yang ditangkap serta menekankan tuntutan massa terkait transparansi proses hukum.¹⁵⁰



Gambar 31. Personel TNI berjaga di depan Mako Brimob Kwitang

142. **Pengerahan militer di Sulawesi Selatan:** Pada 29 Agustus 2025, dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari TNI AU Batalyon Arhanud 4/AAY Makassar diturunkan untuk mengamankan objek vital, yakni Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.¹⁵¹ Selain itu, sekitar pukul 23.00 WITA, satu truk pasukan Marinir Lantamal VI Makassar tiba di lokasi demonstrasi di Makassar untuk melakukan pengamanan. Pada 3 September 2025, 100

¹⁴⁷ YouTube @kumparan, <https://www.youtube.com/watch?v=xQRK46PUcR8>, 8 September 2025.

¹⁴⁸ Detik Bhayangkara, <https://detikbhayangkara.com/2025/08/28/aparat-gabungan-dikerahkan-4-531-personel-jaga-demo-buruh-di-DPR-RI>, 28 Agustus 2025.

¹⁴⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/panglima-tni-instruksikan-pengamanan-demonstrasi-di-mako-brimob-2064593>, 29 Agustus 2025; Antara, <https://www.antarane.ws.com/berita/5074341/pasgat-tni-au-kerahkan-pasukan-untuk-jaga-demo-agar-berjalan-kondusif>, 29 Agustus 2025.

¹⁵⁰ Muria News, <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/447848/tni-desak-polisi-bebaskan-massa-demo-yang-ditangkap-polisi>, 29 Agustus 2025.

¹⁵¹ Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2025/08/29/231135678/tni-datang-amankan-demo-ricuh-di-makassar-polisi-masih-tak-terlihat>, 29 Agustus 2025.

pasukan TNI dari Kodim 1411 diturunkan dalam melakukan pengamanan aksi demo yang digelar di dua titik di Bulukumba.¹⁵²

143. **Pengerahan militer di Jawa Tengah dan Yogyakarta:** Pada 29 Agustus 2025, Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, berkoordinasi langsung dengan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Di kawasan Manahan, Solo, personel TNI AD dari Korem 074 Surakarta dikerahkan untuk membantu meredakan keriuhan pada 29 Agustus 2025. Kehadiran personel TNI bertujuan untuk bernegosiasi dengan massa demonstran yang masih bertahan di tengah situasi yang memanas.¹⁵³ Personel TNI dari Kodim 0735 Surakarta dan Kodim 0705 Magelang juga diterjunkan membantu mengendalikan situasi demonstrasi. Pada 1 September 2025, Kodam IV Diponegoro mengerahkan 9.000 pasukan TNI untuk mengamankan aksi di sejumlah wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.¹⁵⁴ Kepala Penerangan Kodam IV Diponegoro, Kolonel Infantri Andy Soelistyo, mengatakan pihaknya menerjunkan sekitar 282 personel guna melakukan penjagaan di sejumlah titik vital, seperti Kantor Gubernur, Polda, lembaga perbankan, hingga kantor PLN.¹⁵⁵ Pada 3 September 2025, sejumlah kawasan objek vital milik pemerintah daerah di Solo mendapat penjagaan militer, termasuk Balai Kota Solo yang dijaga empat personel TNI AD.¹⁵⁶
144. **Pengerahan militer di Jawa Timur:** Pada 30 Agustus 2025, puluhan prajurit Kostrad Para Raider 501 Madiun diterjunkan untuk membantu menenangkan massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Madiun.¹⁵⁷ Pada 1 September 2025, 100 personel dari Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) dan 15 personel Kodim Surabaya dikerahkan dengan dua truk militer untuk berjaga di sekitar Gedung Negara Graha sebagai bentuk antisipasi aksi susulan setelah kerusuhan.¹⁵⁸ Di Malang, belasan prajurit TNI AD melakukan penjagaan Gedung DPRD Kota Malang di tengah aksi demonstrasi yang tidak mendapat pengamanan dari personel kepolisian.¹⁵⁹ Pada 1–2 September 2025, prajurit TNI dari Kodim 0814 Jombang disiagakan menjaga kantor pemerintahan setempat serta Pendopo Bupati dan Gedung DPRD Jombang selama 24 jam penuh setelah adanya permintaan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Penjagaan dilakukan secara ketat di pintu-pintu masuk gedung pemerintahan dan aset negara lainnya.¹⁶⁰ Di Magetan, 1.500 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Magetan. Personel gabungan juga melakukan patroli skala besar yang sejak 31 Agustus 2025.¹⁶¹
145. **Pengerahan militer di Sumatera Utara:** Pada 1 September 2025, Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, mengerahkan satu Satuan Setingkat Peleton (SST) atau sekitar 30 Prajurit TNI di setiap lokasi aksi demonstrasi di Medan, di antaranya yakni Markas Polda Sumatera Utara, Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Walikota Medan, DPRD

¹⁵² Rubrik, <https://rubrik.co.id/2025/08/30/ratusan-tni-polri-akan-amankan-demo-di-bulukumba-pada-1-september-2025>, 30 Agustus 2025.

¹⁵³ Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2025/08/29/174859478/update-demo-solo-tni-dikerahkan-ke-manahan-bantu-polisi-redakan-situasi>, 29 Agustus 2025.

¹⁵⁴ Detik, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8090288/9-000-tni-dilibatkan-bantu-amankan-aksi-massa-di-jogja-dan-jateng>, 1 September 2025.

¹⁵⁵ Detik, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8090288/9-000-tni-dilibatkan-bantu-amankan-aksi-massa-di-jogja-dan-jateng>, 1 September 2025.

¹⁵⁶ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/usai-demo-ricuh-kawasan-objek-vital-di-solo-dijaga-tni-25ma7wW76cw>, 3 September 2025.

¹⁵⁷ Berita Jatim, <https://beritajatim.com/demo-di-depan-dprd-kota-madiun-ricuh-kostrad-para-raider-501-turun-redam-massa>, 30 Agustus 2025.

¹⁵⁸ Metro TV News, <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4rRm-ratusan-personel-gabungan-siaga-di-gedung-grahadi-antisipasi-demonstrasi-susulan>, 5 September 2025.

¹⁵⁹ Tribun News, <https://jatim.tribunnews.com/jatim/514802/situasi-terkini-dprd-kota-malang-imbis-adanya-info-demo-dengan-nama-aksi-akbar-malang-membara>, 1 September 2025.

¹⁶⁰ I News, <https://jatim.inews.id/berita/antisipasi-aksi-massa-di-jombang-personel-tni-dan-banser-dikerahkan>, 2 September 2025.

¹⁶¹ Detik, <https://www.detik.com/jatim/jogo-jatim/d-8090031/1-500-tni-polri-bakal-amankan-unjuk-rasa-di-dprd-magetan>, 4 September 2025.

Medan, Kantor Perwakilan BI, hingga Kantor Regional OJK Sumatera Utara. Prajurit TNI juga disiagakan di SPBU dan gudang sembako untuk mencegah gangguan distribusi kebutuhan pokok.¹⁶²

146. **Pengerahan militer di Jawa Barat:** Pada 1 September 2025, sekitar 800 aparat gabungan Polda Jawa Barat, Kodim 0607, Sub-Detasemen Polisi Militer, Satpol PP, Dishub, BPBD, hingga petugas pemadam kebakaran melakukan pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa.¹⁶³ Pada 4 September 2025, 355 personel gabungan TNI AD diterjunkan di Bandung untuk mengamankan aksi demonstrasi di Gedung Sate.¹⁶⁴
147. **Pengerahan militer di Bali:** Sebanyak lima kompi prajurit dari Kodam IX Udayana dikerahkan dan disiagakan pada 1 September 2025 di Denpasar untuk mengantisipasi demonstrasi susulan. Personel ini dilakukan untuk mempertebal pengamanan.¹⁶⁵
148. **Pengerahan militer di Sumatera Selatan:** Sebanyak 1.000 prajurit TNI Korem 044 Garuda Dempo dikerahkan untuk melakukan pengamanan di lapangan kawasan Gedung DPRD Sumatera Selatan pada 1 September 2025.¹⁶⁶
149. **Pengerahan militer di Maluku:** Pada 1 September 2025, Polda Maluku mengerahkan sebanyak 735 personel gabungan yang terdiri dari 360 personel Polda Maluku, 315 personel Polresta Pulau Ambon dan Kepulauan Lease, serta 60 personel BKO TNI untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar oleh berbagai elemen mahasiswa di Kota Ambon.¹⁶⁷ Di Saumlaki, personel gabungan yang terdiri dari Jajaran TNI dari Kodim 1507 Saumlaki, Polres Kepulauan Tanimbar, Polsek Tanimbar Selatan dan Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa solidaritas yang dilakukan oleh aliansi Cipayung Plus, yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.¹⁶⁸

IV.B. Dinamika TNI, Polri, dan massa aksi

150. **Penangkapan personel BAIS di Pejompongan:** Sejumlah klaim menyebut TNI ikut terlibat dalam upaya penelusuran aktor penggerak kerusuhan dan berkoordinasi dengan Polri dan BIN. Pada saat yang sama, sejumlah pihak menduga keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam provokasi yang belum tuntas diselidiki. Pada 28 Agustus 2025, di tengah bentrokan di kawasan Pejompongan, anggota Brimob Polri melakukan pengamanan terhadap seseorang yang dituding sebagai provokator kerusuhan. Orang tersebut kemudian diketahui merupakan personel BAIS TNI berpangkat Mayor Infantri dengan nama Sudi Suwarno (SS) yang bertugas sebagai Komandan Tim 2 Detasemen IV Satuan Penyelidikan Intelijen BAIS TNI.¹⁶⁹ Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Freddy Ardianzah, membenarkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa SS dan rekannya sedang memantau unjuk rasa dan terpisah di tengah tembakan gas air mata sebelum kemudian ditarik personel

¹⁶² | News, <https://www.inews.id/news/nasional/tni-turun-tangan-pangdam-bukit-barisan-kerahkan-pasukan-amankan-demo-di-medan>, 1 September 2025.

¹⁶³ | IDN Times, <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/polisi-terjunksan-800-personel-untuk-demo-mahasiswa-di-sukabumi-00-6snxf-d48hfj>, 1 September 2025.

¹⁶⁴ | JPNN, <https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/26724/ratusan-personel-tni-diperbantukan-jaga-aksi-demo-bem-si-di-gedung-sate>, 4 September 2025.

¹⁶⁵ | Detik, <https://www.detik.com/bali/berita/d-8089977/5-kompi-tentara-garnisun-disiagakan-antisipasi-demo-susulan-di-bali>, 1 September 2025.

¹⁶⁶ | Detik, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8090274/tni-polri-lakukan-pengamanan-ekstra-di-dprd-sumsel>, 1 September 2025.

¹⁶⁷ | Polri, <https://tribranews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polda-maluku-kerahkan-735-personel-gabungan-amankan-aksi-demo-di-Ambon>, 1 September 2025.

¹⁶⁸ | Polri, <https://tribranews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/berlangsung-aman-dan-damai-polres-kepulauan-tanimbar-bersama-TNI-amankan-aksi-unjuk-rasa>, 1 September 2025.

¹⁶⁹ | Detik, <https://www.detik.com/bali/berita/d-8092223/heboh-kabar-intel-tni-ditangkap-brimob-wakil-panglima-harusnya-tak-disebar>, 2 September 2025; X @pandugaid, <https://x.com/Pandugaid/status/1961824438254739902>, 30 Agustus 2025.

Brimob ke rantis untuk diinterogasi.¹⁷⁰ Terlepas dari penjelasan tersebut, hal ini membuktikan bahwa personel BAIS TNI berada dan beraktivitas memburu di dalam barisan massa aksi, meskipun dinyatakan sebagai kebetulan belaka. KPF belum menemukan bukti adanya proses hukum, pemeriksaan terbuka, maupun penjelasan resmi tertulis mengenai konteks penugasan, tujuan, dan skala kehadiran personel BAIS TNI di lokasi bentrokan.



Gambar 32. Penangkapan personel BAIS TNI Mayjen SS di Pejompongan

151. **Kehadiran Pangdam Jaya di Kwitang:** Pada 29 Agustus 2025 Sekitar pukul 02.00 WIB, Pangdam Jayakarta, Mayjen TNI Deddy Suryadi, tiba di Mako Brimob Kwitang bersama puluhan personel militer. Ia menemui massa aksi di sisi barat markas dan menyampaikan bahwa kepolisian akan bertanggung jawab atas pembunuhan Affan Kurniawan yang terjadi beberapa jam sebelumnya.¹⁷¹ Massa merespons dengan teriakan, “Kami tidak percaya penegakan hukum di Indonesia.” Sekitar pukul 02.15 WIB, saat Mayjen Deddy Suryadi berjalan menuju Markas Korps Marinir yang berjarak sekitar 150 meter, aparat kembali menembakkan gas air mata. Polisi militer kemudian mengevakuasi Mayjen Deddy Suryadi ke Hotel Gren Alia.
152. **Pembagian uang ke massa aksi di Kwitang:** Pada 29 Agustus 2025 Sekitar pukul 14.38 WIB, personel TNI berseragam loreng abu-abu dan baret ungu memborong air minum dari pedagang kaki lima untuk dibagikan kepada massa.¹⁷² Mereka juga membagikan uang pecahan Rp50.000. Sebagian massa merespons dengan teriakan, “Hidup TNI! Terima kasih bapak!”¹⁷³ Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 23.10 WIB, personel TNI baret ungu dan oranye masih terlihat di sekitar lokasi aksi seraya massa membubarkan diri.¹⁷⁴

¹⁷⁰ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-mabes-tni-soal-anggota-bais-ditangkap-brimob-saat-pantau-demonstrasi-2066951>, 5 September 2025.

¹⁷¹ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/malam-pengepungan-mako-brimob-kwitang-usai-driver-ojol-tewas-2064209>, 29 Agustus 2025.

¹⁷² Kompas, <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/29/152342688/tni-bagi-bagi-air-mineral-ke-massa-demo-ojol-di-mako-brimob>, 29 Agustus 2025.

¹⁷³ Kompas, <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/29/152342688/tni-bagi-bagi-air-mineral-ke-massa-demo-ojol-di-mako-brimob>, 29 Agustus 2025.

¹⁷⁴ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/demonstran-di-sisi-barat-mako-brimob-kwitang-bubar-2064634>, 30 Agustus 2025.

153. **Pembagian beras ke sopir ojol di Medan:** Pada 29 Agustus 2025, Anggota TNI dari Kodim 02/01 Medan membagikan ratusan karung beras ke pengemudi ojek online yang berunjuk rasa. Lebih dari 500 sak beras dibagikan pada sopir ojol di Markas Kodim 02/01 Medan.¹⁷⁵
154. **Pembagian uang ke massa aksi di Bandung:** Pada 29 Agustus 2025, sejumlah massa aksi di Bandung menerima uang dari Kodam III Siliwangi. Uang tersebut diperuntukkan pembelian konsumsi dan sisanya dibagi merata pada massa aksi lainnya.¹⁷⁶
155. **Penangkapan personel Kavaleri di Palembang:** Pada 31 Agustus 2025 dini hari, beredar video berdurasi 19 detik yang menunjukkan beberapa orang anggota Brimob, salah satunya diidentifikasi sebagai Kombes Pol Susnadi, yang mengamankan pria yang diduga merupakan provokator kerusuhan saat demonstrasi di Gedung DPRD Sumatera Selatan.¹⁷⁷ Orang tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Pratu Handika Novaldo, personel TNI yang bertugas di Batalyon Kavaleri 5 DPC Dam II SWJ dengan NRP 31200140341100. yang ditangkap di sekitar SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Dalam video tersebut, salah satu anggota Brimob mengatakan bahwa prajurit TNI itu ikut melakukan kerusuhan.

“Kavaleri—kavaleri ikut rusuh di Palembang. Biar kena Panglima TNI ini kau!” — Aparat Brimob yang menangkap Mayjen SS di Pejompongan

KPF menemukan bahwa Pratu Handika diketahui sedang dalam masa libur dari kegiatan latihan kader pencak silat militer saat ditangkap. Hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada penjelasan resmi tentang mengapa ia dicurigai sebagai provokator oleh personel Brimob ketika aksi demonstrasi berlangsung.¹⁷⁸ Pada 1 September 2025, Kombes Pol Susnadi menyatakan kejadian tersebut murni kesalahpahaman.¹⁷⁹ Kolonel Infantri E. S. Putra Siregar dari Kodam II Sriwijaya mengklarifikasi bahwa Pratu Handika Novaldo sedang mencari makan dan mengisi bahan bakar kendaraan saat ditangkap personel Brimob.¹⁸⁰

156. **Kegagalan TNI mencegah penjarahan:** Pada 30–31 Agustus 2025, sejumlah personel TNI dikerahkan untuk pengamanan eskalasi aksi, namun penjarahan tetap terjadi. Kapolres Metro Jaksel menyebut rumah anggota DPR Eko Patrio dan Ahmad Sahroni tetap dijarah meskipun terdapat pengamanan oleh personel TNI-Polri serta Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat.¹⁸¹ Sejumlah personel marinir TNI juga berjaga di Gedung NasDem Tower pada tanggal yang sama.¹⁸² Dalam kejadian penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bintaro, satpam setempat juga melaporkan kegagalan personel TNI membantu pengamanan dan kehadiran puluhan personel TNI setelah penjarahan terjadi.¹⁸³ Pada 1 September 2025, 10 personel Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU berjaga di

¹⁷⁵ Kita Kini, <https://www.kitakini.news/news/22478/tni-kodim-0201-medan-bagikan-ratusan-beras-ke-ojol-usai-demo-ricuh>, 30 Agustus 2025; Detik, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8087584/kodam-i-bb-bagikan-500-sak-beras-ke-ojol-saat-demo-di-medan>, 30 Agustus 2025.

¹⁷⁶ Creative Station, <https://creativestation.id/pendemo-di-bandung-dapat-uang-segepok-dari-tni>, 30 Agustus 2025.

¹⁷⁷ TikTok @officialinews, <https://www.tiktok.com/@officialinews/video/7544950454464023828>, 1 September 2025.

¹⁷⁸ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/kata-brimob-soal-penangkapan-prajurit-tni-dalam-demo-di-palembang-2065245>, 1 September 2025.

¹⁷⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/kata-brimob-soal-penangkapan-prajurit-tni-dalam-demo-di-palembang-2065245>, 1 September 2025.

¹⁸⁰ Halo Sumsel, <https://halosumsel.com/kodam-ii-sriwijaya-klarifikasi-soal-salah-tangkap-anggotanya-oleh-brimob-polda-sumsel>, 31 Agustus 2025.

¹⁸¹ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8088440/marinir-jaga-rumah-sahroni-usai-penjarahan>, 31 Agustus 2025; Antara, <https://jatim.antaranews.com/berita/968469/orang-tak-dikenal-jarah-rumah-menkeu-sri-mulyani-di-bintaro>, 31 Agustus 2025.

¹⁸² IDN Times, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/marinir-jaga-nasdem-tower-markas-partai-ahmad-sahroni-00-rgfwk-q49wcm>, 30 Agustus 2025.

¹⁸³ Antara, <https://jatim.antaranews.com/berita/968469/orang-tak-dikenal-jarah-rumah-menkeu-sri-mulyani-di-bintaro>, 31 Agustus 2025; Tempo, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-rumah-menteri-keuangan-sri-mulyani-dijarah-massa-2064981>, 31 Agustus 2025.

Gedung Kementerian Keuangan.¹⁸⁴ Seorang informan mengklaim penjarahan dilakukan secara sistematis dengan pergerakan massa yang terorganisir rapi dan mengakui adanya ajakan demonstrasi di Gedung DPR dengan arahan membuat 160 bom molotov.¹⁸⁵

157. **Penangkapan personel TNI 'gadungan':** Pada 1 September 2025, massa demonstran di depan DPRD Sumatera Utara menangkap seseorang memprovokasi massa menyerang aparat. Pria tersebut mengaku bernama Fajar dan dari Kodim 02/01, namun mengaku bergerak atas inisiasi pribadi.¹⁸⁶ Pada 3 September 2025, Kodam I Bukit Barisan menyatakan bahwa pria tersebut bernama Fajrin Bang dan bukan personel TNI.¹⁸⁷
158. **Respons TNI:** Pada 1 September 2025, Wakil Panglima TNI menyatakan pengerahan bantuan TNI dilakukan sesuai ketentuan dan menolak tuduhan bahwa TNI sengaja membiarkan penjarahan terjadi. TNI menyatakan kesiapan bekerja sama dengan tim independen yang dibentuk oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), KPAI, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman untuk mengungkap fakta. Akan tetapi, hingga laporan ini dibuat, investigasi independen tersebut tidak dilakukan.
159. **Pembagian uang ke massa aksi di Kabanjahe:** Pada 3 September 2025, puluhan massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe menerima bantuan beras 5 kilogram yang diangkut menggunakan truk milik TNI AD dari Kodim 0205.¹⁸⁸

IV.C. Patroli TNI di kawasan publik

160. **Patroli militer di Jawa Tengah:** Pada 30 Agustus 2025, Polda Jawa Tengah bersama Kodim 0735 Surakarta serta Korem 074 Warastratama melakukan patroli gabungan skala besar guna menjaga kondusifitas setelah aksi demo di Solo.¹⁸⁹ Pada 3 September 2025, aparat gabungan TNI AL, TNI AD, dan Polri menggelar patroli gabungan di Cilegon untuk mengantisipasi adanya kerusuhan.¹⁹⁰
161. **Patroli militer di Jawa Timur:** Pada 31 Agustus 2025, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, melepas personel untuk melakukan patroli skala besar di Gedung Negara Graha, Surabaya. Menurut Pangdam, patroli ini dilakukan sesuai dengan instruksi Prabowo Subianto bahwa oknum yang bertindak melawan hukum akan dilakukan tindakan tegas.¹⁹¹ Pada 1 September 2025, Korem 083 Baladika Jaya menyiapkan patroli skala besar untuk menjaga keamanan wilayah Malang Raya dan Tapal Kuda.¹⁹²
162. **Patroli militer di Jakarta:** Pada 31 Agustus 2025, TNI dan Polri melakukan patroli keliling Jakarta dengan mengerahkan sekitar 100 personel dimulai dari kawasan Monumen Nasional,

¹⁸⁴ Kompas, <https://money.kompas.com/read/2025/09/01/144143726/kantor-sri-mulyani-dijaga-tni-au>, 1 September 2025.

¹⁸⁵ Republika, <https://news.republika.co.id/berita/t1uklg393/siapa-penjarah-rumah-sahroni-eko-dan-menkeu-ini-kata-yang-ketinggalan-rombongan-part4>, 31 Agustus 2025.

¹⁸⁶ CNN, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250902020813-20-1269061/pria-ngaku-tni-diduga-provokasi-massa-aksi-serang-dprd-sumut>, 2 September 2025.

¹⁸⁷ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/kodam-i-bb-pria-yang-ngaku-tni-saat-demo-di-dprd-sumut-bukan-anggota-tni-25mvlBpDVly/full>, 4 September 2025.

¹⁸⁸ Bisnis Daily, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2025/09/03/192575/massa_demo_di_dprd_karo_dapat_beras_dari_tni_dan_makan_bakso_gratis_dibagikan_kapolres, 3 September 2025.

¹⁸⁹ Polres Surakarta, <https://polresta.surakarta.go.id/pastikan-keamanan-pasca-aksi-demo-di-kota-solo-kapolresta-surakarta-bersama-forkopimda-gelar-patroli-gabungan-skala-besar>, 30 Agustus 2025.

¹⁹⁰ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8093477/polisi-banser-hingga-tni-patroli-gabungan-antisipasi-kerusuhan-di-cilegon>, 3 September 2025.

¹⁹¹ Suara Surabaya, <https://www.suarasurabaya.net/kelanjakarta/2025/patroli-skala-besar-tni-polri-dikerahkan-untuk-jaga-keamanan-surabaya>, 31 Agustus 2025.

¹⁹² RRI, <https://rri.co.id/daerah/1808447/korem-083-baladika-jaya-laksanakan-patroli-skala-besar>, 1 September 2025.

- Jakarta Pusat.¹⁹³ Pada 3 September 2025, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP kembali menggelar patroli dengan jumlah sekitar 310 personel.
163. **Patroli militer di Kalimantan Barat:** Pada 31 Agustus 2025, Polres Landak bersama Kodim 1210 melaksanakan patroli gabungan yang terdiri atas 75 aparat kepolisian dan 11 personel TNI.¹⁹⁴
 164. **Patroli militer di Jawa Barat:** Pada 31 Agustus 2025, Polres Ciamis bersama Kodim 0613 dan Satpol PP melaksanakan patroli gabungan yang terdiri atas 80 personel gabungan menyisir sejumlah titik vital.¹⁹⁵ Pada 1 September 2025, Polres Bogor bersama Kodim 0621 Kabupaten Bogor mengerahkan 1.600 personel dengan status Siaga 1.¹⁹⁶ Di Bandung, aparat gabungan TNI-Polri melakukan penyisiran setelah demonstrasi di wilayah Jalan Tamansari, tak jauh dari kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) yang disertai bentrokan dengan mahasiswa setelah aparat menembakkan gas air mata ke dalam area kampus Unisba.¹⁹⁷ Pada 3 September 2025, personel gabungan TNI-Polri kembali melakukan patroli skala besar.¹⁹⁸
 165. **Patroli militer di Kalimantan Timur:** Pada 1 September 2025, aparat gabungan TNI-Polri serta instansi lain melakukan patroli dengan mengusung tema “Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri” di wilayah Kabupaten Berau. Patroli sejumlah 68 personel ini terdiri atas 30 personel Polres Berau, 10 personel Kodim 0902, 3 personel Sub-Detasemen Polisi Militer VI 1-2 Berau, 10 personel Satpol PP, 5 personel BPBD, dan 10 personel Dishub Kabupaten Berau.¹⁹⁹ Patroli gabungan TNI-Polri juga bergerak di Samarinda pada hari yang sama.²⁰⁰
 166. **Patroli militer di Sulawesi Tengah:** Pada 1 September 2025, Polres Tolitoli bersama TNI AD (Kodim 1305 dan POM AD) serta Satpol PP melaksanakan Patroli Gabungan Perintis Presisi di menyisir Kelurahan Baru, Panasakan Key, Tuweley, Pasar Susumbolan, Taman Kota, Bundaran Tugu Cengkeh, hingga kawasan JB.²⁰¹
 167. **Patroli militer di Sumatera Utara:** Pada 1 September 2025, ratusan personel TNI dari Kodim 0203 dan sejumlah batalyon TNI menggelar patroli berjalan kaki di Langkat.²⁰²
 168. **Patroli militer di Maluku:** Pada 1 September 2025, Polres Kepulauan Aru bersama TNI melaksanakan patroli gabungan skala besar menasar pusat aktivitas masyarakat, fasilitas vital, pemukiman padat, hingga jalur lalu lintas utama Kota Dobo, Kepulauan Aru.²⁰³
 169. **Patroli militer di Kalimantan Tengah:** Pada 2 September 2025, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, didampingi oleh Kapolda Kalimantan Tengah serta Pangdam XII Tambun Bungai melakukan patroli bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁰⁴

¹⁹³ Facebook @metrotv, <https://www.facebook.com/metrotv/videos/tni-angkatan-darat-dan-polisi-militer-menggelar-patroli-skala-besar-pasca-demons/4159378234382859>, 31 Agustus 2025; Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/31/17255141/tni-dan-polri-patroli-keliling-jakarta>, 31 Agustus 2025.

¹⁹⁴ Pontianak Post, <https://pontianakpost.jawapos.com/landak/1466516331/tni-polri-gelar-patroli-skala-besar-di-landak-cegah-gangguan-kamtibmas>, 2 September 2025.

¹⁹⁵ News Tasikmalaya, <https://newstasikmalaya.com/polres-ciamis-tni-dan-satpol-pp-gelar-patroli-gabungan-jaga-kondusivitas-usai-demo>, 1 September 2025.

¹⁹⁶ Investor, <https://investor.id/nasional/408168/sebanyak-1600-pasukan-tnipolri-siaga-1-amankan-bogor>, 1 September 2025

¹⁹⁷ Instagram @volix.media, <https://www.instagram.com/p/DOFRsYhkpfn>, 2 September 2025.

¹⁹⁸ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250903094249-12-1269543/polisi-soal-patroli-di-bandung-berikan-rasa-aman-bukan-bikin-resah>, 3 September 2025.

¹⁹⁹ Polres Berau, <https://www.polresberau.com/patroli-gabungan-tni-polri-di-berau-bersama-masyarakat-menjaga-negeri>, 1 September 2025.

²⁰⁰ Antara, <https://kaltim.antaranews.com/berita/245789/polresta-samarinda-tetap-patroli-besar-pasca-demo-samarinda>, 2 September 2025.

²⁰¹ RRI, <https://rri.co.id/toli-toli/daerah/1807786/patroli-gabungan-tni-polri-amankan-tolitoli-jelang-demo>, 1 September 2025.

²⁰² Mistar, <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/antisipasi-ricuh-ratusan-personel-tni-keliling-kota-stabat>, 1 September 2025.

²⁰³ Polri, <https://tribatanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/cegah-adanya-aksi-demo-merembes-lebih-besar-polres-kepulauan-aru-bersama-TNI-gelar-patroli-skala-besar>, 1 September 2025.

²⁰⁴ Kalteng Daily, <https://kaltengdaily.com/kabar-terkini/gubernur-kapolda-kalteng-dan-forkopimda-patroli-pasca-demo-pastikan-kamtibmas-tetap-kondusif>, 3 September 2025.

170. **Patroli militer di Sulawesi Tenggara:** Pada 2 September 2025, Polresta Kendari bersama Kodim 1417 dan POM AD Kendari menggelar Patroli yang melibatkan 108 personel.²⁰⁵
171. **Patroli militer di Sulawesi Selatan:** Pada 3 September 2025, aparat gabungan TNI-Polri menggelar patroli skala besar di Bulukumba, melibatkan jajaran Polsek dan Koramil.²⁰⁶
172. **Patroli militer di Nusa Tenggara Timur:** Pada 4 September 2025, jajaran Polres Sumba Barat Daya melakukan patroli skala besar, melibatkan kekuatan gabungan TNI-Polri.²⁰⁷
173. **Patroli militer di Sumatera Selatan:** Pada 5 September 2025, patroli gabungan skala besar di sejumlah titik di Palembang melibatkan sekitar 77 personel gabungan yang terdiri atas 21 anggota Korem, 11 anggota Brimob, dan 45 aparat kepolisian.²⁰⁸

²⁰⁵ YouTube @tribunnews, <https://www.youtube.com/watch?v=Kqpk4aliUdk>, 3 September 2025.

²⁰⁶ Radar Selatan, <https://radarselatan.fajar.co.id/2025/09/04/tentara-dan-polisi-gelar-patroli-skala-besar-pasca-demo-dpr-di-bulukumba>, 4 September 2025.

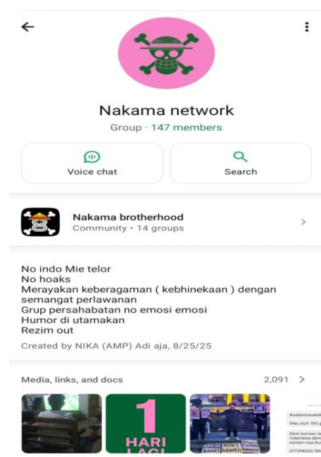
²⁰⁷ Polri, <https://tribratanewssumbabaratdaya.com/pasca-rusuh-demo-bubarkan-DPR-RI-waka-polres-sbd-tegaskan-sinergi-tni-polri-lewat-patroli-skala>, 4 September 2025.

²⁰⁸ Republik Merdeka, <https://www.rmolsumsel.id/hari-keempat-pasca-demo-polda-sumsel-dan-tni-intensifkan-patroli-skala-besar-di-Palembang>, 5 September 2025.

V. Eskalasi di Ruang Digital

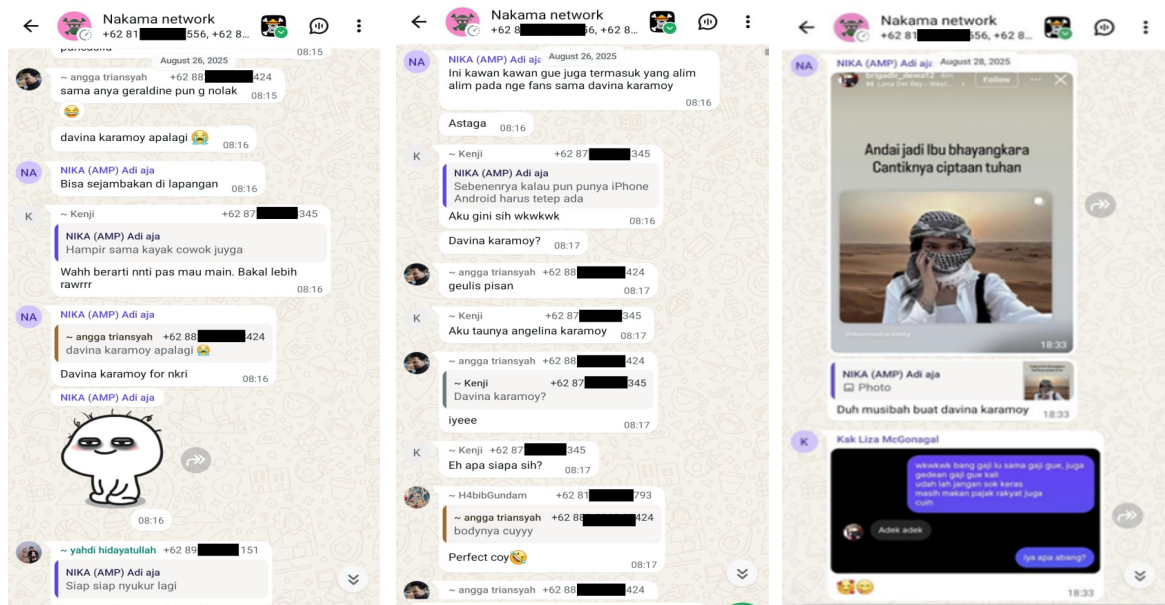
V.A. Teror digital terhadap kolektif NIKA

174. Pada 29 Agustus 2025, massa kolektif NIKA terlibat dalam rangkaian aksi di Polda Metro Jaya dan Gedung DPR. Keterlibatan tersebut tidak disertai tuntutan politik yang terstruktur. Narasi yang dominan adalah perlawanan terhadap kekerasan aparat dan penolakan atas impunitas, sebagaimana tercermin dalam unggahan media sosial di Instagram dan TikTok.
175. Dalam beberapa pernyataan resmi, aparat kepolisian mengklaim bahwa massa kolektif NIKA menyerukan penggunaan perlengkapan aksi seperti batu, petasan, dan bom molotov. Namun, KPF tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Fakta yang terkonfirmasi hanya berkaitan dengan satu orang anggota yang sempat memiliki molotov dan pada akhirnya tidak digunakan dalam aksi demonstrasi.
176. Pada 22 Agustus 2025, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat menanyakan domisili anggota grup KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat). Ia mencantumkan nomor pengguna dengan nama akun Liza McGonagal (279018xxxxx517) dan menyatakan bahwa nomor tersebut berasal dari Hong Kong. Pada hari yang sama, ia juga menanyakan jalur kepulangan anggota yang menggunakan kereta.
177. Sepanjang periode demonstrasi, sejumlah anggota kolektif NIKA melaporkan dugaan teror digital oleh akun Instagram dengan nama @brigadir_dewa12 dan @ibu_brigadir_dede yang mengklaim sebagai anggota Interpol di Polda Metro Jaya. Dugaan teror pertama kali dilaporkan pada 24 Agustus 2025 oleh Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat, kemudian oleh anggota dengan nama akun Ethan dan Liza McGonagal.
178. Pada 25 Agustus 2025, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat (6013xxx8248) membuat grup WhatsApp Nakama Network yang membentuk komunitas WhatsApp Nakama Brotherhood. Komunitas ini terdiri atas sejumlah grup seperti Jaringan Intelektual Hukum Progresif (JIHP), Tim Advokat HAM Institut for Law and Justice Research (ILJR), Barisan Intel dan Propaganda Nakama (BIN), Nakama Internasional, Dewan Perwakilan Nakama (DPN), Nakama Book, Nakama Jawa, dan Nakama Sunda.

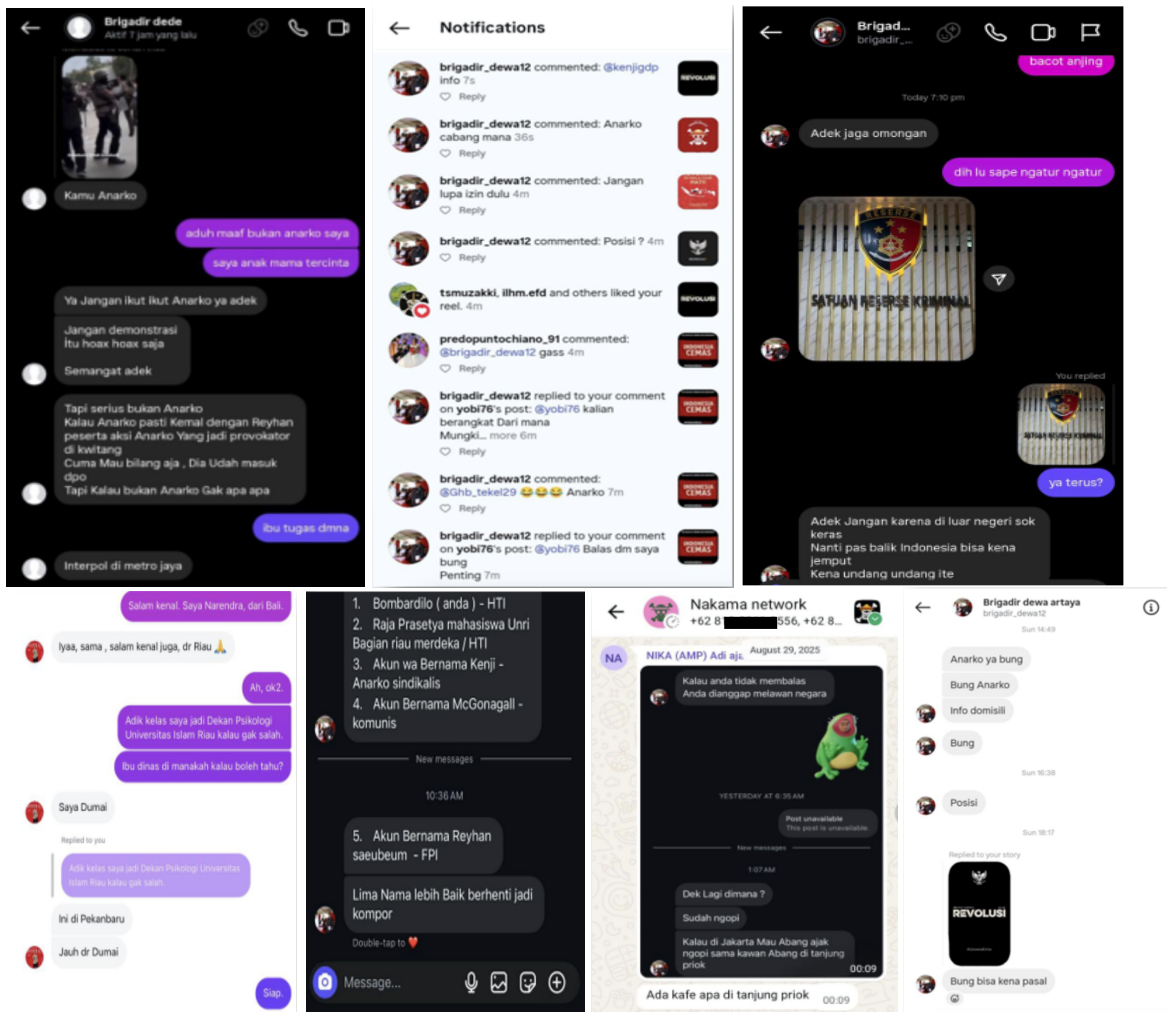


Gambar 33. Tangkapan layar grup WhatsApp Nakama Network

179. Pada 26 Agustus 2025, sebuah percakapan di grup Nakama Network membahas sejumlah selebriti, salah satunya Davina Karamoy. Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat menanggapi percakapan tersebut dengan menulis, "Davina Karamoy for NKRI." Dua hari kemudian, pada 28 Agustus 2025, akun @brigadir_dewa12 mengunggah konten Instagram yang menampilkan Davina Karamoy. Tangkapan layar unggahan tersebut kemudian dikirim oleh Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat ke grup Nakama Network.



Gambar 34, 35, dan 36. Tangkapan layar grup Nakama Network tentang Davina Karamoy



Gambar 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Tangkapan layar teror digital terhadap anggota NIKA

180. Pada 9 September 2025, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat menginisiasi pembentukan grup WhatsApp baru dengan nama BIN Nakama dengan tujuan menelusuri identitas akun @brigadir_dewa12 dan @ibu_brigadir_dede. Dalam proses penelusuran internal, anggota kolektif NIKA lain menemukan kemiripan gaya bahasa dan pola penulisan antara akun-akun yang melakukan teror dengan Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat, termasuk pola waktu unggahan yang kerap berdekatan. Temuan ini memunculkan kecurigaan di antara anggota kolektif terhadap Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat.
181. Tim internal menemukan akun Instagram dan nomor telepon yang mengarah pada sosok Brigadir Dede yang asli dengan domisili di Dumai, Riau. Namun, gaya bahasa dan pola penulisan akun tersebut berbeda secara signifikan dengan akun @brigadir_dewa12 dan @ibu_brigadir_dede. Perbedaan ini memperkuat kecurigaan bahwa akun Brigadir Dede di Dumai tidak identik dengan akun yang melakukan teror digital terhadap anggota kolektif.
182. Dalam sebuah percakapan grup KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat), Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat mempertanyakan kolektif Blok Politik Pelajar (BPP) yang menurutnya sedang berada di Malaysia untuk studi banding ke gerakan mahasiswa di sana. Ia mendesak agar BPP diajak bergabung ke kolektif NIKA. Hal ini mengindikasikan bahwa kolektif NIKA tidak ada hubungan dengan BPP.

V.B. Narasi Riza Chalid sebagai dalang demonstrasi

183. Pada 2 September 2025, sebuah artikel berita diterbitkan oleh TV One dengan tajuk “Nama Riza Chalid disebut-sebut aktor kerusuhan aksi demo, eks-anggota BIN ini menduga dia sakit hati: Kalau pengendalinya...”²⁰⁹ Riza Chalid sendiri merupakan pengusaha sektor minyak dan gas bumi (migas) yang pada Juli 2025 ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.²¹⁰
184. Eks-anggota Badan Intelijen Negara (BIN) yang dimaksud dalam artikel tersebut adalah Kolonel Infantri (Purnawirawan) Sri Radjasa Chandra, yang menyampaikan dugaan Riza Chalid sebagai sosok penyedia dana di balik layar, meskipun bukan pengendali utama aksi demonstrasi Agustus 2025. Chandra berpendapat bahwa Riza Chalid memiliki dendam politik terhadap Presiden Prabowo Subianto setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi mafia minyak dan gas bumi yang menjerat Pertamina.²¹¹
185. Pada 31 Agustus 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono beserta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, serentak mengunggah pesan dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto di akun Instagram masing-masing. Dalam unggahan yang identik tersebut, mereka menyebut nama Riza Chalid secara eksplisit dengan narasi mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo melawan mafia dan kroni-kroninya.²¹²
186. Pada 3 September 2025, pengamat politik Firman Tendry Masengi turut menyampaikan kecurigaannya bahwa Riza Chalid berperan atas terjadinya kerusuhan selama aksi demonstrasi Agustus 2025. Serupa dengan Sri Radjasa Chandra, ia menilai Riza Chalid marah karena Presiden Prabowo Subianto menggerus pengaruh mafia migas perluasan diplomasi energi yang tidak lagi dimonopoli oleh jejaring lama.²¹³

²⁰⁹ TV One News, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/367643-nama-riza-chalid-disebut-sebut-aktor-kerusuhan-aksi-demo-eks-anggota-bin-ini-menduga-dia-sakit-hati-kalau-pengendalinya>, 2 September 2025.

²¹⁰ Tempo, <http://tempo.co/hukum/begini-kronologi-kasus-korupsi-riza-chalid-1965753>, 11 Juli 2025.

²¹¹ Jawa Pos, <https://solobalapan.jawapos.com/berita-utama/2306514036/viral-menteri-ramai-ramai-posting-dukungan-ke-prabowo-riza-chalid-diseret-ada-apakah>, 1 September 2025.

²¹² Tempo, <https://www.tempo.co/politik/ramai-ramai-menteri-unggah-dukungan-ke-prabowo-singgung-mafia-migas-riza-chalid-2065264>, 1 September 2025.

²¹³ Republik Merdeka, <https://rmol.id/publika/read/2025/09/03/678696/pertarungan-maut-penghuni-istana-menunggangi-aksi-demonstrasi-25-28-agustus>, 3 September 2025.

187. Pada 4 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya telah mengantongi indikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi sejumlah tempat pada beberapa hari terakhir.²¹⁴ Ia menyebut adanya “mafia” dan sekelompok orang yang datang ke sejumlah titik demonstrasi sengaja untuk berbuat rusuh.
188. Pada 25 November 2025, anak Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, yang juga terseret kasus korupsi migas bersama Riza Chalid yang masih buron, menulis sebuah surat yang salah satunya membantah keterlibatan Riza Chalid dalam aksi demonstrasi Agustus 2025.

“Ayah saya juga dituduh sebagai dalang dan mendanai demonstrasi ‘Bubarkan DPR’ Agustus lalu tanpa ada satu pun bukti. Ayah saya tidak mungkin melakukan hal tersebut.” — Muhamad Kerry Adrianto Riza²¹⁵

V.C. Narasi PDI-P sebagai dalang demonstrasi

189. Sepanjang demonstrasi Agustus 2025, banyak pihak berspekulasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berperan dalam mengescalasi aksi demonstrasi menjadi kerusuhan. Spekulasi ini berkembang luas terutama di media sosial.²¹⁶
190. Menyikapi pemberitaan tersebut, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menyebut hal tersebut “sesat” dan hanya merupakan upaya mencari kambing hitam.
- “Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI-P saat ini. Buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh? Ini seperti membakar kandang sendiri.”* — Kader PDI-P Muhammad Guntur Romli²¹⁷
191. Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik, termasuk Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, di Istana Negara.²¹⁸ Sepekan setelahnya, pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet yang salah satunya menysar Menko Polkam Budi Gunawan, orang dekat Megawati dan PDI-P.²¹⁹
192. Dalam proses pencarian fakta, salah satu informan KPF mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah ‘mengetahui’ keterlibatan PDI-P dalam memobilisasi demonstrasi Agustus 2025. Pada 19 September 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi membantah tuduhan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengetahui perihal keterlibatan PDI-P dalam perencanaan aksi demonstrasi Agustus 2025.²²⁰ Pada hari yang sama, Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyetujui pembentukan tim investigasi independen terhadap peristiwa Agustus 2025 karena menghormati proses yang telah dimulai oleh Komnas HAM.²²¹
193. Melalui pemeriksaan forensik digital terhadap percakapan di grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat), KPF menemukan bahwa pada 22 Agustus 2025, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat menyampaikan bahwa keluarganya merupakan pengurus PDI-P dan ada pengerahan massa.

²¹⁴ YouTube @kontantv, <https://www.youtube.com/watch?v=t8wzxsIX83M>, 4 September 2025.

²¹⁵ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8228088/anak-tulis-surat-dari-rutan-bela-riza-chalid-di-kasus-korupsi-bbm>, 25 November 2025.

²¹⁶ Sindo, <https://nasional.sindonews.com/read/1622353/12/rumor-pdip-terlibat-demo-ricuh-guntur-romli-informasi-sesat-dan-mencari-kambing-hitam-1758283779>, 19 September 2025.

²¹⁷ Sindo, <https://nasional.sindonews.com/read/1622353/12/rumor-pdip-terlibat-demo-ricuh-guntur-romli-informasi-sesat-dan-mencari-kambing-hitam-1758283779>, 19 September 2025.

²¹⁸ Sekretariat Negara, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_dan_seluruh_ketum_parpol_bertemu_di_istana_bahas_stabilitas_di_tengah_gejolak_aksi_massa, 1 September 2025.

²¹⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/pdip-gerindra-reshuffle-budi-gunawan-2069559>, 14 September 2025.

²²⁰ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/mensesneg-bantah-prabowo-dapat-info-pdip-terkait-kericuhan-agustus-25suPTRXOgW>, 19 September 2025.

²²¹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250919180708-32-1275629/istana-buka-suara-soal-prabowo-tak-bentuk-tim-investigasi-demo-agustus>, 19 September 2025.

“Kebetulan keluarga gue pengurus PDI-P wkwkw join di situ juga dan di PDI-P ada pengerahan massa.” — Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat

194. Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat juga sempat mengirimkan berkas sekali tayang yang disusul pernyataan, *“Aneh bro ... ini kayak ciptakon intel.”* Anggota grup lain dengan nama akun Habil merespons, *“Jir banteng merah.”* Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat kemudian menyampaikan pernyataan tentang akar rumput PDI-P.

“Itu di grup grassroot PDI-P ... sebenarnya di dalam PDI-P terutama kader marhaenis di bawah banyak yang muak sama elite PDI-P di parlemen ... yang gerak itu Repdem.” — Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat

195. Pada November 2025, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat ditangkap oleh pihak kepolisian dan sejak itu masih ditahan di Polda Metro Jaya hingga laporan ini diterbitkan. KPF belum dapat mengonfirmasi tuduhan yang dikenakan pada Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat. Seorang informan yang menemui Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat di Polda Metro Jaya menyatakan ia didampingi kuasa hukum yang berhubungan dengan DPP PDI-P.²²²

V.D. Narasi Geng Solo sebagai dalang demonstrasi

196. Selain narasinya tentang Riza Chalid, Sri Radjasa Chandra juga menyampaikan dugaan sebuah kelompok yang disebutnya sebagai ‘Geng Solo’ di balik aksi penunggalan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Akan tetapi, Chandra tidak pernah menjelaskan pernyataannya dengan bukti yang memadai.²²³
197. Pengajar ilmu komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul, menyampaikan dugaannya terkait kelompok ‘bayangan’ loyalis Presiden Joko Widodo yang menunggal aksi demonstrasi Agustus 2025 untuk menciptakan kerusuhan.²²⁴
198. Pada 28 Agustus 2025, Koordinator kelompok Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, mengeluarkan kritik terhadap Presiden Prabowo dan menyampaikan bahwa kerusuhan yang terjadi adalah bukti kegagalan negara memberikan rasa aman pada warga serta menuntut Presiden Prabowo untuk mundur dari posisinya.

“Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu lebih baik mundur demi kebaikan bangsa.” — Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro²²⁵

199. Pada 9 September 2025, Pelaksana Tugas Ketua Umum kelompok Jokowi Mania, Andi Azwan, menyikapi pihak yang mengaitkan keterlibatan ‘Geng Solo’ dalam kerusuhan pada aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Ia meminta pihak-pihak yang menuding keterlibatan loyalis Presiden Joko Widodo untuk langsung menyebutkan saja secara jelas siapa yang dimaksud.²²⁶

²²² Informan yang meminta dirahasiakan identitasnya.

²²³ TV One News, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/367643-nama-riza-chalid-disebut-sebut-aktor-kerusuhan-aksi-demo-eks-anggota-bin-ini-menduga-dia-sakit-hati-kalau-pengendalinya>, 2 September 2025.

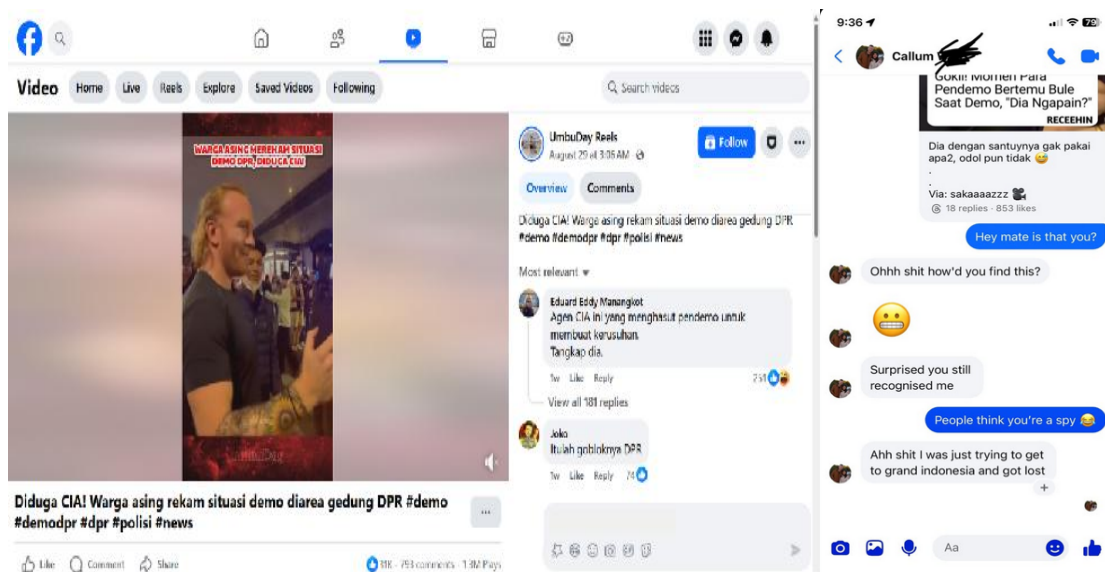
²²⁴ Republik Merdeka, <https://rmol.id/politik/read/2025/09/01/678369/geng-solo-diduga-jadi-shadow-connection-di-balik-situasi-chaos>, 1 September 2025.

²²⁵ Republik Merdeka, <https://rmol.id/politik/read/2025/09/01/678369/geng-solo-diduga-jadi-shadow-connection-di-balik-situasi-chaos>, 1 September 2025.

²²⁶ OkeZone, <https://news.okezone.com/read/2025/09/11/337/3169156/geng-solo-dituding-di-balik-aksi-demo-ricuh-jakarta-nbsp-loyalis-jokowi-beri-pernyataan-menohok>, 11 September 2025.

V.E. Narasi asing sebagai dalang demonstrasi

200. Hampir bersamaan dengan pengumuman tersangka penghasutan kerusuhan demonstrasi Agustus 2025 oleh Polda Metro Jaya, beredar sejumlah konten media sosial yang menampilkan ‘anatomi’ aktor terkait. Yayasan Lokataru dan advokat Haris Azhar dibingkai sebagai ‘dalang’ demonstrasi dan kerusuhan disertai seruan pembubaran Yayasan Lokataru.
201. Pada 31 Agustus 2025, media Sputnik yang berasal dari Rusia merilis berita yang mengklaim bahwa George Soros, investor dan pendiri Open Society Foundation (OSF), beserta lembaga National Endowment for Democracy (NED) dari Amerika Serikat merupakan dalang demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025.²²⁷ Pemberitaan ini hanya didasari oleh pendapat seseorang bernama Angelo Giuliano, yang disebut sebagai pakar geopolitik.
202. Sumber tunggal pemberitaan tersebut, Angelo Giuliano, adalah seorang jurnalis dan wirausahawan berkebangsaan Italia dan Swiss yang tinggal di Hong Kong dan berprofesi jurnalis dan wirausaha. KPF belum menemukan bukti yang dapat mendukung kepakaran Angelo Giuliano di bidang geopolitik kecuali klaim di akun media sosialnya.²²⁸ Angelo pernah memberikan analisis politik di media seperti China Daly dan CGTN.²²⁹ Pada Agustus 2023, media The Odessa Journal dari Ukraina melabeli Angelo sebagai ‘*pseudo-expert*’ setelah banyak memberikan analisis pro-Rusia dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina.²³⁰
203. Di media sosial X, Angelo Giuliano mengunggah informasi terkait sejumlah organisasi dan individu yang ditudingnya telah “dibajak” oleh Amerika Serikat.²³¹ Unggahan ini mendapat banyak interaksi dari sejumlah pengguna X di Indonesia, termasuk akun anonim @tekarok007 yang mengunggah informasi terkait lembaga non-pemerintah yang mendapat pendanaan “jutaan dolar” dari Soros dan Ford.²³² KPF mendapatkan indikasi dari seorang informan bahwa orang di balik akun @tekarok007 berprofesi sebagai aparat keamanan.²³³



Gambar 44 dan 45. Tangkapan layar rumor agen CIA di Gedung DPR dan klarifikasi terkait

²²⁷ Sputnik, <https://en.sputniknews.africa/20250831/1077673374.html>, 31 Agustus 2025.

²²⁸ X @angeloinchina, <https://x.com/angeloinchina>, diakses 20 Desember 2025.

²²⁹ China Daily, <https://global.chinadaily.com.cn/a/202109/20/WS614821d1a310cdd39bc6a62c.html>, 20 September 2021; CGTN, <https://news.cgtn.com/news/2025-05-09/Italian-analyst-China-Russia-lead-multipolar-future-through-action-1DeFlwwlbFe/p.html>, 9 May 2025.

²³⁰ The Odessa Journal, <https://odessa-journal.com/public/warning-pseudo-expert-angelo-giuliano>, 24 Agustus 2023.

²³¹ X @angeloinchina, <https://x.com/angeloinchina/status/1963430983392530698>, 4 September 2025.

²³² X @tekarok007, <https://x.com/tekarok007/status/1962366499416609174>, 1 September 2025.

²³³ Informan KPF yang meminta identitasnya dirahasiakan.

204. Pada 29 Agustus 2025, beredar video yang mengklaim agen intelijen Amerika Serikat (CIA) berada di tengah demonstrasi di Gedung DPR. Penelusuran Cek Fakta oleh media Tempo menemukan bahwa video tersebut pertama diunggah oleh akun TikTok @sakaaaazz sebelum diunggah ulang oleh akun @nowpoppinn di Instagram.²³⁴ Di media sosial Threads, akun @fafamorgana mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan Callum Willis, pria dalam video tersebut, yang mengonfirmasi dirinya ketika itu tersesat mencari jalan menuju pusat perbelanjaan Grand Indonesia dan menilai tuduhan tersebut sebagai lelucon.²³⁵
205. Pada 21 Januari 2026, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.²³⁶

V.F. Narasi kampanye 17+8 sebagai deeskalasi terselubung

206. Pada 31 Agustus 2025, sejumlah pemengaruh dengan pengikut besar lintas kanal media sosial (*influencers*) mengunggah poster digital yang diberi tajuk '17+8 Tuntutan Rakyat'.²³⁷ Penelusuran KPF menemukan bahwa akun @afutami, @okkisutanto, @firdzaradiany, @zensarahman, dan @oryandriana merupakan yang pertama mengunggah tuntutan tersebut di kanal Instagram.



Gambar 46. Unggahan pertama 17+8 Tuntutan Rakyat di Instagram

207. Konten 17+8 Tuntutan Rakyat terdiri atas 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Tuntutan tersebut ditujukan pada Presiden Prabowo Subianto, TNI, Polri, DPR, pemerintah, anggota kabinet, dan ketua umum partai politik.²³⁸

²³⁴ Tempo, <https://www.tempo.co/cekfakta/belum-ada-bukti-anggota-cia-rekam-aksi-demonstrasi-di-jakarta-2068078>, 9 September 2025.

²³⁵ Threads @fafamorgana, <https://www.threads.com/@fafamorgana/post/DN8AKu7koJL>, 29 Agustus 2025.

²³⁶ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/ruu-penanggulangan-disinformasi-dan-propaganda-asing-dinilai-berisiko-batasi-kebebasan-berpendapat>, 22 Januari 2026.

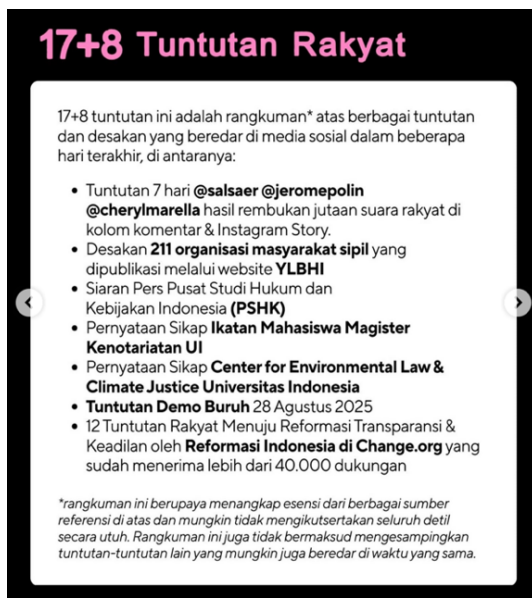
²³⁷ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/demonstrasi-massa-dan-17-8-tuntutan-rakyat-2066527>, 4 September 2025.

²³⁸ Bijak Memantau, <https://bijakmemantau.id/tuntutan-178>, diakses 20 Desember 2025.



Gambar 47 dan 48. Daftar 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di media sosial

208. Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di media sosial menyita perhatian publik. Akan tetapi, muncul tuduhan bahwa kampanye ini merupakan upaya ‘menggembosi’ demonstrasi agar terjadi deeskalasi.²³⁹ Hal ini dikaitkan dengan pesan WhatsApp berisi tawaran bayaran Rp150 juta untuk membuat konten media sosial terkait aksi demonstrasi, yang salah satunya diterima dan ditolak oleh pemilik akun TikTok @geraldvincentt dengan 1,2 juta pengikut.²⁴⁰ KPF tidak menemukan hubungan antara Kolektif 17+8 dengan hal ini.

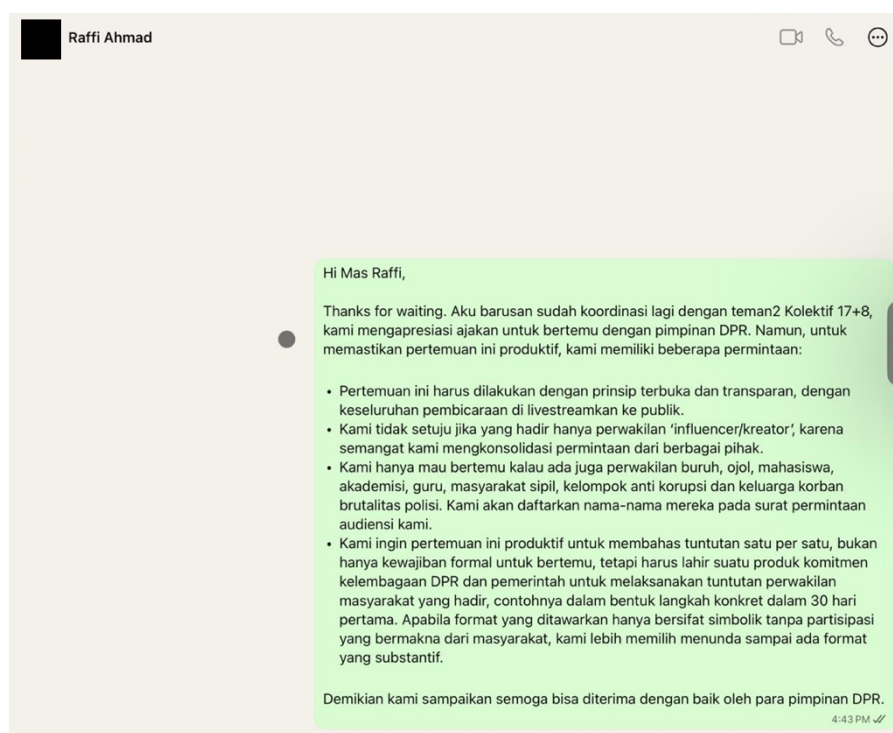


Gambar 49. Keterangan 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai rangkuman berbagai tuntutan dan desakan banyak pihak yang berkembang selama demonstrasi Agustus 2025

²³⁹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/narasi-influencer-merepons-tuntutan-demonstran-2066522>, 4 September 2025.

²⁴⁰ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/narasi-influencer-merepons-tuntutan-demonstran-2066522>, 4 September 2025.

209. Salah satu inisiator kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat dan peneliti kebijakan publik, Andhyta Firselly Utami, menyatakan bahwa kampanye tersebut merupakan upaya “merangkum tuntutan yang sudah ada” dan mengamplifikasi melalui pemengaruh media sosial yang “punya jejak dan pengikut [viral] dipakai sebagai salah satu cara membuka akses ke ruang-ruang yang selama ini tertutup.”²⁴¹ Penelusuran KPF menemukan kesesuaian antara isi tuntutan tersebut dengan sejumlah tuntutan organisasi dan kolektif masyarakat sipil yang sudah ada ketika itu. KPF mewawancarai sejumlah perwakilan masyarakat sipil yang mengaku berkomunikasi dengan Kolektif 17+8 dalam proses perumusannya.²⁴²
210. Pada 1 September 2025, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menghubungi Jerome Polin untuk mengundang berdialog dengan pimpinan DPR. Jerome kemudian mendiskusikan hal ini dengan Kolektif 17+8 yang kemudian meminta Andhyta Firselly Utami untuk melanjutkan komunikasi dengan Raffi Ahmad. Andhyta kemudian menyampaikan keengganan Kolektif 17+8 apabila pertemuan hanya mengundang *influencers* atau pembuat konten. Mereka berpendapat bahwa kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat adalah upaya mengamplifikasi permintaan buruh, ojol, mahasiswa, akademisi, guru, masyarakat sipil, kelompok antikorupsi, dan keluarga korban brutalitas polisi.²⁴³ Oleh sebab itu, dialog apa pun semestinya melibatkan pihak-pihak tersebut. Di samping itu, Andhyta meminta pertemuan dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan keseluruhan pembicaraan ditayangkan ke publik.
211. Raffi Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut, sehingga tidak ada pertemuan yang terjadi.²⁴⁴ Andhyta menyatakan mereka akan membuat permintaan berdialog secara formal pada Jumat, 5 September 2025. Namun, Raffi Ahmad membalas bahwa “Jumat tanggal merah” dan kemudian tidak ada melanjutkan komunikasi.²⁴⁵



Gambar 50. Tangkapan layar persyaratan Kolektif 17+8 untuk berdialog dengan DPR

²⁴¹ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/demonstrasi-gerakan-17-8-tuntutan-rakyat-2066523>, 4 September 2025.

²⁴² Wawancara dengan informan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

²⁴³ Wawancara dengan Andhyta Firselly Utami.

²⁴⁴ Wawancara dengan Andhyta Firselly Utami.

²⁴⁵ Wawancara dengan Andhyta Firselly Utami.

212. Pada 2 September 2025, KPF menemukan adanya pertemuan konsolidasi antara sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil, demonstran, dan Kolektif 17+8. Dalam pertemuan ini, muncul usulan dari sejumlah orang agar daftar 17+8 Tuntutan Rakyat disampaikan secara fisik kepada DPR agar tidak ada alasan bahwa tuntutan tidak dipenuhi karena tidak sampai ke pihak-pihak yang dituju. Beberapa perwakilan masyarakat sipil yang terlibat kurang setuju dengan usulan ini, namun Kolektif 17+8 akhirnya tetap dijadwalkan pada 4 September 2025 untuk mendesak tindakan nyata dari negara. Perwakilan masyarakat sipil membantu perwakilan Kolektif 17+8 berkoordinasi dengan massa buruh yang akan berdemonstrasi pada tanggal yang sama di Jakarta.
213. Pada 3 September 2025 malam, Kolektif 17+8 mengumpulkan alamat email beberapa anggota DPR yang dapat ditemukan dan mengirimkan salinan serta tautan ke 17+8 Tuntutan Rakyat.²⁴⁶
214. Pada 4 September 2025, penyerahan simbolis 17+8 Tuntutan Rakyat di Gedung DPR dilakukan di Gerbang Pancasila.²⁴⁷ Di tengah penyerahan simbolis tersebut, anggota DPR Andre Rosiade dan Rieke Dyah Pitaloka datang menemui Kolektif 17+8 di Gerbang Pancasila dan membuat pernyataan kepada jurnalis.²⁴⁸ Pihak-pihak Kolektif 17+8 menolak berdialog karena kehadiran keduanya tidak direncanakan dan menyatakan mereka “ingin tindakan nyata.”²⁴⁹ Di media sosial, berita tentang penyerahan simbolis dan disinformasi terkait dialog dengan anggota DPR membuat sejumlah warga menilai kampanye 17+8 sebagai upaya deeskalasi terselubung yang mereduksi demonstrasi sebagai ajang tontonan publik.²⁵⁰



Gambar 51. Aksi Piknik Nasional di Gedung DPR pada 5 September 2025

215. Pada 5 September 2025, demonstrasi bertajuk ‘Aksi Piknik Nasional Rakyat’ berlangsung di Gedung DPR dengan peserta dari elemen mahasiswa, masyarakat sipil, buruh, dan akademisi.²⁵¹ Aksi ini mendesak negara untuk segera memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad), Vincent Thomas, salah satu koordinator aksi, menyatakan format piknik dipilih agar rakyat tidak takut bersuara di tengah ancaman kriminalisasi, intimidasi, dan teror pada demonstran.

“Kenapa akhirnya pilih konsep piknik? Kami sadar dan paham bahwa (peserta aksi) terus dikriminalisasi, diintimidasi oleh para aparat, dan memberikan teror kepada kawan semua.” — Ketua BEM Unpad Vincent Thomas²⁵²

²⁴⁶ Wawancara dengan Andhyta Firselly Utami.

²⁴⁷ Tempo, <https://www.tempo.co/wawancara/andhyta-f-utami-tuntutan-17-8-2069544>, 14 September 2025.

²⁴⁸ Kompas, <https://www.kompas.tv/nasional/615663/rieko-diah-pitaloka-terima-17-8-tuntutan-rakyat-usulkan-penolakan-kenaikan-iuran-bpjs>, 4 September 2025.

²⁴⁹ Wawancara dengan Andhyta Firselly Utami.

²⁵⁰ Tempo, <https://www.tempo.co/wawancara/andhyta-f-utami-tuntutan-17-8-2069544>, 14 September 2025.

²⁵¹ Kompas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250905165701-32-1270500/aksi-damai-piknik-rakyat-di-depan-dpr-tagih-17-8-tuntutan>, 5 September 2025.

²⁵² Tempo, <https://www.tempo.co/politik/bem-unpad-demo-ala-piknik-di-dpr-mendesak-pemenuhan-tuntutan-17-8-2066940>, 5 September 2025.

VI. Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Penanganan Demonstrasi

VI.A. Provokasi dan penggunaan kekuatan berlebihan

216. Di Jakarta, bentrokan antara aparat dan demonstran terjadi di berbagai titik demonstrasi pada 25 Agustus 2025. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air di Gerbang Utama DPR dan Jalan Gerbang Pemuda. Massa merespons dengan melempar batu dan petasan. Pembubaran massa mendorong sebagian demonstran masuk ke jalur rel dan jalan tol. Akibatnya, perjalanan KRL Tanah Abang–Merak lumpuh serta penumpang berjalan kaki di atas rel di tengah paparan gas air mata. Setelah bentrokan mereda, kerusakan terlihat di berbagai lokasi. Pos polisi dirusak, sepeda motor dibakar, dan barikade beton di sekitar Senayan Park hancur. Pada 27 Agustus 2025, sejumlah oknum anggota kepolisian mengunggah foto pelajar SMK dengan sebutan ‘STM Kentang’. Unggahan tersebut beredar luas di media sosial dan diliput oleh sejumlah media daring, sehingga menjadi pembicaraan berbagai grup pelajar dan memicu kemarahan. Alih-alih meredam situasi, unggahan itu justru mendorong lebih banyak pelajar untuk turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma dan penghinaan.²⁵³



Gambar 52 dan 53. Berita terkait provokasi aparat kepolisian terhadap massa demonstran

217. Di Makassar, aparat menangkap 44 orang setelah demonstrasi 29 Agustus 2025 yang berakhir ricuh. Dari jumlah tersebut, 17 orang ditetapkan tersangka dan 27 dibebaskan. Terdapat tiga anak, dengan dua anak menjadi tersangka dan satu anak dibebaskan. Dalam proses penyelidikan, muncul dugaan kekerasan aparat seperti pukulan tangan kosong dan menggunakan benda tumpul serta pengeroyokan.²⁵⁴ Sejumlah korban dilaporkan mengalami memar, pembengkakan, kesulitan berjalan, hingga muntah darah selama beberapa hari.

²⁵³ Wawancara pelajar peserta aksi 28 Agustus 2025; Keterangan dalam persidangan Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.

²⁵⁴ BAP a.n. Muhammad Rizki alias Ikki.

218. Pada 29 Agustus 2025, aparat Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap seorang anak berusia 15 tahun dengan inisial DRP. Saat itu, DRP sedang mengisi bahan bakar sepeda motor. Ketika diperiksa dan ditahan oleh kepolisian, DRP mengaku mendapat penyiksaan dengan cara ditampar di wajah berulang kali, dipukul di bagian dada, dipukul menggunakan selang di bagian punggung, dipaksa mengunyah kencur, tidak diberi makan dan minum, serta dipaksa tidur di lantai tanpa alas karena ia tidak mau mengaku sebagai peserta aksi demonstrasi yang sedang terjadi.²⁵⁵
219. LBH Yogyakarta mencatat setidaknya 26 anak berusia 15–17 tahun menjadi korban penyiksaan dan salah tangkap oleh Polres Magelang Kota—termasuk DRP. Dari jumlah tersebut, 6 anak mengambil langkah hukum lanjutan dengan melaporkan kekerasan aparat ke Polda Jawa Tengah pada 2 September 2025.²⁵⁶ Royan Juliazka Chandrajaya, kuasa hukum DRP, menyatakan bahwa 4 anggota kepolisian mendatangi rumah keluarga DRP pada 3 September 2025 untuk menyatakan kekecewaan atas laporan yang dibuat oleh pihak keluarga. Anggota kepolisian tersebut meminta agar kasus DRP diselesaikan secara damai, yang ditolak oleh keluarga DRP.²⁵⁷
220. Di Bali, ketika aksi pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WITA, seorang polisi yang berada di dalam Gedung Polda Bali mengacungkan jari tengah ke arah massa. Massa yang melihat tindakan tersebut melempar batu ke Gedung Ditreskrimsus Polda Bali.²⁵⁸ LBH Bali mendatangi Ditreskrim Polda Bali untuk mendampingi massa yang ditahan setelah demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Namun, polisi menghalangi pendampingan hingga esok hari pukul 03.00 WITA. Sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dan perkara berlanjut hingga tahap persidangan.



Gambar 54. Foto orang tak dikenal saat sidang tahanan politik di Jakarta pada 23 Januari 2026 yang diduga sama dengan provokator kerusuhan di Kediri

²⁵⁵ KBR, <https://kbr.id/articles/ragam/darurat-penyiksaan-negara-gagal-memberikan-penghormatan-terhadap-ham>, 4 November 2025.

²⁵⁶ KBR, <https://kbr.id/articles/ragam/darurat-penyiksaan-negara-gagal-memberikan-penghormatan-terhadap-ham>, 4 November 2025.

²⁵⁷ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/polisi-magelang-dilaporkan-salah-tangkap-dan-siksa-anak-korban-mengaku-diminta-damai>, 17 September 2025.

²⁵⁸ BAP a.n. Komang Adi Supandita

221. Pada 23 Januari 2026, KPF menemukan orang tak dikenal yang diduga memprovokasi terjadinya kerusuhan setelah aksi damai pada 30 Agustus 2025 di Kediri turut mendatangi dan melihat proses persidangan Delpedro Marhaen Rismansyah, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein pada 23 Januari 2026 di Jakarta. Sejumlah informan KPF yang turut serta dalam aksi di Kediri mengonfirmasi kemiripan orang tak dikenal tersebut dengan provokator kerusuhan. Hingga laporan ini diterbitkan, identitasnya belum diketahui.

VI.B. Penangkapan demonstran dan pelajar oleh aparat

222. **Penangkapan di Jabodetabek:** Pada 25 Agustus 2025, pihak kepolisian melakukan penyekatan di berbagai ruas jalan dan stasiun KRL di wilayah penyangga Jakarta. Operasi ini terutama menyasar pelajar yang hendak menuju lokasi aksi. Dalam konferensi pers pada 26 Agustus 2025, Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap 351 orang.²⁵⁹ Dari jumlah tersebut, 196 orang merupakan anak di bawah umur.²⁶⁰ Penangkapan menyasar individu yang membawa atribut Jolly Roger One Piece. Data Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencatat sedikitnya 370 orang ditangkap pada hari yang sama.²⁶¹ Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat angka penangkapan serupa. Pada demonstrasi 28 Agustus 2025, kepolisian mengerahkan 4.531 personel gabungan bersama TNI untuk pengamanan di Jakarta. Aparat melakukan penangkapan terhadap ratusan warga sipil yang dituding terkait aksi unjuk rasa



Gambar 55 dan 56. Penyekatan massa demonstran oleh kepolisian

223. **Penangkapan demonstran di Jakarta Utara:** Pada 31 Agustus 2025, menyusul penyerangan Polres Jakarta Utara, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga. Kepolisian menyatakan bahwa warga yang ditangkap merupakan pelaku penyerangan terhadap Polres Jakarta Utara. Sekitar pukul 06.00 WIB, aparat kembali melakukan penangkapan. Sebagian besar korban menyatakan ditangkap oleh personel Brimob, sementara sejumlah saksi lain melaporkan bahwa penangkapan dilakukan oleh aparat tidak berseragam. Total 72 warga ditangkap terkait peristiwa penyerangan Polres Jakarta Utara, dan 66 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.²⁶²
224. **Penangkapan demonstran di Jawa Barat:** Di Bandung, demonstrasi pada 29 Agustus 2025 berakhir rusuh. Polda Jawa Barat menetapkan 42 orang sebagai tersangka. Sebanyak 26

²⁵⁹ Kompas, <https://www.kompas.tv/nasional/614410/komnas-ham-ratusan-orang-ditangkap-polisi-saat-demo-25-dan-28-agustus>, 29 Agustus 2025.

²⁶⁰ Tangerang News, <https://www.tangerangnews.com/tangsel/read/55124/Polres-Tangsel-Amankan-40-Pelajar-Mau-Demo-DPR-RI>, 29 Agustus 2025.

²⁶¹ YLBHI, <https://bantuanhukum.or.id/kepolisian-harus-tunduk-pada-hukum-tidak-boleh-ada-tindakan-represif-dalam-aksi-demonstrasi>, 28 Agustus 2025.

²⁶² Keterangan polisi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 4 Desember 2025.

orang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) dan 16 orang ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) terkait dugaan konten provokatif, penghasutan, dan aktivitas digital lainnya.²⁶³ Barang bukti yang disebut kepolisian meliputi bom molotov, bom pipa, senjata tajam, petasan, pakaian hitam yang digunakan saat aksi, rekaman video, serta sejumlah buku pengetahuan yang oleh aparat dilabeli sebagai “rujukan anarkisme.”²⁶⁴ Kepolisian menyebut kerusuhan tidak sepenuhnya spontan dan terdapat indikasi perencanaan, provokasi, serta keterkaitan dengan kelompok tertentu. Kepolisian juga menyebut dugaan pengaruh ideologi anarkisme melalui literatur dan konten media sosial, termasuk dugaan jejaring lintas daerah dan kemungkinan afiliasi internasional, misalnya pembelian buku dari luar negeri dan dugaan aliran dana.²⁶⁵

225. **Penangkapan demonstran di Jawa Timur:** Di Surabaya, 315 orang dilaporkan ditahan dan 33 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Beberapa nama yang disebut sebagai tersangka antara lain Andri Irawan yang diduga mengajak membeli bensin untuk melakukan pembakaran serta Ali Arasy dan Rizki Amanah Putra yang diduga turut serta dalam pembelian bensin dan pembakaran. Dalam salah satu kutipan percakapan yang dicantumkan, Andri Irawan menyuruh Rizki Amanah Putra, “*Maju ae mas... lempar ndek kerumunan massa.*” Di Malang, polisi menangkap 61 orang yang terdiri atas 40 dewasa dan 21 anak setelah demonstrasi pada 29 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 17 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di Jember, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka setelah aksi pada 30 Agustus 2025. Dua di antaranya adalah anak di bawah umur. Selain itu, seorang anggota tim paramedis jalanan juga ditetapkan sebagai tersangka meskipun dilaporkan telah meninggalkan lokasi aksi sejak pukul 16.30 WIB.
226. **Penangkapan demonstran di Jawa Tengah:** Polda Jawa Tengah menangkap sekitar 400 orang dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk 1 orang yang ditahan atas tuduhan perusakan di Semarang. Selain itu, dua aktivis lingkungan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan provokasi melalui unggahan Instagram yang menampilkan situasi aksi pada malam 29 Agustus 2025 dengan tulisan “Bakar!”²⁶⁶ Pada 30 Agustus 2025, penasihat hukum Suara Aksi Semarang turut ditahan oleh pihak kepolisian. Di Solo, aparat kepolisian menetapkan sejumlah peserta aksi 29 Agustus 2025 sebagai tersangka, termasuk mereka yang membuat dan menggunakan bom molotov. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan keterlibatan setelah melihat dan menindaklanjuti seruan di media sosial.²⁶⁷ Di Magelang, sebanyak 53 orang ditangkap dan ditahan di Polres Magelang Kota.
227. **Penangkapan demonstran di Sumatera Selatan:** Di Palembang, aparat kepolisian menangkap dan menetapkan sebagai tersangka sejumlah orang yang dinilai pertama kali mengikuti rombongan konvoi dan melakukan perusakan pada demonstrasi 30 Agustus 2025.
228. **Penangkapan pelajar secara nasional:** Secara keseluruhan, KPAI mencatat 2.573 anak ditangkap oleh pihak kepolisian di 15 kota, dengan jumlah terbesar (629 anak) di Jakarta.²⁶⁸ Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyatakan ada 332 anak yang diduga terlibat dalam peristiwa kerusuhan dan masih diproses hingga 3 November 2025. Lebih dari 90% anak yang ditangkap merupakan pelajar sekolah menengah tingkat pertama dan atas.²⁶⁹

²⁶³ Detik, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8117095/6-fakta-penyitaan-buku-milik-tersangka-demo-ricuh-di-Bandung>, 18 September 2025.

²⁶⁴ Bandung Raya, <https://bandungraya.inews.id/read/637189/polisi-sita-belasan-buku-tentang-anarkisme-dari-42-tersangka-kasus-kerusuhan-di-Bandung>, 16 September 2025.

²⁶⁵ IDN Times, <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/polisi-tetapkan-42-orang-jadi-tersangka-dalam-aksi-anarki-demo-di-bandung-00-9y7yl-10s2py>, 16 September 2025.

²⁶⁶ BAP a.n. Adetya Pramandira.

²⁶⁷ BAP a.n. Rafli Adriansyah; BAP a.n. Rizky Ardiansyah.

²⁶⁸ KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pemulihan-dan-pendidikan-anak-dalam-aksi-perlu-sinergi-semua-pihak>, 4 September 2025.

²⁶⁹ Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/5218453/bareskrim-catat-332-anak-terlibat-kerusuhan-unjuk-rasa-agustus-lalu>, 4 November 2025.

1. Polda Jawa Timur: 144 anak
 2. Polda Jawa Tengah: 77 anak
 3. Polda Jawa Barat: 34 anak
 4. Polda Metro Jaya: 36 anak
 5. Sisanya (41 anak) tersebar di Polda Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan.
229. **Penangkapan pelajar di Jabodetabek:** Di Bekasi, aparat melakukan razia dan menangkap puluhan orang yang diidentifikasi sebagai pelajar.²⁷⁰ Sebagian berasal dari Cirebon dan Indramayu, dan diduga sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk ikut demonstrasi. Sedikitnya 120 pelajar ditangkap dalam operasi penyekatan dan razia di wilayah penyangga Jakarta, termasuk Bekasi, Indramayu, Cirebon, Serang, Purwakarta, Depok, dan Cianjur.²⁷¹ Kepolisian menyatakan penangkapan tersebut sebagai langkah pengamanan. Aparat berdalih bahwa pelajar “diamankan, dijaga, dan dilindungi” dari potensi kerusuhan. Di Jakarta, sejumlah pelajar ditangkap sebelum mencapai titik aksi di DPR. Mereka dicegat aparat kepolisian di Stasiun Palmerah, Depok, dan Bogor. Polda Metro Jaya melaporkan 190 pelajar ditangkap.²⁷² Angka ini berbeda dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 200 anak ditahan di Polda Metro Jaya, serta 55 anak lainnya ditahan di Polres Jakarta Timur dan Polres Jakarta Selatan.²⁷³ Perbedaan data ini menunjukkan tidak adanya koordinasi lembaga negara terkait penanganan anak dalam konteks pengamanan demonstrasi. Komnas HAM mencatat setidaknya 600 orang dewasa dan anak ditangkap oleh polisi, baik di lokasi aksi maupun dalam operasi penyekatan menuju Jakarta.²⁷⁴
230. **Penangkapan pelajar di Jawa Barat:** Pada 28 Agustus 2025, kepolisian melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap 417 pelajar di Jawa Barat dan 276 pelajar di Jabodetabek sebelum terjadinya aksi demonstrasi dengan alasan mengamankan mereka dari kerusuhan.²⁷⁵ Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengklaim kepolisian menyita senjata tajam dari beberapa pelajar yang ditangkap dalam perjalanan menuju lokasi aksi.²⁷⁶
231. **Penangkapan pelajar di Jawa Timur:** Pada 21 September 2025, kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pegiat literasi dan pelajar bernama Ahmad Faiz Yusuf di Nganjuk, Jawa Timur. Faiz ditangkap di rumahnya oleh aparat dari Polres Kediri Kota berpakaian preman tanpa memperlihatkan surat tugas, perintah penangkapan, serta izin penggeledahan dari pengadilan setempat sesuai aturan KUHAP yang berlaku.²⁷⁷

VI.C. Penempatan rantis di kerumunan massa

232. Pada 28 Agustus 2025, satu unit rantis jenis Rimueng berpelat Polri 17713-VII ditempatkan di tengah kerumunan massa aksi di area Pejompongan, Jakarta Pusat, meskipun tidak ada objek vital negara di area tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 2/2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

²⁷⁰ IDN Times, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/11-fakta-demo-28-29-agustus-2025-yang-tewaskan-affan-kurniawan-00-f48mr-thr5rc>, 30 Agustus 2025.

²⁷¹ YouTube @officialnews, <https://www.youtube.com/watch?v=63JHxFrSTI4>, 28 Agustus 2025.

²⁷² School Media, <https://schoolmedia.id/artikel/863/kpai-prihatin-penahanan-386-anak-sekolah-dalam-aksi-demonstrasi-di-Jakarta>, 1 September 2025.

²⁷³ Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/5082605/kpai-dalami-dugaan-ada-yang-gerakkan-pelajar-terlibat-aksi-demo>, 2 September 2025.

²⁷⁴ Kompas, <https://www.kompas.tv/nasional/614410/komnas-ham-ratusan-orang-ditangkap-polisi-saat-demo-25-dan-28-agustus>, 29 Agustus 2025.

²⁷⁵ Polri, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2130574-polda-jabar-menghimbau-siswa-sekolah-tidak-terprovokasi-ajakan-demo-anarkis>, 15 Oktober 2025; Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-276-pelajar-yang-hendak-ikut-demo-di-dpr--2064020>, 28 Agustus 2025.

²⁷⁶ Kompas, <https://bandung.kompas.com/read/2025/08/28/223518278/polda-jabar-cegah-pelajar-ikut-demo-331-orang-diamankan-polisi-temukan-sajam>, 28 Agustus 2025.

²⁷⁷ Project Multatuli, <https://projectmultatuli.org/tahanan-politik-dari-perburuan-polisi-ditangkap-paksa-dilarang-baca-buku-disiksa-untuk-mengaku>, 16 Oktober 2025.

233. Di dalam rantis tersebut, terdapat 7 personel Brimob. Rantis yang melaju kencang secara zig-zag dan melawan arus berakibat fatal dalam pembunuhan warga sipil berprofesi sopir ojol yang diketahui bernama Affan Kurniawan akibat dilindas dan diseret kendaraan lapis baja. Ketujuh personel Brimob tersebut adalah sebagai berikut:
1. **Kompol Cosmas Kaju Gae**, Danyon A Resimen 4 Korps Brimob Polri, merupakan komandan rantis yang duduk di sebelah sopir ketika kejadian.
 2. **Bripka Rochmat**, Bamin Silog Batalyon D Pas Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, merupakan sopir rantis ketika kejadian.
 3. **Bharaka Yohanes David**, personel Tamtama Brimob Polda Metro Jaya, merupakan kru yang duduk di bagian belakang rantis ketika kejadian.
 4. **Bharaka Jana Edi Bintoro**, personel Tamtama Brimob Polda Metro Jaya, merupakan kru yang duduk di bagian belakang rantis ketika kejadian.
 5. **Bripda Mardin**,
 6. **Aipda M. Rohyani**, anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya, merupakan kru yang duduk di bagian belakang rantis ketika kejadian.
 7. **Briptu Danang Setiawan**, anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya, merupakan kru yang duduk di bagian belakang rantis ketika kejadian.
234. Segera setelah kejadian, ketujuh personel Brimob tersebut dikenai penempatan khusus di sel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri selama 20 hari sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025. Sopir dan pemberi komando yang berada di dalam rantis mengaku bertindak dalam kondisi panik dengan maksud hendak menyelamatkan diri dari kepungan massa aksi yang marah.
235. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menghasilkan keputusan:
1. Pada 3 September 2025, Kompol Cosmas Kaju Gae dinyatakan bersalah melakukan **pelanggaran etik berat** karena memerintahkan sopir untuk terus maju setelah melindas Affan Kurniawan. Ia dikenai hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dan kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut.²⁷⁸
 2. Pada 4 September 2025, Bripka Rochmat dinyatakan bersalah melakukan **pelanggaran etik berat**. Dengan dalih mengikuti perintah atasan dan mengaku tidak melihat korban (*blind spot*), ia hanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 7 tahun dan tetap mengajukan banding atas keputusan tersebut.²⁷⁹
 3. Pada 29 September 2025, Aipda M. Rohyani dinyatakan bersalah melakukan **pelanggaran etik sedang**. Ia lalai terhadap tanggung jawab etiknya untuk mengingatkan personel terkait prosedur penanganan massa aksi dengan hukuman meminta maaf secara lisan pada sidang KKEP dan tertulis pada Kapolri.²⁸⁰
 4. Pada 30 September 2025, Briptu Danang Setiawan, melakukan **pelanggaran etik sedang**. Ia lalai terhadap tanggung jawab etiknya untuk mengingatkan personel terkait prosedur penanganan massa aksi dengan hukuman meminta maaf secara lisan pada sidang KKEP dan tertulis pada Kapolri.²⁸¹
 5. Pada 1 Oktober 2025, Bripda Mardin dinyatakan bersalah melakukan **pelanggaran etik sedang**. Ia lalai terhadap tanggung jawab etiknya untuk mengingatkan personel terkait

²⁷⁸ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8104749/kompol-kosmas-dan-bripka-rohmat-pelindas-affan-kurniawan-ajukan-banding>, 10 September 2025.

²⁷⁹ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8104749/kompol-kosmas-dan-bripka-rohmat-pelindas-affan-kurniawan-ajukan-banding>, 10 September 2025.

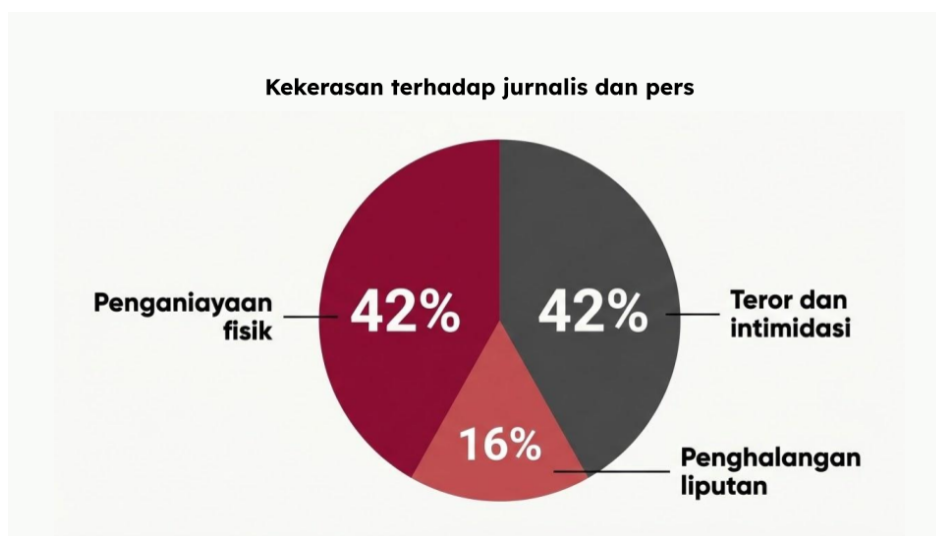
²⁸⁰ Metro TV, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGLJJ-ini-sanksi-untuk-aipda-rohyani-penumpang-barracuda-penabrak-affan-kurniawan>, 30 September 2025.

²⁸¹ Polri, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2109068-sidang-kkep-putusan-sanksi-untuk-briptu-danang-setiawan-terkait-penanganan-unjuk-rasa>, 1 Oktober 2025.

prosedur penanganan massa aksi dengan hukuman meminta maaf secara lisan pada sidang KKEP dan tertulis pada Kapolri.²⁸²

6. Pada 2 Oktober 2025, Bharaka Jana Edi Bintoro dinyatakan bersalah melakukan **pelanggaran etik sedang**. Ia lalai terhadap tanggung jawab etiknya untuk mengingatkan personel terkait prosedur penanganan massa aksi dengan hukuman meminta maaf secara lisan pada sidang KKEP dan tertulis pada Kapolri.²⁸³
7. Pada 3 Oktober 2025, Bharaka Yohanes David dinyatakan bersalah melakukan **pelanggaran etik sedang**. Ia lalai terhadap tanggung jawab etiknya untuk mengingatkan personel terkait prosedur penanganan massa aksi dengan hukuman meminta maaf secara lisan pada sidang KKEP dan tertulis pada Kapolri.²⁸⁴

VI.C. Kekerasan terhadap jurnalis dan pers



236. KPF bersama LBH Pers mencatat setidaknya 12 insiden kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja pers selama rangkaian demonstrasi Agustus 2025. Jumlah ini tidak merepresentasikan skala kekerasan yang sebenarnya karena tidak semua insiden dilaporkan atau didokumentasikan oleh korban.
237. Kekerasan terhadap jurnalis dan pers menysasar individu dalam 11 dari 12 insiden (92%) dan menysasar lembaga dalam 1 dari 12 insiden (8%). Dari 12 insiden, pelaku dapat diidentifikasi dalam 8 di antaranya (67%) dan belum diketahui dalam 4 sisanya (33%). Dari kasus yang dapat diidentifikasi, pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan pers adalah aparat kepolisian (62%), demonstran (25%), dan pejabat setempat (13%). Kekerasan yang didokumentasikan terdiri atas berbagai bentuk: penganiayaan fisik (42%), penghalangan liputan (16%), serta teror, intimidasi, dan serangan siber insiden (42%).

| Insiden | Lokasi | Korban |
|----------------------------------|---------|---------------------------|
| Penganiayaan fisik oleh polisi | Jakarta | Bayu Pratama (Antara) |
| Penganiayaan fisik oleh polisi | Jakarta | Leo Chandra (tvOne) |
| Intimidasi dan serangan siber | Jakarta | 1 orang jurnalis (Jaring) |
| Teror dan intimidasi oleh polisi | Jakarta | Ahmad (Jaring) |
| Teror dan intimidasi | Jakarta | 1 orang (Jurnas) |

²⁸² Warta Kota, <https://wartakota.tribunnews.com/news/870384/3-anggota-brimob-yang-duduk-di-barisan-belakang-rantis-dihukum-etik-meminta-maaf-ke-pimpinan-polri>, 10 Oktober 2025.

²⁸³ Warta Kota, <https://wartakota.tribunnews.com/news/870384/3-anggota-brimob-yang-duduk-di-barisan-belakang-rantis-dihukum-etik-meminta-maaf-ke-pimpinan-polri>, 10 Oktober 2025.

²⁸⁴ Warta Kota, <https://wartakota.tribunnews.com/news/870384/3-anggota-brimob-yang-duduk-di-barisan-belakang-rantis-dihukum-etik-meminta-maaf-ke-pimpinan-polri>, 10 Oktober 2025.

| | | |
|------------------------------------|----------------|---|
| Penghalangan liputan oleh polisi | Sumatera Utara | 6 orang jurnalis |
| Penganiayaan fisik | Jakarta | Muhammad Adiman (Antara) Martin Yogi Pardamean (Tempo) |
| Intimidasi oleh pejabat setempat | Jawa Barat | Akun TikTok Pikiran Rakyat |
| Penganiayaan fisik oleh demonstran | Jambi | 8 orang jurnalis |
| Penghalangan liputan oleh polisi | Bali | Faniola Danira (Detik) Rovin Bou (Bali Topik) |
| Serangan siber | Jawa Tengah | Ahmad Ramzy (Serat) |
| Penganiayaan fisik oleh demonstran | Jakarta | Rafi Adhi (Disway) |

Tabel 2. Insiden kekerasan terhadap jurnalis dan pers selama demonstrasi Agustus 2025

VI.D. Intimidasi, teror, dan pembatasan ruang digital

238. Pada 4 September 2025, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, melaporkan bahwa kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dalam patroli siber pada 23 Agustus hingga 3 September 2025
239. Patroli siber kepolisian diklaim menemukan ratusan akun media sosial yang diduga memprovokasi kerusuhan pada aksi demonstrasi Agustus 2025; 592 di antaranya telah diblokir.²⁸⁵ Himawan mengklaim adanya dugaan aliran dana bisnis judi online (judol) melalui skema hadiah (*gift*) bagi pemilik akun media sosial yang melakukan siaran langsung (*livestream*) pada saat aksi demonstrasi berlangsung.²⁸⁶
240. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut menyatakan adanya dugaan aliran dana dari industri judol kepada sejumlah akun yang menayangkan langsung peristiwa demonstrasi dan kerusuhan. Ia mengklaim ada ajakan penjarahan, penyerangan, serta penyebaran isu suku, agama, ras, dan golongan.²⁸⁷
241. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung, juga mengklaim temuan patroli siber tentang 10 akun anonim yang menyebarkan berita hoaks tentang eksodus besar-besaran serta ajakan menduduki dan melumpuhkan bandara.²⁸⁸
242. Pemantauan independen oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 169 orang yang ditangkap oleh kepolisian berkaitan dengan aktivitas siber selama rangkaian demonstrasi. Sebagian besar dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SAFEnet mencatat patroli siber berdampak terhadap meningkatnya penangkapan terhadap para aktivis dan pegiat media sosial.²⁸⁹
243. Pada 25–31 Agustus 2025, SAFEnet juga menerima 16 pengaduan korban doxing dari masyarakat yang aktif bersuara di media sosial. Modus terbanyak berupa teror terhadap keluarga atau teman melalui WhatsApp oleh orang tak dikenal yang mengaku dari Polda dan menyatakan korban akan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) apabila tidak menghapus konten kritisnya di media sosial.²⁹⁰

²⁸⁵ Bloomberg Technoz, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/82918/polisi-komdigi-blokir-592-akun-medsos-terindikasi-memprovokasi/2>, 4 September 2025.

²⁸⁶ Voice of Indonesia, <https://voi.id/berita/511767/polri-patroli-siber-buru-akun-medsos-lain-yang-sebar-provokasi-aksi-kerusuhan>, 4 September 2025.

²⁸⁷ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/menteri-komdigi-mengungkapkan-ada-aliran-dana-untuk-provokasi-di-ruang-digital-2065372>, 1 September 2025.

²⁸⁸ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-identifikasi-puluhan-akun-provokasi-melumpuhkan-bandara-saat-kerusuhan-jakarta-2068322>, 10 September 2025.

²⁸⁹ SAFEnet, <https://safenet.or.id/id/2025/12/operasi-senyap-polisi-siber-perburuan-jejak-digital-demonstrasi-agustus-september>, Desember 2025.

²⁹⁰ Kompas, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/09/08/093600382/safenet-terima-16-aduan-terkait-doxing-saat-demonstrasi-akhir-Agustus>, 8 September 2025.

244. SAFEnet menemukan pergeseran signifikan dalam pendekatan negara terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi khususnya selama demonstrasi Agustus 2025 dengan adanya represi melalui patroli siber, pemblokiran, dan kriminalisasi atas unggahan di media sosial.²⁹¹

VI.E. Korban luka dan meninggal dunia

245. Pada rentang 25–31 Agustus 2025, pemantauan media yang dilakukan oleh YLBHI mencatat setidaknya 1.042 warga sipil dirawat di rumah sakit di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Medan, Sorong, dan Malang. Angka tersebut tidak mencakup mereka yang mengalami luka dan ditangkap oleh aparat kepolisian.
246. Pada demonstrasi 28 Agustus 2025 di Jakarta, pemantauan dan dokumentasi KPF mencatat sedikitnya 38 orang warga sipil mengalami luka.²⁹²

| Rumah Sakit | Korban Luka |
|---|-----------------|
| RS Cipto Mangunkusumo | 1 orang |
| RS Pelni | 12 orang |
| RS Pusat Pertamina | 8 orang |
| RS Bhakti Mulya | 5 orang |
| RS Budi Kemuliaan | 2 orang |
| RS Patria IKKT | 1 orang |
| RS Angkatan Laut Mintohardjo | 5 orang |
| RS Permata Hijau | 1 orang |
| RS Tarakan | 1 orang |
| RS Duren Sawit | 2 orang |
| Total Korban Luka di Jakarta (28 Agustus 2025) | 38 orang |

Tabel 3. Korban luka-luka di Jakarta pada demonstrasi 28 Agustus 2025

247. Selain warga sipil, setidaknya 10 orang aparat kepolisian juga mengalami luka-luka dalam pengamanan demonstrasi 28 Agustus 2025. Satu di antaranya dilaporkan mengalami luka serius, namun tidak ada yang meninggal dunia.²⁹³
248. Di Surabaya, demonstrasi 29 Agustus 2025 yang berakhir rusuh dan mengakibatkan 8 aparat polisi luka-luka, puluhan sepeda motor dinas terbakar, dan bagian atap Gedung Negara Graha di dilaporkan mengalami kerusakan berat setelah terjadi pembakaran.
249. Hingga 31 Januari 2026, terdapat 13 orang korban meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi selama demonstrasi 25–31 Agustus 2025.
250. Korban meninggal pertama adalah Affan Kurniawan yang menjadi korban pembunuhan oleh aparat Brimob setelah dilindas oleh rantis di Jakarta usai mengantar makanan sebagai sopir ojol pada 28 Agustus 2025 malam. Kematian Affan menjadi katalis yang mengakselerasi terjadinya eskalasi demonstrasi menjadi kerusuhan di berbagai kota.
251. Di antara 13 korban tersebut, terdapat satu orang pelajar berusia 16 tahun, Andika Lutfi Falah, yang meninggal dengan kondisi tempurung kepala pecah setelah berdemo di Gedung DPR pada 29 Agustus 2025.²⁹⁴

²⁹¹ SAFEnet, <https://safenet.or.id/id/2025/12/operasi-senyap-polisi-siber-perburuan-jejak-digital-demonstrasi-agustus-september>, Desember 2025.

²⁹² CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250829085439-20-1267700/38-orang-luka-usai-insiden-demo-pemprov-dki-tanggung-biaya-perawatan>, 29 Agustus 2025.

²⁹³ Tribun News, <https://wartakota.tribunnews.com/nasional/865547/10-polisi-terluka-dalam-keriuhan-demo-di-dpr-satu-orang-dilaporkan-kritis>, 29 Agustus 2025; Kompas, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/08/29/173310782/tidak-benar-AKP-Darkun-meninggal-dunia-akibat-demo-28-agustus-2025>, 29 Agustus 2025.

²⁹⁴ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/pelajar-asal-tangerang-meninggal-diduga-akibat-dianiaya-polisi-2065695>, 2 September 2025.

| Lokasi dan Tanggal | Nama, Usia, dan Pekerjaan | Penyebab Kematian |
|--------------------------|--|--|
| Jakarta 28 Agustus | Affan Kurniawan (21) Ojek Online | Dilindas rantis Brimob kepolisian saat bekerja mengantar pesanan makanan. |
| Manokwari 28 Agustus | Septinus Sesa (n/a) Aparatur Sipil Negara | Sesak napas setelah diduga terpapar gas air mata aparat kepolisian. |
| Makassar 29 Agustus | Rusmadiansyah (25) Ojek Online | Dikeroyok massa demonstran karena dituduh agen intelijen kepolisian. |
| Solo 29 Agustus | Sumari (60) Tukang Becak | Sesak napas setelah diduga terpapar gas air mata aparat kepolisian. |
| Makassar 29 Agustus | Akbar Basri (26) Aparatur Sipil Negara | Terjebak di Gedung DPRD Kota Makassar yang dibakar massa aksi. |
| | Sarina Wati (25) Aparatur Sipil Negara | |
| | Saiful Akbar (46) Aparatur Sipil Negara | |
| Yogyakarta 31 Agustus | Rheza Sindy Pratama (21) Mahasiswa | Diduga kekerasan aparat saat berdemonstrasi di Polda Yogyakarta. |
| Semarang 31 Agustus | Iko Juliant Junior (19) Mahasiswa | Diklaim polisi korban kecelakaan, namun diduga kekerasan aparat. |
| Jakarta, 2 September | Andika Lutfi Falah (16) Pelajar | Diduga kekerasan aparat saat berdemonstrasi di Gedung DPR. |
| Jakarta 30 Oktober | M. Farhan Hamid (23) <i>Tidak diketahui</i> | Setelah terakhir dilihat pada 29 Agustus 2025, keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada 30 Oktober 2025. Penemuan jasad keduanya hanya berupa tulang-belulang yang hangus diduga akibat kebakaran yang terjadi di Gedung ACC Kwitang berdasarkan keterangan tim forensik RS Bhayangkara sesuai hasil tes DNA. |
| | Reno Syahputradewo (24) <i>Tidak diketahui</i> | |
| Surabaya 30 Desember | Alfarisi (21) Pedagang | Diduga korban penganiayaan aparat di Rumah Tahanan Surabaya. |

Tabel 4. Korban meninggal dunia selama rangkaian demonstrasi Agustus 2025

252. Tiga orang korban meninggal dunia yang terjebak di Gedung DPRD Kota Makassar yang dibakar massa aksi pada 29 Agustus 2025 merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPRD Kota Makassar dan Kecamatan Ujung Tanah di Sulawesi Selatan.²⁹⁵ Dua orang korban meninggal dunia, Sumari (Solo) dan Septinus Sesa (Manokwari) diduga meninggal dunia akibat komplikasi yang disebabkan paparan gas air mata aparat kepolisian ketika penanganan demonstrasi.²⁹⁶
253. Setelah sempat dinyatakan hilang sejak terakhir dilihat di area Mako Brimob Kwitang pada demonstrasi 29 Agustus 2025, jasad M. Farhan Hamid dan Reno Syahputradewo ditemukan

²⁹⁵ Kompas, <https://www.kompas.tv/regional/614534/bpbd-tiga-orang-meninggal-dan-lima-terluka-usai-gedung-dprd-Makassar-dibakar-massa>, 30 Agustus 2025.

²⁹⁶ Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2025/09/06/195803278/sesak-karena-gas-air-mata-septinus-sesa-tutup-usia-komnas-ham-turun>, 6 September 2025; Kompas, <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/09/03/071500488/tukang-becak-di-solo-meninggal-saat-kericuhan-diduga-penyakit>, 5 September 2025.

di bekas kebakaran Gedung ACC Kwitang pada 30 Oktober 2025.²⁹⁷ Meskipun kepolisian mengklaim keduanya meninggal karena terjebak dalam kebakaran, terdapat sejumlah kejangalan yang diabaikan kepolisian dalam proses penyelidikan.²⁹⁸

VI.F. Kriminalisasi demonstiran dan aktivis

254. Pada 24 September 2025, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono, mengumumkan kepolisian telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka terkait aksi demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 664 merupakan orang dewasa dan 295 lainnya tergolong anak.²⁹⁹
255. Pada 26 September 2025, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Polri telah menangkap dan menahan 6.719 orang di seluruh Indonesia berkaitan dengan aksi demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025.³⁰⁰
256. Setelah demonstrasi berakhir, KontraS membuka posko pengaduan orang hilang. Data per 18 September 2025 mencatat 44 orang hilang selama di berbagai daerah.³⁰¹
257. Aparat kepolisian menysasar aktivis hingga pegiat termasuk orang-orang yang kerap bersuara di media sosial. Banyak tindakan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan aparat ditengarai melanggar hukum acara pidana.
258. Penelusuran KPF menemukan penyidik Polda Metro Jaya, Kopol Gilang Prasatya, sebagai aparat yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aktivis yang menjadi saksi dan tersangka tuduhan provokator aksi demonstrasi, di antaranya:
 1. **Jakarta:** Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, Delpedro Marhaen Rismansyah, Gerry Gesta Abdullah, Bilal Mumtazkillah, Avicenna, Andi Febriansyah Rahmadana, Bonny Fadillah Ambaritha, dan Daffa Athalla Batubara
 2. **Kediri:** Saiful Amin dan Shelfin Bima
 3. **Surabaya:** Muhammad Fakhurrozi
259. Selain aktivis, warga biasa yang tidak memiliki rekam jejak terlibat dalam gerakan sosial juga turut ditangkap dan diadili. Salah satunya adalah pengguna TikTok bernama Juman (@jomblo6hari) yang didakwa Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Ia ditangkap 6 jam setelah mengunggah ulang video dari akun @OPOSISIA2 yang menyatakan, "*Seandainya serempak begini, maka [Kapolri] Sigit akan dicopot dan diadil*" pada 1 September 2025.
260. Di samping itu, juga ditemukan banyak bukti terjadinya salah tangkap terhadap warga yang sama sekali tidak terlibat dan berpartisipasi dalam aksi demonstrasi. Di Magelang, 14 orang ditangkap meskipun tidak ikut berdemonstrasi namun dijaring dalam operasi penyisiran. Di Jakarta Utara, salah satu tersangka dengan inisial RAS divonis 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara meskipun juga tidak ikut berdemonstrasi dan dijaring kepolisian dalam penyisiran setelah demonstrasi berakhir.

²⁹⁷ Kompas, <https://www.kompas.tv/nasional/628700/polda-metro-jaya-pastikan-reno-dan-farhan-korban-kebakaran-di-gedung-kwitang>, 7 November 2025.

²⁹⁸ Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/jejak-farhan-dan-reno-setelah-api-padam>, 13 November 2025.

²⁹⁹ Polri, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025>, 24 September 2025.

³⁰⁰ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/yusril-polisi-tangkap-6-ribu-orang-usai-demo-agustus-mayoritas-dibebaskan-2073816>, 27 September 2025.

³⁰¹ BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>, 18 September 2025.

VII. Perburuan Aktivistis Terbesar sejak Reformasi

VII.A. Pemidanaan tanpa mens rea

261. Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sedikitnya 6.719 orang ditangkap di seluruh Indonesia dalam demonstrasi Agustus 2025. Sebanyak 5.858 orang sudah dibebaskan.
262. Menurut Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), sedikitnya 399 korban penangkapan adalah anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk pelajar. Dari jumlah tersebut, 382 anak sempat ditahan dan 331 di antaranya telah dibebaskan.
263. Per 14 Februari 2026, Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) mencatat 703 tahanan politik yang menjalani proses hukum, dengan total 506 orang telah diputus bersalah. Sementara itu, 31 orang masih belum dapat dikonfirmasi status pemidanaannya.

| Status | Jumlah | Persentase |
|---|------------|-------------|
| Diputus bersalah | 506 orang | 71,98% |
| Ditahan | 125 orang | 17,78% |
| Ditangguhkan (dalam persidangan) | 6 orang | 0,85% |
| Ditangguhkan (dalam penyidikan) | 9 orang | 1,28% |
| Diversi (terdakwa anak) | 18 orang | 2,56% |
| Dibebaskan atau ditangguhkan | 7 orang | 1,00% |
| Meninggal dunia | 1 orang | 0,14% |
| Belum dapat dikonfirmasi | 31 orang | 4,41% |
| Total Tahanan Politik per 14 Februari 2026 | 703 | 100% |

Tabel 5. Tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan status pemidanaan

264. Per 14 Februari 2026, GMLK mencatat lima provinsi dengan jumlah tahanan politik terbanyak adalah Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

| Provinsi | Jumlah | Persentase |
|---|------------|-------------|
| Jawa Timur | 191 orang | 27,17% |
| Jakarta | 163 orang | 23,19% |
| Jawa Tengah | 113 orang | 16,07% |
| Jawa Barat | 72 orang | 10,24% |
| Sulawesi Selatan | 54 orang | 7,68% |
| Banten | 32 orang | 4,55% |
| Nusa Tenggara Barat | 22 orang | 3,13% |
| Sumatera Selatan | 21 orang | 2,99% |
| Bali | 15 orang | 2,13% |
| Yogyakarta | 8 orang | 1,14% |
| Kalimantan Timur | 7 orang | 1,00% |
| Sulawesi Barat | 3 orang | 0,43% |
| Kalimantan Barat | 1 orang | 0,14% |
| Lampung | 1 orang | 0,14% |
| Total Tahanan Politik per 14 Februari 2026 | 703 | 100% |

Tabel 6. Tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan provinsi

265. Per 14 Februari 2026, GMLK mencatat lima kabupaten/kota tiga daerah dengan tahanan politik terbanyak adalah Jakarta Utara, Makassar, Jakarta Pusat, Bandung, dan Surabaya.

| Kabupaten/Kota | Jumlah | Persentase |
|---|------------------|-------------|
| Jakarta Utara | 71 orang | 10,10% |
| Makassar | 52 orang | 7,40% |
| Jakarta Pusat | 48 orang | 6,83% |
| Bandung | 46 orang | 6,54% |
| Surabaya | 46 orang | 6,54% |
| Blitar | 32 orang | 4,55% |
| Jakarta Timur | 32 orang | 4,55% |
| Solo | 31 orang | 4,41% |
| Kediri (Kota) | 29 orang | 4,13% |
| Kediri (Kabupaten) | 29 orang | 4,13% |
| Mataram | 22 orang | 3,13% |
| Tangerang | 21 orang | 2,99% |
| Palembang | 21 orang | 2,99% |
| Malang (Kota) | 19 orang | 2,70% |
| Malang (Kabupaten) | 15 orang | 2,13% |
| Pekalongan | 15 orang | 2,13% |
| Denpasar | 15 orang | 2,13% |
| Bekasi | 14 orang | 1,99% |
| Jepara | 13 orang | 1,85% |
| Magelang | 12 orang | 1,71% |
| Semarang | 11 orang | 1,56% |
| Serang | 11 orang | 1,56% |
| Cilacap | 10 orang | 1,42% |
| Jakarta Selatan | 10 orang | 1,42% |
| Jember | 10 orang | 1,42% |
| Madiun | 9 orang | 1,28% |
| Ciamis | 7 orang | 1,00% |
| Samarinda | 7 orang | 1,00% |
| Temanggung | 7 orang | 1,00% |
| Cibinong | 5 orang | 0,71% |
| Sragen | 5 orang | 0,71% |
| Yogyakarta | 5 orang | 0,71% |
| Batang | 3 orang | 0,43% |
| Majene | 3 orang | 0,43% |
| Purwokerto | 3 orang | 0,43% |
| Sleman | 3 orang | 0,43% |
| Jakarta Barat | 2 orang | 0,28% |
| Nganjuk | 2 orang | 0,28% |
| Palopo | 2 orang | 0,28% |
| Tegal | 2 orang | 0,28% |
| Bandar Lampung | 1 orang | 0,14% |
| Pontianak | 1 orang | 0,14% |
| Salatiga | 1 orang | 0,14% |
| Total Tahanan Politik per 14 Februari 2026 | 703 orang | 100% |

Tabel 7. Tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 berdasarkan kabupaten/kota

266. Per 14 Februari 2026, KPF menghimpun 23 jenis pasal hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemidanaan terhadap demonstran, pelajar, warga, dan mereka yang menjadi tahanan politik.

| Pasal | Tindak Pidana | Jumlah | Frekuensi |
|------------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 170 UU KUHP | Pengeroyokan di muka umum | 348 | Ekstrem |
| 363 UU KUHP | Pencurian dengan pemberatan | 166 | Tinggi |
| 212 UU KUHP | Melawan aparat (sendiri) | 147 | Tinggi |
| 214 UU KUHP | Melawan aparat (bersama-sama) | 123 | Tinggi |
| 406 UU KUHP | Perusakan barang orang lain | 108 | Tinggi |
| 187 UU KUHP | Membakar dan meledakkan benda | 54 | Sedang |
| 160 UU KUHP | Penghasutan di muka umum | 53 | Sedang |
| 28 (2) UU ITE | Ujaran kebencian di ranah digital | 32 | Sedang |
| 1 (1) UU Darurat | Kepemilikan senjata | 27 | Sedang |
| 213 UU KUHP | Kekerasan terhadap aparat | 22 | Sedang |
| 28 (3) UU ITE | Hoaks yang membuat kerusakan | 17 | Rendah |
| 218 UU KUHP | Menyerang kehormatan presiden | 15 | Rendah |
| 216 UU KUHP | Membangkang pada aparat | 10 | Rendah |
| 362 UU KUHP | Pencurian biasa | 7 | Rendah |
| 211 UU KUHP | Pemaksaan terhadap pejabat | 7 | Rendah |
| 480 UU KUHP | Menadah hasil pencurian | 7 | Rendah |
| 76 UU PA | Pembahayaan anak dalam aksi | 6 | Rendah |
| 161 UU KUHP | Menyiarkan hasutan | 5 | Rendah |
| 32 UU ITE | Merusak informasi elektronik | 4 | Rendah |
| 351 UU KUHP | Penganiayaan biasa | 4 | Rendah |
| 24 UU Bendera | Merusak bendera merah putih | 2 | Rendah |
| 118 UU KUHP | Makar terhadap kepala negara | 2 | Rendah |
| 338 UU KUHP | Merampas nyawa orang lain | 1 | Rendah |

Tabel 8. Pasal-pasal pidana penjerat tahanan politik demonstrasi Agustus 2025

VII.B. Semakin ditekan, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim semakin melawan

267. Pada 1 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Direktur Yayasan Lokataru, Delpedro Marhaen Rismansyah, ditangkap oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya saat berada di kantor Yayasan Lokataru di Jakarta Timur.³⁰²
268. Pada 2 September 2025 sekitar pukul 01.50 WIB, staf Yayasan Lokataru, Muzaffar Salim, turut ditangkap oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya ketika sedang berada di kantin Polda Metro Jaya. Ketika itu, Muzaffar sedang berupaya mendampingi Delpedro yang ditangkap beberapa jam sebelumnya.³⁰³ Saat penangkapan, kepolisian tidak menunjukkan Surat Tugas maupun Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Telepon genggam milik Muzaffar disita oleh polisi tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan. Setelah penangkapan, Muzaffar langsung ditahan di Rutan Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/S-7/1200/IX/2025/Ditreskrim Polda Metro Jaya.

³⁰² Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

³⁰³ Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

269. Delpedro dan Muzaffar diperiksa secara terpisah oleh Kompol Gilang Prasatya sebagai tersangka atas dugaan melakukan penghasutan dan/atau merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan tertentu serta membiarkan anak tanpa perlindungan dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan berdasarkan Pasal 160 KUHP, Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 45 (3) jo. Pasal 28 (3) UU ITE. Menurut kepolisian, Delpedro melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut di Gedung DPR, Jakarta Pusat, dan sejumlah lokasi lain sejak demonstrasi 25 Agustus 2025.
270. Penelusuran KPF menemukan Delpedro dan Muzaffar ditindak berdasarkan laporan polisi yang sama, yaitu LP/A/76/VIII/2025/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Willy Adrian Tanjung, Perwira Unit II Subdit I Keamanan Negara Polda Metro Jaya, pada 29 Agustus 2025. Pada hari yang sama, kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/S-1.1/3789/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/S-1.2/9277/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya. Pada 30 Agustus 2025, Delpedro dan Muzaffar ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanpa pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka.
271. Dalam pemeriksaan keduanya, penyidik kepolisian mengajukan pertanyaan terkait kegiatan Yayasan Lokataru selama aksi demonstrasi Agustus 2025, unggahan kolaborasi dengan akun Instagram Blok Politik Pelajar (BPP), serta maksud dan tujuan pembuatan posko aduan bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi. Menurut kuasa hukum, kegiatan mereka selama periode aksi demonstrasi adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan lapangan untuk mendata peserta aksi yang ditangkap.
 2. Membuka posko aduan bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi.
 3. Melakukan advokasi bagi pelajar yang mengalami pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh pemerintah daerah karena ikut aksi demonstrasi.
272. Kepada Delpedro, kepolisian menanyakan dugaan aliran dana ke Yayasan Lokataru, salah satunya pendanaan dari Solidaridad Indonesia. Hal ini dijelaskan merupakan kerja sama riset mengenai demokratisasi tata kelola korporasi sawit di Riau dan Kalimantan yang merupakan bagian dari program Bappenas dan Kementerian Koperasi. Delpedro menjelaskan bahwa sumber pendanaan Lokataru berasal dari hibah dan donasi publik, termasuk melalui kanal seperti Kita Bisa. Dana tersebut digunakan untuk keperluan seperti riset, advokasi, pengembangan kapasitas, dan upah staf yang bekerja di bidang penguatan demokrasi dan HAM. Sebagai akuntabilitas, Yayasan Lokataru menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, dilaporkan kepada pemberi hibah dan kantor pajak, serta disampaikan kepada pembina dan pengawas melalui rapat kerja tahunan.
273. Kepada Muzaffar, penyidik menanyakan hubungan BPP dan Yayasan Lokataru. Penyidik juga menanyakan hubungan Muzaffar dengan Eko Prasetyo, Andi Febriansyah, Bagas Wisnu, Tegar Apriansyah, Bilal Mumtazkilah, dan Nurul Hasanah, serta apakah Muzaffar mengenal Syahdan Husein, Figa Lesmana, M. Risyad Azhary, Fachri Anwar, dan Angga Saputra. Penyidik menanyakan apakah Muzaffar mengetahui atau pernah bergabung dalam grup WhatsApp NIKA. Muzaffar menyatakan ia mengetahui grup tersebut setelah diundang oleh Andi Febriansyah pada 15 Agustus 2025, namun memutuskan keluar dua hari setelahnya pada 17 Agustus 2025.³⁰⁴ Penyidik juga menanyakan secara spesifik ke Muzaffar terkait partisipasi Syahdan dan Khariq sebagai anggota grup NIKA.
274. Penyidik juga mempertanyakan pendanaan perjalanan Delpedro ke Malaysia pada 29 Juli–9 Agustus 2025 yang disebut sebagai bagian pembelajaran advokasi isu lingkungan, pendidikan, demokrasi, dan HAM. Polisi mendapati bahwa tiket keberangkatan Delpedro dibiayai oleh organisasi Mandiri Malaysia, sedangkan tiket kepulangan ditanggung secara pribadi oleh Delpedro. Dari penelusuran tersebut, polisi mencatat Syahdan Husein, Bilal

³⁰⁴ BAP Forensik a.n. Khariq Anhar.

Mumtazkilah, dan Daffa Batubara sebagai peserta lain kunjungan ke Malaysia tersebut. Muzaffar tidak diketahui mengikuti kegiatan tersebut.

275. Pada 5 September, Delpedro dan Muzaffar mengajukan penangguhan penahanan yang tidak ditanggapi oleh kepolisian. Pada 3 Oktober 2025, Delpedro mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Pada 27 Oktober 2025, permohonan tersebut ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor 129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL yang dibacakan Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiharto.
276. Pada 13 Februari 2026, Hakim PN Jakarta Selatan mengalihkan status Delpedro bersama Muzaffar Salim dan Syahdan Husein menjadi tahanan kota.³⁰⁵

VII.C. Gejayan memanggil Syahdan Husein

277. Pada 1 September 2025 pukul 23.00 WITA, aktivis Gejayan Memanggil, Syahdan Husein, ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya di tempat kerjanya di Bali. Dalam penangkapan tersebut, kepolisian menyita satu unit laptop, satu unit telepon genggam, serta pakaian milik Syahdan tanpa memperlihatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan setempat. Setelah penangkapan, Syahdan tidak diberikan akses untuk menghubungi kuasa hukum maupun keluarganya sesuai aturan hukum acara pidana.³⁰⁶
278. Menjelang penangkapan, Syahdan sempat menjadi korban *doxing* dan teror dari orang tak dikenal yang menuduhnya melakukan penggelapan dana donasi Gejayan Memanggil. Dalam pemeriksaan, Syahdan membantah tuduhan tersebut.
279. Syahdan ditangkap berdasarkan laporan yang sama dengan Delpedro dan Muzaffar, yaitu Laporan Polisi Nomor LP/A/76/VIII/2025/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Willy Adrian Tanjung, Perwira Unit II Subdit I Keamanan Negara Polda Metro Jaya, pada 29 Agustus 2025. Pada 30 Agustus 2025, Syahdan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor SP/Tap/S-4/154/VIII/2025/Ditreskrim/Polda Metro Jaya tanpa melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka.
280. Syahdan disangkakan melakukan tindak pidana penghasutan dan/atau merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan tertentu serta membiarkan anak tanpa perlindungan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan berdasarkan Pasal 160 KUHP, Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 45 (3) jo. Pasal 28 (3) UU ITE. Menurut kepolisian, Syahdan melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, dan sejumlah lokasi lain sejak demonstrasi 25 Agustus 2025. Akan tetapi, penelusuran KPF menunjukkan Syahdan tidak berada di Jakarta selama gelombang demonstrasi.
281. Pemeriksaan pertama terhadap Syahdan dilakukan pada 2 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB hingga 3 September 2025 pukul 02.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan ketika kondisi Syahdan tidak dalam kesadaran penuh karena pengaruh obat medis yang harus dikonsumsinya. Meskipun demikian, penyidik tetap meminta Syahdan menandatangani seluruh berkas pemeriksaan dan menetapkannya sebagai tersangka.
282. Penyidik menanyakan unggahan akun Instagram @gejayanmemanggil yang berisi ajakan turun aksi serta hubungan Gejayan Memanggil dengan Yayasan Lokataru dan Blok Politik Pelajar. Syahdan menjelaskan bahwa ajakan tersebut adalah respons terhadap perilaku anggota DPR yang dianggap memamerkan kekayaan, kurang empati, dan tetap menerima kenaikan tunjangan di tengah krisis ekonomi.
283. Pada 5 September, Syahdan mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang tidak ditanggapi oleh kepolisian. Pada 3 Oktober 2025, Syahdan mengajukan permohonan

³⁰⁵ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260215125816-12-1328412/hakim-alihkan-penahanan-delpedro-cs-jadi-tahanan-kota>, 15 Februari 2026.

³⁰⁶ Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Pada 27 Oktober 2025, permohonan tersebut ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL yang dibacakan Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiharto.

284. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan hubungan Syahdan dengan Delpedro, Muzaffar, Khariq Anhar, Reyhan Aryaputra Purnomo, Abdul Ghofar Dwi Prawira, dan Figa Lesmana. Syahdan mengaku mengenal Delpedro dan Muzaffar, namun hanya mengetahui Khariq melalui komunikasi WhatsApp untuk berkenalan. Syahdan menyatakan tidak mengenal Reyhan Aryaputra Purnomo, Abdul Ghofar Dwi Prawira, dan Figa Lesmana.
285. Penyidik juga mempertanyakan perihal kunjungan Syahdan bersama Delpedro dan Muzaffar ke Malaysia. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Ketua Mandiri Malaysia dalam rangka menghadiri kegiatan peringatan 10 tahun penangkapan Najib Razak lewat diskusi, pemutaran film, pertunjukan musik, dan kegiatan seni lainnya. Syahdan menyatakan bahwa biaya perjalanannya ditanggung oleh Mandiri Malaysia.
286. Penyidik menanyakan partisipasi Syahdan dalam grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat), NIKA, dan Pasukan Revolusi. Syahdan menyatakan ia tergabung dalam grup WhatsApp NIKA sejak 23 Agustus 2025 melalui tautan yang dikirimkan Andi Febriansyah. Akan tetapi, Syahdan tidak mengenal sebagian besar dari 400 orang yang ada di grup.³⁰⁷
287. Sementara itu, Syahdan tidak pernah bergabung dalam grup WhatsApp KPR maupun Pasukan Revolusi. 301. Syahdan menyatakan tidak terlibat dalam mobilisasi dan persiapan aksi kolektif NIKA sepanjang periode 25–31 Agustus 2025.
288. Pada 13 Februari 2026, Hakim PN Jakarta Selatan mengalihkan status Syahdan bersama Muzaffar Salim dan Delpedro Marhaen Rismansyah menjadi tahanan kota.³⁰⁸

VII.D. Khariq Anhar yang Menggugat

289. Pada 29 Agustus 2025, aktivis mahasiswa Aliansi Mahasiswa Penggugat, Khariq Anhar, ditangkap oleh lima orang berpakaian preman yang kemudian diketahui merupakan anggota Ditressiber Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta sebelum kembali ke Pekanbaru.³⁰⁹
290. Dalam penangkapan tersebut, petugas tidak memperlihatkan Surat Tugas sesuai kaidah hukum acara pidana. Aparat meneriaki Khariq “*Koruptor!*” ketika penangkapan.
291. Sebelum penangkapan, Khariq berada di Bandung pada 22–27 Agustus 2025 untuk menghadiri Musyawarah Nasional Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI). Ia bergeser ke Jakarta pada 28 Agustus 2025 untuk melakukan peliputan jurnalistik aksi demonstrasi sebagai jurnalis media Utamapos.com.
292. Dalam pemeriksaan oleh Kompol Gilang Prasatya, penyidik menanyakan unggahan *meme* timpa teks yang dibuat Khariq atas berita berjudul “Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Jangan Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Isu Buruh!” Khariq menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk ekspresi satir yang menunjukkan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut. Penyidik juga menanyakan keterlibatan Khariq sebagai salah satu penggerak pengibaran bendera Jolly Roger One Piece melalui grup WhatsApp NIKA.
293. Pada saat pemeriksaan awal setelah penangkapan, kondisi kesehatan Khariq tidak baik karena mengalami batuk dan radang lambung. Penyidik menolak keberatan dan permohonan pemeriksaan kesehatan yang diajukan oleh kuasa hukum sebelum pemeriksaan dilanjutkan.
294. KPF menemukan bahwa Khariq ditetapkan sebagai tersangka oleh dua direktorat sekaligus.
 1. Oleh Ditressiber Polda Metro Jaya, Khariq ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana manipulasi dan penyebaran informasi elektronik secara sengaja dan melawan hukum menggunakan Pasal 48 (1) jo. Pasal 32 (1), dan/atau Pasal 48 (2) jo.

³⁰⁷ Wawancara dengan Syahdan Husein dan analisis forensik digital percakapan grup NIKA.

³⁰⁸ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260215125816-12-1328412/hakim-alihkan-penahanan-delpedro-cs-jadi-tahanan-kota>, 15 Februari 2026.

³⁰⁹ Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

Pasal 32 (2), dan/atau Pasal 51 (1) jo. Pasal 35 UU ITE. Penetapan tersebut didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/6073/VIII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya yang dibuat oleh Baringin Jaya Tobing pada 28 Agustus 2025.

Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Jangan Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Isu Buruh !

Redaktur
Selasa, 26 Agustus 2025 1.679 kali dilihat



Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi buruh yang akan digelar pada 28 Agustus 2025 adalah murni perjuangan buruh dan bukan ajang kerusuhan.

Dalam seruannya, Said Iqbal meminta kelompok lain seperti BEM, mahasiswa, pelajar, maupun anarko untuk tidak ikut bergabung, apalagi menunggangi aksi buruh dengan tindakan provokatif.



Gambar 57 dan 58. Tangkapan layar berita aksi demonstrasi buruh dan *meme* timpa teks oleh akun Instagram @AliansiMahasiswaPenggugat

2. Oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Khariq ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan dan sangkaan yang sama dengan Delpedro Marhaen Rismansyah, yaitu dugaan penghasutan, merekrut atau memperlak anak, serta menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kerusakan sesuai Pasal 160 KUHP, Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 45 (3) jo. Pasal 28 (3) UU ITE. Serupa dengan Delpedro, Muzaffar, dan Syahdan, Khariq juga dilaporkan menggunakan Laporan Polisi Nomor LP/A/76/VIII/2025/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Willy Adrian Tanjung, Perwira Unit II Subdit I Keamanan Negara Polda Metro Jaya, pada 29 Agustus 2025.
295. Pada 5 September 2025, Khariq mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang tidak ditanggapi oleh kepolisian. Pada 3 Oktober 2025, Syahdan mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Pada 27 Oktober 2025, permohonan tersebut ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor 128/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL yang dibacakan Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiharto.
 296. Pada 23 Januari 2026, Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Khariq atas kasus pidana UU ITE terkait *meme* timpa teks dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan.³¹⁰ Majelis hakim berpendapat dakwaan jaksa memiliki ketidakpastian yang fundamental. Akan tetapi, pada 29 Januari 2026, jaksa mengajukan dakwaan ulang terhadap Khariq.³¹¹

³¹⁰ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/hakim-kabulkan-eksepsi-khariq-anhar-di-kasus-ite-2109379>, 23 Januari 2026.

³¹¹ Tempo, www.tempo.co/hukum/jaksa-dakwa-ulang-khariq-anhar-usai-bebas-dari-tahanan-2111401, 31 Januari 2026.

VII.E. Solidaritas Laras Faizati Khairunnisa

297. Pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Laras Faizati Khairunnisa berangkat dari rumahnya di Jakarta Timur menuju kantornya di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Gedung ASEAN Headquarters Heritage, Jalan Sisingamangaraja No. 70A-2, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Laras tidak mengetahui bahwa kantornya menetapkan kebijakan bekerja dari rumah.³¹²
298. Dari lantai 5 gedung kantornya, Laras mengambil foto sambil menunjuk ke arah Gedung Mabes Polri serta merekam video *outfit of the day* (OOTD). Sekitar pukul 09.00 WIB, Laras mengunggah sejumlah Instagram Story terkait peristiwa kematian Affan Kurniawan yang terjadi pada malam sebelumnya. Ia mengunggah ulang konten dari akun @kolektifa yang menyebut kepolisian sebagai lembaga paling korup dan bangkrut secara moral. Dari akun @pandemictalks, Laras juga mengunggah ulang konten tentang Affan sebagai tulang punggung tujuh orang anggota keluarga yang tinggal di kontrakan berukuran 3x11 meter. Laras menimpal unggahan tersebut dengan ungkapan belasungkawa atas kematian Affan.
299. Pada hari yang sama, Laras mengunggah foto di Instagram Story dari gedung AIPA dengan pose menunjuk ke arah Mabes Polri disertai tulisan yang mengekspresikan kemarahannya terhadap kekerasan aparat dengan idiom “*burn this building down*” seraya bersolidaritas pada demonstran yang beraksi.

“When your office is right next to the national police headquarters. Please burn this building down and get them all y’all. I wish I could help throw some stones, but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters!!” — Laras Faizati Khairunnisa

300. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Laras mengunggah video OOTD dari dalam kantor AIPA sembari mempertanyakan kekerasan aparat yang semestinya melindungi warga.

“Policemen should be serving our country but why do I serve harder than all of them combined??? They’re so useless and lazy [for real] that’s why they are all fat ugly and bald.” — Laras Faizati Khairunnisa

301. Pada sore hari itu, Laras menerima ancaman melalui pesan Instagram dari akun bernama Asepolwan30 dengan akun @neng_irma41. Pesan tersebut memanggil Laras “kriminal siber” seraya mengancam akan membuat Laras tidak bisa mendapatkan surat berkelakuan baik dari kepolisian, tidak bisa mencari pekerjaan, dan menyebut tempat kerja Laras.

“Gua punya kuasa buat blok SKCK lo. See you in hell bitch. [You] will never get official work ... You will regret this ... Wait [until] Monday. Official letter will be draft[ed] by [to]night ... Lo tunggu Senin, lo di AIPA kan ... You’re done bitch.” — @neng_irma41

302. Pada 1 September 2025, lebih dari lima akun Instagram yang diduga terkoordinasi melakukan *doxing* terhadap Laras. Nomor telepon, alamat rumah, nomor induk kependudukan, nomor paspor, dan nama orang tua Laras disebar di media sosial. Setelah itu, Laras menerima banyak panggilan dan pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang berisi ancaman dan kata-kata kasar. Sejumlah wartawan juga mendatangi rumahnya untuk melakukan peliputan.
303. Pada 2 September 2025, empat anggota kepolisian yang mengaku dari Mabes Polri mendatangi rumah Laras dan melakukan interogasi terkait unggahan Instagram Laras pada 29 Agustus. Laras kemudian dibawa ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penghasutan dan/atau penyebaran

³¹² Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

informasi elektronik berdasarkan Pasal 45A (2) jo. Pasal 28 (2) atau Pasal 48 (1) jo. Pasal 32 (1) UU ITE, dan/atau Pasal 160 atau Pasal 161 (1) UU KUHP.

304. Dalam pemeriksaan, Laras menyatakan bahwa unggahannya adalah ekspresi kritik, kekecewaan, dan keresahan terhadap kepolisian yang dinilai gagal melindungi warga dan justru melakukan kekerasan. Ia menyuarakan dukungan kepada warga yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi menggunakan humor dan gaya OOTD.
305. Pada 15 Januari 2026, Hakim PN Jakarta Selatan memutus Laras bersalah melakukan penghasutan dengan vonis pidana pengawasan.³¹³

VII.F. Aktivis literasi Saiful Amin

306. Pada 2 September 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Saiful Amin alias Sam Oemar ditangkap Polres Kediri Kota berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Kap/86/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim. Saiful Amin alias Sam Oemar adalah aktivis, penulis novel dan cerpen, serta inisiator Sekitar Institute yang menjadi koordinator aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025.³¹⁴
307. Saiful Amin alias Sam Oemar diperiksa oleh Polres Kediri Kota sekitar pukul 08.00 WIB sebagai saksi atas Laporan Polisi Nomor LP/A/17/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/Polres Kediri Kota/Polda Jawa Timur tertanggal 1 September 2025. Sebelumnya, ia telah ditetapkan sebagai saksi oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 29 Agustus 2025.³¹⁵
308. Sekitar pukul 13.30 WIB, Saiful Amin alias Sam Oemar ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung secara maraton hingga sekitar pukul 21.00 WIB dengan pertanyaan yang fokus pada aksi demonstrasi 30 Agustus 2025 di depan Polres Kediri Kota, DPRD Kota Kediri, dan Gedung Pemkab Kediri. Kabid Humas Polda Jawa Timur mengklaim bahwa Saiful Amin alias Sam Oemar diduga turut serta dalam pembakaran kantor DPRD, pos polisi, dan penyerangan terhadap aparat.³¹⁶
309. Saksi di lapangan pada 30 Agustus 2025 menyampaikan bahwa Saiful Amin alias Sam Oemar menginstruksikan peserta aksi untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB dan mengingatkan massa di Taman Sekartaji agar tidak melakukan tindakan kerusuhan.³¹⁷ Ia mengajak massa kembali berdemonstrasi pada hari berikutnya, sementara Sam Oemar sendiri telah meninggalkan lokasi aksi sekitar pukul 17.30 WIB.

“Jangan pernah membakar manusia, jangan pernah membunuh orang. Kalau tidak, dia tidak mewakili sebagai aparat teman-teman.” — Saiful Amin alias Sam Oemar
310. Dalam pemeriksaan, Saiful Amin alias Sam Oemar juga menyatakan tidak mengenal pihak yang melakukan penyerangan dan pembakaran, serta menegaskan bahwa dirinya tidak membenarkan kekerasan dalam aksi unjuk rasa.
311. Pada 10 September 2025, Saiful Amin alias Sam Oemar mengajukan penangguhan penahanan, namun tidak ditanggapi oleh kepolisian.³¹⁸ Pada 10 Oktober 2025, perkara Saiful

³¹³ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-bersalah-tanpa-penjara--laras-faizati-singgung-keadilan-dan-ruang-kritik-lt6968a5a424fbd>, 15 Januari 2026.

³¹⁴ Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Al Faruq Kediri.

³¹⁵ BAP a.n. Saiful Amin; Instagram @sekitar.institute, <https://www.instagram.com/p/DN8jRDRE3Gk/?igsh=MXRpNjRvbHMxaHE4YQ%3D%3D>, 29 Agustus 2025.

³¹⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tuduh-aktivis-paul-terlibat-demonstrasi-rusuh-di-kediri--2074556>, 29 September 2025.

³¹⁷ Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, <https://kopri.id/artikel/aktivis-kritis-kediri-dibungkam-begini-kronologi-penangkapan-saiful-amin>, 4 September 2025.

³¹⁸ Suara Jatim Post, <https://suarajatimpost.com/70-tokoh-jadi-penjamin-lbh-al-faruq-ajukan-penangguhan-penahanan-bagi-saiful-amin>, 10 September 2025.

Amin alias Sam Oemar dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejari Kota Kediri dengan dakwaan Pasal 45A (3) jo. Pasal 28 (3) UU ITE dan Pasal 160 UU KUHP tentang penghasutan, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.³¹⁹ Hingga laporan ini diterbitkan, kepolisian masih belum melakukan penelusuran terhadap pihak yang terlihat melakukan provokasi dan memobilisasi massa dari Polresta Kediri menuju DPRD Kota Kediri pada 30 Agustus 2025.

VII.G. Aktivis literasi Shelfin Bima

312. Pada 18 September 2025, Shelfin Bima, Kepala Sekolah Komunitas Belajar Sekitar Institute, ditangkap oleh Polres Kediri Kota berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/130/IX/RES.1.24./2025/Satreskrim. Sebelumnya, pada 10 September 2025, Shelfin telah ditetapkan sebagai tersangka melalui S.Tap/117.A/IX/RES.1.24./2025/Satreskrim atas dugaan melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.³²⁰
313. Polres Kediri Kota mengklaim Shelfin terlibat dalam menghasut massa yang kemudian berujung rusuh pada aksi demonstrasi 30 Agustus 2025.³²¹ Penelusuran KPF menunjukkan bahwa Shelfin Bima tidak terlibat dalam perencanaan baik di tahap mengunggah seruan aksi di media sosial maupun penentuan titik aksi. Ia mengikuti aksi tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah Komunitas Belajar Sekitar Institute. Shelfin hanya membantu penyusunan dan pengiriman surat pemberitahuan aksi pada kepolisian dengan kop 'Koalisi Masyarakat Sipil Kediri' pada 29 Agustus 2025.
314. Pada hari pelaksanaan aksi, Shelfin hadir di Taman Sekartaji sekitar pukul 15.15 WIB dan bersama peserta aksi tiba di depan Polres Kediri Kota sekitar pukul 16.00 WIB. Ia sempat menyampaikan orasi selama kurang lebih dua menit dengan fokus kritik terhadap DPR dan institusi kepolisian berkaitan dengan pembunuhan Affan Kurniawan.
315. Tidak lama setelah menyampaikan orasi, Shelfin Bima meninggalkan lokasi aksi karena harus mengawasi pelaksanaan lomba perayaan kemerdekaan Indonesia di wilayah tempat tinggalnya sekitar pukul 18.00 WIB. Ia menyatakan baru mengetahui adanya penyerangan dan pembakaran yang terjadi pada malam hari melalui informasi di media sosial dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam demonstrasi tidak dapat dibenarkan.
316. Ketika laporan ini diterbitkan, Kejari Kota Kediri telah melimpahkan berkas perkara Shelfin ke tahap II dengan dakwaan Pasal 160 jo. Pasal 55 UU KUHP.³²²

VII.H. Aktivis literasi Ahmad Faiz Yusuf

317. Pada 21 September 2025, Ahmad Faiz Yusuf, aktivis pegiat literasi dan pelajar kelas XII asal Nganjuk, Jawa Timur, ditangkap dan digeledah rumahnya oleh anggota Polres Kediri Kota berpakaian preman tanpa adanya memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan, dan Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan.
318. Setelah ditangkap, Faiz diperiksa oleh Polres Kediri Kota sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/20/IX/2025/SPKT/Polres Kediri Kota/Polda Jawa Timur dengan tanggal 22 September 2025 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/128.q/IX/RES.1.24./2025/Satreskrim. Faiz ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melanggar Pasal 54A (2) jo. Pasal 28 (2) atau

³¹⁹ Ujung Pena, <https://www.ujungpena.id/nasional/1371744617/kejari-kota-kediri-siapkan-dakwaan-untuk-saiful-amin-terjerat-pasal-ite-dan-penghasutan>, 1 November 2025.

³²⁰ BAP a.n. Shelfin Bima.

³²¹ IDN Times, <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/dua-aktivis-ditahan-polres-kediri-kota-lbh-al-faruq-galang-petisi-c1c2-01-h6shc-76cqv>, 21 September 2025.

³²² Radar Kediri, <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/786843452/limpahkan-shelfin-bima-ke-kejari-kota-kediri-tersangka-minta-hal-ini-ke-presiden-Prabowo>, 17 November 2025.

- Pasal 45 (3) jo. Pasal 28 (3) UU ITE.³²³ Polres Kediri Kota menduga aktivitas Ahmad Faiz Yusuf di media sosial menjadi penyebab kerusuhan yang terjadi di Kediri pada 30 Agustus 2025.
319. Kepala Satreskrim Polres Kediri Kota, Ajun Komisaris Cipto Dwi Laksono, menyatakan bahwa barang bukti digital milik Faiz berkaitan dengan ajakan pembakaran, pencurian, dan kerusuhan di Kediri.³²⁴ Dalam pemeriksaan, Faiz mengetahui adanya aksi demonstrasi di depan Polres Kediri Kota pada 30 Agustus 2025 dari unggahan akun Instagram Sekitar Institute serta informasi dari Saiful Amin alias Sam Oemar melalui percakapan Instagram.³²⁵
320. Temuan KPF menunjukkan bahwa Faiz tidak mengikuti aksi demonstrasi dan mengirim pesan pada teman-temannya yang turut serta agar berhati-hati selama berada di lokasi demonstrasi.³²⁶ KPF juga menemukan adanya intimidasi dan ancaman pemukulan oleh aparat kepolisian terhadap Faiz ketika tidak memberikan jawaban yang diinginkan penyidik. Faiz diduga dipaksa mengakui tiga tuduhan sekaligus, yaitu keterlibatan dalam demonstrasi 30 Agustus, keanggotaan dalam kelompok 'anarko', dan pembuatan bom molotov.³²⁷ Menurut orang tua Faiz, Imroatin, ia tidak diperbolehkan membaca buku selain kitab suci Alquran dan buku pelajaran sekolah selama berada di tahanan.
321. Pada 25 September 2025, tim pendamping hukum bersama keluarga mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Polres Kediri Kota, namun tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian.³²⁸ Faiz mengajukan praperadilan ke PN Kediri pada 20 Oktober 2025 atas dugaan tidak sahnya proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka, namun ditolak seluruhnya oleh hakim tunggal pada 11 November 2025 sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Kediri Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Kdr.

VII.I. Aktivis Kamisan Muhammad Fakhurrozi

322. Pada 27 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Polda Jawa Timur menangkap Muhammad Fakhurrozi alias Paul, seorang aktivis yang dikenal sebagai bagian dari Social Movement Institute dan Aksi Kamisan di Sleman, Yogyakarta.³²⁹ Penangkapan dilakukan setelah aksi demonstrasi di Kediri pada 30 Agustus 2025 yang berujung ricuh. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyatakan Paul ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan aktif lewat komunikasi dengan Saiful Amin untuk menghasut masyarakat melakukan kerusuhan, penyerangan, dan pembakaran fasilitas publik di Kediri.³³⁰
323. Penelusuran KPF menemukan Paul ditangkap di rumahnya oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian—sebagian berpakaian gelap dan sebagian mengenakan seragam Satpol PP. Pada saat penangkapan dan penggeledahan, Paul tidak menerima Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan, dan Surat Izin dari Ketua Pengadilan.³³¹
324. Setelah penangkapan, Paul dibawa ke Polda Yogyakarta, di mana kuasa hukum dari LBH Yogyakarta baru mengetahui bahwa penangkapan dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Paul kemudian dibawa ke Polda Jawa Timur dan tiba sekitar pukul 23.00 WIB untuk menjalani

³²³ BAP a.n. Ahmad Faiz Yusuf; Project Multatuli, <https://projectmultatuli.org/tahanan-politik-dari-perburuan-polisi-ditangkap-paksa-dilarang-baca-buku-disiksa-untuk-mengaku>, 16 Oktober 2025.

³²⁴ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/kata-dosen-ugm-soal-penyitaan-buku-dari-pelajar-sma-kediri-yang-ditangkap-polisi-2073014>, 24 September 2025.

³²⁵ BAP a.n. Ahmad Faiz Yusuf.

³²⁶ BAP a.n. Ahmad Faiz Yusuf.

³²⁷ Keterangan Anang Hartoyo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk sebagai kuasa hukum.

³²⁸ Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/puluhan-organisasi-dukung-penangguhan-penahanan-pelajar-oleh-polisi-kediri-2073398>, 26 September 2025.

³²⁹ Republik Merdeka, <https://rml.id/read/2025/09/30/681631/polisi-ungkap-alasan-tangkap-muhammad-fakhurrozi>, 30 September 2025.

³³⁰ Republik Merdeka, <https://rml.id/read/2025/09/30/681631/polisi-ungkap-alasan-tangkap-muhammad-fakhurrozi>, 30 September 2025.

³³¹ Suara, <https://jogja.suara.com/read/2025/09/28/221022/penangkapan-aktivis-paul-di-jogja-kronologi-detail-dari-pria-misterius-hingga-dugaan-penghasutan>, 28 September 2025.

pemeriksaan.³³² Di Polda Jawa Timur, Paul didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Surabaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan LP/A/17/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/Polres Kediri Kota/Polda Jawa Timur pada 1 September 2025—laporan yang sama dengan Saiful Amin alias Sam Oemar dan Shelfin Bima. Ia dijerat Pasal 160 jo. Pasal 170 dan/atau Pasal 157 dan/atau Pasal 55 UU KUHP.

325. Dalam pemeriksaan oleh Kompol Gilang Prasatya, Paul menyatakan tidak mengikuti aksi demonstrasi pada 29–31 Agustus 2025 karena sedang mengikuti kelas pendidikan politik selama 5 hari di Jakarta. Ia juga menyatakan baru mengetahui adanya kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran di Kediri melalui pemberitaan media massa. Paul diperiksa oleh penyidik dari Ditressiber Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan Polda Metro Jaya.
326. Paul menjelaskan bahwa sebelum aksi di Kediri, ia hanya berkomunikasi dengan Saiful Amin alias Sam Oemar untuk membantu membuat pamflet seruan aksi yang akan disebarluaskan melalui media sosial. Di samping itu, penyidik juga menanyakan keterlibatan Paul dalam gerakan pengibaran bendera Jolly Roger One Piece. Paul menyatakan tidak mengetahui adanya gerakan tersebut dan hanya melihat pengibaran bendera One Piece melalui Instagram, termasuk oleh sopir truk yang mengibarkannya bersama bendera merah putih.
327. Penyidik menanyakan sumber pendanaan Aksi Kamisan Surabaya, yang tidak diketahui oleh Paul. Selain Pasal 160 KUHP, Fakhurrozi juga dijerat Pasal 28 (3) dan/atau Pasal 76H jo. Pasal 15 jo. Pasal 87 UU Perlindungan Anak terkait dugaan penghasutan dan/atau penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kerusuhan serta dugaan memeralat anak.
328. Selama pemeriksaan, penyidik menanyakan hubungan Paul dengan Delpedro, Khariq, Saiful Amin alias Sam Oemar, serta Eko Prasetyo. Paul pun menjelaskan bahwa ia pertama kali mengenal Delpedro pada 2019 dalam pertemuan yang mengidentifikasi Delpedro sebagai inisiator Blok Politik Pelajar. Komunikasi berikutnya terjadi pada Desember 2023 terkait kampanye Festival Keadilan bertema UU ITE serta pada Juli 2025 terkait diskusi RUU KUHAP di Yogyakarta. Sementara itu, Paul mengenal Saiful Amin alias Sam Oemar melalui pertemuan di sebuah acara musik di Yogyakarta pada awal 2024 serta Khariq Anhar sekitar akhir 2024 dalam Aksi Kamisan di Tugu Yogyakarta.³³³
329. Penyidik menanyakan sumber pendanaan perjalanan Paul untuk menghadiri pertemuan di kediaman Rocky Gerung pada 31 Agustus 2025 bersama seseorang bernama Eko Prasetyo. Paul menjelaskan bahwa diskusi membahas situasi politik dalam negeri, isu darurat militer, DPR RI, penjarahan, serta program MBG.³³⁴ KPF tidak menemukan bukti apa pun yang menunjukkan adanya komunikasi Paul dalam konteks perencanaan aksi demonstrasi.
330. Penyidik menanyakan hubungan Paul dengan Wawan, administrator akun Instagram @BekasiMenggugat, yang dinyatakan Paul tidak dikenalnya. Paul sempat mendapat ajakan mengikuti kunjungan ke Malaysia bersama Delpedro dan Syahdan, namun urung berangkat.

VII.J. Reyhan Aryaputra Purnomo dan brutalitas aparat

331. Pada 1 September 2025, Reyhan Aryaputra Purnomo ditangkap oleh sejumlah polisi berpakaian preman setelah mengikuti aksi di Gedung DPR. Ia ditangkap setelah kelima rekannya meninggalkan lokasi. Reyhan awalnya dihentikan saat mengendarai sepeda motor dan diapit oleh dua orang yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian. Ia kemudian dipindahkan ke dalam sebuah mobil Daihatsu Ayla. Di dalam mobil, tangan dan kakinya diikat serta sekujur tubuhnya dililit lakban. Reyhan dipaksa mengaku namun membantah telah melempar tiga bom molotov di depan Gedung DPR. Reyhan mengaku dipukuli sekitar sepuluh

³³² Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/polda-diy-konfirmasi-penangkapan-aktivis-aksi-kamisan-oleh-polda-jatim-2074147>, 28 September 2025.

³³³ BAP a.n. Muhammad Fakhurrozi.

³³⁴ BAP a.n. Muhammad Fakhurrozi.

- kali dan dalam kondisi tertekan membuat pengakuan. Salah satu aparat kemudian mengulang kembali pertanyaan tersebut dan merekam pengakuan Reyhan.³³⁵
332. Mobil yang membawa Reyhan sempat berhenti di sebuah warung makan pecel lele. Di lokasi tersebut, sebuah mobil Toyota Fortuner diparkir di samping mobil Daihatsu Ayla. Seluruh pintu mobil dibuka dan seseorang masuk ke dalam mobil sembari menodongkan pistol ke paha Reyhan sambil mengatakan, “*Lo mau gue bolongin gak paha lo!*” Aparat lain menodongkan pistol dari luar mobil sambil mengancam, “*Gue tembak lo sekarang! Kalo di kantor lo lebih parah. Ngaku!*”
 333. Reyhan mengaku dipukul di bagian perut dan mendengar suara kokangan pistol sebelum kemudian dipindahkan ke mobil Toyota Fortuner dan kembali dipukuli. Salah satu aparat mengatakan bahwa ia harus mengaku di kantor polisi karena bukti sudah direkam. Saat mobil melintas di wilayah Kuningan, salah satu aparat mengatakan, “*Gue turuin aja ya. Gue bakar aja pake molotov lo ya.*”
 334. Setibanya di Polda Metro Jaya, lakban yang membungkus tubuh Reyhan dilepas menggunakan pisau dan menyebabkan luka sayatan di bagian pipinya. Ia kemudian diturunkan di depan Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) dan dibawa ke ruangan Keamanan Negara Bagian 4, di mana ia menjalani interogasi.
 335. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengeluarkan surat penetapan tersangka. Reyhan ditahan di ruang Keamanan Negara Bagian 4 selama dua hari sebelum dipindahkan ke ruang tahanan pada hari ketiga. Selama proses tersebut, ia tidak didampingi oleh kuasa hukum sesuai kaidah hukum acara pidana. Selama sekitar dua bulan penahanan, Reyhan mengaku beberapa kali ‘dibon’ atau dipindahkan untuk menjalani interogasi tambahan oleh aparat yang disebutkan berasal dari Densus 88. Ia ditanya mengenai pemahaman ideologi ‘kiri’. Ia juga sempat diperiksa di Keamanan Negara Bagian 2.
 336. Reyhan mengakui pernah membuat bom molotov bersama beberapa orang untuk persiapan aksi pada 25 Agustus 2025. Namun, molotov tersebut tidak pernah digunakan dan telah dibuang. Pada 2 September 2025, sehari setelah penangkapan Reyhan, Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers yang menyebut Reyhan sebagai pemberi “tutorial pembuatan bom molotov” melalui grup WhatsApp dan akun Instagram beserta iming-iming perlindungan hukum.³³⁶
 337. Penyidik Kopol Gilang Prasatya menyampaikan bahwa bersamaan dengan beredarnya tutorial pembuatan molotov di grup WhatsApp, terdapat akun Instagram yang mendorong massa untuk datang ke lapangan dan melakukan aksi dengan janji perlindungan. Dalam paparan tersebut, ditampilkan poster yang dikaitkan dengan Gejayan Memanggil, Yayasan Lokataru, dan Aliansi Mahasiswa Penggugat.³³⁷ Polisi menyatakan Reyhan berperan sebagai koordinator yang mengatur penempatan bom molotov berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik.³³⁸ Dalam proses pemeriksaan digital tersebut, kepolisian menggunakan perangkat lunak Cellebrite untuk melakukan ekstraksi dan analisis data dari perangkat Reyhan.³³⁹

VII.K. Pengakuan paksa Very Kurnia Kusuma

338. Pada 30 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Very Kurnia Kusuma ditangkap oleh Polda Jawa Barat di area parkir Gedung Graha Merah Putih Telkomsel, Bandung.³⁴⁰ Saat itu, Very sedang membeli rokok di sebuah warung. Penangkapan dilakukan dengan cara penodongan

³³⁵ Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

³³⁶ Metro TV, <https://www.youtube.com/watch?v=AgJW9WtwKIQ>, 2 September 2025.

³³⁷ Metro TV, <https://www.youtube.com/watch?v=AgJW9WtwKIQ>, 2 September 2025.

³³⁸ BAP Forensik Khariq Anhar.

³³⁹ BAP Forensik Khariq Anhar.

³⁴⁰ Informasi dalam bagian ini diolah berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

- menggunakan senjata tajam dan memerintahkannya untuk tiarap. Saat itu, aparat tengah melakukan pengejaran terhadap massa aksi yang berlarian ke lokasi tempat Very berada.
339. Setelah ditangkap, Very kehilangan kontak dengan temannya, Rafly, yang sebelumnya telah berjanji untuk pergi ke sebuah angkringan di wilayah Dipatiukur, Bandung. Keberadaan Very baru diketahui setelah pamannya, Debbie, setelah mendatangi Polda Jawa Barat untuk mencari informasi langsung. Namun, akses menemui Very baru diberikan oleh kepolisian pada 1 September 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Ketika ditemui, Very menyampaikan kepada Debbie bahwa dirinya mengalami kekerasan berupa pemukulan berulang dan penyetruman hingga tidak sadarkan diri selama penahanan. Menurut kesaksian Debbie, kondisi fisik Very saat itu menunjukkan sejumlah luka lebam, pembengkakan, mata merah, serta luka basah di pelipis kanan dan kiri.
340. Polda Jawa Barat menuduh Very terlibat dalam kerusuhan 30 Agustus 2025 di Bandung dengan alat bukti pengakuan saat pemeriksaan dan barang bukti dua batu. Namun, Very menyatakan bahwa pengakuan tersebut diberikan dalam kondisi terpaksa karena penyiksaan yang dialaminya. Kabid Humas Polda Jawa Barat menyatakan bahwa penangkapan Very dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/10/VIII/SPKT/Ditreskrimum/Polda Jabar. Pada 30 September 2025, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Mohammad Choirul Anam, menyampaikan komitmen mengusut dugaan salah tangkap dan penyiksaan terhadap Very Kurnia Kusuma. Pada 10 Oktober 2025, puluhan warga Cihampelas menggelar aksi solidaritas di depan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Jalan Cihampelas No. 194, Cipaganti, Bandung, menuntut pembebasan Very.

VIII. Operasi sebelum Operasi

VIII.A. Disinformasi dan manipulasi persepsi di ruang digital

341. Investigasi KPF menemukan bahwa video joget anggota DPR yang viral pada pertengahan Agustus 2025 memainkan peran kunci sebagai katalis emosional dalam eskalasi Demonstrasi 25–31 Agustus 2025. Video asli menampilkan sejumlah anggota DPR, yang di antaranya memiliki latar belakang sebagai selebriti, menari mengikuti lagu daerah Sajojo saat penutupan Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.
342. Video anggota DPR berjoget tersebut kemudian viral dan ditimpali banyak orang di media sosial dengan narasi anggota DPR berjoget merayakan kenaikan tunjangan dan gajinya. Kedua hal ini sama-sama terjadi, namun tidak berkaitan. KPF menilai terdapat indikasi kuat pembingkai video anggota DPR berjoget tersebut dengan konteks yang tidak tepat sebagai bagian dari penyebaran disinformasi.
343. Fakta menunjukkan bahwa viralitas video ini terjadi beriringan dengan muncul dan menguatnya tagar #BubarkanDPR dan mencuatnya wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR di media sosial. Jelang gelombang aksi pertama pada 25–27 Agustus 2025, tercatat ratusan juta interaksi terkait isu demonstrasi di media sosial dengan tagar tersebut, terutama TikTok. Hal ini mengakibatkan semakin runcingnya sentimen publik akibat rasa marah dan kecewa terhadap DPR yang dinilai tidak sensitif pada kesulitan rakyat.
344. Kondisi emosional publik yang sudah jenuh oleh beban ekonomi, kebijakan yang tidak merespons kebutuhan rakyat, dan rendahnya kepercayaan terhadap DPR menjadi lahan subur bagi narasi yang menyederhanakan persoalan dari krisis kenegaraan yang bersifat institusional menjadi DPR yang berjoget di atas penderitaan rakyat.
345. Analisis tim investigasi menemukan indikasi bahwa disinformasi terkait joget anggota DPR ini menunjukkan pola penyebaran yang konsisten dan berulang, serta kerap muncul beriringan dengan pesan-pesan kunci lainnya, antara lain:
 - a. Berjoget di atas penderitaan rakyat.
 - b. Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai simbol ketidakadilan ekonomi.
 - c. Secara spesifik menyasar nama-nama tertentu, seperti Ketua DPR Puan Maharani (PDI-P), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem) yang menjadi personifikasi dari ketidakpekaan DPR.
 - d. Menautkan kemarahan itu dengan seruan-seruan aksi seperti #BubarkanDPR, #StopBayarPajak, #Demo25, dan #SahkanRUUPerampasanAset. Akibatnya, kritik terhadap lembaga bercampur dengan ajakan mobilisasi yang tidak terstruktur.
346. KPF menemukan sejumlah akun yang aktif memproduksi dan menyebarkan konten manipulatif tersebut. Beberapa di antaranya termasuk akun TikTok @strongerboy24 dan @adhyastha_8 serta akun YouTube Army Zone AI.³⁴¹ Pola unggahan mereka menunjukkan bahwa video joget DPR bukan sekadar dibagikan sebagai fakta, namun diolah, diberi teks, suara, dan keterangan yang menautkan video joget anggota DPR dengan narasi pesta kenaikan tunjangan, pengkhianatan terhadap rakyat, dan seruan pembubaran DPR.
347. Analisis forensik media sosial mengindikasikan bahwa sebagian akun yang intensif menyebarkan narasi tersebut memproduksi konten menggunakan AI bot, memiliki nama generik, mengunggah konten yang sama berulang kali, menunjukkan pola mengemukakan narasi dan isu yang sama, dan terhubung dengan konten-konten lain yang secara konsisten mengampanyekan konten-konten penguatan peran militer di ruang sipil. Akun Army Zone AI, misalnya, kerap mereproduksi narasi kerusakan dan penjarahan dalam format yang vulgar

³⁴¹ Youtube @ArmyZoneAI, <https://www.youtube.com/shorts/zpsJv2f07PO>, 25 Agustus 2025; TikTok @Adhyastha_8, https://www.tiktok.com/@adhyastha_8/video/7542438266071567672, 25 Agustus 2025; TikTok @strongerboy24, <https://www.tiktok.com/@strongerboy24/video/7542563858473356564>, 25 Agustus 2025.

dan sensasional, termasuk dengan menyinggung kemungkinan terulangnya tragedi kemanusiaan 1998 secara vulgar.

348. Kampanye disinformasi ini tidak hanya menarget anggota DPR, tetapi juga mempermainkan emosi publik melalui sejumlah grup dan komunitas di WhatsApp dan TikTok. Investigasi KPF menemukan sebaran konten berupa video dan gambar korban kekerasan polisi terhadap demonstran, narasi DPR berpesta dan berjoget setelah menaikkan gajinya sendiri, dan ajakan eksplisit agar pelajar ikut turun ke jalan pada 25 Agustus 2025 dan seterusnya.
349. Meskipun informasi terkait konten kekerasan aparat bersifat faktual, pihak-pihak tertentu menjahit narasinya dengan pesan tertentu yang menekankan bagaimana negara bertindak tidak adil dan menghina rakyat secara terang-terangan. KPF menilai bahwa pola penyebaran narasi tersebut secara efektif mengonversi kekecewaan publik menjadi kemarahan yang mudah dimobilisasi, terlepas dari apakah terdapat satu aktor tunggal atau desain terpusat di balik penyebarannya.
350. Akan tetapi, terdapat bukti-bukti yang jelas bahwa aparat penegak hukum tebang pilih dalam merespons berbagai konten disinformasi ini. Selama dan setelah kerusuhan, akun-akun yang secara jelas memproduksi dan menyebarkan konten disinformasi ini tidak diusut sama sekali. KPF belum menemukan keterangan publik apa pun bahwa aparat keamanan melacak, memanggil, atau menyidik akun-akun tersebut.
351. Alih-alih, Polri justru memfokuskan operasi siber dan proses pidana terhadap akun-akun organisasi dan aktivis pro-demokrasi yang mengkritik kekerasan aparat dan menyerukan akuntabilitas negara melalui cara-cara advokasi tanpa ada indikasi pelanggaran hukum.
352. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting tentang praktik penegakan hukum yang seolah sudah memiliki kesimpulan sebelum dilakukan penyelidikan.
 - a. Mengapa akun-akun yang aktif menyebar disinformasi sama sekali tidak ditelusuri dan ditindak guna menguak tabir di balik kampanye yang terkoordinasi tersebut?
 - b. Mengapa upaya penindakan paksa berlebihan malah menasar aktivis yang, berdasarkan temuan fakta yang dipaparkan dalam laporan ini, secara objektif tidak terbukti mengendalikan massa untuk melakukan kekerasan?
353. Analisis terhadap pola penyebaran konten terkait selama 25–31 Agustus 2025 menunjukkan bahwa kampanye disinformasi tidak hanya memproduksi narasi dengan bingkai yang melupakan konteks kejadian, tetapi juga menunjukkan kecenderungan memaksimalkan jangkauan emosional melalui pilihan kanal dan format penyebaran.
354. Disinformasi yang masif sebenarnya berkembang terutama di ruang percakapan privat dan semi-privat seperti grup dan komunitas WhatsApp, DM Instagram, serta *livestreaming* TikTok dan YouTube ruang yang secara umum tidak memberikan ruang untuk cek fakta dan lebih berisiko menyebarkan informasi yang keliru.
355. Pada medio November 2025, KPF memilih tiga akun yang diidentifikasi memiliki penetrasi besar sebagai sampel dalam proses investigasi, yaitu:
 - a. Akun TikTok @strongerboy24 memiliki 81,2 ribu pengikut dan 13,1 juta suka Konten terkait DPR di akun ini pada masa demonstrasi memperoleh hingga 13,9 ribu suka.³⁴²
 - b. Akun TikTok @adhyastha_8 memiliki 30,8 ribu pengikut dan memperoleh 188,7 ribu suka untuk satu konten terulangnya tragedi 1998.³⁴³
 - c. Akun YouTube @ArmyZone AI, yang baru dibuat dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan sebelum aksi demonstrasi dimulai, memiliki 282 ribu pengikut dan lebih dari 168 juta tontonan. Salah satu konten terkait DPR di akun ini memperoleh hingga 5,5 ribu suka dari pengguna.³⁴⁴

³⁴² TikTok @strongerboy24, <https://www.tiktok.com/@strongerboy24/video/7542563858473356564>, 25 Agustus 2025.

³⁴³ TikTok @Adhyastha_8, https://www.tiktok.com/@adhyastha_8/video/7542438266071567672, 25 Agustus 2025.

³⁴⁴ Youtube @ArmyZoneAI, <https://www.youtube.com/shorts/zpsJv2f07P0>, 25 Agustus 2025.

356. Lembaga Drone Emprit mengungkapkan bahwa kanal X (sebelumnya Twitter) didominasi oleh tagar #BubarkanDPR pada 25 Agustus 2025 dan #PolisiPembunuh pada 28–31 Agustus 2025. Temuan ini penting karena kemarahan publik yang awalnya mengarah pada DPR bergeser ke kepolisian, sejalan dengan eskalasi kekerasan aparat di lapangan.
357. Pola ini menunjukkan adanya interaksi yang berkelanjutan antara realitas lapangan dan narasi di ruang digital. Sirkulasi disinformasi mempercepat mobilisasi, sementara kekerasan aparat memperkuat resonansi pesan di publik, sebagaimana tercermin dalam lonjakan percakapan digital setelah peristiwa bentrokan dan penembakan gas air mata di lapangan.
358. Dalam pemetaan narasi tersebut, akun-akun media sosial milik aktivis pro-demokrasi yang kemudian dikriminalisasi sebagai dalang demonstrasi dan kerusuhan tidak memiliki pengaruh signifikan apa pun dalam percakapan publik. Tidak ada di antara mereka yang dijadikan tersangka berada dalam daftar akun pemengaruh utama maupun pendengung yang menyebarkan informasi. Analisis ini memperlemah narasi aparat penegak hukum bahwa para aktivis pro-demokrasi mengorkestrasi kerusuhan.
359. Sementara diskursus publik di X dan Instagram terus berlangsung, kanal *livestreaming* memiliki pengaruh paling besar dalam memengaruhi pergerakan massa di lapangan, terutama di kalangan pelajar dan warga organik yang cenderung reaktif dan spontan.
360. Wawancara KPF dengan sejumlah pelajar yang ikut demonstrasi mengungkap bahwa mereka tidak menonton tayangan berita televisi maupun mengikuti kanal X, tetapi terpapar informasi utamanya melalui kanal *live stream* TikTok dan YouTube yang memperlihatkan demonstrasi secara terus-menerus tanpa henti serta sirkulasi video korban kekerasan aparat yang menyebar luas melalui percakapan, komunitas, dan grup WhatsApp, dibarengi oleh seruan penguatan massa di titik-titik utama terjadinya kerusuhan.

VIII.B. Telinga yang tak mendengar

361. Video anggota DPR yang berjoget pada Sidang Tahunan MPR RI 15 Agustus 2025 menjadi titik balik penting dalam memengaruhi emosi publik menjelang demonstrasi 25 Agustus 2025. Video asli menunjukkan sejumlah anggota DPR menari mengikuti lagu daerah Sajojo sebagai penutup acara formal. Ketika viral, video ini kemudian dibingkai sebagai perayaan atas kenaikan tunjangan DPR dan tidak menyertakan konteks kejadian sebenarnya. Narasi ini kemudian dikemas bersama klaim fantastis mengenai berbagai tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Video asli yang netral menjadi pemantik emosional karena konteksnya dipelintir. Klarifikasi dari beberapa anggota DPR bahwa joget tersebut merupakan reaksi spontan sebagai apresiasi terhadap penampilan tidak menghentikan viralitas bukan karena publik tidak tahu faktanya, tetapi karena narasi yang beredar sudah kepalang terbentuk dalam kesadaran publik.
362. Ketika demonstrasi 25 Agustus 2025 pecah, Gedung DPR diposisikan sebagai target simbolis kemarahan publik. Eskalasi berikutnya memperlihatkan pola yang semakin mengarah pada personalisasi kemarahan yang berakhir dengan terjadinya penjarahan pada 29–31 Agustus 2025 terhadap kediaman sejumlah anggota DPR yang banyak muncul dalam berbagai konten di media sosial.
363. Meskipun tidak menjadi sasaran penjarahan, anggota DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra) sempat menyatakan mundur dari DPR akibat tekanan publik yang besar di media sosial, sebelum kemudian menarik kembali pernyataan tersebut. Peristiwa ini memperlihatkan kuatnya tekanan simbolis dan personal yang dialami figur-figur DPR dalam eskalasi setelah demonstrasi.
364. Pola penyebaran ini memperlihatkan bahwa disinformasi lebih berfungsi sebagai akselerator dan bukan pemantik demonstrasi. Demonstrasi dan kemarahan publik sudah ada tanpa adanya kampanye disinformasi yang meluas dan memanfaatkan momentum untuk mempercepat eskalasi dan memperluas reaksi spontan dari demonstran.

365. Pernyataan anggota DPR Ahmad Sahroni (NasDem) pada 22 Agustus 2025 bahwa aksi demonstrasi dengan tuntutan pembubaran DPR adalah aksi orang tolol turut andil dalam mengakselerasi kemarahan publik yang lebih luas.
366. Pernyataan Sahroni tersebut viral di media sosial dan memantik Salsa Erwina Hutagalung, seorang WNI diaspora, menantang Sahroni untuk berdebat secara terbuka mempertahankan pernyataannya yang menyebut tuntutan publik sebagai aksi orang tolol. Tak lama, Salsa mengabarkan di akun Instagram @salsaer bahwa keluarganya mengalami intimidasi dari pihak yang ditengarai berafiliasi dengan Sahroni, sehingga semakin memantik kemarahan publik terhadap Sahroni.
367. Pernyataan Ahmad Sahroni terus viral di berbagai kanal mulai dari TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Wawancara KPF dengan sejumlah pelajar peserta demonstrasi menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka hanya mengetahui pernyataan Sahroni dari potongan video dan bukan dari rekaman yang lengkap dengan konteksnya.
368. Meskipun Sahroni bukan penyebab langsung kerusuhan, pernyataannya yang tidak peka pada kondisi emosional masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mengakselerasi kemarahan publik karena dinilai tidak peka dan merendahkan rakyat. Kekecewaan publik yang sebelumnya diarahkan pada institusi DPR kemudian beralih menjadi kemarahan yang lebih personal terhadap Sahroni, sehingga memperkuat dorongan publik untuk mengekspresikan protes secara terbuka melalui aksi demonstrasi.

VIII.C. Gedung DPR sebagai *ground zero*

369. Pemilihan Gedung DPR sebagai titik kumpul dan sasaran utama aksi pada 25 Agustus 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Tuntutan seperti 'Bubarkan DPR', 'Turunkan Puan Maharani', dan 'Sahkan RUU Perampasan Aset' mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap DPR sebagai lembaga legislatif yang telah gagal menjadi representasi rakyat dan penuh dengan praktik korupsi dan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Kampanye disinformasi tentang video joget anggota DPR turut mempercepat proses simbolisasi tersebut dan menjadikan DPR sebagai musuh bersama bagi peserta aksi dari lintas kelompok.
370. Bentrokan yang terjadi pada 25 Agustus 2025 menyebar dari gerbang DPR ke berbagai titik strategis di sekitarnya mulai dari Jalan Gerbang Pemuda, kolong jalan layang Pejompongan, jalur rel Pejompongan, hingga ruas tol dalam kota.
371. Di titik-titik strategis ini, KPF menemukan sejumlah pola yang berulang. Utamanya, bentrokan diawali oleh insiden kecil seperti dorong-dorongan yang terjadi di tengah kerumunan massa aksi dan kemudian diikuti oleh pelemparan batu dan petasan. Ketika ini terjadi, aparat kepolisian kemudian merespons dengan tembakan gas air mata, meriam air, dan manuver lebih lanjut untuk mendorong massa masuk lebih dalam ke ruang kota dan menjauh dari titik utama aksi di Gedung DPR.
372. Dalam kekacauan yang terjadi, terjadi penyerangan terhadap sejumlah infrastruktur publik yang juga menjadi arena bentrokan aparat dan massa aksi. Akibatnya, KPF menemukan sejumlah insiden pembakaran pos polisi, perusakan pembatas jalan dan gerbang jalan tol, serta vandalisme terhadap kendaraan yang diparkir di area sekitar Gedung DPR dan titik-titik di mana aparat memukul mundur massa aksi.
373. KPF mencatat bahwa dimensi kekerasan dalam demonstrasi pada 25–28 Agustus 2025 tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai kejahatan yang dilakukan secara terencana oleh massa aksi. Penting untuk menggarisbawahi bahwa kekerasan muncul dalam konteks respons aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi sebagai ekspresi kekecewaan publik terhadap penyelenggara negara. Pola kejadian di lapangan menunjukkan eskalasi kekerasan tidak dapat dilepaskan dari kekerasan aparat mengelola massa dan ruang demonstrasi.
374. Prosedur penanganan aksi oleh kepolisian berperan signifikan dalam menyebabkan eskalasi kekerasan dan bentrokan dengan massa peserta aksi. KPF mencatat tindakan-tindakan berlebihan seperti penangkapan pelajar yang hendak turut serta dalam aksi demonstrasi,

kekerasan seperti menyusup ke dalam massa aksi, dan penggunaan alat-alat seperti pentungan, gas air mata, dan meriam air turut andil mengeskalasi kekerasan.

375. KPF belum menemukan pola serangan yang menunjukkan adanya perencanaan taktis terpusat dalam bentrokan tersebut. Pergerakan massa dan eskalasi kekerasan cenderung mengikuti dinamika situasional di lapangan, dipengaruhi oleh penempatan aparat, penyempitan ruang gerak massa, serta penggunaan kekuatan secara berulang di titik-titik yang sama. Pola ini memperlihatkan bahwa kerusuhan berkembang secara reaktif dan sporadis, bukan sebagai hasil dari instruksi terkoordinasi oleh satu kelompok atau komando aksi tertentu.

VIII.D. Jolly Roger One Piece dan keberanian yang menular

376. Rangkaian demonstrasi pada 25–28 Agustus 2025 tidak dapat dilepaskan dari saga Jolly Roger One Piece yang telah berkembang sejak akhir Juli 2025 di berbagai kanal media sosial. Fakta menunjukkan bahwa simbol Jolly Roger One Piece awalnya diartikulasikan secara kreatif oleh sejumlah sopir truk guna memprotes ketidakadilan ekonomi, sebelum kemudian diadopsi oleh sejumlah kolektif pergerakan masyarakat sipil sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki dan dijadikan kerangka naratif Agustus sebagai ‘bulan perlawanan’ dengan ajakan mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece di rumah, kampus, jalan, dan ruang-ruang digital.
377. Dalam kerangka ini, aksi demonstrasi 25–28 Agustus 2025 sebenarnya hanyalah salah satu babak dalam rangkaian yang lebih besar tersebut dan bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, sebagaimana digambarkan dalam narasi aparat kepolisian yang kemudian mengaitkan rangkaian aksi tersebut dengan tuduhan pengendalian oleh aktivis.
378. Aksi Gemarak pada 21 Agustus 2025, konsolidasi kolektif NIKA dan KPR Depok pada 24 Agustus 2025, serta mobilisasi simbolis bendera Jolly Roger One Piece dalam Demonstrasi Pati menandai kesinambungan agenda yang memadukan kritik terhadap oligarki, tuntutan keadilan sosial, dan perlawanan terhadap represi negara secara kreatif.
379. KPF mengakui bahwa penggunaan simbol Jolly Roger One Piece yang sangat populer sebagai produk budaya pop menciptakan risiko penunggang aksi yang besar. Di satu sisi, kolektif gerakan masyarakat sipil menggunakan bendera Jolly Roger One Piece untuk mengartikulasikan agenda keadilan dan demokrasi. Di sisi lain, aparat kepolisian membaca penggunaan simbol yang sama sebagai identitas yang menandai, menyasar, dan membuat stigma demonstran (termasuk pelajar yang ditangkap) sebagai ‘anarko’, ‘perusuh’, dan ‘dalang kerusuhan’. Akibatnya, simbol perlawanan yang awalnya inklusif berubah menjadi liabilitas di tengah kriminalisasi massal terhadap aktivis pro-demokrasi oleh kepolisian.
380. KPF merasa perlu membedakan antara kesinambungan simbolis dan komando dalam rangkaian aksi ini. Penggunaan simbol yang sama tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya struktur organisasi tunggal atau perencanaan terpusat lintas aksi. Berdasarkan temuan fakta, tidak ada bukti penggunaan simbol Jolly Roger One Piece disertai dengan mekanisme komando yang terintegrasi antar lokasi, waktu, dan kelompok peserta aksi.
381. Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), transkrip percakapan, dan verifikasi lapangan langsung, KPF menemukan indikasi kuat bahwa kolektif NIKA dan grup KPR Depok memainkan peran penting dalam merancang dan memobilisasi aksi 25 Agustus 2025 dengan tajuk Revolusi Rakyat Indonesia.
382. KPF menemukan sejumlah klaster grup percakapan di aplikasi WhatsApp yang aktif mendiskusikan aksi demonstrasi Agustus 2025, di antaranya:
- a. **Klaster NIKA**, yang pertama dibuat sebagai Pasukan Revolusi oleh Khariq Anhar pada 30 Juli 2025. Sejumlah figur sentral yang aktif di grup ini termasuk Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat yang bertindak sebagai administrator bersama Khariq Anhar serta anggota Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji, Yahdi

- Hidayatullah Ramadhan alias Rama, Fata Muhibuddin, Syahdan Husein, Gerry Gesta Abdullah, dan Reyhan Aryaputra Purnomo.
- b. **Klaster KPR - Depok**, yang dibuat oleh Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji pada 5 Agustus 2025 dan menjadi simpul koordinasi logistik dan teknis aksi di Jakarta. Dengan anggota mencapai 100 orang, sejumlah figur sentral yang aktif di grup ini termasuk Khariq Anhar dan Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat yang juga bertindak sebagai administrator bersama Kenji serta anggota Gerry Gesta Abdullah, Reyhan Aryaputra Purnomo, Dito, Habil, Andi F. R dan lainnya.
 - c. **Klaster Tai Kuda**, yang dibuat oleh akun bernama Rey (ReyhanAP) dengan nomor +972 (0) 232 411 363 pada 31 Agustus 2025 dengan anggota 29 orang.
 - d. **Klaster Nakama Network berbasis kedaerahan seperti Jatim dan Jateng**, yang dibuat oleh Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat.
 - e. **Grup Pendinginan Dulu**, yang dibuat oleh Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat pada 25 Agustus dengan total 8 admin dan 89 anggota.
383. Penelusuran latar belakang menunjukkan bahwa anggota NIKA dan KPR Depok merupakan anggota dan berasal dari spektrum organisasi yang beragam, mulai dari Front Aksi Mahasiswa (FAM), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Blok Politik Pelajar (BPP), mahasiswa dari berbagai kampus, mahasiswa WNI diaspora di Malaysia dan Hong Kong, hingga sejumlah anggota dan simpatisan PDI-P.
384. Temuan fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan adanya afiliasi politik atau faksi tertentu di antara figur-figur yang aktif mengelola dan mengorganisir berbagai grup dan kolektif yang ada serta tidak mengindikasikan adanya orientasi politik yang tunggal. Mereka memiliki afiliasi yang berbeda-beda, namun disatukan oleh kekecewaan dan kemarahan terhadap praktik pemerintahan yang laten korupsi serta terkesan meromantisasi konsep revolusi rakyat. Meskipun ada kesamaan garis ideologis dengan tradisi marhaenisme dan melibatkan sejumlah individu yang tercatat sebagai kader dan simpatisan partai, verifikasi independen oleh KPF dengan sejumlah kader PDI-P menegaskan tidak ada dukungan atau mandat organisasi bagi individu-individu yang terlibat. Tuduhan adanya faksi internal di dalam PDI-P sebagai motor aksi pun tidak pernah dikonfirmasi secara pro justitia, sekalipun percakapan informal mengakui adanya ketegangan internal di tubuh partai.
385. Penelaahan lebih rinci terhadap percakapan di grup WhatsApp NIKA dan KPR Depok menunjukkan bahwa beberapa individu berperan aktif bukan hanya sebagai admin teknis, tetapi juga sebagai pendorong garis tuntutan politik yang beragam. Ilham Mukti Ali Damanik dan Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat, misalnya, pada 24 Agustus secara eksplisit meminta Syahdan Husein untuk menyusun draf awal siaran pers Aliansi Perlawanan Rakyat yang memasukkan tuntutan Bubarkan DPR ke dalam naskah resmi aliansi. Permintaan tersebut diulang oleh beberapa anggota lain seperti Abdul Ghofar Dwi Prawira, sehingga Syahdan Husein kesal terhadap dorongan tersebut, meskipun pada akhirnya dimasukkan ke dalam siaran pers.
386. Transkrip percakapan grup KPR Depok juga menunjukkan bahwa dorongan atas tuntutan Bubarkan DPR konsisten datang dari sejumlah anggota tertentu, seperti Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji, Gerry Gesta Abdullah, Reyhan Purnomo, dan Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat. Sementara Syahdan Husein justru lebih menekankan pentingnya tuntutan perubahan yang lebih besar seperti Turunkan Prabowo–Gibran. Fakta ini menunjukkan bahwa pergerakan kolektif ini bersifat dinamis dan penuh dengan perdebatan yang cukup substantif, bukan berdasarkan arahan dari aktor tertentu sebagaimana insiniasi aparat penegak hukum.
387. Transkrip percakapan grup KPR Depok memperlihatkan adanya wacana, spekulasi, dan perbincangan mengenai kemungkinan terjadinya bentrokan dengan aparat, keterlibatan kelompok pelajar dalam aksi, dan rencana menyertai gerakan massa Relawan Perjuangan

Demokrasi (Repdem) PDI-P yang diidentifikasi oleh anggota kolektif akan turun aksi pada tanggal 25 Agustus 2025.

388. KPF belum menemukan bahwa percakapan tersebut berkembang menjadi instruksi operasional yang terstruktur atau dieksekusi secara konsisten di lapangan. Fakta lapangan justru menunjukkan bahwa bentrokan dan eskalasi kekerasan berkembang secara situasional, dipengaruhi oleh respons aparat dan dinamika massa yang cair, sehingga tidak dapat dikaitkan secara kausal dengan satu rencana taktis kolektif.
389. Transkrip percakapan grup NIKA dan KPR Depok menunjukkan situasi grup dengan anggota yang saling curiga dan mengindikasikan adanya penyusupan. Beberapa anggota menuduh dan mengidentifikasi anggota lainnya sebagai intelijen. Bukti fakta percakapan grup KPR juga menunjukkan adanya peringatan dari salah satu anggota bahwa demonstrasi tanggal 25 merupakan demonstrasi yang akan terjadi bentrokan karena penyusupan oleh agen BIN yang menyamar sebagai massa mahasiswa dan umum. Peringatan itu juga termasuk informasi akan adanya operasi besar-besaran yang akan menuduh para kolektif sebagai 'anarko'.
390. Keterkaitan operasional yang sama juga tidak ditemukan dalam hal dugaan keterlibatan BAIS dan TNI, BIN, atau pun Polri dalam dinamika demonstrasi kolektif NIKA. Kesesuaian di tingkat isu seperti kritik terhadap korupsi politik, serangan terhadap polisi dan DPR, dan sebagainya tidak dapat gegabah disimpulkan sebagai suatu hubungan yang kausal meskipun terdapat korelasi di permukaan. Sampai laporan ini disusun, belum ada bukti kuat bahwa kolektif NIKA, KPR Depok, atau organisasi gerakan masyarakat sipil lainnya menerima perintah, dukungan logistik terstruktur, atau koordinasi langsung dari pejabat, partai politik, atau institusi negara.
391. KPF menyimpulkan bahwa kolektif NIKA, KPR Depok, dan lain-lain yang berkaitan di tingkat anggota individu lebih tepat dipahami sebagai aktor yang beroperasi tanpa pimpinan komando tertentu. Mereka memiliki daya lenting tinggi, namun kapasitas organisasinya mustahil dapat melakukan apa yang dituduhkan sebagai orkestrasi kerusuhan di berbagai penjuru negara.
392. Oleh sebab itu, menasbihkan mereka sebagai dalang mahakuasa (*mastermind*) yang dengan sedemikian rupa mengatur semua rangkaian kejadian demonstrasi mengindikasikan adanya kecenderungan menyederhanakan dinamika aktor dan mengabaikan faktor-faktor lain yang relevan, seperti pengaruh kampanye disinformasi yang meluas dan kesembronoan pihak kepolisian ketika menangani aksi massa dalam praktik penegakan hukum.
393. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah individu, termasuk Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryodiningrat, Abdul Ghofar, Ilham Mukti Ali Damanik dan lainnya, memang berperan aktif dalam ruang diskursus dan perumusan tuntutan politik di tingkat kolektif. Namun, peran tersebut berada pada ranah artikulasi gagasan dan komunikasi politik, bukan pada pengendalian operasional lapangan.
394. KPF tidak menemukan bukti bahwa individu-individu tersebut memiliki kapasitas, otoritas, atau kendali faktual untuk mengarahkan bentrokan, menentukan sasaran kekerasan, atau mengorkestrasi kerusuhan di berbagai titik secara simultan. Fakta ini menjadi relevan karena praktik penegakan hukum tidak secara konsisten membedakan antara peran diskursif dan peran operasional, sehingga berisiko menyederhanakan aktor dan tanggung jawab pidana.

VIII.E. Massa aksi yang organik dan sporadis

395. Sejumlah organisasi mahasiswa memobilisasi aksi demonstrasi lanjutan pada 29 Agustus 2025 dengan titik utama di Gedung DPR dan Polda Metro Jaya. Kelompok yang teridentifikasi sebagai penggerak utama antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia () Rakyat Bangkit, dan BEM SI Kerakyatan.³⁴⁵ Mobilisasi dilakukan melalui seruan terbuka di media sosial, khususnya

³⁴⁵ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-ui-membawa-sejumlah-tuntutan-saat-demo-di-polda-metro-jaya-2064393>, 29 Agustus 2025.

Instagram dan TikTok. Ajakan aksi menekankan respons atas pembunuhan Affan Kurniawan, eskalasi kekerasan aparat dalam pengamanan demonstrasi, serta penangkapan massal terhadap pelajar, mahasiswa, aktivis, dan warga sipil. Tuntutan utama yang disuarakan massa mahasiswa meliputi pengusutan tuntas, transparan, dan akuntabel pembunuhan Affan Kurniawan, penindakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melanggar HAM, pembebasan demonstran dan warga sipil yang ditangkap sepanjang rangkaian aksi, serta penghentian penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan demonstrasi. Selain aksi di Jakarta, BEM SI menyerukan aksi serentak nasional pada Jumat, 29 Agustus 2025, serta aksi lanjutan pada 1 September 2025, dengan tajuk 'Bubarkan Institusi Pelanggar HAM!!!'

396. Di luar BEM, organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga menggelar aksi dengan bentuk berbeda. Keduanya melaksanakan aksi simbolis berupa tahlilan di depan Mabes Polri yang berlangsung damai. HMI dan GMNI menyampaikan kritik moral terhadap praktik kekerasan aparat dan menuntut perubahan pendekatan keamanan negara dalam merespons demonstrasi warga sipil.

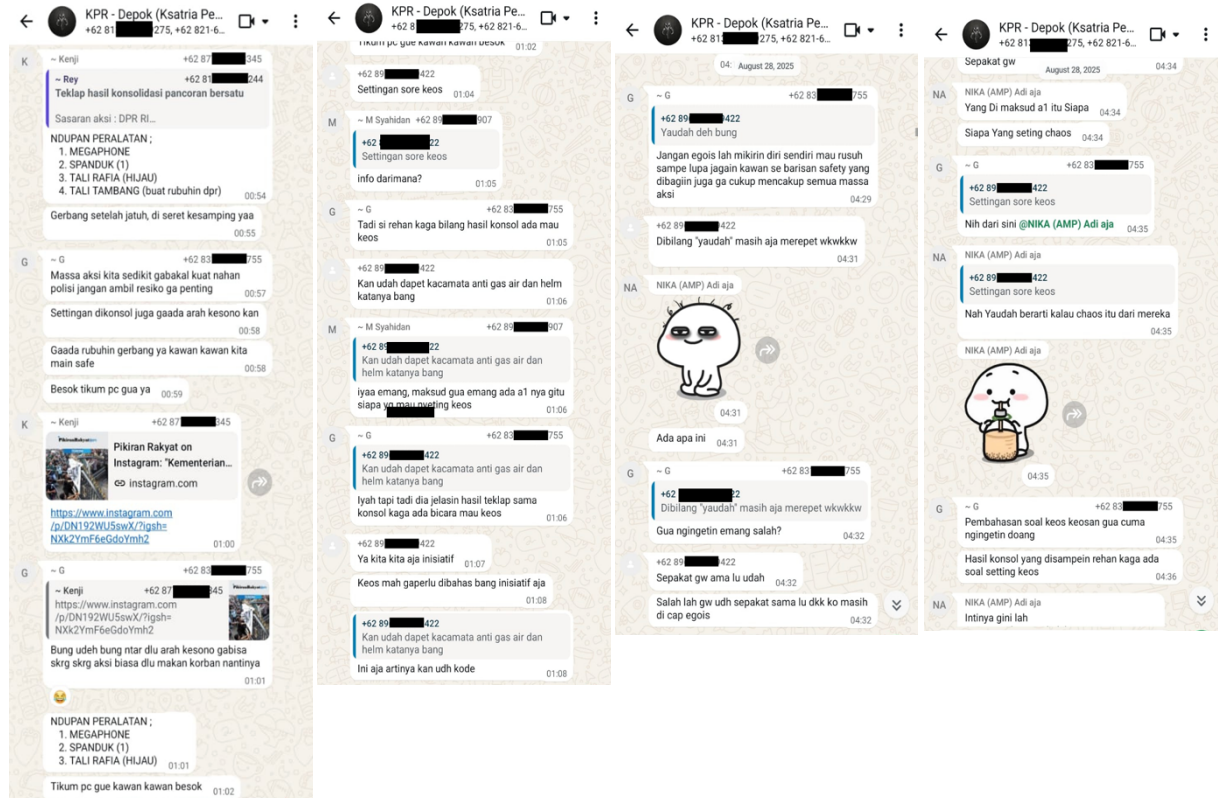


Gambar 59. Poster seruan aksi demonstrasi oleh BEM SI

397. Massa sopir ojol bergabung ke barisan demonstran utamanya dan menjadi kekuatan dominan karena reaksi spontan, emosional, dan solidaritas kolektif atas pembunuhan sejawat Affan Kurniawan. Konsentrasi massa sopir ojol terutama berada di sekitar Mako Brimob Kwitang, dengan sebagian bergabung di Gedung DPR. Dalam aksi-aksi tersebut, massa sopir ojol secara konsisten menyuarakan seruan "polisi pembunuh" sebagai ekspresi kemarahan dan duka kolektif. Tuntutan utama mereka berfokus pada pertanggungjawaban institusional Polri serta desakan agar aparat yang terlibat diproses secara hukum pidana, bukan hanya proses etik internal kelembagaan.
398. Meskipun menjadi salah satu motor awal demonstrasi pada 25 Agustus 2025, kolektif NIKA yang memiliki jaringan di berbagai kota mengalami sejumlah dinamika internal selama aksi demonstrasi berkembang.³⁴⁶ KPF menemukan banyak pertentangan di antara anggota kolektif NIKA terkait beberapa hal, di antaranya penggunaan katapel berisi batu berlapis kain

³⁴⁶ Khariq Anhar, selaku salah satu administrator grup, meminta anggota kolektif NIKA untuk melaporkan dokumentasi aksi melalui laman <https://bit.ly/laportimaliansi> serta mengajak orang-orang untuk bergabung ke grup WhatsApp Revolusi https://chat.whatsapp.com/L0hWkSqcij7HYuEgllF6SM?mode=ac_t.

yang direndam minyak pada 13 Agustus 2025 oleh anggota yang tidak diketahui, usulan *long march* nasional dengan membawa bendera One Piece secara serentak pada 17 Agustus 2025, serta wacana penciptaan kekacauan jelang aksi 28 Agustus 2025 yang ditolak oleh sejumlah anggota, termasuk Reyhan Aryaputra Purnomo, Gerry Gesta Abdullah, dan Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji.³⁴⁷ Anggota kolektif kerap menegaskan tidak adanya instruksi untuk menciptakan kekerasan dan menekankan kewaspadaan terhadap eskalasi yang tidak terkendali. Di samping itu, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardiro Suryodiningrat juga pernah mempertanyakan keberadaan molotov yang sempat dimiliki Gerry



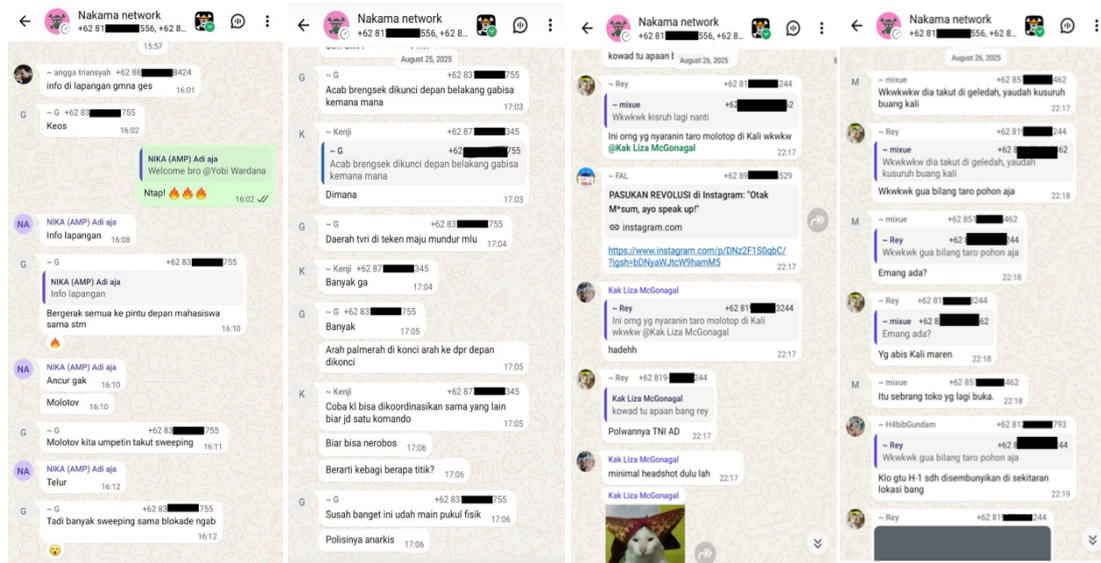
Gesta Abdullah dan kemudian diketahui dibuang, sehingga tidak pernah digunakan dalam aksi demonstrasi.³⁴⁸

Gambar 60, 61, 62, dan 63. Tangkapan layar percakapan grup WhatsApp NIKA menolak keterlibatan dalam kerusuhan yang diusulkan salah satu anggota tidak dikenal

399. Demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan pola gerakan yang cair, sporadis, dan tidak terpusat pada satu struktur komando formal. Berdasarkan temuan fakta lapangan, tidak terlihat peran menonjol dari koordinator atau jenderal lapangan tertentu. KPF juga tidak menemukan bukti adanya kendaraan komando tertentu yang secara konsisten memimpin, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas pergerakan massa pada 25–28 Agustus 2025.
400. Pada fase ini, aksi demonstrasi terpusat di Gedung DPR. Selama 25–28 Agustus 2025, terdapat pergeseran kelompok yang dominan di garda terdepan aksi. Banyak peserta aksi pada awalnya mengenakan atribut bendera Jolly Roger One Piece, sebelum kemudian berganti dengan kelompok mahasiswa lintas kampus dan massa pelajar STM yang ditemukan berhadapan langsung dengan barikade polisi yang bertugas menangani demonstrasi.

³⁴⁷ Berdasarkan tangkapan layar grup WhatsApp KPR - Depok (Ksatria Pembela Rakyat) dari informan yang dirahasiakan.

³⁴⁸ Bukti percakapan di berbagai grup WhatsApp kolektif NIKA dan grup yang terafiliasi dapat ditelusuri melalui forensik digital yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya namun dipotong-potong. Bukti lengkap didapatkan melalui informan yang namanya disamarkan.



Gambar 64, 65, 66, dan 67. Tangkapan layar percakapan grup Nakama Network tentang demonstrasi 25 Agustus 2025

401. Ketiadaan pemimpin aksi dalam arti konvensional ini membuat gerakan demonstrasi tampak *leaderless*. Meskipun ada koordinasi berbagai kolektif di grup WhatsApp NIKA dan KPR - Depok, KPF tidak menemukan adanya komando pusat di pihak warga sipil yang mengatur seluruh tahapan aksi secara keseluruhan.
402. Akibatnya, aksi demonstrasi sangat rentan disusupi, diambil alih, atau bahkan dimanfaatkan oleh berbagai faksi lain yang mempunyai tujuan dan gaya aksi berbeda. Beberapa contoh dari faksi-faksi ini termasuk kelompok mahasiswa yang mengusung tuntutan kebijakan antikorupsi, kolektif NIKA yang menyuarakan perlawanan terhadap penindasan, serta kelompok pelajar STM dan massa umum yang motif dan tingkat kedisiplinannya tidak konsisten menurut amatan KPF.
403. Massa mahasiswa yang tergabung dalam Gemarak cenderung lebih terorganisir dan membawa isu-isu yang relatif konsisten, seperti pemberantasan korupsi, pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan terhadap komersialisasi pendidikan, dan penghapusan sistem kerja *outsourcing*. Kelompok ini juga diamati disiplin untuk mundur ketika situasi mengeskalasi menjadi bentrokan.
404. Massa pelajar menunjukkan pola perlawanan tipikal jalanan yang lebih 'spartan' dan adaptif. Mereka bergerak cair, menduduki ruang-ruang kota seperti jalan tol, jalur rel, dan kolong jalan layang secara oportunistis dan spontan. Massa ini tidak tunduk pada satu instruksi teknis yang terpusat, baik itu dari kolektif NIKA dan KPR maupun Gemarak.
405. Analisis ini meyakinkan KPF bahwa tuduhan adanya dalang atau pengendali utama demonstrasi tidak sejalan dengan pola faktual di lapangan. Terdapat tumpang tindih berbagai aliran massa dengan tingkat kemarahan, aspirasi, dan disiplin yang beragam, sehingga menciptakan kondisi yang rentan terhadap eskalasi dan pemanfaatan situasi oleh berbagai pihak yang berada di sekitar arena demonstrasi, tanpa adanya kendali terpusat dari satu aktor tertentu.

VIII.F. Mahasiswa dan pelajar turun ke jalan

406. Temuan fakta kejadian, BAP, serta verifikasi video demonstrasi 25–28 Agustus 2025 menunjukkan kehadiran kelompok mahasiswa sebagai salah satu unsur massa pada fase awal hingga pertengahan aksi. Keterlibatan massa mahasiswa berlangsung dalam kapasitas artikulasi tuntutan politik dan kebijakan, bukan komando sebagai pihak yang mengatur pengendalian massa atau kerusuhan.

407. Kelompok mahasiswa yang dapat diidentifikasi sebagai peserta aksi antara lain berasal dari:
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI** (100 orang) dengan penanggung jawab Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama serta tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.
 - Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara DKI Jakarta** (300 orang) dengan penanggung jawab Hasyim Rahman Mahad dan Piere Lailossa bertajuk 'Merdeka untuk Siapa?'
 - Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (Semmi) Jakarta Timur** (50 orang) dengan penanggung jawab Ainun Sakti Rahanyaan dengan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.
 - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Barat** (50 orang) dengan penanggung jawab Choirul Umam serta tuntutan pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
408. Selain keempat kelompok tersebut, beberapa massa aksi dari kalangan organisasi mahasiswa juga turun meskipun dengan tidak menonjolkan organisasi mereka di lapangan. Percakapan-percakapan di WAC KPR Depok dan NIKA misalnya menyebut beberapa anggota gerakan dan organisasi mahasiswa yang ikut aksi namun tidak menggunakan bendera organisasinya secara resmi.
409. Kelompok- kelompok ini datang dengan massa masing-masing dan menyampaikan tuntutan yang berbeda tetapi beririsan, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, kritik terhadap ketimpangan kesejahteraan, serta pencabutan gaji dan tunjangan anggota DPR.
410. Keberadaan mahasiswa dalam aksi memperlihatkan pola yang relatif terstruktur dan terbuka, dengan penanggung jawab lapangan yang jelas serta penyampaian tuntutan melalui mekanisme orasi dan simbol aksi yang lazim dalam praktik demonstrasi mahasiswa.
411. Dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun turut memasuki halaman depan Gedung DPR, kelompok mahasiswa tidak mengambil alih atau mengendalikan arena aksi ketika terjadi pergeseran dinamika massa.
412. Massa kelompok mahasiswa menarik diri lebih awal sebelum eskalasi bentrokan fisik terjadi, yang berbeda dengan massa pelajar yang mengambil alih ruang aksi dan tidak gentar untuk bersinggungan langsung dengan aparat selama bentrokan.
413. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa berperan terutama sebagai pengusung isu dan aspirasi kebijakan yang konsisten dengan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya pada Februari dan Maret 2025 di tengah himpitan ekonomi, efisiensi APBN, dan ketidakpercayaan publik terhadap negara.
414. Oleh sebab itu, keterlibatan mahasiswa menunjukkan bahwa demonstrasi 25–28 Agustus 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai reaksi impulsif terhadap video joget anggota DPR ataupun wacana kenaikan tunjangan anggota DPR, melainkan bagian dari rangkaian advokasi kebijakan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
415. KPF tidak menemukan bukti bahwa kelompok mahasiswa terlibat dalam perencanaan, pengendalian, atau pelaksanaan tindakan kekerasan, perusakan, maupun penjarahan yang terjadi setelah eskalasi bentrokan. Tidak terdapat temuan mengenai instruksi, seruan, atau koordinasi dari penanggung jawab kelompok mahasiswa yang mengarah pada tindakan melawan hukum. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam aksi tidak dapat dipertautkan dengan terjadinya kerusuhan.
416. Berdasarkan transkrip percakapan dalam grup WhatsApp KPR Depok serta verifikasi rekaman video aksi demonstrasi 25 Agustus 2025, kelompok pelajar merupakan salah satu elemen massa yang hadir dan mengambil alih ruang demonstrasi pada fase eskalasi. Keberadaan massa pelajar bukan bersifat spontan, namun hasil mobilisasi informal melalui jaringan pertemanan, kanal percakapan daring, serta jejaring aktivisme pelajar yang sudah ada jauh sebelum Agustus 2025.
417. Beberapa anggota inti grup WhatsApp KPR Depok tercatat memiliki jaringan dengan kelompok pelajar terutama di wilayah Jakarta dan Tangerang. Salah satu penghubung tersebut adalah akun dengan nomor +972xxxxxx363, yang dalam percakapan grup

menyatakan kedekatan dengan sejumlah kolektif pelajar. Dokumentasi visual dan keterangan saksi menunjukkan bahwa mayoritas pelajar yang hadir di DPR pada 25 dan 28 Agustus berasal dari SMK Se- Jabodetabek.

418. Adanya anggota grup WhatsApp dengan nomor luar negeri tidak dapat gegabah disimpulkan sebagai bukti keterlibatan aktor asing dalam perencanaan demonstrasi. Hingga laporan ini disusun, tidak terdapat satu pun temuan yang mengaitkan keberadaan akun tersebut dengan keterlibatan negara asing, pendanaan lintas negara, atau operasi intelijen eksternal.
419. KPF merasa hal-hal seperti ini perlu ditelusuri dengan saksama agar dapat menjelaskan dinamika yang ada, bukan hanya berdasarkan keyakinan semata. Hal ini juga menunjukkan adanya penyelidikan digital forensik yang entah sengaja atau tidak belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, terlebih menimbang fokus kepolisian yang sedari awal sudah menarget aktivis pro-demokrasi, mahasiswa, dan pelajar.
420. Pergerakan massa pelajar menunjukkan pola mobilisasi yang berbeda dibandingkan kelompok mahasiswa dan massa umum. Kelompok pelajar masuk ke area depan Gedung DPR bukan dari arah gerbang utama. Mereka menyeberangi Jalan Tol Dalam Kota, yang menandakan adanya koordinasi dan rute yang telah disepakati sebelumnya meskipun tetap tidak ditemukan bukti adanya komando tunggal. Ketika tiba di depan gerbang DPR, massa pelajar secara bertahap mengambil alih arena aksi dari massa umum dan mahasiswa, lalu menjadi garda depan yang paling intens berhadapan dengan aparat kepolisian.
421. Ketika terjadi bentrokan, massa pelajar tampil sebagai aktor yang cenderung konfrontatif. Satu insiden yang banyak terdokumentasi adalah pencabutan bendera Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipasang di pagar Gedung DPR. Tiang bambu penyangga bendera tersebut kemudian digunakan oleh pelajar dalam konteks bentrokan langsung dengan aparat kepolisian, dibarengi oleh pelemparan batu dan botol yang kemudian dibalas semburan gas air mata dan diikuti tindakan penangkapan pelajar oleh polisi saat pembubaran massa.
422. Meskipun terkesan konfrontatif, bukti lapangan tidak menunjukkan bahwa pelajar bertindak berdasarkan komando yang terpusat. Pola percakapan di grup WhatsApp KPR Depok memperlihatkan bahwa pelajar memiliki motivasi sendiri untuk hadir sebagai bagian dari ekspresi kemarahan publik terhadap kondisi ekonomi dan ketidakadilan sosial.
423. Temuan ini konsisten dengan kajian aktivisme pelajar yang menunjukkan bahwa pelajar bukan massa bayaran atau pencari kerusuhan yang disetir oleh pihak ketiga. Mereka adalah warga negara berusia muda yang memiliki kesadaran politik, jaringan kolektif, dan kapasitas mobilisasi sendiri karena jengah akan masa depan yang dipertaruhkan oleh elite politik.³⁴⁹
424. KPF menilai penting untuk menempatkan keterlibatan pelajar dalam kerangka yang tepat secara hukum dan konstitusional. Pelajar memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
425. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang eksploitasi politik terhadap anak, namun tidak melarang partisipasi politik anak apabila dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa kekerasan. Oleh sebab itu, kehadiran pelajar dalam aksi demonstrasi Agustus 2025 tidak dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum terhadap UU Perlindungan Anak semata-mata karena status usia mereka.
426. KPF menegaskan bahwa dalam demonstrasi Agustus 2025, pelajar bukanlah objek yang dieksploitasi oleh pihak tertentu demi kepentingan politik. Mereka adalah warga negara yang juga memiliki keresahan nyata terhadap kenaikan biaya pendidikan, biaya hidup keluarga, krisis kesempatan kerja, dan akses pendidikan yang semakin membebani. Motivasi ini konsisten dengan tren lebih luas di mana kelompok pelajar mulai memosisikan diri sebagai aktor politik dengan kepentingan langsung atas kebijakan-kebijakan publik yang sembrono, terlebih karena mereka yang akan menanggung dampaknya di masa depan.³⁵⁰

³⁴⁹ Anotasi, <https://anotasi.org/aktivisme/blok-politik-pelajar>, 5 September 2025.

³⁵⁰ Tirto, <https://tirto.id/anak-muda-dan-sekolah-politik-di-luar-kelas-hjSv>, 17 Oktober 2025.

427. Pada saat yang sama, kelompok pelajar menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh tindakan represif baik pada hari aksi maupun pada rangkaian penangkapan setelah demonstrasi. Beberapa pelajar mengalami kekerasan oleh aparat berpakaian preman, sementara sebagian lainnya ditangkap tanpa pemberitahuan kepada orang tua atau wali dan pendampingan penasihat hukum.
428. KPF menilai terdapat ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana fokus aparat lebih diarahkan pada pelajar dan peserta aksi lapangan dibandingkan penelusuran aktor lain dengan kapasitas koordinasi dan sumber daya yang lebih besar.

VIII.G. Menelusuri massa aksi bayaran

429. Pada demonstrasi 25 Agustus 2025, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Ary Syam Indradi, mengklaim bahwa sejumlah demonstran yang ditangkap menerima bayaran antara Rp62.500–Rp200.000. Hingga laporan ini diterbitkan, kepolisian belum memberikan pernyataan lanjutan terkait koordinator massa bayaran ataupun kejelasan pengusutan aliran dana di baliknya.
430. Penelusuran KPF menemukan indikasi kuat keberadaan massa suruhan dalam demonstrasi 28 Agustus 2025. Massa ini diduga berasal dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Cimahi.
431. Kelompok massa bayaran datang ke Jakarta secara bertahap pada 28 Agustus 2025. Pada tahap awal, sekitar 10 orang berangkat dari Cimahi dengan membawa sekitar 160 botol bom molotov, petasan, kembang api, dan alat lainnya. Kelompok awal ini kemudian menjemput massa tambahan di Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Jumlah massa yang terkumpul meningkat hingga sekitar 600 orang sebelum tiba di Jakarta.³⁵¹
432. Sejumlah BAP kepolisian menunjukkan keterkaitan aktor dalam mobilisasi massa bayaran tersebut. Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON), Ginka Febriyanti Br Ginting, mengakui telah memerintahkan Sekretaris Nasional BISON, Ahmad Rifaldi, untuk menggalang 70 massa aksi untuk demonstrasi pada 28 Agustus 2025.³⁵² Ia menyerahkan dana sebesar Rp9.300.000 kepada Bendahara BISON, Ebyn Atsil Majid.³⁵³ Dana tersebut terdiri atas imbalan massa aksi sebesar Rp6.300.000 dan biaya logistik sebesar Rp3.000.000. Seluruh dana dinyatakan bersumber dari kas internal BISON.
433. BISON sendiri didirikan awalnya sebagai bagian dari tim sukses kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 serta Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.³⁵⁴ Ginka Febriyanti Br Ginting juga menyatakan bahwa BISON memiliki organisasi sayap bernama Blok Pelajar Politik Merdeka (BP2M) dan berstatus mitra atau 'afilator' Polri.³⁵⁵
434. Ahmad Rifaldi kemudian berkoordinasi dengan Intan Nur Aini alias Intan BISON, anggota BP2M, untuk memobilisasi 70 orang demonstran dengan imbalan Rp90.000. Total dana sebesar Rp6.300.000 disebut sebagai upaya untuk mencegah massa bertindak 'anarkis'.³⁵⁶
435. Intan Nur Aini alias Intan BISON, melalui akun WhatsApp 6285xxxxxx372, kemudian menghubungi Setiawati alias Mama Resal Indosiar, seorang koordinator penonton bayaran acara televisi, untuk menggalang 50 massa aksi dengan imbalan Rp70.000.³⁵⁷ Setiawati alias Mama Resal Indosiar kemudian menghubungi Megie Dwi Saputra, rekan sesama penonton bayaran acara televisi, untuk memobilisasi 30 orang dengan imbalan Rp62.500.

³⁵¹ Republika, <https://news.republika.co.id/berita/t1uklg393/siapa-penjarah-rumah-sahroni-eko-dan-menkeu-ini-kata-yang-ketinggalan-rombongan>, 31 Agustus 2025.

³⁵² BAP a.n. Ginka Febriyanti Br Ginting.

³⁵³ BAP a.n. Ebyn Atsil Majid.

³⁵⁴ BAP a.n. Ginka Febriyanti Br Ginting.

³⁵⁵ BAP a.n. Ginka Febriyanti Br Ginting.

³⁵⁶ BAP a.n. Intan Nur Aini.

³⁵⁷ BAP a.n. Setiawati.

436. Megie Dwi Saputra kemudian menyebarkan informasi mobilisasi massa melalui grup WhatsApp Pesta Rakyat yang beranggotakan 187 orang. Persyaratan yang dicantumkan mencakup berusia 17–40 tahun, berpakaian hitam, dan hadir di Gedung DPR pada pukul 13.00–14.00 WIB, dengan imbalan Rp50.000 per orang.³⁵⁸ Megie Dwi Saputra ditangkap aparat kepolisian pada 28 Agustus 2025.
437. Ebyn Atsil Majid menyatakan bahwa BISON menerima perintah dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri pada 29 Agustus 2025. Perintah tersebut mencakup dua tujuan: menggeser massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang akan berunjuk rasa di depan Markas Besar (Mabes) Polri. Selain itu, mereka juga menggelar aksi damai bertema penolakan ‘anarkisme’ dan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.
438. Secara terpisah, aparat kepolisian juga menangkap seseorang bernama Araz Gani di area Jalan Palmerah pada 28 Agustus 2025. Araz Gani mengaku ditawari imbalan Rp300.000 oleh seseorang bernama Akim melalui grup WhatsApp DEMO. Ia diberi tugas mengecek titik unjuk rasa, lokasi istirahat, serta memancing emosi demonstran.³⁵⁹ Araz Gani menyatakan bahwa ia pertama kali bertemu Akim pada 25 Agustus 2025 saat bekerja sebagai kurir aplikasi Shopee Food. Imbalan tersebut dijanjikan akan dibayarkan secara tunai. Nomor WhatsApp yang digunakan Akim (6288xxxxxx956) diduga mengarah kepada seseorang berinisial ABH alias Topan Nurhakim alias Babangs Haki Mansel. Hingga laporan ini diterbitkan, KPF tidak mendapatkan bukti bahwa Akim alias ABH alias Topan Nurhakim alias Babangs Haki Mansel sudah dipanggil dan diperiksa oleh kepolisian.
439. Selain kelompok mahasiswa dan pelajar, KPF juga menginvestigasi kehadiran kelompok massa umum serta indikasi keberadaan massa bayaran dalam rangkaian demonstrasi Agustus 2025. Hal ini bukan fenomena baru dalam aksi berskala besar di Indonesia, namun intens dan banyak terjadi dalam konteks demonstrasi Agustus 2025.
440. Dokumen BAP dan keterangan saksi mengungkap keberadaan Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia (DPP GMI), dengan estimasi sekitar 500 peserta aksi di bawah penanggung jawab aksi Albar, yang mengusung tuntutan Bubarkan DPR, Sahkan RUU Perampasan Aset, dan Lengserkan Puan Maharani. Amatan KPF menunjukkan bahwa kehadiran DPP GMI dibarengi oleh kedisiplinan struktural dalam pergerakan massa dengan narasi ideologis serta tuntutan politik yang konsisten.
441. Seruan untuk berdemonstrasi yang disuarakan oleh kelompok yang mengatasmamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia yang menasar mobilisasi masyarakat umum melalui ajakan berbasis isu populis seperti kenaikan tunjangan DPR, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Ajakan ini memperoleh respons luas terutama di kalangan buruh lepas, masyarakat perkotaan yang terdampak kenaikan biaya hidup, serta individu tanpa afiliasi
442. KPF menemukan indikasi adanya massa bayaran dari sejumlah keterangan yang tercantum dalam BAP terkait klaster organisasi Barisan Intelektual Strategis Objektif Nasional (BISON) dengan koordinator Ginka Febriyanti Br Ginting. Dalam BAP ini, diungkap bahwa sebagian peserta aksi menerima kompensasi berupa uang transportasi untuk hadir dalam demonstrasi.
443. Ginka Febriyanti Br Ginting diketahui merupakan anggota tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 serta juru bicara tim sukses Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024 lalu.³⁶⁰
444. Keterangan Ginka Febriyanti Br Ginting sebagaimana tertuang dalam BAP menyebut bahwa ia memerintahkan Ahmad Rifaldi untuk menyerahkan uang sebesar Rp6.300.000 kepada Intan Nuraini untuk dibagikan ke sekitar 70 orang yang hadir pada demonstrasi 28 Agustus 2025 di Gedung DPR. Keterangan ini menunjukkan adanya skema pendanaan untuk

³⁵⁸ BAP a.n. Megie Dwi Saputra.

³⁵⁹ BAP a.n. Araz Gani.

³⁶⁰ YouTube @cnnidofficial, <https://www.youtube.com/watch?v=HrXHr05BqLE>, 6 November 2024.

mendatangkan massa. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa belum ada bukti konklusif yang menjelaskan apakah dana tersebut ditujukan sekadar sebagai bantuan bagi massa umum yang membutuhkan bantuan untuk menyampaikan pendapatnya melalui demonstrasi atau mobilisasi untuk mengondisikan terjadinya kerusuhan.

445. Di samping itu, terdapat pula pemberitaan terkait massa suruhan yang datang bertahap menuju Jakarta dari wilayah sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cimahi. Sebagian di antaranya ditengarai membawa perlengkapan seperti petasan dan bom molotov. Meskipun informasi ini bersumber dari laporan media dan bukan BAP kepolisian, terdapat pola yang konsisten dengan BAP terhadap klaster BISON sehingga relevan untuk dicatat.
446. Hingga waktu penulisan laporan ini, bukti yang tersedia hanya memungkinkan kesimpulan-kesimpulan dasar sebagai berikut:
- a. Terdapat sejumlah massa aksi yang menerima kompensasi finansial untuk hadir di demonstrasi, namun jumlahnya tidak signifikan.
 - b. Fakta yang tersedia hanya mengonfirmasi pemberian kompensasi sebagaimana ditemukan secara eksplisit dalam BAP klaster BISON. Akan tetapi, tidak ada bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa massa bayaran adalah ‘dalang’ aksi 25–28 Agustus. KPF juga belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa massa bayaran tersebut ditujukan untuk melakukan kerusuhan secara sengaja.
 - c. Tanpa adanya komando terpusat yang mengarahkan eskalasi kekerasan, indikasi yang ada hanya dapat menunjukkan bahwa massa bayaran merupakan satu dari banyak elemen dalam dinamika massa yang kompleks dan *leaderless*.
447. KPF juga mencatat perkembangan setelah demonstrasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Pada Oktober 2025, beberapa minggu setelah rangkaian demonstrasi Agustus 2025, Ginka Febriyanti Br Ginting (Koordinator BISON) ditunjuk sebagai Komisaris anak usaha BUMN Pertamina Retail meskipun tidak memiliki rekam jejak profesional yang lazim dalam sektor energi atau pengelolaan korporasi.³⁶¹ KPF tidak menyimpulkan adanya kausalitas langsung antara keterlibatan Ginka Febriyanti Br Ginting dalam dinamika demonstrasi dengan penunjukan jabatan tersebut. Namun, fakta ini penting dicatat karena menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan inkonsistensi prioritas penegakan hukum, di mana individu yang namanya tercantum dalam BAP sebagai koordinator mobilisasi massa tidak menjadi fokus pendalaman aparat penegak hukum, sementara aktivis pro-demokrasi dengan kapasitas mobilisasi yang jauh lebih terbatas justru dijadikan target utama kriminalisasi.
448. Oleh sebab itu, menyimpulkan bahwa kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi 25 Agustus 2025 merupakan konsekuensi dari mobilisasi massa secara sengaja dan dikoordinasi melalui massa bayaran merupakan penyederhanaan yang gegabah dan tidak selaras dengan fakta lapangan. Hal ini justru berisiko mengaburkan peran krusial sejumlah aktor yang memiliki kapasitas mobilisasi lebih besar namun tidak diselidiki oleh kepolisian.

³⁶¹ Instagram @bison_indonesia, <https://www.instagram.com/p/DQY4xMskq3E>, 29 Oktober 2025.

IX. Penegakan Hukum yang Tajam ke Bawah

IX.A. Jejak bentrokan aparat dan demonstran

449. Bentrokan antara massa demonstran dan aparat kepolisian berlangsung sejak siang hingga malam hari pada 25 Agustus 2025 di area sekitar Gedung DPR. KPF mengolah temuan lapangan, keterangan saksi, dokumentasi audio-visual, serta BAP sejumlah korban dan pihak yang diperiksa untuk menemukan pola kekerasan pada hari kejadian berlangsung dua arah: aparat menggunakan kekuatan untuk mengendalikan massa dan demonstran bereaksi dengan menyerang aparat dalam kondisi tertekan.
450. Namun, karakter dan intensitas kekerasan yang terjadi menunjukkan ketimpangan signifikan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sebagaimana tercermin dari penggunaan alat pengendalian massa berdaya rusak tinggi oleh aparat, termasuk gas air mata dan pemukulan fisik, dibandingkan dengan respons reaktif massa demonstran yang sebagian besar bersifat defensif dan tidak terkoordinasi.
451. Pada tahap awal aksi, sebagian massa, khususnya mahasiswa dan kelompok masyarakat umum, berdemonstrasi tanpa adanya kekerasan. Ketegangan meningkat setelah massa pelajar mengambil alih area Gedung DPR dan terlibat bentrok langsung dengan aparat, baik yang berseragam maupun berpakaian preman.
452. Investigasi menunjukkan bahwa penggunaan gas air mata oleh kepolisian dilakukan dalam durasi dan intensitas tinggi, sehingga berkontribusi besar terhadap eskalasi kerusuhan. Tindakan ini memicu kekacauan yang lebih luas karena massa terpecah secara tidak terarah dan barisan massa yang lebih disiplin seperti kelompok mahasiswa memilih mundur lebih awal, sementara massa pelajar tetap bertahan dan berujung bentrok.
453. KPF menemukan adanya aparat yang menjadi korban pemukulan dan pelemparan batu ketika massa demonstran terdesak setelah penembakan gas air mata. Sementara itu, korban dari pihak demonstran umumnya terdiri atas mereka yang tertangkap di lokasi bentrokan dan yang ditangkap setelah aksi berakhir di area permukiman dan pengungsian.
454. Kesaksian dari sejumlah demonstran dan saksi di sekitar lokasi permukiman dan pengungsian menunjukkan bahwa sebagian besar demonstran mengalami kekerasan fisik dari aparat pada fase penangkapan, bukan ketika bentrokan. Tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh aparat berpakaian preman, sehingga baru dapat diidentifikasi setelah korban ditemukan di kantor kepolisian.
455. KPF juga menemukan bahwa pelajar merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi dalam eskalasi kekerasan selama demonstrasi. Tanpa struktur komando dan mobilisasi yang jelas, pelajar menjadi kelompok yang paling banyak ditangkap dan mengalami kekerasan dari aparat, baik saat maupun setelah demonstrasi. Sementara itu, kelompok massa umum dan bayaran yang jumlahnya signifikan pada aksi 25 Agustus 2025 relatif diabaikan oleh penindakan hukum, meskipun keberadaan dan keterlibatan mereka tercatat dalam BAP serta dokumentasi lapangan.
456. Perbandingan pola kekerasan antara 25 dan 28–31 Agustus menunjukkan perbedaan pola yang penting untuk diperhatikan. Pada 25 Agustus 2025, tidak ada korban jiwa. Pada 28 Agustus 2025, di tengah kekacauan, tindakan tidak terukur dari pihak aparat kepolisian berakhir dengan pembunuhan sopir ojek online Affan Kurniawan yang disaksikan oleh massa demonstrasi dan warga sekitar di area Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
457. Oleh sebab itu, demonstrasi 25 Agustus tidak dapat dikelompokkan sebagai bagian dari kerusuhan dan kekerasan, melainkan sebagai titik eskalasi awal yang memperlihatkan adanya tiga pola utama: (a) penggunaan kekuatan yang tidak proporsional sehingga berujung eskalasi kekerasan; (b) penindakan paksa yang melanggar prosedur hukum setelah massa membubarkan diri; dan (c) pengabaian terhadap kelompok-kelompok tertentu.

IX.B. Manipulasi psikologi massa

458. KPF menemukan bahwa gelombang kekerasan pada 28–31 Agustus 2025 tidak hanya dipicu oleh bentrokan ketika demonstrasi serta pembunuhan Affan Kurniawan, tetapi juga diakselerasi oleh kampanye disinformasi yang seolah muncul secara organik terutama di media sosial setelahnya. Di tengah simpati dan kemarahan publik yang meluas, terdapat konten-konten tertentu yang menggeser narasi menjadi penjarahan dan penyerangan sebagai respons atas kekerasan aparat dan negara yang brutal.
459. KPF memverifikasi sejumlah konten media sosial di sejumlah kanal WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram yang mengarahkan narasi penjarahan sebagai balasan warga atas pembunuhan Affan Kurniawan, di antaranya:
- a. **Penjarahan sebagai ‘balasan’** terhadap negara yang membunuh rakyatnya.³⁶²
 - b. **Penjarahan sebagai ‘perampasan’** aset kekayaan yang ‘dikangangi’ oleh oligarki.³⁶³
 - c. **Penjarahan sebagai ‘konsekuensi logis’** ketika negara penuh korupsi dan tidak berpihak pada rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup.
460. Tanpa mengesampingkan peran pembunuhan Affan Kurniawan dalam membakar kemarahan publik, perlu ditelusuri adanya akun-akun anonim di berbagai kanal yang secara serentak menjejali ruang digital dengan pesan-pesan kekerasan yang tidak organik.
461. KPF menegaskan bahwa kemarahan publik akibat pembunuhan Affan Kurniawan merupakan ekspresi sosial yang dapat dipahami secara sosiologis. Namun, kemarahan tersebut tidak secara otomatis bermuara pada tindakan penjarahan. Fakta menunjukkan adanya proses diskursif yang aktif membingkai penjarahan sebagai tindakan yang sah, wajar, dan bahkan bermoral—karakterisasi menjadi ciri utama kampanye disinformasi.
462. Pola yang berulang dalam sejumlah lokasi penjarahan menunjukkan urutan yang relatif konsisten dan mengindikasikan bahwa disinformasi tidak sekadar mengikuti peristiwa, tetapi berperan aktif membentuk ekspektasi dan justifikasi atas tindakan kekerasan yang terjadi:
- a. Beredarnya ajakan atau pembenaran penjarahan di media sosial dan grup percakapan.
 - b. Terjadinya penjarahan di lokasi tertentu.
 - c. Beredarnya video penjarahan dengan narasi ‘aksi rakyat’ dalam waktu cepat.
463. Sebaliknya, penelusuran terhadap kanal komunikasi dan pernyataan publik aktivis, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil yang kemudian dijadikan tersangka menunjukkan kecenderungan yang berlawanan. Tidak ditemukan konten yang menyerukan penjarahan, pembakaran, atau penyerangan terhadap warga sipil. Beberapa di antaranya justru menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga, sehingga menegaskan bahwa menyamakan aktivis dengan provokator penjarahan tidak didasari oleh fakta yang memadai.
464. Tidak adanya penyelidikan terhadap akun-akun anonim yang secara terbuka mengampanyekan dan membenarkan penjarahan berbanding terbalik dengan kecepatan aparat dalam menarget aktivis pro-demokrasi, memperlihatkan pola penegakan hukum yang selektif. Pola ini memperkuat dugaan bahwa fokus aparat bukan pada pencegahan kekerasan atau perlindungan warga, melainkan pada pengendalian narasi politik setelah kerusuhan.
465. Pembunuhan Affan Kurniawan, seorang sopir ojek online (ojol) berusia 17 tahun, karena dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di area Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada malam hari 28 Agustus 2025 menjadi titik balik krusial yang mempercepat terjadinya eskalasi kekerasan dalam peristiwa demonstrasi Agustus 2025.
466. Sebelum Affan dibunuh, pola aksi hingga titik tersebut memperlihatkan tidak adanya pola kekerasan yang mengarah pada aparat di lapangan, melainkan sebagai konsekuensi dari tindakan aparat yang membubarkan massa secara represif. Setelah 28 Agustus 2025, kemarahan warga semakin memuncak dan membuat aksi kekerasan lebih mudah terjadi.

³⁶² TikTok @ipnu64, <https://www.tiktok.com/@ipnu64/video/7544355519889149189>, 30 Agustus 2025.

³⁶³ Republik Merdeka, <https://rmol.id/nusantara/read/2025/08/31/678254/massa-jarah-rumah-eko-patrio-ini-namanya-perampasan-aset>, 31 Agustus 2025.

467. Video pembunuhan Affan, yang beredar luas dengan cepat di berbagai kanal media sosial, menjadi simbol dari kekerasan negara terhadap rakyat yang semakin beringas, terlebih setelah diketahui bahwa Affan ketika itu bukan sedang berdemonstrasi, melainkan bekerja mengantar makanan yang dipesan melalui aplikasi daring ke seorang pelanggan. Gerak lambat kepolisian dalam menyampaikan keterangan ke publik juga menciptakan ruang vakum yang kemudian diisi oleh asumsi dan narasi polisi sengaja melindas demonstran.
468. Pembunuhan Affan juga krusial karena membuat massa aksi merasa adanya legitimasi moral untuk melawan aparat yang dinilai telah bersalah mengakibatkan kematian Affan. Sejumlah demonstran yang diwawancarai KPF secara gamblang menyebut kematian Affan sebagai pemantik partisipasi mereka dalam demonstrasi.
469. Pembunuhan Affan juga berdampak terhadap tuntutan yang diusung oleh massa aksi. Jika aksi pada 27–28 Agustus 2025 fokus pada tuntutan seperti pembubaran DPR, pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR, dan pengesahan RUU Perampasan Aset, tuntutan setelah titik ini bergeser menjadi desakan untuk mereformasi kepolisian, diawali oleh tuntutan mengadili pelaku yang bersalah menyebabkan kematian Affan secara akuntabel dan terbuka.
470. Secara umum, pembunuhan Affan menjadi titik ekstrem yang mengubah lanskap psikologis, sosial, dan keamanan massa aksi, sehingga eskalasi tidak dapat dihindari.

IX.C. Penyerangan dan penjarahan yang sistematis dan terukur

471. Berbeda dengan dinamika demonstrasi yang awalnya cenderung sporadis dan berpusat di area Gedung DPR, aksi pada 28–31 Agustus 2025 setelah kematian Affan menunjukkan perubahan pola menjadi lebih sistematis dan terukur, sebagaimana terlihat dari beberapa penyerangan dan penjarahan yang terkoordinasi dalam hal mobilisasi massa, pemilihan sasaran, dan waktu.
472. KPF menilai penyerangan dan penjarahan yang terjadi tidak menunjukkan pola yang acak, melainkan terfokus pada sejumlah tokoh dan lokasi yang sangat spesifik dengan jadwal tertentu mengikuti urutan sebagai berikut:
- a. Sekitar pukul 17.00, Sabtu, 30 Agustus 2025: rumah anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara.³⁶⁴
 - b. Sekitar pukul 21.00, Sabtu, 30 Agustus 2025: rumah anggota DPR Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan.³⁶⁵
 - c. Sekitar pukul 22.00, Sabtu, 30 Agustus 2025: rumah anggota DPR Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur.³⁶⁶
 - d. Sekitar pukul 01.00, Minggu, 31 Agustus 2025: rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bintaro, Tangerang Selatan.³⁶⁷
 - e. Sekitar pukul 05.00, Minggu, 31 Agustus 2025: rumah anggota DPR Fraksi NasDem Nafa Urbach di Bintaro, Tangerang Selatan.³⁶⁸
473. Respons polisi terhadap penjarahan pun menunjukkan pola yang berbeda dengan tindakannya melakukan kriminalisasi dan perburuan para aktivis. Polisi mencoba menciptakan bangunan kasus bahwa aksi demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan terjadi karena provokasi akun-akun media sosial gerakan masyarakat sipil kemudian menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam demonstrasi maupun pelaku provokasi. Sedangkan dalam

³⁶⁴ Jambi Link, <https://jambilink.id/post/5388/kronologi-rumah-ahmad-sahroni-dijarah-massa>, 30 Agustus 2025.

³⁶⁵ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/detik-detik-ketika-rumah-eko-patrio-dijarah-massa-2064938>, 31 Agustus 2025.

³⁶⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/rumah-uya-kuya-dijarah-massa-harta-benda-hingga-kucing-peliharaan-diangkut-2064954>, 31 Agustus 2025.

³⁶⁷ Tempo, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-rumah-menteri-keuangan-sri-mulyani-dijarah-massa-2064981>, 31 Agustus 2025.

³⁶⁸ Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/rumah-nafa-urbach-dijarah-massa-barang-barang-berharga-digondol-25IFXLxObeg>, 31 Agustus 2025.

- merespons penjarahan, polisi hingga laporan ini selesai ditulis, hanya menangkap orang-orang yang mengambil barang di rumah-rumah para pejabat. Padahal, fakta awal sudah cukup kuat untuk membantu aparat kepolisian melakukan penelusuran aktor intelektual.
474. KPF menekankan bahwa eskalasi kekerasan setelah pembunuhan Affan Kurniawan tidak dapat dibaca sebagai pembenaran atas tindakan penjarahan dan penyerangan, melainkan sebagai penjelasan terhadap adanya perubahan drastis dinamika massa. Fakta ini penting untuk membedakan antara analisis sebab-akibat dengan legitimasi normatif terhadap kekerasan.
 475. Selain itu, KPF juga menemukan adanya mobilisasi massa ke rumah milik Ketua dan Wakil Ketua DPR, Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad. Akan tetapi, penjarahan tidak terjadi ditengarai karena langkah pengamanan yang lebih gesit daripada lokasi lainnya.
 476. Pola yang berurutan dan sistematis mengindikasikan adanya mobilisasi massa yang sengaja diarahkan untuk melakukan penjarahan. Terlebih, terdapat indikasi kuat bahwa aksi penjarahan dipimpin oleh kelompok yang dimobilisasi secara khusus dari luar lingkungan lokasi penjarahan. Dalam keterangan media serta wawancara KPF dengan salah satu pelaku penjarahan menemukan:
 - a. Adanya instruksi untuk melakukan penjarahan di empat rumah pejabat, dengan rumah Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai sasaran akhir.
 - b. Massa yang dimobilisasi sudah sering mendapat permintaan bertindak sebagai massa aksi bayaran di Jakarta dan Bandung.
 - c. Bayaran bagi massa yang mendapat ‘pesanan’ untuk turut berdemonstrasi datang dari seseorang dengan nama Mama Resal yang menjelaskan bahwa dirinya hanya perantara bagi ‘pimpinan’ yang masih belum jelas identitasnya.
 - d. Adanya instruksi menyiapkan hingga 160 bom molotov untuk digunakan dalam eskalasi kekerasan aksi demonstrasi.
 477. Pola ini menunjukkan bahwa aksi penjarahan yang berlangsung pada 30–31 Agustus 2025 kemungkinan besar memiliki rantai komando operasional, yang hingga kini belum ditelusuri lebih dalam oleh kepolisian sama sekali.
 478. Kegagalan negara dalam merespons pembunuhan Affan Kurniawan tidak hanya terletak pada peristiwa itu sendiri, tetapi juga pada absennya langkah cepat, transparan, dan akuntabel setelah kejadian. Tidak adanya konferensi pers yang komprehensif, status hukum pelaku yang tidak jelas di hari-hari awal, serta minimnya empati institusional memperdalam krisis kepercayaan publik dan memperkuat persepsi impunitas aparat.
 479. KPF menemukan indikasi bahwa sebagian penyerangan terhadap pos kepolisian dan fasilitas publik tidak dilakukan oleh massa spontan yang berada di sekitar lokasi, melainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang diduga dimobilisasi dari luar wilayah sasaran.
 480. Pola kehadiran massa ini berbeda dari massa demonstran sebelumnya, baik dari segi waktu kemunculan, cara bergerak, maupun sasaran yang dituju, sehingga mengindikasikan adanya peran kelompok dengan tujuan spesifik di luar dinamika demonstrasi awal.
 481. Secara kumulatif, ada indikasi bahwa aksi penjarahan dan penyerangan pada 28–31 Agustus 2025 telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan temuan berikut:
 - a. Beredarnya konten di media sosial TikTok jauh sebelum terjadinya penjarahan yang secara eksplisit menarasikan kemungkinan terulangnya peristiwa kerusuhan dan penjarahan seperti tragedi 1998. Konten-konten ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga membangun ekspektasi dan imajinasi kolektif kekacauan yang ‘akan’ terjadi.
 - b. Dokumentasi audio-visual pada aksi 25 Agustus 2025 memperlihatkan adanya peringatan dari warga, termasuk seorang perempuan paruh baya (belum diidentifikasi) yang memperingatkan demonstran mengenai potensi terjadinya kerusuhan dan penjarahan. Peringatan ini menunjukkan bahwa wacana mengenai eskalasi kekerasan telah beredar di ruang publik bahkan sebelum pembunuhan Affan Kurniawan.
 - c. Transkrip percakapan dalam grup WhatsApp NIKA menunjukkan sebagian anggota sempat menyebut dan mengusulkan penyerangan terhadap kediaman sejumlah figur

publik, antara lain Ahmad Sahroni dan Uya Kuya. Namun, hal ini tidak disepakati oleh anggota grup .

- d. Beredarnya daftar sasaran penjarahan yang memuat nama-nama tertentu, termasuk Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad. Daftar ini beredar di ruang digital dan percakapan tertutup, sehingga memperkuat dugaan bahwa sasaran tidak dipilih secara acak, melainkan sangat spesifik dan terbatas.
 - e. Di sejumlah lokasi penjarahan, ditemukan adanya aba-aba, isyarat, dan tanda-tanda tertentu yang berfungsi memandu pergerakan pelaku di lapangan. Pola ini menunjukkan adanya tingkat koordinasi minimal, meskipun tidak ditemukan bukti adanya satu komando terpusat yang mengendalikan seluruh rangkaian aksi.
482. Dalam konteks ini, pembunuhan Affan Kurniawan tidak hanya menjadi pemicu emosional, tetapi juga membuka ruang bagi aktor-aktor tertentu untuk memanfaatkan kemarahan publik melalui narasi, mobilisasi, dan tindakan kekerasan yang semakin terarah. Fakta-fakta ini menjadi penting untuk membaca pola penyerangan dan penjarahan pada 29–31 Agustus 2025, yang menunjukkan karakter berbeda dibandingkan bentrokan sebelumnya.

IX.D. Satu koin, tiga sisi: Massa organik, bayaran, dan ojol

483. Dalam upaya memahami eskalasi kekerasan pada 28–31 Agustus 2025, KPF menelaah dugaan keterlibatan kolektif NIKA dalam penyerangan terhadap kantor kepolisian, fasilitas publik, dan kediaman sejumlah pejabat negara.
484. Fakta menunjukkan bahwa narasi mengenai kemungkinan terjadinya kerusuhan dan penjarahan telah beredar sejak 25 Agustus 2025. Hal ini terekam dalam liputan media nasional, termasuk Kompas TV, yang mendokumentasikan peringatan warga kepada demonstran mengenai potensi kerusuhan lanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wacana eskalasi kekerasan telah beredar luas di ruang publik sebelum rangkaian penyerangan dan penjarahan benar-benar terjadi.
485. Penelusuran terhadap transkrip percakapan grup WhatsApp NIKA serta analisis BAP dan forensik digital menemukan adanya ujaran-ujaran bernada ekstrem dari sejumlah individu. Pada 26 Agustus 2025, misalnya, seorang anggota grup bernama Fata Muhibuddin mengusulkan agar demonstran membakar rumah Ahmad Sahroni. Pada 24 Agustus 2025, akun bernama Segogaring mengusulkan Uya Kuya sebagai target serangan massa. KPF menegaskan pentingnya membedakan antara percakapan tertutup di grup WhatsApp dengan tindakan faktual di lapangan. Ujaran-ujaran tersebut, meskipun patut ditelusuri secara hukum terhadap individu yang bersangkutan, tidak dapat diperlakukan sebagai bukti adanya perencanaan kolektif atau komando operasional oleh anggota NIKA. Anggota grup lain tidak merespons ajakan ini.
486. Hingga laporan ini disusun, tidak ditemukan bukti yang memadai bahwa anggota kolektif NIKA mengorganisir atau bahkan terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan penjarahan rumah penyelenggara negara. Anggota kolektif tidak ditemukan berada di lokasi kejadian, mengendalikan massa, mengatur pendanaan dan logistik, maupun memberi aba-aba yang dapat mengaitkan kolektif NIKA dengan rangkaian penyerangan tersebut.
487. Fakta-fakta menunjukkan keberadaan diskursus kekerasan di ruang percakapan digital tidak berkorelasi sebab-akibat dengan eskalasi kekerasan.
488. Menggunakan percakapan grup WhatsApp sebagai dasar untuk menisbahkan tanggung jawab kolektif atas penyerangan dan penjarahan malah mengaburkan perbedaan mendasar antara ekspresi verbal, kemarahan simbolis, dan kejahatan faktual yang terjadi di lapangan.
489. KPF menilai kegagalan aparat penegak hukum untuk menelusuri secara menyeluruh aktor-aktor yang secara nyata terlibat dalam penyerangan dan penjarahan, sembari memusatkan perhatian pada aktivis pro-demokrasi, menguatkan indikasi penyederhanaan narasi dan pengalihan tanggung jawab eskalasi kekerasan.

490. Temuan KPF menunjukkan bahwa eskalasi pembakaran, penyerangan, dan penjarahan pada periode 28–31 Agustus 2025 melibatkan kelompok massa umum dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari warga organik yang terdorong kemarahan sesaat hingga kelompok dengan pola gerak yang lebih terorganisir dan terukur.
491. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan tidak dapat dipahami sebagai satu pola tunggal, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan motif, kapasitas, dan tingkat perencanaan yang beragam.
492. Dalam kasus penyerangan dan pembakaran Polsek Jatinegara di Jakarta Timur, kepolisian menetapkan 14 tersangka dari total 17 terduga pelaku, di mana empat di antaranya masih berusia anak.³⁶⁹ Fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan kepolisian dan pemberitaan media menunjukkan adanya peran spesifik masing-masing pelaku, termasuk pembuatan bom molotov, rekaman provokatif dengan seruan untuk membakar polsek dan polisi pembunuh serta peran logistik untuk membantu pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian.
493. Pola ini menunjukkan bahwa penyerangan Polsek Jatinegara tidak hanya terjadi secara spontan, melainkan ada unsur perencanaan taktis di lapangan. Hingga laporan ini disusun, tidak ada penjelasan yang transparan dari kepolisian mengenai apa dan bagaimana pola provokasi, mobilisasi, dan pendanaan dalam kasus ini ditelusuri lebih lanjut untuk mengidentifikasi keterhubungan dengan peristiwa di lokasi lain.³⁷⁰
494. Dalam kasus pembakaran Halte Bus TransJakarta dan penyerangan fasilitas kepolisian, KPF menemukan bahwa para pelaku memiliki pola operasional yang relatif seragam. Mereka datang dalam rombongan kecil menggunakan sepeda motor, membawa perlengkapan seperti bensin, botol untuk molotov, dan tangga, serta bergerak cepat sebelum membubarkan diri.³⁷¹
495. Sebagian dari 34 pelaku yang ditangkap kepolisian terkait pembakaran fasilitas publik diketahui merupakan pengangguran, buruh harian lepas, dan anggota karang taruna di wilayah Mampang, Jakarta Selatan.³⁷² Fakta ini menunjukkan bahwa aksi pembakaran halte tidak dilakukan secara spontan oleh massa demonstran di lokasi, melainkan oleh kelompok khusus dengan tujuan terbatas dalam waktu singkat.
496. Massa yang menjarah rumah anggota DPR Ahmad Sahroni (NasDem) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 30 Agustus 2025 menunjukkan karakteristik massa yang brutal dan terorganisir dengan karakteristik:
1. Massa berjumlah ratusan orang dan datang ke lokasi mengendarai sepeda motor.
 2. Aksi dipicu oleh pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut tuntutan demonstran tolol.
 3. Massa melempari batu, merusak bangunan, dan merobohkan pagar rumah.
 4. Massa masuk ke dalam rumah dan menjarah berbagai barang berharga, termasuk mobil listrik, televisi, koper, dan sejumlah benda koleksi mahal.
 5. Penjarahan berlangsung selama lebih dari empat jam dan meninggalkan bangunan rumah dalam keadaan rusak parah.
 6. Laporan saksi lapangan mengindikasikan bahwa sebagian besar massa yang terlibat penjarahan bukan warga asli sekitar lingkungan rumah Ahmad Sahroni.
497. Pola yang serupa, bahkan lebih terstruktur, ditemukan dalam penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan Bintaro pada 31 Agustus 2025. Aksi ini ditandai dengan penggunaan petasan sebagai aba-aba masuk, keberadaan *drone* yang memantau area, serta kehadiran dua truk besar yang diduga digunakan untuk mengangkut barang hasil jarahan. Kesaksian warga sekitar mengonfirmasi bahwa mayoritas pelaku bukan warga lokal, melainkan datang dari wilayah Pamulang, Tangerang, dan Depok. Fakta ini menunjukkan

³⁶⁹ YouTube @officialokezune, <https://www.youtube.com/watch?v=V8GhODf05dQ>, 5 September 2025.

³⁷⁰ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8102229/peran-4-pelaku-penyerangan-polsek-jatinegara-provokator-lempar-molotov>, 8 September 2025.

³⁷¹ Disway, <https://disway.id/read/896196/4-pemuda-ditangkap-usai-bakar-halte-transjakarta-di-mampang-diduga-bawa-bom-molotov>, 5 September 2025.

³⁷² YouTube @trijayafm, <https://www.youtube.com/shorts/ROXtNPmFDqo>, 30 Agustus 2025.

adanya perencanaan logistik yang tidak lazim dalam aksi massa spontan, sekaligus memperlihatkan kegagalan aparat dalam mencegah atau merespons secara cepat meskipun skala aksi berlangsung berjam-jam.

498. Massa yang menjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bintaro, Tangerang Selatan, pada 31 Agustus 2025 menunjukkan karakteristik serupa:
- Aksi diduga kuat sudah direncanakan, ditandai dengan penggunaan petasan sebagai isyarat masuk, adanya aktivitas *drone* di sekitar lokasi, dan dua truk besar yang diparkir di depan rumah untuk mengangkut barang jarahan.
 - Saksi lapangan menyatakan bahwa mayoritas penjarah bukan warga sekitar, melainkan diduga berasal dari berbagai wilayah lain (Pamulang, Tangerang, dan Depok).
 - Beberapa penjarah mengenakan jaket merah dan helm hitam dan dilaporkan membawa senjata tajam.
 - Penjarah menarget lukisan, televisi, dan sejumlah barang mewah lainnya. Keterangan Sri Mulyani Indrawati menggambarkan penjarah seperti sedang 'berpesta' saat beraksi.
 - Massa berjumlah ratusan dan datang pada dini hari, ketika keamanan kompleks perumahan tidak optimal dan akibatnya kewalahan mencegah terjadinya penjarahan.
 - Hingga laporan ini ditulis, kepolisian telah menangkap 11 orang sebagai tersangka.
499. Berbeda dengan dua penjarahan tersebut, penjarahan rumah anggota DPR Surya Utama alias Uya Kuya (PAN) di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 30 Agustus 2025 menunjukkan karakter yang lebih oportunistis dan lokal sebagai berikut:
- Motif utama para pelaku adalah murni untuk menguasai harta benda di lokasi kejadian dan mencari keuntungan pribadi.
 - Penjarahan terjadi secara spontan karena tidak adanya pengamanan di lokasi.
 - Massa mengobrak-abrik isi rumah dan menjarah berbagai barang berharga, termasuk sofa, pecah belah, dan kurang lebih 20 ekor kucing ras peliharaan.
 - Meskipun terjadi secara spontan, polisi mendalami kemungkinan adanya provokator yang memanfaatkan momentum melalui media sosial.
 - Dari 15 tersangka yang ditetapkan kepolisian, terdapat satu pelaku berusia anak dan mayoritasnya merupakan warga setempat.
500. Sementara itu, massa yang menjarah rumah anggota DPR Eko Patrio alias Eko Hendro Purnomo (PAN) di Kuningan, Jakarta Selatan, pada 30 Agustus 2025 memperlihatkan kombinasi antara provokasi emosional dan mobilisasi berlapis:
- Sama seperti penjarahan rumah Sri Mulyani Indrawati, massa yang menjarah rumah Eko Patrio mayoritas tidak dikenali sebagai warga sekitar.
 - Massa datang dalam tiga gelombang berbeda secara bergantian sejak Sabtu malam (pukul 20.00 dan 23.00 WIB) hingga Minggu dini hari (02.30 WIB).
 - Aksi dipicu amarah setelah beredarnya rekaman Eko Patrio berjoget saat sidang DPR yang dinilai tidak berempati terhadap penderitaan rakyat.
 - Ratusan massa berhasil menerobos masuk ke dalam rumah meskipun dijaga oleh petugas keamanan kompleks yang kewalahan tanpa bantuan memadai dari kepolisian.
 - Massa tidak hanya melakukan penjarahan barang berharga, tetapi juga merusak bagian dalam rumah dan mencoret dinding dengan kata-kata cacian.
501. Secara keseluruhan, KPF mencatat adanya beberapa kesamaan lintas peristiwa, yakni massa yang berjumlah besar, bertujuan spesifik untuk melakukan penjarahan, dan tidak ada pengamanan memadai dari pihak kepolisian untuk mencegah eskalasi penjarahan.
502. Namun, fakta-fakta yang tersedia tidak mendukung kesimpulan bahwa seluruh aksi tersebut dikendalikan oleh satu aktor atau jaringan komando tunggal. Sebaliknya, yang tampak adalah tumpang tindih antara kemarahan publik yang nyata, penjarahan oportunistis, dan aksi terorganisir skala kecil yang memanfaatkan kekacauan.
503. KPF mencatat bahwa aparat kepolisian telah menetapkan dan memproses hukum sejumlah pelaku penjarahan di berbagai lokasi yang menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan menghasilkan sejumlah tersangka sebagai berikut:

- a. Penjarahan rumah Ahmad Sahroni: 12 tersangka
 - b. Penjarahan rumah Eko Patrio alias Eko Hendro Purnomo: 7 tersangka
 - c. Penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya: 11 tersangka
 - d. Penjarahan rumah Sri Mulyani Indrawati: 14 tersangka
 - e. Upaya penjarahan rumah Nafa Urbach: 8 tersangka
504. Akan tetapi, penanganan hukum berhenti pada pelaku lapangan dan belum menyentuh secara memadai aspek-aspek kunci lain, di antaranya keterkaitan antara berbagai kelompok pelaku, pola mobilisasi, kemungkinan adanya alur pendanaan, serta kemungkinan pembiaran, keterlambatan, atau kelalaian aparat kepolisian dalam mencegah dan merespons penjarahan yang berlangsung selama berjam-jam dan diberitakan luas.
505. KPF menggarisbawahi upaya kepolisian yang terbilang minim dalam mengungkap aktor dan struktur lebih besar di balik aksi-aksi destruktif tersebut. Terdapat pembebanan tidak proporsional dalam fokus penegakan hukum yang menarget aktivis pro-demokrasi dan demonstran, meskipun temuan fakta menunjukkan tidak ada keterkaitan antara aksi demonstrasi dengan penjarahan dan pembakaran yang terjadi.
506. Oleh sebab itu, KPF menilai aparat kepolisian cenderung memiliki bias konfirmasi dengan menetapkan satu narasi tertentu yang telah lebih dulu dibentuk (*pre-determined conclusion*), yaitu bahwa penyerangan dan penjarahan terjadi karena provokasi aktivis pro-demokrasi, bukan sebagai konsekuensi pengelolaan keamanan dan deeskalasi kekerasan yang gagal.
507. Massa sopir ojol mulai terlibat secara signifikan dalam rangkaian demonstrasi setelah terjadinya pembunuhan Affan Kurniawan akibat dilindas oleh kendaraan taktis Brimob Polri pada 28 Agustus 2025 malam. Keterlibatan massa sopir ojol didorong solidaritas sejawat dan kemarahan kolektif terhadap kekerasan aparat yang brutal, tidak proporsional, dan berakhir dengan kematian Affan Kurniawan.
508. Berdasarkan temuan fakta dan dokumentasi lapangan, aksi kurang lebih seribu sopir ojol bersifat terfokus dan simbolis, diawali oleh iringan proses pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan. Dalam berbagai keterangan media, massa sopir ojol menuntut pengusutan tuntas pelaku, penarikan Brimob dari pengamanan demonstrasi, dan reformasi kepolisian.
509. Eskalasi terjadi ketika sebagian massa sopir ojol mendatangi dan menyerang Markas Brimob Kwitang pada malam 28 Agustus 2025, yang kemudian menjalar ke beberapa kantor kepolisian lainnya. Pola pergerakan massa ojol ini menunjukkan karakteristik berbeda dengan massa pelajar, mahasiswa, maupun umum yang cenderung terfokus di simbol institusi negara yang dianggap langsung bertanggung jawab.
510. KPF tidak menemukan bukti adanya keterlibatan massa ojol dalam penjarahan dan pembakaran fasilitas publik. Sebaliknya, analisis BAP dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa massa ojol bergerak dalam formasi longgar, tanpa struktur komando formal, dan dipicu oleh kemarahan akibat pembunuhan Affan Kurniawan.
511. KPF menilai bahwa eskalasi kekerasan yang melibatkan massa sopir ojol juga tidak dapat dilepaskan dari kegagalan aparat kepolisian dalam memberikan penjelasan yang cepat, transparan, dan akuntabel terkait pembunuhan Affan Kurniawan.
512. Kekosongan informasi resmi pada waktu kritis setelah kejadian menciptakan ruang hampa bagi asumsi dan mobilisasi spontan yang disulut amarah kolektif tanpa adanya indikasi provokasi. Fakta ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa dinamika kekerasan pada rangkaian demonstrasi Agustus 2025 bersifat majemuk, reaktif, dan tidak dapat dibebankan pada satu aktor tunggal, terlebih aktivis yang kemudian dijadikan target kriminalisasi.

IX.E. Malapetaka seharga 13 nyawa

513. Eskalasi demonstrasi dan kerusuhan menimbulkan banyak korban yang mengalami kerugian material akibat penjarahan dan pembakaran serta kekerasan fisik akibat bentrokan antara massa dan aparat kepolisian.

514. Aksi penjarahan menyasar rumah sejumlah tokoh publik dan penyelenggara negara, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta sejumlah anggota DPR: Ahmad Sahroni (NasDem), Eko Patrio alias Eko Hendro Purnomo (PAN), Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), dan Nafa Urbach (NasDem). Penentuan sasaran yang terbatas dan tidak acak ini menunjukkan bahwa penjarahan tidak berlangsung sebagai luapan spontan semata, melainkan diarahkan pada figur-figur tertentu yang sebelumnya menjadi objek kemarahan publik dalam narasi media sosial, termasuk melalui sejumlah kampanye disinformasi.
515. Beberapa tokoh publik yang menjadi sasaran potensial berhasil terhindar dari penjarahan. Ketua DPR Puan Maharani (PDI-P) dilaporkan mendapat pengamanan dari unsur organisasi kepemudaan Banteng Muda Indonesia, sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengamankan diri sebelum massa mencapai kediamannya. Fakta ini semakin menguatkan bahwa penjarahan menyasar figur tertentu dan sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengamanan masing-masing lokasi.
516. Selain korban penjarahan, korban kekerasan fisik juga jatuh dalam bentrokan antara massa dan aparat kepolisian, khususnya di sekitar Mako Brimob Kwitang. Sejumlah demonstran dan warga mengalami luka-luka akibat kekerasan aparat dan benturan langsung antara massa aksi. KPF juga mencatat bahwa jumlah korban luka meningkat signifikan pada 30 Agustus 2025, bertepatan dengan terbakarnya Gedung ACC di seberang Mako Brimob Kwitang di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Eskalasi memuncak akibat bentrokan terbuka, pembakaran fasilitas, dan kekerasan aparat yang berlebihan.
517. Secara keseluruhan, korban dalam eskalasi demonstrasi menunjukkan bahwa kekerasan tidak terdistribusi secara acak, melainkan mengikuti garis konflik antara massa yang terfragmentasi, aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan berlebihan, dan kegagalan negara dalam menangani eskalasi secara tepat, cepat, transparan, dan akuntabel.
518. Pada awal September 2025, KontraS mengambil langkah cepat dengan melakukan penelusuran lapangan. Hasilnya, didapati adanya sejumlah demonstran yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya setelah demonstrasi.³⁷³ KontraS menegaskan adanya indikasi praktik penghilangan orang secara paksa, ditandai dengan terputusnya komunikasi korban, kesaksian penangkapan oleh aparat tanpa prosedur hukum yang jelas, serta ketiadaan informasi resmi. Lebih dari dua bulan setelah demonstrasi, dua demonstran masih dinyatakan hilang: M. Farhan Hamid dan Reno Syahputradewo, yang terakhir diketahui berada di sekitar Mako Brimob Kwitang pada saat aksi demonstrasi.³⁷⁴
519. Pada awal November 2025, kepolisian mengonfirmasi penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus di Gedung ACC Kwitang yang terbakar ketika kerusuhan di sekitar Mako Brimob Kwitang.³⁷⁵ Keterangan resmi kepolisian berdasarkan hasil identifikasi forensik mengonfirmasi bahwa dua kerangka tersebut adalah dua demonstran yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh KontraS dan belum ditemukan oleh kepolisian setelah gelombang demonstrasi Agustus 2025.³⁷⁶
520. Hingga laporan ini disusun, KPF mencatat bahwa belum ada penjelasan yang utuh dan transparan mengenai penemuan dua kerangka demonstran tersebut di Gedung ACC Kwitang serta kondisi penyebab kematian.

³⁷³ KontraS, <https://kontras.org/media/siaranpers/surat-desakan-terbuka-pencarian-dua-orang-hilang-dan-penegakan-ham-atas-temuan-praktik-penghilangan-orang-secara-paksa-dalam-aksi-demonstrasi-25-31-agustus-2025>, 29 September 2025.

³⁷⁴ KontraS, <https://kontras.org/media/siaranpers/surat-desakan-terbuka-pencarian-dua-orang-hilang-dan-penegakan-ham-atas-temuan-praktik-penghilangan-orang-secara-paksa-dalam-aksi-demonstrasi-25-31-agustus-2025>, 29 September 2025.

³⁷⁵ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8200074/fakta-fakta-kerangka-di-gedung-kwitang-teridentifikasi-2-orang-yang-hilang>, 8 November 2025.

³⁷⁶ Detik, <https://news.detik.com/berita/d-8140032/kontras-minta-pencarian-2-orang-hilang-usai-demo-terus-dilakukan>, 1 Oktober 2025.

521. KPF menggarisbawahi perlunya ada penelusuran terhadap kelalaian, pembiaran, dan kegagalan prosedur pengamanan dan evakuasi oleh aparat negara sebelum, saat, dan setelah kekerasan terjadi sebagai bagian dari penanganan demonstrasi. Tidak adanya kejelasan ini memperkuat urgensi penyelidikan independen yang menyeluruh, mengingat peristiwa tersebut terjadi dalam radius konflik yang berada di bawah penguasaan aparat keamanan ketika demonstrasi berlangsung.
522. Penemuan ini menegaskan bahwa eskalasi kekerasan demonstrasi Agustus 2025 turut menambah daftar panjang korban warga sipil yang kehilangan nyawa karena menyampaikan pendapatnya di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga berpotensi memperpanjang luka keadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap negara.

IX.F. Ketiadaan penegak hukum

523. Pada saat terjadinya penjarahan dan pembakaran di berbagai lokasi, aparat kepolisian telah lalai dan tidak hadir secara langsung di lokasi-lokasi penjarahan. Fakta lapangan menunjukkan tidak terdapat upaya pencegahan, pengamanan awal, maupun intervensi cepat di lokasi-lokasi penjarahan. Aparat kepolisian baru melakukan tindakan setelah peristiwa penjarahan selesai, melalui proses penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku dalam beberapa hari kemudian.
524. Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan ketiadaan aparat di lokasi penjarahan. Salah satunya adalah karakter aksi penjarahan yang dinilai bersifat sporadis dan sulit dideteksi sebelumnya. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa para pelaku bergerak cepat, berpencar, dan bercampur dengan kelompok massa lainnya, sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan pengamanan preventif di setiap lokasi secara bersamaan.
525. Pada saat yang sama, aparat kepolisian memusatkan pengerahan personel dalam jumlah besar untuk mengamankan demonstrasi yang berlangsung serentak di berbagai wilayah, khususnya Gedung DPR dan Mako Brimob Kwitang.
526. KPF mencatat bahwa modus operandi para pelaku penjarahan menunjukkan pola yang relatif terkoordinasi, meskipun tidak selalu berasal dari inti massa demonstrasi. Para pelaku memanfaatkan kekacauan setelah bentrokan dan lemahnya kontrol keamanan untuk melakukan aksi kriminal di berbagai lokasi hampir secara bersamaan.
527. Akan tetapi, kegagalan pengamanan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kapasitas intelijen dan sistem peringatan dini kepolisian, mengingat sejumlah sasaran penjarahan telah beredar sebelumnya, bahkan di media sosial, secara luas.
528. Kepolisian juga mengemukakan ketidakhadiran pemilik rumah di lokasi penjarahan serta keterbatasan sumber daya serta tekanan psikologis dalam menghadapi situasi keamanan nasional yang memburuk sebagai alasan tidak adanya pengamanan. KPF menilai bahwa alasan ini tidak dapat diterima akal sehat dan tidak menghapus tanggung jawab kepolisian melindungi warga dan mencegah terjadinya kejahatan secara meluas, terutama ketika eskalasi kekerasan telah berlangsung selama beberapa hari berturut-turut.
529. KPF mengkhawatirkan telah terjadi pembiaran oleh aparat kepolisian sehingga terjadi kegagalan mencegah eskalasi kekerasan yang meluas.
530. Setelah penjarahan terjadi, aparat kepolisian mampu bertindak cepat dengan menangkap sedikitnya 52 orang tersangka yang terlibat dalam penjarahan dan pembakaran. Hal ini mengindikasikan pendekatan penindakan yang represif dan tidak memperhitungkan eskalasi kekerasan. Ketimpangan ini semakin nyata ketika aparat penegak hukum secara simultan memfokuskan perhatian pada pemidanaan aktivis pro-demokrasi dan demonstran, tanpa transparansi dan kesungguhan dalam menelusuri keterlibatan berbagai kelompok lain, alur pendanaan, serta tindakan disiplin terhadap aparat yang bersalah dan lalai.
531. KPF menilai kegagalan pengamanan pada rangkaian demonstrasi Agustus 2025 bukan semata akibat keterbatasan teknis atau situasi yang genting. Akan tetapi, hal ini

mencerminkan kinerja dan akuntabilitas kepolisian yang lemah dalam memitigasi risiko dan melakukan deeskalasi kekerasan.

IX.G. Hukum acara yang seremonial

532. KPF menemukan bukti yang memadai terkait penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aktivis, pelajar, dan peserta demonstrasi Agustus 2025. Penangkapan terjadi pada beberapa fase: sebelum demonstrasi, saat demonstrasi, segera setelah demonstrasi, dan jauh setelah demonstrasi berakhir.
533. Investigasi menemukan ada bukti yang cukup yang mengarah pada indikasi yang kuat dan kesimpulan mengenai adanya tindakan brutalitas kepolisian yang sistematis.
534. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, pembubaran massa pada 25 Agustus dilakukan karena “aksi sudah tidak kondusif” dan “banyak pelajar, anak-anak” di dalam massa.
535. Analisis atas bukti-bukti di lapangan menemukan dugaan adanya pelanggaran prosedur dan hukum di antaranya:
1. **Kewajiban menunjukkan identitas aparat penegak hukum.** Berdasarkan UU Polri, anggota kepolisian wajib menunjukkan identitas dan tanda pengenal saat menjalankan tugas, terutama dalam penangkapan. Polisi berpakaian preman yang melakukan penangkapan tanpa identitas yang jelas melanggar mekanisme administrasi resmi ini.
 2. **Mengaburkan garis pertanggungjawaban.** Ketidakjelasan identitas aparat mengaburkan garis pertanggungjawaban hukum. Hal ini menyulitkan identifikasi jika terjadi pelanggaran atau penggunaan kekerasan berlebihan, dan berpotensi membuat tindakan mereka menjadi perbuatan pidana karena tidak jelas statusnya sebagai penegak hukum yang mewakili negara pada saat itu.
 3. **Penggunaan kekerasan yang berlebihan.** Peraturan internal kepolisian, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8/2009, melarang penggunaan kekerasan, kecuali jika mutlak diperlukan untuk mencegah kejahatan atau melakukan penangkapan sesuai prosedur dan proporsional. Tindakan pemukulan atau kekerasan lainnya sebagai upaya represif dilarang. Instruksi Internal: Beberapa laporan mengindikasikan adanya instruksi internal di berbagai Polda yang melarang polisi menggunakan pakaian preman saat pengamanan unjuk rasa untuk menghindari insiden.
536. KPF menilai reformasi Polri adalah agenda yang genting. Perlu ada evaluasi standar penanganan demonstrasi terkait penahanan, kapan dan bagaimana demonstran boleh ditahan? Apa dasar hukumnya? Bagaimana petugas harus bertindak sesuai prinsip kekerasan minimal? Sertu kebutuhan pelatihan ulang untuk pengendalian massa (*crowd control*), deeskalasi, dan pemenuhan HAM dalam pengamanan unjuk rasa.
537. Temuan KPF menunjukkan penangkapan dilakukan secara masif tanpa dasar individualisasi kesalahan. Banyak pelajar dan peserta aksi ditangkap bukan karena tertangkap tangan atau terbukti melakukan tindak pidana, melainkan semata-mata karena berada di sekitar lokasi demonstrasi, mengenakan atribut tertentu, atau berdasarkan asumsi aparat bahwa yang bersangkutan ‘berpotensi’ mengganggu keamanan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip legalitas dan praduga tak bersalah dalam hukum pidana.
538. KPF juga mencatat tingginya jumlah anak, termasuk pelajar, yang ditangkap dan ditahan. Dalam banyak kasus, penangkapan terhadap pelajar dilakukan tanpa pemberitahuan kepada orang tua atau wali, pendampingan penasihat hukum, dan langkah-langkah perlindungan anak sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
539. KPF juga menemukan banyak pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan dan penahanan, antara lain tidak adanya surat penangkapan, tidak dijelaskannya alasan hukum penangkapan kepada yang bersangkutan, serta pemindahan para tahanan ke lokasi-lokasi yang sulit diakses keluarga dan pendamping hukum. Sejumlah saksi juga melaporkan bahwa

penangkapan dilakukan oleh aparat berpakaian preman tanpa identitas yang jelas, sehingga memperburuk situasi ketakutan dan ketidakpastian hukum yang menciptakan perasaan diteror oleh aparat negara.

540. Meskipun kepolisian menyatakan bahwa seluruh penangkapan dilakukan secara sah sebagai bagian dari upaya pemulihan ketertiban, KPF menilai pola, skala, dan konteks penangkapan telah melampaui kebutuhan proporsional penegakan hukum. Penangkapan massal yang tidak jelas individualisasi kesalahannya justru memperlihatkan pendekatan represif yang berpotensi digunakan untuk menimbulkan efek ketakutan (*chilling effect*) dan pencegah (*deterrence*) terhadap partisipasi warga negara dalam penyampaian pendapat di muka umum.
541. KPF menyimpulkan bahwa praktik penangkapan selama demonstrasi Agustus 2025 tidak dapat sepenuhnya dibenarkan sebagai tindakan penegakan hukum yang sah, karena mengandung unsur kesewenang-wenangan yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip praduga tak bersalah dalam negara hukum.
542. KPF menemukan adanya pola penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan tidak akuntabel oleh aparat kepolisian selama rangkaian demonstrasi Agustus 2025. Salah satu ciri paling menonjol dari pola ini adalah keterlibatan aparat kepolisian yang tidak mengenakan seragam resmi (berpakaian sipil atau preman) dalam tindakan penangkapan, pengejaran, dan pengendalian terhadap demonstran menggunakan kekerasan.
543. Berdasarkan verifikasi dokumentasi video, foto, dan keterangan saksi, KPF mencatat bahwa aparat tidak berseragam secara aktif kerap menyusup ke dalam barisan massa demonstran. Beberapa di antaranya melakukan penangkapan tanpa menunjukkan identitas kepolisian dan melakukan berbagai kekerasan seperti pemukulan, cekikan, dan penyeretan terhadap demonstran, termasuk pelajar dan warga yang tidak terlibat bentrokan sekalipun. Praktik-praktik ini juga terjadi di luar area aksi, seperti di gang permukiman, warung makan, halte, dan titik-titik evakuasi massa.
544. Pola ini memperlihatkan praktik penegakan hukum yang mengaburkan batas antara tindakan pengamanan dan represif. Aparat tidak berseragam beroperasi tanpa penanda identitas yang jelas, sehingga menyulitkan korban dan publik untuk mengidentifikasi pelaku, meminta pertanggungjawaban, dan mengakses mekanisme pengaduan hukum yang efektif.
545. KPF mendapatkan kesaksian dan dokumentasi yang mengindikasikan aparat tidak berseragam melakukan provokasi serta pengejaran massa aksi hingga ke arah permukiman padat serta mengintimidasi dan bahkan memukuli individu yang bukan bagian massa aksi, sehingga menciptakan kepanikan yang berujung eskalasi kekerasan.
546. Meskipun pihak kepolisian membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa aparat tidak berseragam hanya bertugas menangkap provokator, hingga laporan ini disusun tidak ada laporan akuntabilitas yang transparan dan dapat diverifikasi mengenai mekanisme penugasan, identitas, serta garis komando aparat-aparat tidak berseragam tersebut.
547. Oleh sebab itu, KPF menilai bahwa keberadaan aparat tidak berseragam berkontribusi signifikan terhadap eskalasi kekerasan serta berbagai tindakan represif terhadap massa aksi. Dengan kata lain, tindakan aparat yang tidak akuntabel adalah penyebab utama terciptanya rasa teror, ketakutan, dan ketidakpastian hukum di tengah-tengah warga sipil (bukan hanya massa aksi).
548. Selain pola kekerasan, KPF menemukan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur pengamanan unjuk rasa dan prinsip-prinsip hukum acara pidana dalam tindakan aparat kepolisian selama demonstrasi Agustus 2025.
 1. **Penggunaan aparat tidak berseragam dalam penindakan paksa.** Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang mensyaratkan kejelasan identitas petugas negara. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian wajib menunjukkan identitasnya dalam menjalankan tugas, kecuali dalam keadaan sangat terbatas yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks demonstrasi

Agustus 2025, tidak ada kondisi darurat yang dapat membenarkan penggunaan luas aparat tidak berseragam dan tanpa kejelasan identitas dalam berbagai penangkapan.

2. **Pelanggaran prosedur hukum acara pidana.** Banyak penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan surat perintah, kejelasan alasan penangkapan, pemberitahuan kepada keluarga, dan pendampingan penasihat hukum. Temuan fakta juga menunjukkan bahwa pelajar, yang tergolong anak, tidak luput dari berbagai pelanggaran prosedur yang keseluruhannya bertentangan dengan KUHAP, UU Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip HAM universal yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
 3. **Penggunaan kekerasan berlebihan.** Tindakan seperti pemukulan, tendangan, penggunaan gas air mata secara masif dan tidak terukur, serta pengejaran hingga ke ruang-ruang sipil menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keperluan (*necessity*) dan kesesuaian (*proportionality*) dalam penggunaan kekuatan paksa. Fakta bahwa sebagian besar kekerasan dialami demonstran pada fase penangkapan dan bukan saat bentrokan terbuka memperkuat indikasi penggunaan kekerasan sebagai alat penghukuman (*punitive force*), bukan semata-mata untuk mengendalikan situasi.
549. KPF menilai bahwa tindakan aparat kepolisian dalam demonstrasi Agustus 2025 tidak hanya melampaui kewenangan yang sah, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam penerapan standar pengamanan aksi dan perlindungan hak asasi manusia. Pola ini memperkuat dugaan bahwa kekerasan digunakan secara sistematis untuk memukul dan mengintimidasi peserta demonstrasi, bukan untuk menjamin keamanan publik secara proporsional dan akuntabel.

X. Operasi dalam Operasi

X.A. Keterlibatan militer dalam pengamanan sipil

550. KPF menemukan bukti memadai mengenai kehadiran personel TNI di area Mako Brimob Kwitang selama rangkaian demonstrasi dan eskalasi kerusuhan pada 28–30 Agustus 2025. Kehadiran tersebut berlangsung secara terbuka, tidak disamarkan, dan dapat disaksikan secara langsung oleh demonstran, warga sekitar, serta media massa.
551. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kehadiran personel TNI di Mako Brimob Kwitang tidak terbatas pada fungsi pengamanan pasif. Dokumentasi visual, liputan media massa, serta kesaksian demonstran mengonfirmasi interaksi aktif antara personel TNI dan massa aksi.
552. Salah satu peristiwa yang paling menonjol adalah pembagian uang tunai dan air minum oleh personel TNI kepada sejumlah demonstran di depan Mako Brimob Kwitang pada 29 Agustus 2025 siang. Peristiwa ini terekam dalam pemberitaan media nasional serta beredar luas di media sosial, termasuk unggahan warganet yang menyebutkan bahwa massa aksi “berebut uang yang dibagikan TNI di depan Mako Brimob Kwitang.”³⁷⁷
553. Hingga laporan ini disusun, tidak ada klarifikasi resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa informasi mengenai pembagian uang oleh personel TNI. Dalam ‘Laporan Isu Hoaks’ yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, isu pembagian uang oleh TNI di Mako Brimob Kwitang tidak dibantah dan dilabeli hoaks. Hal ini memperkuat temuan pembagian uang dan air minum oleh personel TNI pada demonstran.
554. Fakta ini penting untuk dibaca dalam konteks eskalasi konflik di Mako Brimob Kwitang, karena menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas dan batas peran TNI dalam situasi penanganan unjuk rasa sipil, relasi antara institusi keamanan negara, serta implikasinya terhadap netralitas dan akuntabilitas penggunaan kekuatan negara.
555. KPF menempatkan fakta ini sebagai salah satu hal mendasar bagi analisis lanjutan mengenai dugaan keterlibatan, pembiaran, maupun potensi komplikasi rantai komando antara institusi keamanan selama peristiwa Agustus 2025.
556. Dugaan keterlibatan anggota BAIS dan TNI dalam dinamika Agustus 2025 mencuat setelah beredarnya sejumlah rekaman video yang memperlihatkan individu dengan kartu tanda pengenal Badan Intelijen Strategis (BAIS) berada di lokasi bentrokan.
557. Dalam salah satu video ini terlihat personel BAIS diamankan oleh aparat Brimob. Kepolisian pun mengonfirmasi bahwa personel BAIS berada di lokasi dan sempat diamankan oleh Brimob. Kepolisian tidak memberikan keterangan resmi mengenai dasar hukum, konteks operasional, maupun kronologi penangkapan anggota BAIS tersebut. Satu-satunya penjelasan yang beredar luas di publik adalah narasi “kesalahpahaman” antara aparat, tanpa disertai penjelasan terbuka lebih lanjut mengapa personel BAIS berada di tengah arena bentrokan sipil yang sedang ditangani oleh Polri.
558. KPF mencatat keberadaan personel BAIS di sejumlah titik bentrokan bukanlah isu tunggal atau kebetulan belaka. Sejumlah saksi lapangan, dokumentasi visual, serta rekaman media menunjukkan kehadiran personel yang diidentifikasi sebagai aparat BAIS dan TNI sebelum dan selama eskalasi bentrokan. TNI pun tidak membantah hal ini dan hanya menawarkan penjelasan normatif bahwa mereka “membantu deteksi dini dan mencegah.”
559. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menyatakan bahwa informasi penangkapan anggota BAIS berinisial Mayor SS oleh Brimob adalah hoaks, dan menyatakan bahwa SS berada di sekitar kawasan Slipi-Petamburan pada 28 Agustus 2025 bukan sebagai provokator atau penggerak massa. TNI juga membantah adanya personel yang ditahan oleh Polri.

³⁷⁷ Tribun News, <https://bekasi.tribunnews.com/news/54729/massa-demonstran-berebut-air-minum-dan-uang-yang-dibagikan-anggota-TNI-di-depan-mako-brimob-kwitang>, 29 Agustus 2025.

560. Penjelasan serupa diberikan dalam kasus Pratu Handika Novaldo yang sempat dikabarkan telah diamankan Brimob Polda Sumsel di Palembang saat kerusuhan di DPRD Sumsel. Setelah diklarifikasi, TNI menyatakan bahwa yang bersangkutan berada di lokasi semata-mata untuk keperluan pribadi, yakni mencari makan dan mengisi bahan bakar kendaraan.
561. Pada 3 September 2025, Kapuspen TNI menegaskan bahwa kehadiran personelnya di lapangan merupakan bentuk bantuan bagi Polri atas permintaan resmi, dengan tujuan menjaga keamanan bersama dan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas Polri. TNI menyatakan seluruh personel bekerja sesuai aturan dan akan ditarik kembali ke kesatuan masing-masing setelah situasi dinyatakan kondusif, sesuai desakan masyarakat.³⁷⁸
562. KPF menilai bahwa penjelasan normatif tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar yang muncul dari temuan fakta di lapangan. Kehadiran personel BAIS dan TNI di tengah eskalasi demonstrasi yang sedang ditangani Polri menimbulkan persoalan serius terkait batas kewenangan, rantai komando, dan akuntabilitas operasional, terutama ketika kehadiran tersebut tidak dikomunikasikan secara transparan kepada publik.
563. KPF tidak menemukan adanya mekanisme pengawasan independen atau laporan terbuka mengenai ruang lingkup tugas, instruksi operasional, serta evaluasi terkait keterlibatan BAIS dan TNI. Hal ini membuka ruang spekulasi sekaligus memperlemah kepercayaan terhadap institusi negara, khususnya di tengah upaya kriminalisasi terhadap aktivis pro-demokrasi sebagai 'provokator' yang mengabaikan keterlibatan aktor-aktor negara.
564. KPF menilai bahwa kehadiran BAIS dan TNI, sekalipun dalam kapasitas deteksi dini dan mencegah eskalasi kekerasan, perlu ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas sipil yang jelas. Jika tidak, tidak salah jika muncul persepsi adanya upaya mengaburkan kompleksitas peran aparat negara dalam eskalasi kekerasan serta melanggengkan pola penegakan hukum yang tidak proporsional dalam membebankan pertanggungjawaban pidana.
565. Secara normatif, kehadiran TNI dalam situasi keamanan dalam negeri dapat dibenarkan dengan syarat yang ketat sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam fungsi membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memungkinkan TNI dikerahkan atas permintaan otoritas sipil dalam kondisi tertentu.
566. KPF menemukan adanya persoalan serius pada aspek prosedural dan transparansi terkait mobilisasi personel TNI di sejumlah titik strategis demonstrasi, termasuk area Mako Brimob Kwitang. Hingga laporan ini disusun, tidak ada dokumen atau pernyataan resmi yang secara jelas mendudukkan kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa otoritas sipil yang meminta kehadiran personel TNI dalam penanganan demonstrasi.
567. Ketidakjelasan ini krusial karena keberadaan TNI di ruang sipil menimbulkan ambiguitas komando dan pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks penanganan demonstrasi, publik (termasuk peserta aksi dan warga sekitar) tidak dapat membedakan secara jelas peran, kewenangan, dan batas tindakan antara aparat Polri dan personel TNI di lapangan.
568. Hingga saat ini, belum ada peraturan turunan komprehensif yang mengatur mekanisme permintaan bantuan, batasan tugas, rantai komando, penggunaan kekuatan, serta akuntabilitas TNI dalam operasi bantuan pada Polri. Kekosongan regulasi ini membuka ruang interpretasi yang longgar dan berpotensi disalahgunakan dalam situasi krisis keamanan.
569. Oleh sebab itu, kehadiran anggota BAIS dan TNI di lokasi bentrokan dan kerusuhan menambah lapisan persoalan hukum dan etika. KPF menilai bahwa tidak adanya penjelasan resmi yang transparan mengenai ruang lingkup tugas, otoritas, dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas intelijen di tengah aksi sipil telah mengaburkan prinsip supremasi sipil dan penegakan hukum yang adil (*due process of law*).
570. KPF menegaskan bahwa kehadiran anggota BAIS dan personel TNI bukan sekadar persoalan justifikasi secara hukum, melainkan kekosongan regulasi yang spesifik, akuntabel, dan dapat

³⁷⁸ Tribun News, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/09/03/mabes-tni-buka-suara-soal-178-tuntutan-rakyat-prajurit-kembali-ke-barak-hingga-proyek-sipil>, 3 September 2025.

diawasi publik. Dalam konteks demonstrasi Agustus 2025, hal ini berkontribusi pada meningkatnya kecurigaan publik, melemahnya kepercayaan terhadap negara, serta kaburnya tanggung jawab atas eskalasi kekerasan yang terjadi.

571. Temuan fakta menunjukkan bahwa personel TNI hadir di sejumlah lokasi penjarahan, termasuk di sekitar rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di mana keterangan saksi mengkonfirmasi hanya terdapat satu personel TNI yang berjaga (*relief force*). Pengerahan personel TNI dalam jumlah besar baru dilakukan setelah penjarahan selesai.
572. Pola kehadiran personel TNI di titik eskalasi kekerasan dapat dibagi kepada dua fase: kehadiran awal dalam jumlah minimal dan kehadiran setelah kejadian dalam jumlah besar.
573. KPF menilai faktor-faktor teknis, prosedural, dan keterbatasan kewenangan masih lebih masuk akal berdasarkan temuan-temuan fakta untuk menjelaskan pola kehadiran personel TNI di titik-titik eskalasi kekerasan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya indikasi pembiaran. Hal ini terutama menimbang keterangan TNI yang menyampaikan kehadiran personel TNI bertujuan melakukan deteksi dini dan pencegahan, namun pada praktiknya hanya mengintervensi setelah penjarahan terjadi.
574. Temuan-temuan operasional di lapangan menimbulkan kecurigaan di sejumlah pihak tentang adanya ‘komando’ agar personel TNI membiarkan sejumlah titik menjadi sasaran kelompok penjarah. Hal ini didasari oleh analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rantai komando dan kewenangan diskresi penindakan hukum di lapangan, yaitu:
 1. **Kepatuhan terhadap prosedur konstitusional terkait pengerahan TNI untuk membantu kepolisian.** Fakta menunjukkan permintaan bantuan resmi dari kepolisian belum diterbitkan hingga 30 Agustus 2025 sore hari, yang kemudian diikuti pengerahan personel TNI dalam jumlah signifikan pada 31 Agustus 2025 dan setelahnya. Personel TNI tidak memiliki kewenangan penuh sebagai penegak hukum utama dalam situasi sipil tanpa adanya status darurat militer. Oleh sebab itu, penindakan terhadap pelaku penjarahan secara normatif berada di bawah komando kepolisian.
 2. **Keterbatasan jumlah personel menunjukkan tidak adanya pengerahan pasukan secara sistematis dan masif di titik penjarahan sebelum dan saat kejadian.** Fokus utama pengerahan aparat keamanan ketika itu terkonsentrasi pada titik-titik utama demonstrasi, seperti Gedung DPR dan objek vital nasional lainnya. Personel TNI yang ada di lokasi penjarahan diduga merupakan aparat yang kebetulan berada di lokasi atau pengawal pribadi dalam jumlah terbatas dan tanpa kesiapan taktis menghadapi ratusan massa penjarah.
 3. **Pencegahan eskalasi kekerasan lanjutan.** Dengan personel minim, tindakan represif langsung terhadap massa dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan eskalasi konflik yang lebih luas dan bahkan korban jiwa. TNI mengambil pendekatan yang cenderung bersifat persuasif atau sebatas pemantauan situasi sambil menunggu kejelasan perintah dan dukungan tambahan. Beberapa rekaman video memperlihatkan personel TNI meminta massa untuk membubarkan diri setelah penjarahan alih-alih melakukan intervensi fisik langsung.
575. Secara keseluruhan, ketidakhadiran banyak personel TNI disebabkan oleh ketiadaan perintah pengerahan dari otoritas yang berwenang (Polri/Panglima TNI), keterbatasan personel di lokasi, dan kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku di Indonesia terkait perbantuan militer dalam menangani ketertiban sipil.
576. KPF menilai kehadiran personel TNI di lokasi penjarahan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketiadaan perintah pengerahan resmi pada fase awal, keterbatasan jumlah personel yang tersedia di lokasi, serta kehati-hatian mengikuti kerangka hukum perbantuan militer dalam penanganan ketertiban sipil. Akan tetapi, fakta-fakta ini tidak menutup ruang evaluasi kritis terhadap efektivitas perbantuan TNI dalam mencegah terjadinya penjarahan dan eskalasi kekerasan pada masa darurat sipil.

X.B. Garis komando yang abu-abu

577. Berdasarkan analisis atas fakta dan bukti yang dihimpun, KPF memastikan kehadiran personel BAIS dan TNI selama rangkaian demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan Agustus 2025 adalah fakta yang tidak terbantahkan dan didukung oleh dokumentasi visual, kesaksian lapangan, serta pernyataan resmi TNI sendiri terkait OMSP. Analisis terhadap pola kehadiran dan tindakan personel militer di lapangan menunjukkan adanya indikasi keterlibatan dalam batas dan level tertentu (*complicity*):
1. **Indikasi penghasutan (*instigating*)** personel BAIS dan TNI yang “menyemangati” massa demonstrasi dan kemudian berujung pada terjadinya penyerangan dan bentrokan. Temuan ini didukung saksi lapangan dan rekaman visual yang memperlihatkan interaksi langsung antara personel berseragam dan massa pada fase awal eskalasi. Namun demikian, bukti-bukti tersebut masih memerlukan pendalaman pro justitia untuk memastikan niat (*mens rea*), konteks penugasan, dan rantai komando yang relevan.
 2. **Indikasi perbantuan dan fasilitasi (*aiding and abetting*)** bahwa komando militer memiliki pengetahuan awal (intelijen) potensi ancaman nyata dan segera (*imminent threat*) terhadap keamanan publik, termasuk risiko penyerangan, pembakaran fasilitas umum, serta penjarahan rumah politisi. KPF menilai telah personel BAIS dan TNI lalai dan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan (*necessary measures*) untuk mencegah eskalasi kekerasan. Pendalaman pro justitia diperlukan untuk memastikan apakah hal ini bersifat disengaja (*by intent*) atau konsekuensi adanya hambatan rantai komando.
 3. **Indikasi pembiaran dan persetujuan diam-diam (*tacit approval*)** atas terjadinya penyerangan, pembakaran, dan penjarahan, yang tercermin dari ketidakhadiran personel TNI di lokasi rawan eskalasi kekerasan meskipun ada permintaan bantuan.
 4. **Indikasi putusnya pertanggungjawaban komando (*command responsibility*)**, seusia analisis bahwa Panglima TNI dan Pangdam Jaya memiliki komando efektif atas pengerahan pasukan dan pelaksanaan OMSP di sejumlah lokasi strategis, termasuk Polda Metro Jaya, Mako Brimob Kwitang, dan sejumlah rumah penyelenggara negara serta anggota DPR. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban komando berlaku terhadap seluruh kehadiran, tindakan, dan kelalaian personel TNI yang bertugas, sepanjang dapat dibuktikan adanya pengetahuan atau seharusnya mengetahui sehingga gagal mengambil tindakan terukur.
578. KPF belum menemukan bukti memadai untuk menyimpulkan adanya keterlibatan TNI secara lembaga dalam bentuk operasi atau pemberian perintah ilegal (*unlawful orders*) yang sengaja menciptakan kerusuhan, penjarahan, atau kekacauan keamanan. Meskipun terdapat informasi mengenai individu-individu berlatar belakang militer yang diduga terlibat dalam pengerahan massa, tidak ada bukti kuat, langsung, dan tak terbantahkan yang menunjukkan kausalitas antara keterlibatan TNI di level institusi dan personel.

X.C. Rekonstruksi lepasnya komando aksi dari massa organik

579. Penelaahan menyeluruh terhadap rangkaian fakta terkait penggunaan simbol Jolly Roger, pola eskalasi aksi, dinamika disinformasi, serta kehadiran aktor keamanan negara di berbagai titik eskalasi kerusuhan menunjukkan indikasi adanya operasi penunggang aksi yang berlangsung secara sistematis, bertahap, dan terkoordinasi dengan tujuan tertentu.
580. KPF tidak menyimpulkan adanya satu aktor tunggal yang secara definitif merancang dan mengendalikan seluruh rangkaian peristiwa. Namun, terdapat pola eskalasi, narasi digital, kemunculan aparat keamanan, serta pengarahannya sasaran kekerasan yang menguatkan dugaan bahwa demonstrasi dan kemarahan publik yang awalnya organik telah ditunggangi secara sistematis oleh aktor-aktor dengan kapasitas operasional dan intelijen tertentu.
581. Dalam kerangka analitis tersebut, KPF melakukan rekonstruksi dugaan tahapan operasi terkait penggunaan atribut Jolly Roger.

- 1. Simbolisasi dan cipta kondisi awal.** Fakta menunjukkan bahwa pengibaran bendera Jolly Roger mulai muncul secara masif sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2025, bertepatan dengan peluncuran logo resmi peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di ruang digital, muncul respons warganet yang membandingkan dan memarodikan simbol negara dengan simbol perlawanan Jolly Roger. Di lapangan, simbol ini pertama kali tampak diangkut oleh sopir-sopir truk logistik dan angkutan barang. Sebagian dari aksi ini bersifat organik sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah (khususnya terkait Zero ODOL dan biaya logistik), namun sebagian lainnya menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya spontan, ditandai oleh visualisasi yang seragam, waktu kemunculan yang berdekatan, dan amplifikasi cepat di media sosial. Pemilihan truk sebagai medium simbolis dinilai strategis karena merepresentasikan 'wong cilik' dan kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan ekonomi, sehingga efektif membangun legitimasi emosional di publik. Temuan fakta menunjukkan kolektif NIKA memulai mengorkestrasi pengibaran bendera Jolly Roger di awal Agustus sebagai perlawanan simbolis rakyat dengan harapan mendapatkan respons dari elite dan penguasa. Ketika pesan simbolis semakin kuat dan akhirnya mendapat respons dari sejumlah elite, mereka menargetkan tanggal 17 Agustus sebagai momen untuk meluncurkan aksi demonstrasi. Target mereka meleset dan ketika wacana demo 25 Agustus muncul dan semakin besar, mereka memutuskan untuk ikut serta meramaikan dan menunggangi aksi.
- 2. Perluasan penggunaan simbol Jolly Roger One Piece dan pembajakan kendali gerakan.** Penambahan jumlah anggota kolektif Nakama ke ruang pergerakan mahasiswa dan kelompok sipil membuka kemungkinan terjadinya pembajakan kendali gerakan. Temuan Fakta menunjukkan beberapa figur dominan mulai mengendalikan arah aksi menjadi lebih serius dengan tuntutan-tuntutan politis. Temuan KPF menunjukkan adanya individu-individu yang berperan sebagai penghubung lintas komunitas digital, mengarahkan narasi, mendorong eskalasi tuntutan, serta mengoordinasikan penyebaran konten seruan aksi. Dalam konteks ini, aktivis dan kolektif mahasiswa yang sebelumnya memiliki agenda advokasi kebijakan mulai berada dalam posisi rentan untuk ditunggangi, diprovokasi dan dikambinghitamkan, terutama ketika narasi "Bubarkan DPR" menjadi dominan dan masuk ke dalam siaran pers dan materi aksi. Temuan Fakta menunjukkan adanya penyusupan unsur intelijen dalam gerakan yang disadari oleh anggota kolektif namun mereka biarkan. Fakta juga menunjukkan beberapa anggota utama mengalami serangan doxing dan teror yang tercatat dilakukan oleh seseorang yang menyamar sebagai petugas kepolisian bernama Brigadir Dede dan Brigadir Dewa. Investigasi menemukan bahwa petugas polisi bernama brigadir Dede adalah nama sebenarnya seorang aparat kepolisian di Dumai yang dibajak dan digunakan namanya untuk tujuan *doxing* dan teror tanpa sepengetahuan dirinya. Pelaku dan identitas sesungguhnya dari kedua brigadir tersebut belum terungkap meskipun ada sejumlah bukti petunjuk kuat mengarah pada salah satu anggota grup yang sangat dominan. KPF tidak menemukan bukti kuat adanya komunikasi langsung antara pihak institusi negara dengan kolektif sipil yang tergabung dalam jaringan NIKA, KPR Depok, dan Nakama. Akan tetapi, investigasi menemukan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan kuat pengendali kolektif NIKA memiliki akses yang besar terhadap dokumen kepolisian, berupa BAP dan Rekaman CCTV penangkapan sejumlah anggota kolektif.
- 3. Kampanye disinformasi dan pembingkai fakta memanipulasi emosi publik.** Upaya masif mengangkat wacana kenaikan hak keuangan anggota DPR yang dijahit dengan video-video joget pejabat serta narasi menakut-nakuti terulangnya tragedi 1998 disebarluaskan di TikTok, WhatsApp, dan YouTube tanpa asal-usul dan sumber yang jelas. Disinformasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai akselerator kemarahan publik guna menciptakan kondisi psikologis yang siap meledak.

4. **Eskalasi kekerasan dan produksi martir melalui pola pengondisian yang konsisten dengan skenario bentrokan.** Temuan fakta menunjukkan adanya dorongan dan provokasi dari beberapa figur kolektif yang dominan untuk konfrontasi langsung dengan aparat di sejumlah titik demonstrasi, baik melalui provokasi verbal dan manuver massa maupun reaksi terhadap kekerasan aparat kepolisian. Pembunuhan Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 menjadi titik balik ekstrem yang mengubah kondisi psikologis demonstran seraya menciptakan legitimasi moral baru bagi eskalasi kekerasan yang segera dieksploitasi baik di berbagai sudut ruang digital maupun di lapangan dan memperluas sebaran aksi dan kemarahan publik terhadap institusi kepolisian dengan beragam bentuk ekspresinya.
5. **Kerusuhan dan penjarahan yang diakselerasi oleh pembunuhan Affan Kurniawan dan hilangnya kendali gerakan awal.** Fakta-fakta mengindikasikan bahwa penjarahan tidak bersifat acak, melainkan menyasar figur-figur yang sejak awal menjadi objek kemarahan publik. Narasi penjarahan sebagai “perampasan aset rakyat” menyebar secara serentak di media sosial, mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk melegitimasi eskalasi kekerasan. Dalam tahap ini, kendali atas aksi dan agenda gerakan Jolly Roger sudah dapat dikatakan telah diambil alih oleh aktor dominan lainnya (pasukan pembakar dan penjarah serta aktor di belakangnya) dan hilang sepenuhnya dari yang disepakati dari koordinasi teknis lapangan dan perbincangan atau diskusi di grup percakapan NIKA dan Nakama. Investigasi menemukan beberapa anggota kolektif yang ditangkap adalah juga merupakan anggota yang cukup dominan dalam percakapan grup WhatsApp NIKA, KPR Depok, dan jejaring Nakama lainnya yang selama ini telah menjadi sasaran *doxing* dan teror bahkan dalam percakapan grup WA itu sendiri. Hal ini menunjukkan para aktivis anggota kolektif tersebut telah seolah-olah sejak dari awal telah diintai, diidentifikasi dan dijebak untuk ditangkap dan dikambinghitamkan.
6. **Narasi dalang untuk mengambinghitamkan dan mengkriminalisasi aktivis pro-demokrasi.** Segera setelah aksi demonstrasi mengalami deeskalasi, KPF menemukan pola aparat kepolisian untuk menciptakan narasi bahwa individu-individu yang mengalami penindakan paksa oleh kepolisian bukanlah aktor utama penjarahan dan pembakaran, namun ‘dalang’ dan ‘provokator’ berdasarkan ‘bukti-bukti’ yang mengarah pada kesimpulan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh aparat (*pre-determined conclusion*), sehingga malah mengaburkan jejak aktor sebenarnya.
7. **Penutupan jejak dan normalisasi kondisi setelah demonstrasi.** Ditandai oleh sejumlah tindakan menghapus jejak konten digital, mengalihkan narasi pemberitaan di media massa, serta pembatasan berita terkait isu-isu krusial seperti kekerasan aparat, kegagalan pencegahan dini eskalasi kekerasan, dan penyerangan terhadap jurnalis. Pola ini menyerupai praktik penutupan jejak yang lazim terjadi setelah operasi kekerasan berskala besar.

582. KPF tidak bermaksud menetapkan rekonstruksi tujuh tahap ini sebagai kesimpulan final yang definitif menjelaskan setiap tahapan demonstrasi dan eskalasi kekerasan yang terjadi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana pola-pola kejadian (akumulasi fakta, keserempakan peristiwa, kesamaan metode, dan konsistensi sasaran) semestinya menjadi dasar kuat untuk tidak melimpahkan tanggung jawab secara hukum kepada segelintir aktivis pro-demokrasi demi menutupi kegagalan aparat penegak hukum melakukan deteksi dini dan pencegahan eskalasi kekerasan yang memakan korban jiwa.

X.D. Paralel Agustus 2025 dan Malari

583. Demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 memiliki sejumlah kemiripan dengan Peristiwa Malari (15 Januari) 1974, khususnya dalam hal keterhubungan antara konflik elite, dinamika antara lembaga negara, dan pembentukan narasi ‘dalang’ yang berujung pada perburuan aktivis pro-demokrasi melalui serangkaian upaya kriminalisasi.

584. KPF menegaskan bahwa paralel ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca pola kekuasaan dan respons negara terhadap mobilisasi publik, bukan untuk menyederhanakan konteks historis keduanya dan menyebut adanya kesengajaan pengulangan yang diatur sedemikian rupa
585. **Pertama, terdapat kemiripan pada konteks elite yang bertikai di balik ledakan sosial.** Dalam peristiwa Malari, kerusuhan dan respons negara tidak bisa dilepaskan dari dinamika perebutan pengaruh di lingkaran kekuasaan Orde Baru, di mana rivalitas elite mempengaruhi cara negara membaca, mengelola, dan kemudian “menyimpulkan” dinamika aksi demonstrasi massa. Dalam demonstrasi Agustus 2025, demonstrasi dan kerusuhan juga berlangsung dalam lanskap ketegangan elite dan instabilitas institusional, sehingga penjelasan berbasis “ajakan aktivis” semata tidak memadai untuk memahami rangkaian peristiwa secara utuh.
586. **Kedua, pertikaian tersebut melibatkan lembaga negara dan mempengaruhi strategi penanganan aksi massa.** Dalam peristiwa Malari, pembacaan negara atas aksi mahasiswa dan kerusuhan diikuti oleh konsolidasi keamanan yang kuat, termasuk langkah-langkah yang berdampak pada ruang sipil dan kebebasan berekspresi. Dalam peristiwa Agustus 2025, terdapat ketegangan antar lembaga penegak hukum serta implikasinya terhadap cara negara merespons protes yang mencampuradukkan penegakan hukum, operasi keamanan, dan perebutan legitimasi lembaga.
587. **Ketiga, terdapat kemiripan pola kambing hitam aktivis pro-demokrasi untuk menutup kompleksitas aktor dan kepentingan yang ada di lapangan.** Dalam peristiwa Malari, narasi penyebab dan penanggung jawab kerusuhan mengerucut pada pembingkaiannya tertentu yang memudahkan negara melakukan penindakan, seraya mengabaikan dinamika struktural dan manuver elite. Dalam peristiwa Agustus 2025, aparat memusatkan penindakan pada aktivis pro-demokrasi, seraya menutup mata pada simpul produksi dan distribusi disinformasi serta jejaring pelaku kekerasan yang tidak ditelusuri secara imbang, sehingga menguatkan dugaan bahwa proses penegakan hukum bergerak mengikuti narasi yang “sudah terkendali,” bukan hasil penyelidikan yang objektif dan mengikuti fakta.

X.E. Analisis Operasi Siber yang Menebar Ketakutan

588. Selama rangkaian demonstrasi Agustus 2025, KPF menemukan indikasi kuat adanya penggunaan operasi siber oleh aparat kepolisian yang melampaui fungsi penegakan hukum dan berimplikasi serius terhadap pelanggaran hak digital warga negara. Operasi siber tersebut berlangsung paralel dengan penanganan keamanan di lapangan dan menargetkan demonstran, aktivis, jurnalis warga, serta organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan kritik terhadap negara.
589. KPF menelusuri ratusan pengaduan korban, pemantauan lembaga independen, serta verifikasi silang dengan temuan lapangan dan menemukan setidaknya 16 insiden pembocoran identitas pribadi (*doxing*), intimidasi di ranah digital, penyitaan perangkat tanpa dasar hukum jelas, ekstraksi data pribadi, pemblokiran akun media sosial, serta kriminalisasi ekspresi politik menggunakan UU ITE. Pola-pola ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sekadar dipantau, melainkan dijadikan medan operasi untuk menekan, membatasi, dan mengendalikan narasi publik.
590. Pemantauan independen oleh SAFEnet mencatat lonjakan pelanggaran hak digital yang signifikan pada triwulan III 2025 (Juli hingga September).³⁷⁹ Secara temporal dan substansial, lonjakan signifikan ini berkorelasi dengan terjadinya demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. SAFEnet mencatat sedikitnya 59 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital dengan 156 korban terlapor, serta 299 insiden keamanan digital yang 129 di antaranya berkaitan langsung dengan kritik terhadap pemerintah dan dukungan terhadap aksi

³⁷⁹ SAFEnet, <https://safenet.or.id/id/2025/10/polisi-siber-picu-lonjakan-pelanggaran-hak-digital-selama-triwulan-iii-2025>, 29 Oktober 2025.

demonstrasi. Bentuk pelanggaran yang diidentifikasi SAFEnet meliputi pembatasan akses dan fitur pada media sosial Instagram, TikTok, dan WhatsApp (*restrictions*), penangguhan dan penghapusan akun (*suspension*), serta dugaan pembatasan jaringan internet (*throttling*).

591. SAFEnet mencatat bahwa fitur TikTok Live dinonaktifkan pada periode tertentu ketika gelombang demonstrasi memuncak dengan alasan keamanan, yang secara efektif menghambat penyiaran langsung kondisi lapangan dan membatasi arus informasi publik.³⁸⁰
592. SAFEnet juga menemukan modus intimidasi digital baru berupa pengiriman pesan singkat dari nomor tak dikenal kepada aktivis maupun anggota keluarganya, disertai gambar manipulatif yang menampilkan wajah target seolah-olah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian. Praktik ini menunjukkan eskalasi intimidasi personal dan psikologis.
593. KPF menemukan bahwa operasi siber juga digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap aktivis dan demonstran yang ditangkap aparat kepolisian setelah aktivitas digital mereka dipantau dan ditafsirkan sebagai bentuk hasutan atau pelanggaran UU ITE.
594. Salah satu kriminalisasi yang terjadi pada fase awal demonstrasi Agustus 2025 adalah penangkapan aktivis mahasiswa Khariq Anhar di Bandara Soekarno-Hatta pada 28 Agustus 2025, tak lama setelah ia menyebarkan dukungan terhadap demonstrasi melalui akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat, yang ditafsirkan tanpa dasar hukum dan ahli terkait oleh kepolisian sebagai provokasi massa.
595. Dalam pernyataan sikap bersama, organisasi masyarakat sipil menyoroti setidaknya empat pembela HAM muda yang dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal UU ITE (Pasal 28 ayat (2), 28 ayat (3), 32, dan 35) serta Pasal 160 KUHP tentang hasutan. SAFEnet mencatat bahwa Pasal 28 UU ITE yang memiliki definisi luas dan rentan multitafsir menjadi pasal yang paling sering digunakan dalam konteks ini.³⁸¹
596. Aparat kepolisian menyatakan bahwa patroli siber dilakukan sebagai langkah pencegahan eskalasi kerusuhan. Namun, skala penindakan yang mencapai pemblokiran 592 akun media sosial dan penetapan 959 orang demonstran sebagai tersangka provokator demonstrasi menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas dan akuntabilitas penegakan hukum di ranah digital.³⁸²
597. Penggunaan operasi siber secara masif selama demonstrasi menimbulkan sejumlah implikasi jangka menengah dan panjang:
 1. **Terjadi erosi kebebasan berekspresi digital.** Kritik yang menasar kebijakan publik dan solidaritas terhadap aksi demonstrasi massa diperlakukan sebagai serangan personal dan dinarasikan sebagai ancaman keamanan secara gegabah.
 2. **Muncul efek ketakutan (*chilling effect*) yang meluas.** Banyak warga yang tidak ikut berdemonstrasi sekalipun merasa takut dan tidak dapat menyuarakan pendapat atau berorganisasi secara daring.
 3. **Delegitimasi gerakan sipil.** Operasi siber membingkai ekspresi politik lewat demonstrasi sebagai hasutan atau ancaman keamanan. Narasi bahwa demonstrasi identik dengan kekerasan diampifikasi oleh penindakan digital yang selektif terhadap warga dan aktivis yang kerap menyuarakan keadilan, sementara pelanggaran HAM oleh aparat negara di lapangan justru sulit dilaporkan akibat pembatasan akses internet serta ketidakjelasan rantai komando dan akuntabilitas.
 4. **Risiko pelanggaran HAM yang terstruktur dan sistematis.** Jika operasi siber menjadi bagian integral dari strategi pengamanan massa aksi secara berkelanjutan tanpa adanya standar dan pengawasan independen yang jelas, hal ini tak terelakkan.

³⁸⁰ SAFEnet, <https://safenet.or.id/2025/08/statement-on-digital-repression-during-the-august-2025-indonesian-protests>, 31 Agustus 2025.

³⁸¹ SAFEnet, <https://safenet.or.id/2025/09/international-civil-society-strongly-condemn-digital-crackdown-by-the-government-of-indonesia-and-big-tech/>, 10 September 2025.

³⁸² Asia-Pacific Solidarity Network, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-09-04/police-indonesia-claim-step-cyber-surveillance-ahead-of-week-long-protests.html>, 4 September 2025.

598. KPF menilai bahwa aparat kepolisian telah menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan operasi siber. Ombudsman dan Komnas HAM telah menyoroti minimnya transparansi dalam penangkapan dan penetapan status hukum para demonstran, baik di ranah fisik maupun digital.
599. Pada prinsipnya, operasi siber dibutuhkan untuk menangani berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di ruang digital seperti penipuan menggunakan sarana elektronik, perjudian daring, intimidasi dan perisakan di media sosial, serta pembocoran identitas dan data pribadi. Akan tetapi, pada rangkaian demonstrasi Agustus 2025, aparat kepolisian menggunakan wewenang operasi siber untuk memberangus hak-hak digital warga negara, bukan hanya demonstran, sehingga mengakibatkan terjadinya penyelewengan hukum sebagai alat pelindung hak warga negara menjadi alat penindasan.
600. Indikator penyelewengan tersebut meliputi skala pemblokiran akun yang tidak transparan, penggunaan pasal-pasal UU ITE yang represif dan multitafsir, penyitaan serta ekstraksi data perangkat tanpa pengawasan yudisial yang memadai, serta dugaan intimidasi terhadap perusahaan pengelola media sosial untuk membatasi akses dan narasi kritis terhadap kebijakan publik. Lebih jauh, operasi siber juga cenderung pilih-pilih (*cherry picking*) dan menysasar target spesifik yakni akun-akun aktivis dan masyarakat umum yang marah kepada kepolisian, sementara di saat yang bersamaan mengabaikan berbagai akun-akun yang memproduksi dan mereproduksi berbagai konten hoaks dan disinformasi perihal aksi demonstrasi, kerusuhan dan penjarahan.
601. KPF menilai bahwa penyelewengan hukum dalam operasi siber aparat kepolisian telah menjadi momok baru dalam penindasan hak kebebasan berekspresi warga negara yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan negara (*abuse of power*).
602. KPF merekomendasikan beberapa langkah korektif untuk membenahi dan memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam operasi siber oleh aparat kepolisian, di antaranya:
- Ombudsman dan Komnas HAM** perlu melakukan investigasi independen terhadap praktik operasi siber Polri, bukan hanya dalam konteks demonstrasi Agustus 2025 namun juga secara menyeluruh.
 - Polri dan Kementerian Komdigi** perlu mempublikasikan data pemblokiran akun, pembatasan akses, dan kriminalisasi digital secara transparan.
 - DPR** perlu meninjau ulang kembali dan mempertimbangkan amandemen atau bahkan pencabutan terhadap pasal-pasal UU ITE yang terbukti kerap disalahgunakan.
 - Kementerian Komdigi** perlu membangun sistem perlindungan yang ketat terhadap hak privasi dan keamanan data warga negara.
 - Penyelenggara sistem elektronik**, seperti perusahaan media sosial, perlu membangun ketahanan dan akuntabilitas dalam merespons permintaan aparat negara yang bertentangan dengan hak privasi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
 - Masyarakat sipil** perlu memperkuat daya lenting dan keamanan digital kolektif.
603. KPF menyimpulkan bahwa operasi siber selama demonstrasi Agustus 2025 telah menjadi arena baru bagi represi warga sipil. Tanpa pengawasan dan pembatasan yang jelas, praktik ini berpotensi menjadi preseden berbahaya yang melemahkan kebebasan sipil dan demokrasi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa teknologi keamanan tidak digunakan untuk membungkam kritik, melainkan melindungi hak dan keselamatan seluruh warga negara.

XI. Operasi Kambing Hitam

XI.A. Yang dikejar dan diabaikan

604. Indikasi adanya operasi pengambanghitaman terhadap aktivis pro-demokrasi dapat ditelusuri sejak sebelum eskalasi demonstrasi menjadi kerusuhan. Salah satu indikator awal yang signifikan adalah beredarnya informasi nomor telepon yang diduga sengaja disebarluaskan sebagai nomor telepon sejumlah aktivis HAM, yakni Haris Azhar (Pendiri Yayasan Lokataru), Muhammad Isnur (Direktur YLBHI), M. Said Iqbal (Presiden Partai Buruh), dan Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia). Penyebaran nomor telepon ini diduga dilakukan untuk menciptakan persepsi seolah para aktivis tersebut merupakan pengendali atau penggerak utama mobilisasi massa.
605. Tak lama berselang, sejumlah aktivis pro-demokrasi ditangkap atau dipanggil untuk diperiksa oleh aparat kepolisian, disertai bingkai naratif yang menggambarkan mereka sebagai ‘dalang’ kerusuhan dan penjarahan. Penangkapan tersebut dilakukan dengan kontrol salah satu divisi Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh penyidik berpangkat Kopol dan menysasar aktivis-aktivis yang dikonstruksikan oleh polisi memiliki keterkaitan atau komunikasi satu sama lain antara penggagas grup WhatsApp One Piece dan mereka yang aktif di dalamnya, Komite Politik SMI, dan Yayasan Lokataru. Penindakan ini berbanding terbalik dengan minimnya penyelidikan terhadap pihak-pihak yang secara faktual terlibat langsung dalam mobilisasi massa perusuh, pembakaran fasilitas publik, dan penjarahan.
606. Pola pengambanghitaman dalam konteks kerusuhan sosial bukanlah fenomena baru dalam sejarah penanganan konflik atau demonstrasi di Indonesia. Dalam berbagai peristiwa sebelumnya, masyarakat sipil dan aktivis kerap dijadikan sasaran operasi kambing hitam karena aktivitasnya di ruang publik, sementara aktor-aktor dengan kapasitas mobilisasi dan sumber daya lebih besar justru luput dari akuntabilitas karena beroperasi di balik layar.
607. Pola tersebut berulang dalam demonstrasi Agustus 2025, di mana penegakan hukum cenderung diarahkan untuk memperkuat narasi yang telah dibentuk sebelumnya, alih-alih mengungkap jaringan pelaku dan pemengaruh yang sebenarnya secara objektif.
608. KPF menemukan sejumlah figur sentral yang memiliki peran signifikan dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aksi demonstrasi serta eskalasi kerusuhan, namun diabaikan begitu saja oleh penyelidikan kepolisian. Padahal, keberadaan dan peran figur-figur ini diketahui aparat penegak hukum, sebagaimana diindikasikan oleh BAP pihak-pihak yang dijadikan tersangka dan saksi yang diperiksa.
609. Hingga laporan ini disusun, tidak ada informasi dilakukannya penyelidikan pro justitia penetapan status tersangka, atau pencantuman figur-figur tersebut dalam DPO oleh pihak kepolisian. Tidak adanya transparansi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah dan prioritas pengembangan perkara.
610. Beberapa figur sentral yang diabaikan oleh penyelidikan aparat kepolisian tersebut di antaranya pihak-pihak yang ditemukan **menggerakkan, mengkoordinasi, dan melaksanakan pembakaran** berbagai fasilitas umum dan atribut-atribut lain di sejumlah titik demonstrasi dan eskalasi kekerasan; serta pihak-pihak yang **secara terbuka berkonvoi dengan kendaraan roda dua ke berbagai lokasi penjarahan** dengan gerakan yang terkoordinasi, memiliki sinyal-sinyal khusus, dan tidak dicegah oleh aparat kepolisian dan TNI yang mengetahui aktivitasnya.
611. KPF menemukan bahwa penyelidikan kepolisian umumnya berhenti pada tahap menelusuri aktor-aktor lapangan yang dituduh mengkoordinasi massa aksi dan/atau mengelola dana operasional (sekalipun bersifat swadaya) untuk konsumsi dan kebutuhan massa selama demonstrasi. Sementara itu, aktor-aktor yang sebenarnya mengendalikan massa dalam jumlah besar, termasuk bayaran, diabaikan begitu saja.

- 612. Pola ini mengindikasikan adanya keterbatasan atau keengganan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum untuk menelusuri rantai komando dan pengendalian massa yang tidak organik secara mendalam.
- 613. Akibatnya, penegakan hukum berisiko tidak hanya gagal mengungkap kebenaran secara menyeluruh, tetapi juga melanggengkan praktik pengambinghitaman masyarakat sipil yang secara faktual tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan massa dalam jumlah masif, apalagi merencanakan eskalasi kekerasan secara nasional.

XI.B. Harus bersih maksimal

- 614. KPF mengidentifikasi pola pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap aktivis pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil, dan pengelola kanal informasi gerakan yang dinarasikan sebagai dalang kerusuhan dan kekerasan. Pola ini tidak muncul secara organik dengan sendirinya, melainkan berhubungan erat dengan strategi mengambinghitamkan³⁸³ dan kriminalisasi ekspresi digital.³⁸⁴
- 615. Mengambinghitamkan dan membunuh karakter aktivis dan demonstran membawa implikasi serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Narasi ‘provokator’ dan ‘anarko’ digunakan untuk menjustifikasi kriminalisasi demonstran sebagai sumber tunggal terjadinya eskalasi kekerasan dan menciptakan ketakutan (*fear mongering*) yang sangat berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat dalam memantau kebijakan publik.
- 616. Penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, penyitaan perangkat digital, dan penargetan figur simbolis gerakan masyarakat sipil berpotensi mengikis kebebasan berekspresi, mempersempit ruang sipil, dan memperdalam ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
- 617. KPF menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menindak ajakan kekerasan secara sah. Namun, berdasarkan fakta yang tersedia, terdapat indikasi kuat bahwa sebagian penindakan terhadap aktivis dan pengelola kanal digital lebih mencerminkan kriminalisasi ekspresi politik daripada penegakan hukum yang proporsional.
- 618. Tanpa transparansi bukti, pengawasan HAM independen, dan pemisahan yang jelas antara ekspresi politik dan kekerasan fisik, praktik penegakan hukum semacam ini berisiko menjadi preseden berbahaya yang melemahkan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
- 619. Polda Metro Jaya menetapkan Delpedro Marhaen (Direktur Yayasan Lokataru) dan Muzaffar Salim (Staf Yayasan Lokataru) sebagai tersangka dengan tuduhan memprovokasi pelajar atau anak di bawah umur untuk mengikuti demonstrasi, menggunakan Pasal 160 KUHP, Pasal 76H jo. 15 jo. 87 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 45A ayat (3) jo. 28 ayat (3) UU ITE. Tuduhan tersebut terutama didasarkan pada unggahan media sosial Lokataru yang memuat ajakan solidaritas dan tagar perlawanan.
- 620. Berdasarkan analisis transkrip percakapan dalam sejumlah grup WhatsApp (kolektif NIKA, KPR Depok, dan lain-lain), KPF tidak menemukan bukti yang menunjang tuduhan terhadap Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Yayasan Lokataru dalam perencanaan, mobilisasi pelajar, atau hasutan kekerasan.
- 621. Baik Delpedro Marhaen maupun Muzaffar Salim bukanlah pengelola maupun anggota grup percakapan kolektif NIKA dan/atau KPR Depok yang aktif mendiskusikan rencana demonstrasi Agustus 2025. Keduanya juga tidak berkaitan dengan individu-individu yang ditengarai oleh aparat kepolisian sebagai perencana aksi demonstrasi. Keberadaan mereka di lokasi aksi demonstrasi diketahui berkaitan dengan aktivitas pemantauan dan pendataan korban kekerasan serta penangkapan terhadap warga yang menyampaikan pendapat di muka umum.

³⁸³ Lihat G.4.1. Analisis Operasi Kambing Hitam.

³⁸⁴ Lihat G.3. Analisis Operasi Siber yang Menebar Ketakutan.

622. Pembungkahan negatif terhadap Yayasan Lokataru mengindikasikan pengambinghitaman organisasi masyarakat sipil yang aktif mengadvokasi pemenuhan HAM sebagai ‘biang kerok’ demonstrasi dan kerusuhan.
623. KPF menilai aparat kepolisian sengaja menggunakan tuduhan pelibatan anak di bawah umur guna membunuh karakter aktivis pro-demokrasi sebagai pihak yang menimbulkan ancaman sosial dan juga membangun legitimasi atas tindakan represif yang dilakukan.
624. Aparat kepolisian memberikan beban bukti yang berlebihan dan tidak proporsional pada konten-konten media sosial (seperti tajuk “Kita Lawan Bareng” dan tagar #JanganTakut). Terdapat lompatan logika dalam pembangunan kasus aparat kepolisian yang menarik hubungan korelasi—apalagi kausalitas—antara penyebaran informasi di media sosial dan provokasi pelajar dan anak di bawah umur untuk berdemonstrasi dan merusuh.
625. Sementara itu, penggeledahan ruang kantor dan penyitaan materi penelitian ilmiah Yayasan Lokataru mengindikasikan tekanan terhadap ruang kebebasan berserikat dan berekspresi di tengah kemarahan publik.
626. KPF mengkhawatirkan bahwa apabila tidak dilakukan koreksi dan penelusuran mendalam terhadap praktik pembunuhan karakter oleh aparat kepolisian, maka akan tercipta narasi keliru yang memukul rata organisasi masyarakat sipil dan aktivis pro-demokrasi sebagai provokator kekerasan, sehingga berakibat pada penyempitan ruang sipil.
627. Di samping itu, hal ini juga dapat menciptakan demoralisasi dan demobilisasi di tengah-tengah gerakan masyarakat sipil, yang merupakan salah satu unsur krusial guna memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan sehat dan adil.
628. Tuduhan yang tidak berdasar tersebut juga berpotensi mendelegitimasi kerja-kerja Yayasan Lokataru yang dikenal luas aktif memberikan pendampingan hukum dan pendidikan politik bagi pelajar sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya.
629. Melabeli tuntutan rakyat yang menyampaikan pendapatnya di muka umum sebagai hasil ‘provokasi’ oleh kelompok ‘anarko’ mengindikasikan upaya aparat kepolisian mereka-reka “hantu” yang menakut-nakuti masyarakat sipil agar tidak kritis terhadap kebijakan publik.
630. Penangkapan Syahdan Husein (administrator akun Instagram @GejayanMemanggil) dan Khariq Anhar (administrator akun Instagram @AliansiMahasiswaPenggugat) menegaskan adanya pola kriminalisasi terhadap aktivisme warga di ruang digital.
631. Keduanya dituduh memprovokasi terjadinya demonstrasi dan eskalasi kekerasan atas dasar kolaborasi akun Instagram, meskipun tidak ada bukti bahwa keduanya melakukan kekerasan. Serupa dengan Delpedro Marhaen dan Khariq Anhar, kepolisian juga membebaskan tuduhan tidak berdasar terkait pelibatan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi.
632. Penangkapan Syahdan Husein di Bali dan Khariq Anhar di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan strategi penindakan yang menyasar figur-figur tertentu dengan aktivitas digital di luar lokasi demonstrasi.
633. KPF menilai tindakan kepolisian sebagai upaya membungkam aktivisme di ruang digital yang selama ini efektif membangun solidaritas publik dan menjaga perhatian pada tuntutan perubahan kebijakan.
634. Tuduhan manipulasi konten media sosial yang dikenakan pada Khariq Anhar, sekaligus penyitaan dua perangkat digital miliknya, juga menambah daftar panjang kriminalisasi ekspresi yang bertentangan dengan hak privasi dan keamanan digital warga negara.
635. Tuduhan kepolisian bahwa Khariq Anhar telah melakukan penyuntingan konten digital yang dibuat “seolah otentik” menunjukkan ketidakpahaman terkait perkembangan budaya populer di internet yang kerap mengandung makna sarkastis, ironis, dan hiperbolis. Hal ini juga menunjukkan adanya jurang antara generasi dalam pendekatan hukum pidana.
636. KPF menilai bahwa tindakan mengaitkan langsung ekspresi digital di media sosial dan kekerasan fisik tanpa pembuktian korelasi (apalagi kausalitas) yang memadai telah menciptakan preseden berbahaya bagi kebebasan berekspresi yang menjadi prasyarat partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

637. Ketika laporan ini dibuat, Hakim PN Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Syahdan Husein dan Khariq Anhar serta menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penyitaan sudah sesuai prosedur hukum.
638. Penangkapan Reyhan Aryaputra disertai dengan penyiksaan baik berupa fisik maupun psikis. Hal ini ditunjukkan dari kronologi penangkapannya yang dilakukan dengan cara menculik, melakban sekujur tubuh Reyhan oleh polisi berpakaian preman, pengeroyokan, dan menodong pistol pada bagian pundak dan paha. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa Reyhan telah melakukan pelemparan molotov.³⁸⁵
639. Penangkapan Reyhan Aryaputra Purnomo alias Profesor R dengan tuduhan menyebarkan tutorial bom molotov dan mengoordinasikan titik penyimpanan bahan peledak digunakan sebagai narasi ekstrem yang menegaskan bingkai negatif bahwa demonstrasi adalah konspirasi kekerasan terorganisir.



Gambar 68. Pernyataan Kompol Gilang Prasetya tentang Reyhan Aryaputra Purnomo

640. Penyetaman julukan “Profesor R” pada Reyhan Aryaputra Purnomo juga turut memperkuat konstruksi simbolis yang dimaksudkan untuk menciptakan teror di tengah masyarakat. KPF menilai kepolisian sengaja menyetaman julukan ini untuk menciptakan kesan seolah-olah ada keahlian tingkat tinggi yang menyebabkan eskalasi kekerasan dan digunakan sebagai justifikasi atas tindakan represif yang dialami oleh demonstran dan warga.
641. Setelah meninjau transkrip grup percakapan WhatsApp kolektif NIKA dan KPR Depok, KPF menilai bahwa meskipun Reyhan Aryaputra Purnomo memiliki peran menonjol dalam dinamika aksi, aparat kepolisian telah membunuh karakternya melalui simplifikasi berlebihan yang membuat seolah ada aktor tunggal yang begitu maha kuasa dalam mengorkestrasi eskalasi kekerasan.
642. Tuduhan berat terkait tutorial bom molotov yang dikenakan terhadap Reyhan Aryaputra Purnomo perlu ditelusuri lebih dalam melalui pembuktian forensik yang transparan. Hingga laporan ini disusun, hal ini belum dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengevaluasi tuduhan yang dikenakan.
643. Penggunaan Densus 88 sebagai bagian dari Satgas Gakkum Antianarkis mengonstruksikan bahwa para demonstran di tempatkan posisinya sebagai teroris. Ini dibarengi dengan penyitaan buku-buku dengan alasan untuk “mendapatkan konstruksi perkara yang utuh.”³⁸⁶

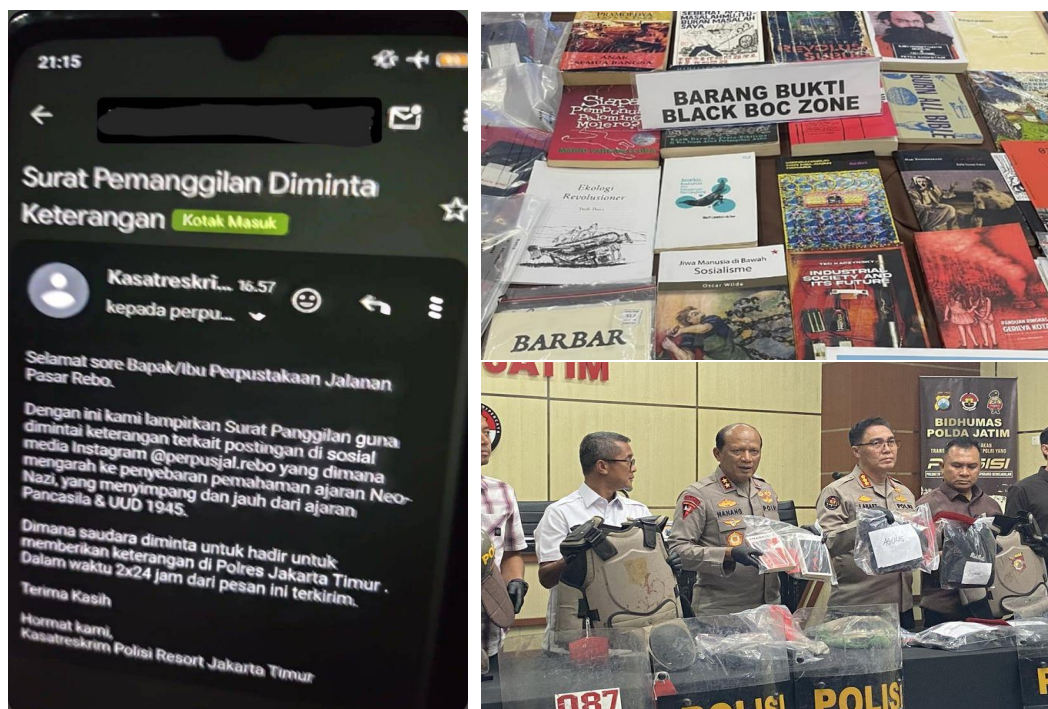
³⁸⁵ Wawancara dengan Reyhan Aryaputra Purnomo. 23 Desember 2025.

³⁸⁶ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/19/21465481/apa-tujuan-polisi-sita-buku-buku-di-kasus-kerusuhan-agustus>. 19 September 2025

XI.C. Kegagalan deeskalasi oleh kepolisian

644. Hingga laporan ini disusun, tidak ada komandan satuan yang dinyatakan bertanggung jawab atas rangkaian pelanggaran prosedur penegakan hukum selama demonstrasi Agustus 2025, meskipun temuan menunjukkan pola yang berulang, meluas, dan dapat dipetakan secara waktu dan lokasi.
645. Berbagai temuan dari lembaga pemantau HAM dan verifikasi internal KPF mengarah pada kesimpulan kegagalan serius Kapolri dalam menjalankan tugasnya mengawasi berbagai tindakan kepolisian, bahkan cenderung melakukan pembiaran, atasi praktik kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyelewengan wewenang operasi siber.
646. KPF menilai Kapolri sepatutnya bertanggung jawab atas tindakan represif yang terjadi secara sistematis dan meluas:
1. **Pola kekerasan yang berulang dan berkarakter sistemis.** Kekerasan aparat, mulai dari penggunaan kekuatan berlebihan di lapangan, pemukulan, pengejaran ke luar titik aksi, hingga insiden-insiden yang terekam luas, tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal. Temuan KPF justru menunjukkan pola yang berulang dari waktu ke waktu, dengan bentuk yang relatif konsisten: tindakan “tegas terhadap perusuh” menjadi legitimasi yang mudah disalahgunakan di lapangan untuk menggunakan kekerasan yang berlebihan, termasuk terhadap demonstran yang tidak sedang melakukan kekerasan atau bahkan warga yang kebetulan berada dekat lokasi demonstrasi.
 2. **Ketidaktegasan penindakan internal yang memproduksi impunitas karena mekanisme etik dan pidana internal kepolisian tidak transparan dan akuntabel.** Ketika pelanggaran prosedur oleh kepolisian tidak ditindak secara terbuka dan terukur, institusi Polri menciptakan ruang impunitas, dan akibatnya pelanggaran terus berulang tanpa konsekuensi yang dapat diverifikasi publik. Dalam jangka waktu panjang, impunitas ini memperlemah daya cegah internal, sehingga tanggung jawab atas pelanggaran sudah sepatutnya tidak disematkan pada “oknum”, melainkan pimpinan yang memegang rantai komando lembaga.
 3. **Pembiaran terhadap penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*) dan praktik penghilangan paksa singkat (*short-term enforced disappearance*) yang masif, termasuk terhadap demonstran berusia anak.** KPF menemukan pelanggaran prosedur berupa penangkapan oleh aparat tidak berseragam tanpa identitas yang jelas, penghambatan akses kuasa hukum, dan kegagalan memberi tahu keluarga sesuai aturan KUHAP. Berbagai pelanggaran ini mengindikasikan kegagalan pimpinan Polri dalam mengendalikan situasi dan mengawasi tindakan satuannya sebagai rantai komando tertinggi. Dalam kerangka HAM, pola ini beririsan dengan penghilangan paksa singkat.
 4. **Lemahnya kontrol terhadap operasi siber dan serangan digital.** Laporan pembocoran data pribadi (*doxing*), intimidasi di ruang digital, serta dugaan penyalahgunaan pemantauan dan penegakan siber memperlihatkan adanya celah pengawasan atas unit siber. Ketika Polri menyatakan fokus mengejar provokator, temuan aduan dan insiden dari pemantau independen mengindikasikan dampak operasi digital yang meluas ke aktivis, pendamping hukum, dan warga, sekalipun tidak berpartisipasi dalam demonstrasi dan hanya turut menyatakan solidaritas dengan tuntutan demonstran.
 5. **Konsekuensi akuntabilitas tidak bisa berhenti di ‘aktor lapangan’.** Karena pola pelanggaran ini terjadi serentak pada beberapa fase (sebelum, saat, dan sesudah aksi) dan di beberapa titik (arena demonstrasi, area permukiman, hingga ruang digital), maka evaluasi pertanggungjawaban tidak memadai hanya menindak pelaku lapangan.
647. KPF menilai ukuran akuntabilitas yang relevan adalah bagi pimpinan Polri untuk melakukan langkah-langkah berikut yang tidak ditemukan dalam demonstrasi Agustus 2025:
- a. Menerbitkan kebijakan dan arah operasi yang memadai untuk mencegah pelanggaran.
 - b. Mengawasi pelaksanaan di lapangan guna memastikan kepatuhan prosedur.
 - c. Menindak pelanggaran melalui proses yang terbuka, akuntabel, dan proporsional.

648. Dalam membaca peran Polri, KPF pertama membedakan antara dua ranah yang sering dicampuradukkan:
- Di tingkat regulasi normatif, peran Polri sebagai institusi yang menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.
 - Di tingkat praktik dan tindakan, peran Polri sebagai aktor yang, melalui pilihan taktis, sasaran penindakan, serta operasi siber, membentuk arah eskalasi sekaligus membentuk narasi publik tentang ‘dalang’ dan ‘provokator’ demonstrasi dan eskalasi kerusuhan serta kekerasan.
649. Temuan KPF menunjukkan adanya kecenderungan penindakan yang lebih cepat dan keras terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti aktivis pro-demokrasi, administrator akun media sosial, mahasiswa, dan pelajar. Hal ini berbanding terbalik dengan bagaimana kepolisian bergerak lambat, atau tidak bergerak sama sekali, guna mendalami aktor-aktor lapangan yang terlibat langsung dalam penjarahan, pembakaran, dan penyerangan terorganisir serta rantai koordinasinya.
650. KPF menilai kepolisian gagal menerapkan prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengamanan yang diklaim sebagai langkah melindungi warga dari potensi kerusuhan banyak berakhir pada praktik kriminalisasi (*malicious prosecution*) yang tidak didasari oleh bukti berkekuatan hukum tetap.



Gambar 69, 70, dan 71. Bukti penggunaan buku dan kegiatan aktivisme literasi sebagai alat pemidanaan terhadap warga sipil oleh kepolisian

651. Beberapa oknum personel polisi melakukan sejumlah tindakan yang berkontribusi besar dalam mengakselerasi kemarahan para demonstran setelah mengunggah tantangan dan ejekan terbuka kepada massa pelajar STM dengan misalnya menyebut mereka “kentang” dan menyebabkan eskalasi kemarahan pelajar yang berujung pada aksi-aksi melawan aparat.³⁸⁷
652. Keterlibatan Densus 88 dalam kriminalisasi terhadap aktivis yang merupakan satuan di kepolisian untuk menanggulangi terorisme merupakan alarm terhadap demokrasi, terutama demonstrasi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Proses penyelidikan dan penyidikan Densus 88 yang tidak biasa dengan mencari tahu konsumsi bahan bacaan yang dibaca oleh para demonstran menunjukkan bahwa kriminalisasi dengan

³⁸⁷ Wawancara pelajar yang turut terlibat aksi pada 28 Agustus 2025.

cara seperti itu akan berlanjut di kemudian hari. Terbukti, perburuan dengan menggunakan narasi adanya ancaman teror dikembangkan oleh kepolisian dengan diperiksanya komunitas perpustakaan jalanan dan disitanya buku-buku para tahanan politik.

653. Ketimpangan fokus penegakan hukum ini berimplikasi pada dua hal:
- Pertama, indikasi bahwa kepolisian secara sengaja melakukan pengambanghitaman.
 - Kedua, fakta bahwa praktik tebang pilih ini mengabaikan adanya jejaring koordinasi yang memiliki sumber daya masif dan sistematis sehingga gagal membongkar rantai komando mobilisasi, pendanaan, dan provokasi yang sebenarnya.

XI.D. Respons negara yang setengah hati

654. Analisis terhadap respons Presiden dan kebijakan publik pada periode segera setelah demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan pola pengabaian sistemis terhadap akar persoalan, pelanggaran hak asasi manusia, dan tuntutan akuntabilitas publik.
655. Meskipun eskalasi kekerasan telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, penghilangan orang secara paksa, penangkapan massal, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perampasan kemerdekaan, respons pemerintah tidak pernah bergerak dari tataran normatif yang cenderung defensif dan fokus pada mencari “hantu” untuk dijadikan “musuh bersama.”
656. Pernyataan Presiden merespons demonstrasi dan eskalasi kekerasan menekankan “pentingnya menjaga ketertiban umum dan mencegah anarkisme” tanpa mengakui adanya pelanggaran prosedur penegakan hukum, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, dan dugaan keterlibatan aparat dalam eskalasi kekerasan dan penjarahan.
657. KPF tidak melihat adanya ketegasan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menindaklanjuti rangkaian pelanggaran HAM, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan aparat, operasi siber yang represif, serta dugaan pembiaran oleh unsur aparat keamanan secara independen dan terbuka. Tidak adanya langkah korektif yang substantif dari Presiden dan pemerintah memperlihatkan adanya defisit akuntabilitas yang serius.
658. Hingga laporan ini disusun, tidak ada pejabat tinggi negara baik dari unsur keamanan, politik, maupun pembuat kebijakan yang mengambil tanggung jawab politik dan administratif atas kegagalan pencegahan, pengamanan, dan penindakan yang proporsional selama demonstrasi. Penanganan berbagai pelanggaran hampir seluruhnya diserahkan begitu saja pada mekanisme internal kepolisian tanpa kerangka akuntabilitas struktural yang memadai. Akibatnya, “penindakan” yang dilakukan oleh institusi negara tidak menghasilkan konsekuensi yang adil dan proporsional bagi korban pelanggaran di pihak warga dan demonstran.
659. Rekomendasi berbagai lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan sejumlah koalisi dan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti adanya pola pelanggaran yang meluas dan sistematis cenderung diabaikan begitu saja oleh Presiden dan pemerintah, sehingga terjadi kevakuman pertanggungjawaban.
660. Pengabaian sistematis ini berkontribusi pada menguatnya impunitas. Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pemegang rantai komando atau pengambil keputusan memperkuat persepsi bahwa kekerasan aparat, kriminalisasi aktivis, dan pembatasan hak sipil merupakan praktik yang dapat ditoleransi dalam situasi krisis politik.
661. Meskipun menerima sumber daya dan anggaran yang masif, kepolisian tidak mampu menegakkan hukum secara adil dan proporsional, justru melakukan represi terhadap demonstran, pelajar, dan aktivis yang sama sekali tidak seharusnya menjadi fokus utama.
662. Kegagalan kepolisian ini berjalan secara paralel dengan ketiadaan proses hukum yang akuntabel terhadap aktor negara yang diduga bertanggung jawab secara struktural.
663. Normalisasi impunitas ini berbahaya karena memperkuat preseden bahwa stabilitas politik dan keamanan dapat dijaga dengan mengorbankan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.

664. Pendekatan represif tidak hanya gagal mencegah, tetapi juga memperluas dampak kekerasan, termasuk melalui operasi siber, pembungkaman ekspresi digital, serta pengambinghitaman dan pembunuhan karakter aktivis, demonstran, dan masyarakat sipil.
665. KPF menilai bahwa impunitas bukan hanya merupakan konsekuensi dari kegagalan institusi negara, melainkan instrumen yang digunakan oleh berbagai lembaga sebagai alat tawar strategis yang saling melindungi satu sama lain dari pertanggungjawaban.
666. Sebagai respons atas tekanan publik, pemerintah dan DPR memberikan sejumlah konsesi yang bersifat minimalis dan simbolis, seperti pernyataan keprihatinan, janji evaluasi internal, serta dialog terbatas dengan sebagian perwakilan masyarakat sipil.
667. KPF menilai konsesi ini tidak menyentuh isu-isu kunci yang menjadi tuntutan utama, yaitu pengungkapan kebenaran secara menyeluruh, pertanggungjawaban komando secara struktural, pemulihan hak korban, serta reformasi kebijakan pengamanan unjuk rasa dan operasi siber.
668. Tanpa langkah konkret untuk meninjau ulang kerangka hukum yang memungkinkan kriminalisasi ekspresi politik, memperbaiki prosedur penanganan demonstrasi, atau memastikan pengawasan sipil yang efektif terhadap aparat keamanan, konsesi yang diberikan berakhir hanya sebagai penenang situasi politik jangka pendek, bukan sebagai upaya serius mencegah pengulangan pelanggaran di masa depan dan perbaikan struktural.
669. Setelah mempertimbangkan seluruh temuan, KPF menyimpulkan bahwa respons pemerintah, aparat keamanan, dan DPR terhadap demonstrasi Agustus 2025 mencerminkan pengabaian sistemis terhadap prinsip akuntabilitas dan perlindungan HAM.
670. Pengabaian sistemis yang mengakselerasi kekerasan sepanjang demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan pendekatan militeristis yang usang dan sudah tidak selaras dengan konteks Indonesia sebagai negara modern yang demokratis.
671. Tanpa perubahan pendekatan yang mendasar, pola ini menjadi tanda bahaya bagi kesehatan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil serta membuka ruang pengulangan kekerasan negara yang tidak berujung.

XII. Rekomendasi

XII.A. Kepada Presiden Republik Indonesia

672. Membentuk tim gabungan pencari fakta independen serta penyelidikan pro justitia atas dugaan pelanggaran HAM serius dengan memberikan dukungan penuh kepada Komnas HAM, menjamin akses terhadap dokumen, saksi, dan pejabat negara, serta mengumumkan komitmen untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan.
673. Menghentikan penggunaan narasi ‘antek asing’ yang tendensius tanpa dasar pembuktian hukum serta mengoreksi dan/atau mencabut pernyataan resmi yang tidak didukung temuan hukum berkekuatan tetap.
674. Menginstruksikan seluruh jajaran pejabat negara untuk menghentikan penggunaan narasi ancaman keamanan terhadap kritik sah warga negara dan membuka saluran partisipasi publik yang bermakna seluas-luasnya di setiap sektor kebijakan.
675. Memerintahkan evaluasi menyeluruh atas seluruh penanganan perkara tahanan politik demonstrasi Agustus 2025, termasuk dengan melakukan penghentian perkara yang tidak memenuhi standar pembuktian hukum melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
676. Menggunakan kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi atau amnesti atau rehabilitasi atau kebijakan korektif lainnya terhadap tahanan politik yang memiliki keterlibatan minor, non-struktural, dan tidak terorganisir dalam eskalasi demonstrasi Agustus 2025, terutama yang berusia anak.
677. Menyampaikan peta jalan kebijakan untuk merespons ketidakpuasan ekonomi dan politik generasi muda, termasuk dengan membuka forum-forum dialog secara rutin serta mengumumkan hasil implementasi kebijakan secara teratur.
678. Membuka akses kepada pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penyelidikan dan pelaporan terkait peristiwa demonstrasi Agustus 2025.

XII.B. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

679. Membentuk Panitia Khusus DPR untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh lembaga dan aparat negara dalam rangkaian peristiwa Agustus 2025, lengkap dengan otoritas akses dokumen, saksi, dan pejabat negara terkait.
680. Membentuk mekanisme pengawasan DPR terhadap penggunaan kekuatan berdaya paksa oleh TNI dan Polri, termasuk melalui audit kebijakan penanganan demonstrasi serta evaluasi penggunaan operasi patroli siber.
681. Memperkuat pembatasan penggunaan operasi militer selain perang melalui pembentukan keputusan politik negara yang dituangkan dalam sebuah perundang-undangan.
682. Membatalkan peraturan-peraturan di bawah undang-undang tentang perbantuan militer dalam penanganan dan pengendalian demonstrasi.
683. Melakukan reformasi pengawasan lembaga legislatif terhadap badan intelijen, termasuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui pembatasan keterlibatan dalam urusan sipil dan aktivitas politik yang sah secara hukum, disertai kewajiban pelaporan berkala kepada DPR.
684. Memanggil Kapolri dan Panglima TNI dalam sidang rapat terbuka dengan DPR untuk menjelaskan kegagalan pengendalian demonstrasi yang berakibat eskalasi kekerasan, kerusuhan, dan penjarahan.
685. Mengawasi pelaksanaan pemulihan hak tahanan politik, terutama mereka yang berusia anak, serta rehabilitasi nama baik dan penghapusan catatan hukum.
686. Menjamin perlindungan bagi pembela HAM dari praktik-praktik kriminalisasi serta intimidasi dan serangan fisik, siber, dan hukum yang dituangkan dalam sebuah undang-undang.

XII.C. Kepada Tentara Nasional Indonesia

687. Menyelidiki personel dan komandan yang diduga melampaui batas kewenangan dan/atau menyalahgunakan peran operasi militer selain perang dalam penanganan demonstrasi melalui proses disiplin militer di pengadilan militer dan tindak pidana umum di pengadilan umum.
688. Mempublikasikan garis besar hasil penyelidikan terhadap setiap personel dan komandan.
689. Mengevaluasi rantai komando dan dasar hukum pengerahan militer dalam pengamanan demonstrasi dan aktivitas sipil.
690. Memperbarui, mengumumkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol pembatasan peran TNI dalam aktivitas sipil secara ketat.
691. Mereformasi kebijakan internal pembatasan keterlibatan TNI dalam fungsi pengamanan sipil, disertai oleh mekanisme pengawasan eksternal yang objektif dan independen.

XII.D. Kepada Kepolisian Republik Indonesia

692. Mengaudit menyeluruh atas seluruh langkah penegakan hukum terkait demonstrasi Agustus 2025, terutama dalam hal kepatuhan terhadap hukum acara pidana, standar pembuktian, serta integritas penyelidikan dan penyidikan.
693. Mengedepankan fokus penyidikan kepada aktor-aktor yang memiliki peran dan pengaruh besar mengeskalasi kekerasan, kerusuhan, dan penjarahan dalam rangkaian demonstrasi Agustus 2025, bukan pada aktivis dan warga sipil.
694. Menyelidiki penggunaan kekuatan berlebihan, penyiksaan, provokasi, serta intimidasi melalui kanal-kanal digital, serta brutalitas aparat terhadap massa, warga sipil, dan jurnalis melalui proses etik kepolisian dan tindak pidana di pengadilan umum.
695. Mempublikasikan garis besar hasil penyelidikan terhadap personel dan komandan terkait.
696. Mengevaluasi dan memeriksa terhadap pihak-pihak yang memegang kendali rantai komando (*chain of command*) serta mengetahui dan/atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum dalam rangkaian demonstrasi Agustus 2025.
697. Menetapkan standar transparansi pembuktian menggunakan informasi dan konten digital, termasuk dengan memberikan akses hasil audit forensik independen, kekeluasaan bagi kuasa hukum, dan menjamin dokumentasi rantai kepemilikan (*chain of custody*) barang bukti.
698. Menjamin integritas dan perlindungan data digital pribadi tahanan politik serta melarang penyebaran informasi dan privasi di luar kepentingan pembuktian.
699. Menghentikan praktik kriminalisasi aktivis dan warga sipil berbasis interpretasi informasi digital dan konten media sosial tanpa didukung ahli yang berkompeten di bidang digital.
700. Memperbarui dan menyesuaikan standar-standar penanganan demonstrasi yang ada agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM umum internasional.

XII.E. Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia

701. Meninjau ulang seluruh berkas perkara sebelum menyatakan kelengkapan formal dan materil (P-21) dengan menerapkan standar pembuktian yang ketat dan independen.
702. Menghentikan penuntutan perkara terhadap tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 yang tidak memiliki bukti memadai dan/atau merupakan pelanggaran pidana ringan.
703. Menanggukhan penahanan terhadap tahanan politik demonstrasi Agustus 2025 yang perkaranya tidak memenuhi syarat objektif penahanan.

XII.F. Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

704. Melakukan penyelidikan pro justitia atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penanganan demonstrasi Agustus 2025 sesuai mandat UU Pengadilan HAM.

705. Menyelidiki praktik kriminalisasi tanpa dasar yang jelas (*malicious prosecution*) terhadap aktivis dan warga sipil terkait demonstrasi Agustus 2025.
706. Melakukan pemantauan dan pelaporan berkala terkait tren penyempitan ruang sipil, termasuk terkait hak menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi.
707. Menyusun mekanisme pengawasan struktural terkait penggunaan pasal-pasal 'karet' dalam praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan warga sipil yang kritis.

XII.G. Kepada Dewan Pers

708. Melakukan investigasi independen dan terbuka terhadap kekerasan, intimidasi, dan penghalangan kerja jurnalistik dalam peliputan demonstrasi Agustus 2025, termasuk dengan mengidentifikasi pola dan aktor yang berulang.
709. Membentuk mekanisme respons cepat untuk mendokumentasikan dan merespons kekerasan terhadap jurnalis secara langsung.
710. Menjamin penerapan protokol perlindungan jurnalis dalam situasi pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian lewat pedoman etik bersama dengan aparat keamanan.

XII.H. Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia

711. Memberikan jaminan pemenuhan hak menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi yang damai bagi anak sebagai bagian pemenuhan hak politik sesuai prinsip-prinsip internasional.
712. Mengawasi proses hukum pidana yang berlangsung terhadap anak korban kriminalisasi dan tindak kekerasan dalam peristiwa demonstrasi Agustus 2025.
713. Memastikan pemulihan hak melalui penghentian pemidanaan, rehabilitasi, dan restitusi bagi anak korban kriminalisasi dan tindak kekerasan dalam peristiwa demonstrasi Agustus 2025.

XII.I. Kepada Masyarakat Sipil

714. Membangun solidaritas kewargaan, memperkuat akses bantuan hukum struktural, serta menolak upaya delegitimasi terhadap gerakan dan organisasi masyarakat sipil.
715. Memperkuat kolaborasi dalam melakukan dokumentasi independen berbasis bukti atas pelanggaran hukum dan HAM terhadap warga sipil yang membela kepentingan umum.
716. Meningkatkan kapasitas keamanan dan daya lenting digital serta literasi hukum di kalangan aktivis, mahasiswa, pelajar, serta warga sipil.
717. Menjembatani dialog multipihak bersama masyarakat untuk menegaskan hak warga negara untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyampaikan pendapat di muka umum serta batas antara kritik yang sah secara hukum dan risiko kriminalisasi tanpa dasar yang jelas, terutama terhadap informasi dan konten di ruang digital.

XII.J. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa

718. Mendesak Komisi Tinggi untuk HAM (OHCHR) untuk menginvestigasi dan melaporkan pelanggaran hukum dan HAM dalam penanganan demonstrasi serta respons negara.
719. Mendesak Komisi Tinggi untuk HAM (OHCHR) untuk memantau dan menyoroti tren penyempitan ruang sipil di Indonesia secara berkala, terutama dalam kaitannya dengan praktik-praktik pembungkaman kaum muda dan kriminalisasi aktivis sebagai bentuk perampasan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.

Epilog: Merawat Ingatan untuk Affan, Septianus, Dandi, Sumari, Abay, Sarina, Saiful, Rheza, Iko, Andika, Farhan, Reno, dan Alfarisi

720. **Affan Kurniawan**, 21 tahun, gugur diimpit kendaraan lapis baja.
721. **Septianus Sesa**, gugur dalam kepungan gas air mata.
722. **Rusmadiansyah**, 25 tahun, gugur dikeroyok karena tuduhan menyusup.
723. **Sumari**, 60 tahun, gugur dalam kepungan gas air mata.
724. **Akbar Basri**, 26 tahun, gugur dalam kepungan api.
725. **Sarina Wati**, 25 tahun, gugur dalam kepungan api.
726. **Saiful Akbar**, 46 tahun, gugur dalam kepungan api.
727. **Rheza Sedy Pratama**, 21 tahun, gugur dengan jasad yang penuh luka.
728. **Iko Juliant Junior**, 19 tahun, gugur sembari memohon tidak dipukuli.
729. **Andika Lutfi Falah**, 16 tahun, gugur dengan tempurung kepala retak.
730. **M. Farhan Hamid**, 23 tahun, gugur tinggal tulang belulang.³⁸⁸
731. **Reno Syahputradewo**, 24 tahun, gugur tinggal tulang belulang.³⁸⁹
732. **Alfarisi**, 21 tahun, gugur dengan badan yang kejang.

Respons negara terhadap tuntutan publik

733. Selama dan sejak demonstrasi Agustus 2025, berbagai organisasi masyarakat sipil, koalisi lintas sektor, dan serikat buruh telah menyampaikan tuntutan kolektif berupa penghentian kekerasan aparat, pembebasan demonstran yang ditangkap sewenang-wenang, investigasi independen pelanggaran HAM, serta perlindungan ruang sipil dan kebebasan berekspresi. KPF menilai respons para pemangku kewajiban sejauh ini cenderung parsial, tebang pilih, reaktif, normatif, dan administratif.
734. Negara lebih menekankan narasi pemulihan ketertiban dan stabilitas keamanan dibanding menjawab akar persoalan struktural yang memicu kemarahan publik, termasuk akuntabilitas aparat, kegagalan pengamanan, dan ketimpangan penegakan hukum. Hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada mekanisme akuntabilitas independen di luar proses internal kepolisian, serta tidak ada komitmen publik yang jelas untuk mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebihan, operasi siber, dan kriminalisasi aktivis secara menyeluruh.
735. Tidak adanya dialog terbuka dan setara antara pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan kecenderungan negara memandang kritik sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai bagian sah dari demokrasi.

Ruang sipil yang terus menyempit

736. Salah satu dampak paling serius dari penanganan demonstrasi Agustus 2025 adalah penyempitan ruang sipil—khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan kelompok rentan—untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Penangkapan pelajar serta narasi bahwa demonstrasi “membahayakan anak” dan kriminalisasi pendidikan politik kewargaan secara damai bertentangan dengan upaya mendorong partisipasi dan kepemimpinan kaum muda.
737. Penangkapan massal terhadap anak dan pelajar, penggunaan pasal UU ITE dan hasutan KUHP, serta pelabelan “radikalisasi” telah menciptakan iklim ketakutan yang nyata. Situasi ini berisiko memutus tradisi partisipasi politik generasi muda sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia.

³⁸⁸ Keterangan hasil tes DNA oleh tim forensik RS Bhayangkara.

³⁸⁹ Keterangan hasil tes DNA oleh tim forensik RS Bhayangkara.

738. Operasi siber—pemblokiran akun, pembatasan fitur, doxing, dan intimidasi di ruang digital—mempersempit ruang ekspresi online yang selama ini menjadi kanal utama kelompok marginal. Ketika ruang fisik dibatasi dan ruang digital diawasi represif, masyarakat kehilangan medium aman untuk menyampaikan aspirasi.
739. Penyempitan ruang sipil yang dibiarkan dan bahkan diperburuk oleh negara berisiko menciptakan preseden berbahaya, di mana partisipasi politik kritis diposisikan sebagai ‘ancaman’ keamanan, bukan hak konstitusional.

Menjahit ulang kontrak sosial yang putus

740. KPF mencatat dinamika politik parlemen turut berkontribusi pada memburuknya kepercayaan publik dan eskalasi kemarahan sosial. Konfigurasi koalisi pemerintahan yang dominan dan lemahnya oposisi substantif secara efektif mengurangi fungsi kontrol dan perwakilan DPR.
741. Perilaku dan ucapan pejabat negara yang tidak berempati pada penderitaan rakyat, sikap defensif dan bahkan agresif terhadap kritik, serta absennya kepemimpinan politik yang komunikatif turut memicu kemarahan publik terhadap sejumlah anggota DPR.
742. Alih-alih membuka ruang dialog dan koreksi kebijakan, respons politik cenderung menyerahkan penanganan krisis sepenuhnya pada pendekatan keamanan. Sementara itu, konsolidasi politik berlebihan menciptakan sistem tanpa oposisi yang memperlemah mekanisme *check and balance* terhadap tindakan eksekutif dan aparat penegak hukum.
743. Risiko penyalahgunaan kekuasaan dan impunitas menjauhkan DPR dari fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi dan pengawas kebijakan publik.
744. Peristiwa Agustus 2025 membuat banyak anggota DPR menahan diri dan berhati-hati berlebihan dalam menyampaikan pendapat, terutama pada isu sensitif. Situasi ini tidak ideal bagi wakil rakyat yang seharusnya tetap menyuarakan hak publik yang mereka wakili. Tanpa komunikasi publik yang terbuka, rakyat kehilangan hak untuk mengetahui bagaimana kehidupan bernegara dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat lewat kontrak sosial.

